Pustakapedia

Intan Zakiyyah, M.A.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KUALITAS MADRASAH

Pengantar
Prof. Dr. H. Husni Rahim
(Guru Besar Politik Pendidikan SPs UIN Jakarta)





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KUALITAS MADRASAH

Studi Dampak Standardisasi Pendidikan terhadap Mutu Madrasah

Intan Zakiyyah, M.A.



Pengantar:
Prof. Dr. Husni Rahim

Pustakapedia

Indonesia

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KUALITAS MADRASAH
Studi Dampak Standardisasi Pendidikan terhadap Mutu Madrasah

Penulis : INTAN ZAKIYYAH, MA
Tata Letak : Tim Pustakapedia
Desain Sampul : Fadil Fadhilla

ISBN : 978-623-7641-17-9

Cetakan ke-I, Januari 2020

Diterbitkan oleh:
Pustakapedia
(CV Pustakapedia Indonesia)
Jl. Kertamukti No.80 Pisangan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
Email: penerbitpustakapediagmail.com
Website: http://pustakapedia.com

KATA PENGANTAR

Madrasah Pendidikan Alternatif yang Belum Selesai dalam Upaya Mengintegrasikan Moral dan Sains

Prof. Dr. H. Husni Rahim.
(Guru Besar Politik Pendidikan SPs UIN Jakarta dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998-2002)

Kajian tentang Madrasah selalu menarik dan seolah tidak ada akhirnya. Ada dua faktor yang mendorong lahirnya madrasah, pertama pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai untuk menghadapi persaingan dengan lulusan sekolah. Kedua, laju perkembangan sekolah *gubememen* di masa penjajahan Belanda dikalangan masyarakat cenderung meluas dan membawa watak sekularisme, sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Madrasah berawal dari perpaduan model sekolah (pengaruh Barat) dan model pesantren (pengaruh Timur Tengah). Dari madrasah diharapkan lahir alumni sebagai kader umat dan kader bangsa yang mempunyai kemampuan Moral dan Sains yang saling menopang.

Perjuangan Lembaga pendidikan Islam (madrasah) menuntut eksistensi dan perlakuan yang sama dengan sekolah telah di mulai lewat SKB 3 Menteri tahun 1975. Dan alhamdulillah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 sudah mengakui madrasah sebagai sekolah umum bercirikan Islam dan kurikulumnya sama dengan sekolah plus pelajaran agama Islam. Setelah mendapat pengakuan dan penghargaan yang sama antara madrasah dan sekolah maka perjuangan berikutnya adalah menampilkan keunggulan madrasah serta kesiapan bersaing secara nasional dan global. Dalam kaitan

inilah akreditasi berdasarkan standar nasional Pendidikan memberikan jalan dan peluang untuk mencapainya.

Akreditasi pendidikan merupakan buah reformasi yang dituangkan dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui akreditasi dihapuskan diskriminasi dalam Pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, antara sekolah umum dan sekolah agama (madrasah), antara sekolah di Jawa dan Luar Jawa. Tidak ada lagi istilah sekolah yang berstatus terdaftar, diakui dan disamakan, tidak ada lagi perbedaan perlakukan pengakuan antara sekolah negeri dan swasta, juga antara sekolah umum dan sekolah agama, semua diperlakukan sama, terakreditasi atau tidak dan bila terakreditasi maka apakah terakreditasi dalam peringkat A, B dan C tergantung kemampuan sekolah itu sendiri. Ijazah hanya diakui bila diberika oleh Lembaga Pendidikan yang terakreditasi. Akreditasi juga memberikan kesempatan masing-masing sekolah/madrasah untuk memberikan ciri khas nya. Peringkat akreditasi C merupakan standar minimal suatu Lembaga pendidikan dan sekolah/madrasah dipersilahkan untuk meningkatkan kualitasnya setinggi mungkin dan tetap boleh memberikan ciri khas dan karateristik masing masing. Disinilah peluang madrasah untuk tetap memlihara ciri sekolah Islamnya dengan kualitas yang unggul siap bersaing secara nasional dan global. Kini banyak madrasah yang berupaya menampilkan identitas sekolah Islami, Populis, Beragam, Unggul Moral dan Sains

Penelitian Intan Zakiyyah mengenai, "Standar Nasional Pendidikan dan Kualitas Madrasah: Studi Dampak Standardisasi Pendidikan terhadap Mutu Madrasah", menunjukkan bahwa akreditasi sebagai satu sistem penjaminan mutu madrasah yang menggunakan Standar Nasional Pendidikan, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu madrasah dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Diharapkan madrasah menjadikan akreditasi sebagai pintu untuk meningkatkan kualitasnya dengan cara mengimplementasikan SNP sebagai standar minimal dan

menyadari SNP bukan untuk mengekang madrasah, melainkan untuk menjadi arah dalam peningkatan mutu madrasah.

Ciputat, 20 Januari 2020

Prof. Dr. H. Husni Rahim.





uin
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
intanzakiyyahsyahroni
INTAN ZAKIYYAH
PROMOVENDA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
uin
Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

PRAKATA PENULIS

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji dan syukur hanya patut terlimpahkan kehadirat Allah SWT., karena berkat taufik, hidayah, inayah, izin serta ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN KUALITAS MADRASAH (Studi Dampak Standardisasi Pendidikan Terhadap Mutu Madrasah). Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul-Nya, Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut setia beliau hingga hari akhir.

Buku ini merupakan hasil penelitian penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Magister Pengkajian Islam di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan konsentrasi Pendidikan Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik berupa moril maupun materil. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang dalam, penulis haturkan ribuan terima kasih kepada semua pihak. Pertama, kepada Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Amany Burhanuddin Umar Lubis, MA., Direktur SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Dr. Jamhari, MA. beserta jajaran pimpinan, Prof. Dr. Didin Saepudin, MA., Dr. Hamka Hasan, MA., Arif Zamhari, M.Ag, Ph.D., Dr. Imam Sujoko, MA., juga kepada para staf, pustakawan-pustakawati dan seluruh civitas akademika SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kedua, kepada Prof. Dr. Husni Rahim selaku dosen pembimbing. Penulis haturkan banyak terima kasih atas kesabaran dan keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, motivasi dan semua arahannya. Tidak lupa pula para dosen penguji proposal, *work in progress* I dan II, ujian pendahuluan serta ujian promosi tesis di SPs UIN Jakarta yang telah memberikan ilmunya, Prof. Dr. Suwito, MA., Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA., Suparto, M.Ed., Ph.D., Muhammad Zuhdi, M.Ed., Ph.D., Dr. JM Muslimin,

MA., Dr. Kamarusdiana, MH., Dr. Halid, serta para dosen lainnya yang turut memberikan sumbangsih pemikiran, kritik tajam dan saran-saran dalam penyempurnaan penulisan ini.

Ketiga, kedua orang tua tercinta Abinda Drs. H. Oman Syahroni dan Uminda Hj. Haryanti, S.Pd., yang dengan tulus dan penuh kasih sayang senantiasa mengorbankan banyak waktu, pikiran, dan tenaganya sejak penulis lahir hingga saat ini. Kesabaran, keikhlasan, perhatian serta kasih sayang keduanya yang tak pernah habis bahkan bermunajat tak henti-hentinya mendoakan penulis agar lancar dan sukses dalam menyelesaikan studi. Dan juga kepada mertua terkasih penulis yakni Babah H. Bahrudin dan Uminda Hj. Bariyah yang juga terus mendoakan keluarga penulis. Serta kepada abang H. Khairul Umam, M.Ag., kakak Arnia Kalbu, S.St., dan adik Malik Rahmatullah serta Dinda Nadwah Aulia, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, melalui perhatian mereka yang membuat penulis tidak patah semangat dalam menyelesaikan studi S2 di SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Keempat, suami tercinta Ayahanda Ahmad Abdul Muis, M.Pd.I., yang senantiasa mendukung dikala suka dan duka, serta selalu memotivasi penulis untuk terus berkarya dan terima kasih yang tak terhingga untuk selalu sabar menjaga anak kita dikala penulis menyelesaikan tesis. Serta anakku tersayang Adinda Mutiara Suci Kamilah sebagai penyejuk hati kami yang cerdas, pintar dan sholehah selalu memahami jika ditinggal Bunda sekolah, serta sudah berkorban demi Bunda untuk ikut besama beberapa bulan ketika pasca melahirkan meninggalkan keluarga untuk menyelesaikan tesis Bunda.

Kelima, rasa terima kasih sebesar-besarnya penulis haturkan kepada teman-teman yang senantiasa terlibat dalam diskusi berbagai hal dan motivasi selama menempuh studi S2 di SPs UIN Jakarta, mas Zainul Hasani Syarif, MA., Zikra Fadila, Niela Siska Sari, kak Ike Utia Ningsih, MA., kak Restia Gustiana, MA., mas Oga Satria, MA., kak Mutiara Yasmi, kak Aam Aminah, Nur Mardhiah, MA., Nur Ikhlas, MA., mas Ahmad Hifni,

MA., kak Aini, kak Reni Ilmayanti, mbak Izza Farhatin Ilmi, mas Ibnu Sina, bang Sahlan, MA., dan teman-teman S2 dan S3 angkatan Februari 2016 dengan kebijaksanaan mereka yang enggan untuk dituliskan namanya serta tidak mengurangi rasa sayang saya kepada teman-teman semua.

Keenam, terima kasih juga kepada teman-teman guru seperjuangan di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, kepala madrasah dan dewan guru di MTs dan MA Khairul Ummah serta semua tata usaha, pembina, pengabdi, santri-santri Khairul Ummah dan semua yang selalu memberikan motivasi serta kemudahan untuk penulis tetap eksis membantu sebagai pengajar disela-sela penulis studi S2. Tidak lupa juga kepada nenek Anah, kak Yuliyanti Harahap, ustadzah Fatimah, aa Andre, babah, kakak Ratu, Fatimah yang telah menjaga dan menemani Suci.

Ketujuh, penulis ucapakan terima kasih untuk informan-informan selama penulis meneliti yakni kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Jaminan Mutu/ P3JM Bapak Drs. H. Sugiono, kepala MTs Pembangunan Bapak Momon Mujiburahman, M.A. Wakil kurikulum Bapak Mardi, M.A. Guru Agama kak M. Idham Khalid, M.Ag. Kasubag Keuangan dan Kepegawaian Bapak Maradona, S.E. Kasubag Pendidikan dan Pengajaran Bapak Efron Faulusia, S.E. Komite Madrasah Ibu drg. Silvia Wahyuni, beberapa wali murid MTs Pembangunan dan semua dewan guru serta staf di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Terima kasih juga kepada Ketua BAN-S/M, tim ahli BAN-S/M pak Fajarudin Irfan dan Ibu Dedi, Sekretariat BSNP Ibu Nurul yang sudah banyak membantu memberikan data-data dan kemudahan penulis dalam meneliti tesis ini.

Terakhir tidak lupa juga ucapan terima kasih banyak kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayan melalui Beasiswa Unggulan/ BU program masyarakat berprestasi yang ikut serta mendukung dan membiayai studi penulis di SPs UIN Jakarta dari tahun 2016-2019. Berkat dukungan dari kalian semua penulis akhirnya bisa menyelesaikan studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya hanya kepada Allah SWT., penulis berdoa

semoga bantuan dan partisipasi dari semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dibalas pahala yang berlipat ganda oleh-Nya. Semoga pula tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi kemajuan negara dan bangsa ini, khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan mutu madrasah. Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian tesis ini masih jauh dari kata "sempurna", karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Kritik dan saran yang konstruktif terbuka lebar untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas penulisan ini.

Jakarta, 20 Januari 2020
Penulis,

Intan Zakiyyah



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah ALA-LC ROMANIZATION tables yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Initial	Romanization	Initial	Romanization
ا	A	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	ة،ه	H
ش	Sh	و	W
ص	Ṣ	ي	Y

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatḥah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Ḍammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ ... ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
َ ... و	Fatḥah dan wau	Au	A da U

Contoh:

حسين: Ḥusain حول: Ḥaul

3. Vokal Panjang

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَا	Fatḥah dan alif	ā	a dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	Ḍamah dan wau	Ū	u dan garis di atas

C. Ta' Marbūţah.

Transliterasi ta' marbūţah (ة) di akhir kata, bila dimatikan ditulis h.

Contoh:

مرأة : Mar'ah　　　　مدرسة: Madrasah

(ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafadz aslinya)

D. Shiddah

Shiddah/Tashdīd di transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf bershaddah itu.

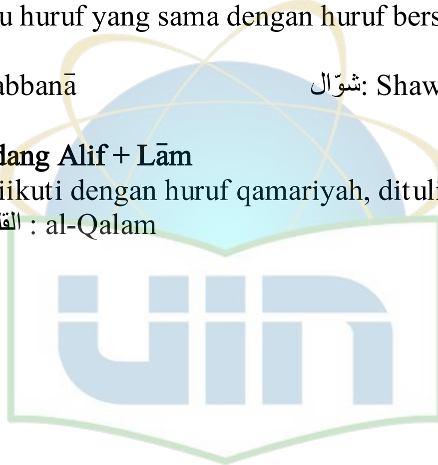
Contoh:

ربّنا: Rabbanā　　　　شوّال: Shawwāl

E. Kata Sandang Alif + Lām

Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al.

Contoh: القلم : al-Qalam





رباط الطلبة للمرقاة العلمية الإتقان

PONDOK PESANTREN

Mirqot Ilmiyah Al-Itqon

DURI KOSAMBI – CENGKARENG JAKARTA BARAT

www.alitqon.org

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAN-S/M	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah
BAP-S/M	Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah
BBQ	Bina Baca Alquran
BOS	Bantuan Operasional Sekolah
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan
CPU	Central Processing Unit
DIKJAR	Pendidikan dan Pengajaran
Diknas	Pendidikan Nasional
Disdik	Dinas Pendidikan
EDM	Evaluasi Diri Madrasah
ESOL	English for Speakers of Other Languages
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara
HAM	Hak Asasi Manusia
HC	Habitual Curriculum
IAIN	Institut Agama Islam Negeri
IELTS	International English Language Testing System
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPTEK	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
ISO	International Organization Standardization
IT	Information and Technology
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar
KD	Kompetensi Dasar
Kemenag	Kementrian Agama

KIR	Kelompok Ilmiah Remaja
KKM	Kriteria Ketuntasan Minimal
KKR	Kader Kesehatan Remaja
LCD	Liquid Crystal Display
LDK	Latihan Dasar Kepemimpinan
LPJ	Laporan Pertanggung Jawaban
LPMP	Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan
MAN	Madrasah Aliyah Negeri
MAPK	Madrasah Aliyah Program Keagamaan
MAS	Madrasah Aliyah Swasta
MBS/M	Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MIPA	Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
MKM	Madrasah Kategori Mandiri
MP	Madrasah Pembangunan
MPHC	Monitor Penilaian Habitual Curriculum
MPK	Majelis Perwakilan Kelas
MSI	Madrasah Standar Internasional
MSM	Madrasah Standar Nasional
MTs	Madrasah Tsanawiyah
NESIC	National Education Standard and Improvement Council
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
OECD	Organisation for Economic Cooperation
ORTALA	Organisasi dan Tata Laksana
OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah
P3JM	Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu
PAS	Penilaian Akhir Semester

PAT	Penilaian Akhir Tahun
PC	Personal Computer
Pemda	Pemerintah Daerah
PH	Penilaian Harian
PISA	Programme for International Students Assessment
PKB	Pelatihan Keprofessionalan Berkelanjutan
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PP	Peraturan Pemerintah
PPDB	Pendaftaran Peserta Didik Baru
PTK	Penelitian Tindakan Kelas
PTS	Penilaian Tengah Semester
Puspendik	Pusat Penilaian Pendidikan
Raker	Rapat Kerja
RIP	Rencana Induk Pengembangan
RKA	Rencana Kerja dan Anggaran
RKAM	Rencana Keuangan Anggaran Madrasah
RKJM	Rencana Kerja Jangka Menengah
RKT	Rencana Kerja Tahunan
SBI	Sekolah Bertaraf Internasional
SC	Student Company
SDM	Sumber Daya Manusia
SIM	Sistem Informasi Manajemen
SISDIKNAS	Sistem Pendidikan Nasional
SKB	Surat Keputusan Bersama
SKL	Standar Kompetensi Lulusan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMM	Sistem Manajemen Mutu

SNP	Standar Nasional Pendidikan
SOP	Standard Operating Prosedur
SPP	Sumbangan Pembinaan Pendidikan
SWOT	Strengths, Weakness, Opportunities, Threats
TIMSS	Trends International Mathematics and Science Study
TK	Taman Kanak-kanak
TOEFL	Test of English as a Foreign Language
TU	Tata Usaha
UAMBN	Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional
UIN	Universitas Islam Negeri
UKS	Usaha Kesehatan di Sekolah
UM	Ujian Madrasah
UN	Ujian Nasional
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPP	Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran
UUSPN	Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional
VCD	View Compact Disc

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa standardisasi pendidikan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap mutu madrasah. Tujuan tersebut dapat dijabarkan dengan menganalisis sistem penjaminan mutu madrasah, menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan pada madrasah dan dampak yang terjadi ketika pendidikan distandardisasikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan pemerintah tentang SNP dan sejarah akreditasi di madrasah tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di MTs Pembangunan UIN Jakarta, baik berupa perangkat akreditasi, instrument penilaian BAN-S/M terhadap madrasah, hasil wawancara maupun fenomena dan fakta riil yang diamati. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah literatur otoritatif yang mengkaji tentang standardisasi pendidikan dan kualitas madrasah. Seluruh data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif analisis dan deskriptif interpretatif. Penelitian ini berharap data empirik dapat mendukung teori. Data ini diperoleh dengan memotret dampak implementasi dari standardisasi pendidikan yang terdapat dalam indikator Standar Nasional Pendidikan terhadap mutu madrasah.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa standardisasi pendidikan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan mutu madrasah. Standar Nasional Pendidikan menjadi arah dan acuan madrasah dalam upaya berkomitmen terhadap mutu. Sehingga mutu madrasah berada pada mutu yang terus berkelanjutan dan meningkat. Dampak yang ditimbulkan karena madrasah benar-benar memaksimalkan SNP, yaitu 1) Adanya penjamin mutu internal yang terorganisir, 2) Adanya audit mutu internal secara berkala, 3) Adanya respon positif terhadap kebutuhan orang tua peserta didik, 4) Madrasah dapat berdaya saing. Inti dari penelitian ini adalah “peningkatan

mutu pada madrasah mengharuskan adanya acuan dari pemerintah seperti standardisasi pendidikan".

Penelitian ini mendukung pendapat Crosby (1979), Dede Rosyada (2017), Putu Subawa, Sabar Budi Raharjo (2012), Jafriansen Damanik (2015) yang berkesimpulan bahwa pentingnya standardisasi dan akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan. Dalam semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan harus menerapkan standar yang professional, agar bisa diharapkan terciptanya suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. Penelitian ini tidak sependapat dengan H.A.R. Tilaar (2006) dan Suwidi (2015) yang menyatakan bahwa dengan adanya standardisasi pendidikan kemungkinan akan berbahaya bagi tegaknya suatu masyarakat demokrasi yang kreatif dan inovatif. Masyarakat akan terkukung oleh standar dan kompetensi yang statis. Standardisasi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya sebatas legislasi dan legalisasi orientasi sebuah kelompok yang memainkan peran utama, yaitu kelas menengah borjuis. Strandardisasi menandakan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan model pendidikan yang memihak.

Kata Kunci : Standardisasi Pendidikan, Kualitas/Mutu Madrasah.

DAFTAR ISI







PONDOK PESANTREN MIRQOT ILMIYAH AL-ITQON
JL. H. Selong No. 14 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat 11750



MENERIMA PENDAFTARAN
SANTRI BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023





Lebih Baik Al-Itqon Lebih Baik

JADWAL PENDAFTARAN

GELOMBANG I
01 Februari s/d 10 Maret 2022
Tes Masuk : Ahad, 13 Maret 2022
Pengumuman Tes : 16 Maret 2022
Pemberkasan : 16 Maret - 09 Mei 2022

GELOMBANG 2
11 Maret s/d 12 Mei 2022
Tes Masuk : Ahad, 15 Mei 2022
Pengumuman Tes : 18 Mei 2022
Pemberkasan : 18 Mei - 10 Juli 2022

LINK PENDAFTARAN

Pendaftaran Santri Baru Pondok Pesantren Al-Itqon
Melalui Link http://linktr.ee/psbalitqon
atau bisa dengan scan barcode di bawah





Ponpes_Alitqon
Al-Itqon Jakarta
085691379431
082111744911

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini memusatkan kajian pada sistem penjaminan mutu madrasah, implementasi Standar Nasional Pendidikan di madrasah dan dampak yang terjadi ketika pendidikan distandardisasikan, dengan mengambil kasus Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta. Masalah tersebut penting untuk dikaji mengingat mutu madrasah yang secara global masih terbilang rendah dibanding sekolah umum. Madrasah merupakan salah satu ciri khas sekolah Islam yang dari tahun ke tahun terus diprioritaskan perkembangan dan kemajuannya dalam pendidikan, khususnya di Indonesia yang mayoritas muslim.

Pendidikan adalah hal yang sangat penting yang akan menjadi tiang suatu bangsa. Negara yang maju rata-rata memiliki kualitas pendidikan yang mumpuni, maju mundurnya suatu negara sangat berkaitan dengan pendidikan yang ada di negara tersebut, semakin berpendidikannya masyarakat, maka akan semakin sejahtera kotanya. Negara tanpa pendidikan yang baik maka akan tertinggal jauh oleh negara lain.[1] Di Indonesia khususnya, pendidikan masih terbilang cukup tertinggal dari negara maju yang lain.[2] Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan bagian terpenting juga untuk memajukan bangsa Indonesia. Negara maju sangat menomersatukan pendidikan sebagai hal yang utama. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang dapat menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas dan bisa menciptakan sesuatu dan berinovasi bukan hanya menikmati produk dari luar. Keberhasilan bangsa dalam membangun pendidikan merupakan alat ukur utama tingkat kemajuan bangsa

---

[1] Sujarwo, "Pendidikan di Indonesia Memprihatinkan", *Journal: UNY*, Dosen PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY, 2016

[2] Amerika, Inggris, Jerman, dan bahkan Malaysia serta lainnya.

tersebut. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) pada tahun 2015 adalah 0.689, yang berarti menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan peringkat 113 dari 188 negara dan wilayah. Urutan 113 dari 188 negara masih sangat jauh tertinggal oleh negara yang berada di peringkat atas. Hal ini menyatakan bahwa negara Indonesia memerlukan upaya dan strategi untuk membangun khususnya pendidikan agar IPM pun mempunyai prestasi yang gemilang. Pemerintah dan semua rakyat Indonesia seharusnya prihatin dengan prestasi yang belum memuaskan ini.[3] IPM bertujuan untuk mengukur antara pendidikan, melek huruf, harapan hidup, dan standar hidup untuk membedakan apakah dikatakan negara maju, berkembang atau terbelakang, dan mengukur bagaimana pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan hal yang penting, karena dengan adanya IPM maka negara-negara dapat mengoreksi dan membenahi diri untuk semakin meningkatkan kualitas.[4] Data tersebut membuktikan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia sangat tertinggal oleh negara maju, bahkan oleh negara tetangga yaitu Malaysia, yang dahulu pernah banyak belajar dari Indonesia.

Demikian juga hasil PISA[5] pada tahun 2015, rangking Indonesia untuk Sains 62, Matematika 63, dan Membaca 64 dari 70 negara.[6] Hasil ini secara umum masih sangat jauh dengan

---

[3] UNDP Indonesia, *United Nations Development Programme*, (akses 15 Januari 2017).

[4] Kholid Musyaddad, "Problematika Pendidikan di Indonesia", *Jurnal: Edu-Bio*, Vol. 4, tahun 2013, h. 52.

[5] *Programme for International Student Assessment* merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia.

[6] https://pisaindonesia.wordpress.com/ akses tanggal 31 Mei 2018.

negara maju lainnya. Hasil TIMSS[7] juga menempatkan Indonesia di urutan bawah. Skor Matematika 397, yang menempatkan Indonesia di nomor 45 dari 50 negara. Pada bidang sains, dengan skor 397, Indonesia di urutan ke-45 dari 48 negara.[8] Dari hasil IPM, PISA dan TIMSS menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih sangat rendah.

Pendidikan merupakan jasa yang perlu memiliki standardisasi penilaian terhadap mutu.[9] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.[10] Sama halnya yang dituliskan di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa standar adalah ukuran dasar yang digunakan.[11] Adapun Standardisasi pendidikan adalah penstandaran pendidikan, dalam artian pengukuran dasar yang digunakan dalam pendidikan. Munculnya standardisasi pendidikan juga dilatar belakangi oleh perhatian pemerintah terhadap kualitas pendidikan.[12] Daniel & Christopher berpendapat bahwa standardisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai metode kontrol mutu terhadap madrasah.[13] Pendidikan di Indonesia tidak

---

[7] *Trends in Mathematic and Science Study* adalah sebuah riset internasional untuk mengukur kemampuan anak-anak kelas 4 dan kelas 8 dibidang matematika dan IPA.

[8] https://puspendik.kemdikbud.go.id/seminar/upload/Hasil%20Seminar%20Puspendik%202016/TIMSS%20infographic.pdf akses tanggal 31 Mei 2018.

[9] Aan Komariah dan Cepi Triatna, *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), h. 10

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 858.

[11] Badudu & Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 1355.

[12] Diskusi dengan Ibu Nurul, Sekretariat BSNP, Cipete, Rabu 24 Juli 2019, Kantor Sekretariat BSNP.

[13] Daniel Lan Rubin & Christopher John Kazanjian, "Just Another Brick in The Wall: Standardization and the Devaluing of

akan berkualitas jika tidak ada dukungan serta campur tangan pemerintah di dalamnya. Karena pemerintahlah yang mempunyai kekuasaan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Oleh karena itu pemerintah berhak untuk membuat standardisasi pendidikan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Ada kekhawatiran masyarakat dengan adanya standardisasi pendidikan. Pertama, dengan adanya standardisasi pendidikan terutama di madrasah, apakah akan menghambat berkembangnya ciri khas madrasah dan menghilangkan kreatifitas dan inovatif madrasah. Kekhawatiran yang kedua, apakah dengan adanya standardisasi pendidikan yang nantinya akan diakreditasi sebagai pengakuan publik hanya sekedar formalitas tanpa memperhatikan proses mutu dari madrasah tersebut. Maka diperlukan penelitian standardisasi pendidikan di madrasah. Di dalam penelitian ini juga mengulas dampak yang akan terjadi dari standardisasi tersebut.

Selanjutnya Nurul mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu beragam, maka untuk menjamin kualitas pendidikan diperlukan adanya standar minimal pendidikan. Standar minimal pendidikan melihat dari standar kompetensi lulusan bangsa Indonesia harus seperti apa, lalu dilanjuti oleh standar isi. Kedua standar inilah yang menjadi standar utama, dan untuk penjabaran standar-standar yang lain.[14] Rata bukan berarti harus sama, namun rata di sini madrasah harus mampu menerjemahkan bahwa setiap lembaga pendidikan harus bermutu dengan minimal standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pendidikan Islam di Indonesia setelah orde reformasi atau pasca pemerintahan presiden Soeharto[15] menduduki tempat yang sangat diperhitungkan di

Education", *Journal of Curriculum and Instruction (JoCI)*, November 2011, Vol. 5, No. 2, h. 94-108.

[14] Diskusi dengan Ibu Nurul, Sekretariat BSNP, Cipete, Rabu 24 Juli 2019, Kantor Sekretariat BSNP.

[15] Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang menggantikan Soekarno dari tahun 1967 sampai 1998.

dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya madrasah. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah dimulai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perubahan kedua PP Nomor 13 Tahun 2015 bahwa SNP perlu dilakukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. PP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendiknas Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud. Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN-S/M yaitu badan evaluasi mandiri akreditasi sekolah/madrasah. Dengan adanya UU dan peraturan tersebut maka memaksa seluruh madrasah dan semua pendidikan Islam untuk mengevaluasi seluruh aspek dalam pendidikan agar bisa setara bahkan bisa lebih menyaingi sekolah non Islam.[16]

Indikator atau kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur mutu pendidikan yaitu hasil akhir pendidikan. Dalam konteks pendidikan indikator mutu berpedoman pada konteks hasil pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai oleh madrasah pada setiap kurun waktu tertentu, misalnya setiap catur wulan, semester, setahun, 5 tahun sekali pada saat akreditasi dan sebagainya. Prestasi yang dicapai dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, seperti nilai Ujian Nasional (UN), atau prestasi bidang lain, misalnya bidang olahraga dan seni. Bahkan prestasi madrasah berupa kondisi yang tidak dapat dipegang, seperti suasana, disiplin, kereligiusan dan sebagainya.[17] Indikator

[16] Samsirin, "Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam", *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2015, Juni, h. 141.

[17] Muwafiqus Shobri, "Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Hasan Jufri", *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*,

mutu di dalam penelitian ini akan ditekankan mutu berdasarkan proses pembelajaran, hasil lulusan dan nilai akreditasi.

Madrasah dan semua kelembagaan pendidikan baik sekolah, pesantren dan lainnya mendapat kepercayaan tersendiri dari masyarakat untuk membawa peserta didiknya menjadi manusia yang bisa berdaya saing. Persainganpun semakin menggulat karena masyarakat yang berpendidikan pasti akan lebih memilih lembaga yang bermutu, serta akan memiliki banyak peluang dan lebih terbuka memperoleh kesempatan untuk membuka pekerjaan bahkan mendapatkan pekerjaan yang baik. Akhirnya orientasi ini pun akan mendorong masyarakat untuk memilih lembaga atas dasar "taraf" dan "mutu". Maksudnya masyarakat akan mengukur sekolah dan perguruan tinggi mengacu pada "taraf" dan "mutu", inilah yang disebut oleh A. Malik Fadjar sebagai orientasi alokasi posisional.[18] Terlebih lapisan masyarakat yang memang hidupnya di tengah-tengah pusat pendidikan seperti di sekitar universitas, sekolah favorit atau ber-gengsi dan madrasah model, maka akan sangat terpacu untuk memilih sekolah yang berkualitas. Walaupun mutu tidak harus ditentukan oleh akreditasi, namun akreditasi merupakan hal yang sangat penting untuk madrasah mendapatkan jaminan mutu terhadap publik. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan mutu madrasah, madrasah harus bisa bersaing salah satunya dengan akreditasi.

Madrasah bukan suatu produk yang asli dari negara Indonesia. Walaupun madrasah bukanlah suatu produk yang datang dari Indonesia, namun madrasah merupakan sejarah yang harus dikenang oleh bangsa Indonesia, karena madrasah merupakan bagian dari pranata pendidikan yang memiliki ciri khas dan berakar kuat pada sendi-sendi ke-Indonesiaan baik dari segi

---

Volume 3, Nomor 1, Juni 2017; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503, h. 15.

[18] A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, (Bogor: Mizan, 1999), h. 5.

nilai dan budaya yang dikembangkan masyarakat. Selayaknya dapat dikatakan bahwa madrasah telah menjadi salah satu wujud entitas Indonesia selain dari pesantren.[19] Madrasah juga merupakan salah satu jenis lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki partisipasi sangat besar dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa sebagaimana cita-cita pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003, madrasah dipaksa untuk selalu memodifikasi sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat mencetak lulusan yang berkualitas, mampu bersaing dan mampu menghadapi setiap liku-liku zaman yang semakin berkembang.[20] Madrasah juga harus memiliki *brand* yang kompetitif dan terpecaya. Ideologi adalah salah satu ancaman yang besar terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam saat ini, yang jika dibiarkan akan mengurangi nilai-nilai religiusitas yang selama ini menjadi sistem nilai yang ada di madrasah.[21] Maka madrasah harus tetap bertahan pada eksistensi ke-Islamannya dengan menciptakan budaya ke-Islaman. Sudah banyak madrasah zaman sekarang yang membuat budaya Islam, seperti tadarus Alquran sebelum memulai pelajaran, sholat dhuha di pagi hari dan kegiatan Islami lainnya. Namun apakah kegiatan itu benar-benar dilaksanakan secara hakikat sehingga menimbulkan kesadaran pada peserta didik, atau kegiatan tersebut hanyalah sebatas kegiatan formalitas untuk mempertahankan eksistensi madrasah saja, sehingga tidak menimbulkan kesadaran peserta didik untuk menjalankannya ketika mereka di luar madrasah.

---

[19] M. Amin Haedari, *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), h. 1.

[20] M. Amin Haedari, *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, h. 425.

[21] Ismid Hadad, "Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar", *Jurnal Prisma*, Vol. 29, No. 2, April 2010.

Perkembangan pendidikan di madrasah juga tidak bisa lepas dari perkembangan politik, sosial, budaya, ekonomi dan perkembangan sistem pendidikan yang tengah berlangsung baik di Indonesia maupun di luar Indonesia atau dunia global. Perubahan yang terjadi di lingkungan sistem pendidikan nasional juga mempengaruhi sistem pendidikan madrasah. Namun hal ini tidak perlu dikhawatirkan, jika memang madrasah harus mengikuti sistem pendidikan nasional. Karena sistem pendidikan nasional juga memaksa madrasah untuk lebih berkualitas. Adanya dugaan sebagian pihak yang mengatakan bahwa masyarakat enggan menyekolahkan anaknya ke madrasah, sebab adanya pergeseran nilai dalam masyarakat akibat proses modernisasi tampaknya perlu dikaji lebih lanjut. Karena, persoalan memilih jenis lembaga pendidikan itu sebenarnya tidak sederhana. Banyak pertimbangan, baik strategis, politis, ekonomis, maupun agamawi. Menurut A. Malik Fadjar ada beberapa faktor yang menjadi perhitungan masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka, yaitu prioritas cita-cita dan gambaran hidup masa depan, posisi dan status sosial, serta agama.[22] Menurut Nurkolis definisi kualitas selalu dikaitkan dengan produk, aspek di sini bermacam-macam, antara lain adalah produk pendidikan.[23] Lembaga pendidikan itu sangat banyak, diantaranya adalah madrasah. Pertanyaannya adalah bagaimana madrasah bisa berkualitas dan bagaimana cara mengetahui bahwa madrasah tersebut berkualitas.

Menurut Crosby kualitas adalah *conformance to requirements*, yaitu sesuatu yang sesuai dengan standar yang ditentukan publik, maksudnya suatu produk bisa dikatakan mempunyai kualitas apabila sesuai dengan standar yang telah ditentukan, produk di sini bisa diartikan barang atau jasa.[24] Jika

---

[22] A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, h. 47.

[23] Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*, (Jakarta: Anggota Ikapi, 2006), Cet. Ke-3, h. 69

[24] Philip B. Crosby, *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*, (New York: New American Library, 1979), h. 17.

pendidikan di Indonesia maka standardisasinya adalah mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, karena indikator SNP adalah pemerintah yang berhak menentukan kebijakannya, dan kebijakan tersebut diambil dari berbagai penelitian dan kondisi sosial budaya serta ekomoni Indonesia.

Berbeda halnya dengan H.A.R. Tilaar dalam tinjauan kritisnya bahwa epistema standardisasi dan kompetensi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional akhirnya akan dibawa kepada pegungkapan bahaya-bahaya yang tersembunyi di balik epistema-epistema tersebut, yaitu kemungkinan lahirnya suatu masyarakat Indonesia yang terkukung oleh standar dan kompetensi yang statis yang secara keseluruhan berbahaya bagi tegaknya suatu masyarakat demokrasi yang kreatif dan inovatif.[25] Menurut peneliti, pendidikan memang harus ada yang menjadi suatu ukuran untuk menentukan mutu dari madrasah tersebut. Karena apabila pendidikan mempunyai standar maka masyarakat tidak sulit untuk memilih madrasah yang bermutu. Standardisasi nasional sudah menjadi tuntutan globalisasi bahkan tuntutan untuk kemajuan suatu negara tersebut.

Standardisasi pendidikan dengan menekankan pada penguasaan materi pelajaran tertentu dilatarbelakangi asumsi bahwa semua siswa dapat menguasai mata pelajaran yang terstandar. Asumsi demikian memunculkan problema filosofis ketika dikaitkan dengan peningkatan mutu pendidikan. Asumsi tersebut berbeda dengan pandangan progresifisme turunan pada pragmatisme dalam pendidikan, yang menekankan pada kebutuhan anak, bukan penguasaan materi tertentu. Dengan kata lain, kontestasi standardisasi pendidikan sebagai wujud filosofi eksistensialisme dan manajemen mutu terpadu sebagai pengejawantahan pragmatisme merupakan paradoks pendidikan di

---

[25] H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 13.

Indonesia yang membutuhkan jawaban kritis untuk mencapai tujuan.[26]

Terkait perdabatan pro-kontra mengenai standardisasi pendidikan di atas, antaranya yang pro berpendapat bahwa standardisasi berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di dalam mengadakan perubahan global, standardisasi juga merupakan suatu kewajiban moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Alasan mereka juga, bahwa standardisasi yang bersifat nasional atau internasional akan menghindari keinginan-keinginan pribadi dari guru serta mencegah kontrol lokal yang berlebihan.[27] Selain dari itu standardisasi juga merupakan suatu kebutuhan karena tuntutan masyarakat yang berubah sangat cepat. Dan dengan adanya standardisasi diharapkan dapat memberikan akuntabilitas pendidikan. Adapun mereka yang kontra terhadap standardisasi pendidikan bahwa standardisasi pendidikan banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan bisnis dan politik, tidak serta merta karena kepentingan masyarakat. Padahal belajar mengajar secara berhasil terletak kepada relasi antara siswa dan guru, bukan pada otoritas dari luar yang dipaksakan dari atas. Dan juga evaluasi pendidikan yang dipakai untuk mengetahui tercapai tidaknya standar yang telah disepakati tidak semata-mata diselenggarakan melalui tes objektif. Tes objektif tersebut seakan hanya berkedok

[26] Taufiqur Rahman, "Paradoks Manajemen Mutu: Standarisasi Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Lisan al-Hal*, Vol. 4, No. 2, Desember 2012, h. 228.

[27] Putu Subawa, "Standarisasi Dunia Pendidikan", *Jurnal Penjaminan Mutu* (STAHN Mpu Kuturan Singaraja), file:///C:/Users/Personal/Downloads/STANDARISASI_DUNIA_PENDIDIKAN.pdf, diakses pada tanggal 06 April 2018

akuntabilitas masyarakat padahal hanya untuk kepentingan orang-orang yang berada di atas.[28]

Maka dari itu penelitian di sini akan menilai mutu madrasah berdasarkan delapan indikator SNP yang telah ditetapkan oleh pemerintah[29] dan akan menganalisis efek atau dampak standardisasi terhadap mutu madrasah. Penelitian ini juga sependapat dengan Sabar Budi Raharjo, yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sudah menanggapi secara positif dan layak untuk menerapkan SNP ditunjukkan dengan status akreditasi yang terbanyak adalah B yang terdiri dari populasi yang tersebar di seluruh Indonesia tingkat SMPN dan dengan jumlah sample 42 SMPN. [30] Di Indonesia khususnya Jakarta, seharusnya sekolah atau madrasah sudah mampu untuk mempunyai status akreditasi dengan nilai A, karena beragam faktor yang mendukung baik dari segi informasi dan majunya teknologi serta hampir meratanya bantuan pendidikan yang tersebar di Jakarta. Tetapi dalam kenyataannya, masih banyak madrasah, khususnya di Jakarta Utara, yang belum mempunyai akreditasi A bahkan masih ada yang status akreditasinya C dan tidak terakreditasi. Kondisi seperti ini terjadi karena berbagai kemungkinan, diantaranya pertama, madrasah tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. Kedua madrasah tidak mempunyai modal yang cukup untuk membiayai pendidikan, karena dana BOS / Bantuan Operasional Sekolah turun ketika madrasah sudah terakreditasi.

[28] Suwidi, *Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional: Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: SPs UIN Jakarta, 2015).

[29] Standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian.

[30] Sabar Budi Raharjo, 'Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, Nomor 2, Balitbang Kemendiknas, 2012, h. 303.

Ketiga madrasah belum mengerti standar apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah dan bagaimana menerapkannya. Dan yang terakhir karena masyarakat yang tidak mendukung, karena pada dasarnya madrasah swasta sangat memerlukan dukungan dari masyarakat.

Indonesia terkenal sebagai muslim mayoritas yang memiliki tantangan dan peluang yang sangat besar dalam menjadikan dirinya sebagai model dan sumber inspirasi bagi dunia Islam maupun masyarakat dunia, khususnya seputar hubungan Islam dan modernitas di dalam pendidikan dan hal lainnya.[31] Kehidupan bangsa Indonesia di era global seperti sekarang ini juga ditandai oleh berbagai tantangan, berupa terjadinya perubahan pola pikir, tingkah laku, persaingan dan konflik sosial, pelanggaran HAM, berbagai tindak kejahatan yang telah sampai pada batas-batas yang mengkhawatirkan terhadap ketahanan bangsa dan negara.[32] Maka dari itu pemerintah perlu membuat suatu standar pendidikan agar semua pendidikan di Indonesia semakin berkualitas atau bermutu.

Karena Indonesia merupakan muslim yang terbanyak, maka seharusnya madrasah yang memang dikenal sebagai wajah pendidikan muslim sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah. Di daerah tempat tinggal peneliti khususnya Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Penjaringan Jakarta Utara hanya ada satu yang mempunyai nilai akreditasi A pada tahun 2015. Persoalan ini sungguh miris dan membuat pendidikan Islam khususnya madrasah swasta di mata masyarakat sangat rendah. Sebagaimana

[31] Kusmana dan Jm Muslimin, *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PIC UIN JAKARTA dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2008), h. 92.

[32] Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global: Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h. 716.

yang dikatakan oleh Ahdi Heryadi[33] bahwa MAS di Jakarta Utara yang memiliki nilai akreditasi A baru satu madrasah swasta, khususnya di Penjaringan. Maka perlunya untuk melakukan penelitian mengenai dampak standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah.

Pemerintah melalui kebijakannya selalu mempunyai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, antara lain melalui penetapan SNP, sertifikasi guru/dosen, akreditasi dan lain sebagainya. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia/ NKRI. SNP di madrasah juga berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan madrasah, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan dan pendidikan yang berkualitas. SNP mempunyai tujuan untuk menjamin mutu madrasah atau sekolah di dalam pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. SNP juga meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. [34] Di dalamnya tidak hanya untuk mencapai hasil belajar yang baik, melainkan terdapat proses yang terjadi pada peserta didik.[35]

Teguh berpendapat bahwa SNP juga bisa dikatakan sebagai indikator mutu di dalam layanan manajemen madrasah,

[33] Ahdi Heryadi adalah salah satu pengawas madrasah di Jakarta Utara bagian Penjaringan, khususnya di tempat peneliti bertugas di MTs dan MA Khairul Ummah.

[34] Jafriansen Damanik, "Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan", *JDP STKIP Purnama Jakarta,* Vol. 8, Nomor 3, November Tahun 2015, h. 152.

[35] M. Supriadi, "Analisis Sistem Penilaian Kelas dalam Kegiatan Belajar Mengajar", El-Hikam: *Jurnal Pendidikan dan Kajian Ke-Islaman*, Vol. Vii, No. 1, Januari (2014): 3.

seperti bimbingan konseling, perpustakaan, kesehatan, asrama, kantin dan sebagainya. Nilai-nilai dan standar yang berlaku dalam masyarakat sekitar harus tetap diperhatikan di dalam manajemen layanan madrasah. Memenuhi SNP merupakan kewajiban setiap madrasah atau sekolah, tetapi merespon perkembangan masyarakat juga merupakan hal yang wajib bagi madrasah yang hidup di tengah masyarakat. Nilai dan standar yang berlaku dalam masyarakat juga memungkinkan dijadikan untuk pengayaan atau evaluasi bagi madrasah.[36]

SNP merupakan salah satu dari upaya perbaikan manajemen pendidikan di madrasah. Perbaikan manajemen pendidikan secara luas harus mengacu pada memberdayakan lembaga pendidikan sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang demikian ini dimaksudkan agar lembaga pendidikan Islam lebih mandiri dan bersikap kreatif, dapat mengembangkan iklim kompetitif antar lembaga pendidikan di wilayahnya, serta bertanggung jawab terhadap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat, yang di era otonomi ini akan menjadi kontrol pada proses pengembangan pendidikan.[37]

Standar isi berupa kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kalender pendidikan meliputi tingkat kompetensi dan lingkup materi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang pendidikan tertentu. Yang berupa kerangka dasar dan prinsip pengembangan serta struktur kurikulum dan beban belajar untuk jenjang tertentu dan lainnya.[38] Standar proses misalnya untuk satuan pendidikan menengah meliputi

[36] Teguh Triwiyanto, "Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indkator Mutu Layanan Manajemen Sekolah", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, Jilid 19, Nomor 2, Desember 2013, h. 170.

[37] A. Malik Fadjar, *Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam*, (Malang: UM Press, 2012), h. 107

[38] H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), h. 117.

perencanaan berupa silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disebut RPP, prinsip penyusunannya. Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi pengelolaan kelas, buku teks pelajaran, beban kerja minimal guru, dan rombongan belajar. Adapun penilaian hasil pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembelajaran.

Adapun standar kompetensi lulusan (SKL) menurut Permendikbud Nomor 54 tahun 2013 adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL juga digunakan sebagai acuan utama untuk pengembangan standar yang lainnya. SKL terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya disatuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi kepala madrasah, guru dan staff yang bertanggung jawab akan madrasah. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pendidikan di madrasah adalah terpenuhinya aspek pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas, terpenuhinya standar kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan madrasah. Sedangkan secara kuantitas, terpenuhinya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan tersebut mencapai kondisi ideal dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.[39]

Standar sarana dan prasarana, setiap madrasah wajib memiliki sarana dan prasarana. Sarana berupa peralatan

[39] M. Amin Haedari, *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, h. 426.

pendidikan, perabot, buku, sumber belajar, media pembelajaran, bahan habis pakai dan perlengkapan lainnya yang menunjang proses belajar mengajar. Adapun prasarana meliputi satuan pendidikan, lahan, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, tempat bermain dan olahraga, masjid atau tempat peribadatan, ruang kepala serta wakilnya, ruang tata usaha, kantin, ruang unit produksi, ruang usaha kesehatan sekolah dan tempat atau ruang lainnya yang menunjang dan dibutuhkan untuk proses pembelajaran. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan standar sarana dan prasarana, No 24 tahun 2007 untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs).

Standar pengelolaan ada tiga, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah Pusat. Standar ini berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembelajaran agar tercapai penyelenggaraan pendidikan yang efisien dan efektif. Standar pengelolaan juga terdapat beberapa kategori, pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yaitu menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan standar pengelolaan pendidikan tinggi berupa menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian.

Adapun standar pembiayaan meliputi biaya personal, operasi dan investasi. Biaya ini ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, jumlah siswa, prosentase siswa berbanding guru/dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (khususnya di negara berkembang), perubahan kebijakan dari penggajian/pendapatan. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi berupa gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Sedangkan Biaya investasi meliputi biaya penyediaan pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan modal kerja tetap.[40]

Standar penilaian berkaitan dengan prosedur, mekanisme dan perangkat serta instrumen penilaian hasil belajar siswa. Kekurangan dan kesulitan siswa dapat dievaluasi dengan adanya standar penilaian dan proses pembelajaran akan terukur. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas tiga macam, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Penilaian juga terdapat dua kategori yaitu penilaian hasil belajar peserta didik dan penilaian kelulusan.

Fungsi SNP adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa dengan adanya SNP maka mutu pendidikan nasional akan terukur dan akan memudahkan untuk mencapai tujuan pendidikan di Indonesia.[41] Sebagian madrasah yang sudah mampu untuk terpenuhinya SNP, dan ada pula sebagian yang lain masih sangat sulit untuk terpenuhinya SNP. Hal ini perlu dikaji dikarenakan ternyata belum semua madrasah mampu memenuhi SNP dengan baik, maka akan sangat

[40] Nanang Fatah, *Standar Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5

[41] M. Amin Haedari, *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, h. 428.

memprihatinkan bila madrasah belum mampu memenuhi SNP dengan baik. Karena semua madrasah seharusnya sudah paham betul bagaimana caranya dapat memenuhi SNP dengan baik agar pendidikan di madrasah dapat berkualitas.

Terpenuhinya SNP ada dugaan kuat bahwa yang sangat penting dan berperan adalah seluruh pemimpin yang ada di madrasah tersebut, baik itu kepala madrasah dan wakilnya serta staff dan guru yang profesional. Dapat mempengaruhi anak buahnya adalah tipe khas seorang pemimpin. Apa yang dipilih oleh pemimpin untuk dikerjakan dan cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi bawahannya membentuk gaya kepemimpinan. Maka pemimpin yang profesional sangat diperlukan untuk membantu terpenuhinya SNP sehingga akan meningkatkan kualitas madrasah.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas madrasah, pemerintah juga telah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang kelayakan madrasah atau program yang dilaksanakan madrasah berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), yang memberikan pengakuan peringkat kelayakan (A, B, C atau tidak terakreditasi), memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif diperlukannya akreditasi madrasah, sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan rencana pengembangan madrasah, umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program madrasah dan memotivator madrasah.[42]

[42] Sispena (Sispena adalah sistem penilaian akreditasi sekolah atau madrasah)

Usaha untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkualitas memerlukan langkah-langkah yang pasti dan bisa dijalankan secara efektif dan efesien. Lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dituntut memiliki visi, tanggung jawab, wawasan, dan keterampilan manajerial yang tangguh. Ia hendaknya dapat memainkan peran sebagai lokomotif perubahan menuju terciptanya madrasah berkualitas. Untuk kepentingan ini, paradigma manajemen madrasah harus mengalami pergeseran dari paradigma lama yang penuh ketergantungan, kurang transparan dan tidak berani mengambil resiko diubah ke paradigma baru yang transparan dan demokratis, bekerja secara kelompok/ jaringan serta mempunyai akuntabilitas (kebertanggungjawaban) tinggi. Secara rinci dikatakan sebagian ahli pendidikan seharusnya mengubah hal-hal berikut ini, dari posisi subordinatif ke posisi otonom, dari strategi sentralistik ke strategi desentralistik, dari pengambilan keputusan otoritatif ke pengambilan keputusan partisipatif, dari pendekatan birokratik ke pendekatan profesional, dari model penyeragaman ke model keragaman, dari langkah praktis kaku ke langkah praktis luwes, dari kebiasaan diatur ke kebiasaan berinisiatif, dari serba regulasi ke deregulasi, dari kemampuan mengontrol ke kemampuan mempengaruhi, dari kesukaan mengawasi ke kesukaan memfasilitasi, dari ketakutan dengan resiko ke keberanian mengelola resiko, dari pembiayaan yang boros ke pembiayaan yang efisien, dari kecerdasan individual ke kecerdasan kolektif, dari informasi tertutup ke informasi terbagi/terbuka, dari pendelegasian ke pemberdayaan dan dari organisasi hirarkis ke organisasi egaliter.[43]

Pemimpin yang baik harus mengerti bagaimana manajemen madrasah yang baik. Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Istilah manajemen biasa

[43] Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2005), h. 69.

dikenal dalam ilmu ekonomi, yang memfokuskan pada keuntungan dan komoditas komersial. Seseorang yang menggunakan wewenang dan kebijaksanaan suatu organisasi untuk menggerakkan staf atau bawahannya mencapai tujuan yang telah ditetapkan disebut dengan seorang manajer. Karena itu, seorang manajer biasanya bertugas untuk mengelola sumber daya fisik, yang berupa *capital* (modal), keterampilan-keterampilan manusia, bahan mentah, dan teknologi, agar dapat melahirkan produktivitas, efisiensi, tepat waktu (sesuai dengan rencana kerja), dan kualitas. Berbeda halnya dengan seorang pemimpin, yang lebih memfokuskan pada visi. Pemimpin berusaha mengajak dan memotivasi staf atau bawahannya untuk bersama-sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, seorang pemimpin biasanya berusaha mengelola sumber-sumber emosional dan spiritual, yang berupa: nilai-nilai, keberpihakan, dan aspirasi staff atau bawahannya, agar dapat melahirkan kebanggaan dan kepuasan dalam bekerja. Menurut teori manajemen, bahwa manajer yang sukses adalah manajer yang memiliki unsur kepemimpinan dan mampu menerapkan serta mengembangkannya. Dengan kata lain, manajer yang mampu bertindak sebagai pemimpin.[44]

Kepemimpinan madrasah yang kuat melalui manajemen madrasah yang baik harus dapat membangun koordinasi, menggerakkan semua komponen madrasah, mensinergikan semua potensi, merangsang perumusan tahapan-tahapan perwujudan visi dan misi madrasah dan mengambil inisiatif yang berani dalam pembaharuan serta menjalankan manajemen madrasah secara terbuka, juga mengembangkan tim kerja yang solid, cerdas, dan dinamis. Pemimpin yang bisa me-*manage* madrasah dengan baik tentunya madrasah tersebutpun dapat memenuhi SNP dengan

[44] Muhaimin, dkk., *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Kencana, 2012), cet. Ke-4, h. 5.

baik. Selanjutnya, penting untuk diketahui bahwa mengingat standar merupakan sebuah konsensus bersama dari para pemangku kepentingan, maka keterlibatan publik dalam pengembangan SNP sangat penting. Keterlibatan ini dilakukan lewat tahap telaah draf standar dan uji publik. Dengan demikian, pada saat draf SNP ditetapkan menjadi Peraturan Menteri diharapkan akan mendapat penerimaan dan dukungan yang optimal dari masyarakat.[45]

Dengan adanya SNP tersebut, maka arah peningkatan kualitas pendidikan Indonesia menjadi lebih jelas dan terukur. Masyarakat *awam* tidak perlu sulit untuk mencari madrasah yang bermutu untuk menyekolahkan anaknya, salah satunya bisa dilihat dari nilai akreditasi madrasah apakah sudah mencapai standar atau melebihi. Bila setiap satuan pendidikan telah dapat mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan tersebut, maka kualitas satuan pendidikan tersebut dapat dinyatakan tinggi. Berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan telah ditetapkan dan diimplementasikan, dengan harapan kualitas pendidikan dapat berangsur-angsur meningkat pada gradasi yang tinggi.[46] Dengan adanya SNP juga pemerintah membentuk tim penjamin mutu eksternal yaitu berupa BAN-S/M, begitu juga dengan madrasah harus membentuk tim penjamin mutu internal sebagai wujud kepedulian pemerintah dan madrasah yang sama-sama berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Penelitian terhadap Standar Nasional Pendidikan umumnya banyak dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan penelitian Standar Nasional Pendidikan pada madrasah masih minim. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Sabar Budi

[45] Bambang Suryadi, "Peran BSNP dalam Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Pengembangan Standar Nasional Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Revitalisasi LPTK, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia", *KONASPI*, VIII Tahun 2016, h. 3.

[46] Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia", h. 301.

Raharjo, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, yang berjudul, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia", bahwa setiap satuan pendidikan sudah layak menerapkan SNP, dengan dibuktikan oleh jumlah sekolah yang terakreditasi yang terbanyak adalah nilai B, untuk tingkat SD 73,55%, SMP 85,97%, SMA 77,07%, dan SMK 76,15%. SNP yang sulit dicapai adalah standar kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana dan prasarana.[47]

Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Jafriansen Damanik, yang berjudul "Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan". Penelitian ini membahas bahwa sekolah harus melakukan upaya penjaminan mutu hingga memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu Jafriansen mengemukakan bahwa sekolah harus melalukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi.

Penelitian dengan objek yang berbeda dilakukan oleh Zakiyah Kholidah, AL HIKMAH Jurnal Studi Ke-Islaman, yang berjudul, "Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional Pendidikan". Penelitian ini membahas tentang pendidikan madrasah yang ada di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia, dan problematika madrasah. Yang membahas manajemen madrasah, kepemimpinan madrasah, sumber daya madrasah dan pendanaan di madrasah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, kajian terhadap Standar Nasional Pendidikan cukup banyak. Namun pengkajian terhadap dampak Standar Nasional Pendidikan belum banyak dilakukan, terlebih terhadap sekolah yang berciri khas Islam seperti Madrasah. Realitas tersebut menunjukkan adanya kesenjangan perhatian terhadap pengkajian Standar Nasional Pendidikan antara sekolah umum dan sekolah yang berciri khas Islam. Maka peneliti termotivasi untuk mengkaji dampak standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah. Adapun objek

---

[47] Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia".

yang dipilih adalah MTs Pembangunan UIN, didasarkan pada keunggulan antara lain, pertama madrasah yang mempunyai tiga standardisasi pendidikan, 1) Standar Nasional Pendidikan; 2) Standar Internasional; 3) Standar mutu di atas SNP yang berbasis keunggulan atau spesifikasi madrasah seperti tiga pilar keunggulan al-akhlāk al-karīmah, bahasa dan sains. Standardisasi inilah yang merupakan pengembangan dari Standar Nasional Pendidikan.[48] Kedua MTs Pembangunan UIN adalah madrasah swasta yang mempunyai komitmen terhadap mutu, dibuktikan dengan nilai akreditasi madrasah dari awal di akreditasi sampai sekarang berpredikat A. Ketiga, MTs Pembangunan UIN memiliki nilai *plus* baik dari sisi akademik maupun non akademik[49], terlebih letaknya yang strategis yaitu diperkotaan[50] sehingga daya dukung madrasah cukup memadai dan dapat dijadikan pertimbangan manajemen mutu untuk madrasah yang lain, khususnya madrasah swasta agar mempunyai nilai unggul dan madrasah tidak dianggap sebelah mata.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada beberapa masalah yang diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Kualitas Pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PISA dan TIMSS.

[48] Adanya standar internasional dan standar keunggulan MTs Pembangunan UIN Jakarta adalah sebagai pengembangan dari Standar Nasional Pendidikan di madrasah tersebut.

[49] Nilai *Plus* MTs Pembangunan UIN dilihat dari data-data kesiswaan di antaranya perlombaan baik akademik maupun non akademik terlampir.

[50] MTs Pembangunan UIN Jakarta terletak di Jln. Ibnu Taimia Komplek UIN Jakarta, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan.

2. Madrasah banyak yang belum berkomitmen terhadap peningkatan mutu dibuktikan dengan masih banyak nilai akreditasi madrasah di bawah A.
3. Bagaimana SNP yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan Apakah SNP dapat meningkatkan mutu madrasah.
4. Bagaimana kesiapan madrasah dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
5. Apa strategi dan evaluasi yang dilakukan madrasah untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan.
6. Adakah pengaruh standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah.
7. Bagaimana implementasi SNP pada madrasah dan penilaian BAN-S/M terhadap madrasah.
8. Dampak apa yang terjadi di madrasah ketika pendidikan distandardisasikan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah, "Bagaimana dampak standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah?". Pertanyaan tersebut dapat dijabarkan menjadi tiga pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimana sistem penjaminan mutu madrasah?
2. Bagaimana implementasi Standar Nasional Pendidikan di madrasah?
3. Dampak apa yang terjadi di madrasah ketika pendidikan distandardisasikan?

D. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah dengan fokus:

1. Sistem penjaminan mutu yang dimaksud adalah sistem penjaminan mutu madrasah Pembangunan UIN Jakarta.

2. Implementasi Standar Nasional Pendidikan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh BSNP yang diimplementasikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta dan standardisasi pendidikan yang dimaksud adalah standardisasi pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.
3. Dampak yang dimaksud adalah akibat (baik negatif maupun positif) yang terjadi ketika pendidikan distandardisasikan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian tesis ini adalah untuk membuktikan bahwa standardisasi pendidikan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap mutu madrasah. Adapun tujuan-tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagaimana menjawab rumusan masalah di atas:

1. Menganalisis sistem penjaminan mutu madrasah.
2. Menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan pada madrasah.
3. Menganalisis dampak yang terjadi ketika pendidikan distandardisasikan.

F. Signifikansi dan Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, antara lain:

1. Bagi Pemerintah yang ditujukan untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: Sebagai bahan masukan mengenai standardisasi pendidikan yang profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
2. Bagi Cendikia: Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pemerhati ilmu, baik secara konsepsional, teoritis dan metodologi. Serta diharapkan hasil penelitian ini nantinya bisa menjadi sebuah pengetahuan ilmiah dan tambahan kekayaan ilmu pengetahuan bagi Insan Akademik, dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
3. Bagi Ahli Hukum: Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih teliti dan objektif dalam menilai indikator delapan Standar Nasional Pendidikan di madrasah/sekolah.
4. Bagi Masyarakat: Menambah wawasan bagi masyarakat luas untuk mengetahui standardisasi pendidikan dan lebih pintar lagi untuk memilih madrasah sebagai pendidikan untuk anak dan keluarga mereka.
5. Bagi lembaga yang diteliti: Sebagai bahan masukan dalam upaya pengembangan sistem penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas madrasah.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tema bahasan yang akan peneliti angkat pada tesis ini adalah “Standar Nasional Pendidikan dan Kualitas Madrasah (Studi Dampak Standardisasi Pendidikan terhadap Mutu Madrasah)”. Tema yang peneliti angkat sudah banyak digarap oleh para ahli dan para peneliti. Namun, untuk memperoleh gambaran seutuhnya, peneliti akan berusaha mengeksplorasi sumber-sumber yang ada dan masih relevan dengan kajian ini, diantaranya adalah:

Putu Subawa[51] dalam penelitiannya mengenai “Standarisasi Dunia Pendidikan”, penelitian ini melihat bahwa

[51] Tenaga Pendidik pada STAHN Mpu Kuturan Singaraja

semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan harus menerapkan standar yang profesional yang tinggi, yang bisa diharapkan akan terciptanya suatu kualitas masyarakat yang semakin baik. Dalam penelitian ini juga membahas dalam dunia pendidikan teknologi memiliki peran yang sangat penting, dan lahirnya pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan merupakan sebuah solusi dalam mengatasi permasalahan dalam pendidikan tersebut. Serta pendidik transformatif harus menyakini bahwa peserta didik memiliki kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam sejarah penciptaan manusia.[52] Di dalam penelitian ini menjelaskan tiga aspek standardisasi yang harus dilakukan yaitu membuat standar yang profesional, standar yang memanfaatkan perkembangan teknologi dan standardisasi lulusan yang sesuai dengan keunggulan di masing-masing satuan pendidikan. Perbedaan dalam penelitian tesis ini akan membahas standardisasi pendidikan dalam 8 aspek SNP, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Penelitian oleh Sabar Budi Raharjo, Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, yang berjudul, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia", bahwa setiap satuan pendidikan sudah layak menerapkan SNP, dengan dibuktikan oleh jumlah sekolah yang terakreditasi yang terbanyak adalah nilai B, untuk tingkat SD 73,55%, SMP 85,97%, SMA 77,07%, dan SMK 76,15%. SNP yang sulit dicapai adalah standar kompetensi lulusan, ketenagaan, sarana dan prasarana.[53] Di dalam penelitian ini menggunakan delapan standar nasional pendidikan untuk dijadikan ukuran pencapaian mutu sekolah baik pencapaian tertinggi dan terendah dalam setiap standarnya. Menurutnya delapan standar nasional

[52] Putu Subawa, "Standarisasi Dunia Pendidikan", *Jurnal Penjaminan Mutu.*

[53] Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia".

yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja sekolah menengah pertama sudah rasional, karena sebagian besar sudah dapat digunakan untuk mengukur kinerja setiap komponen pendidikan. Sedangkan perbedaan di dalam penelitian tesis ini tidak mengukur ketercapaian yang terendah maupun yang tertinggi di setiap standarnya. Namun di dalam tesis ini adalah berfokus pada dampak yang ditimbulkan setelah pendidikan distandardisasikan dan menguraikan manajemen mutu yang digunakan sebagai bentuk keharusan madrasah mencapai standar yang maksimal.

Penelitian oleh Zakiyah Kholidah, AL HIKMAH Jurnal Studi Ke-Islaman, yang berjudul, "Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional Pendidikan". Penelitian ini membahas tentang pendidikan madrasah yang ada di Indonesia, sistem pendidikan Indonesia, dan problematika madrasah. Yang membahas manajemen madrasah, kepemimpinan madrasah, sumber daya madrasah dan pendanaan di madrasah. Hal yang juga berisikan bahwa manajemen madrasah yang baik secara langsung akan mempengaruhi dan menentukan efektif tidaknya kebijakan, tujuan dan sasaran mutu madrasah. Dengan adanya manajemen yang bagus diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap peningkatan kualitas madrasah.[54] Tulisan ini fokus pada kajian tata kelola madrasah yang baik melalui manajemen berbasis kompetensi dimana secara langsung akan mempengaruhi efektif tidaknya kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu madrasah. Pendidikan madrasah harus diupayakan agar dikelola secara baik dan teratur penuh dengan komitmen. Di dalam penelitian ini tidak membahas delapan standar nasional pendidikan secara eksplisit melainkan hanya membahas secara umum gambaran pendidikan di Indonesia dan problematikanya. Sedangkan di dalam penelitian

[54] Zakiyah Kholidah, "Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional Pendidikan", AL *HIKMAH Jurnal Studi Ke-Islaman*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2014.

tesis ini penulis berusaha menjelaskan delapan standar nasional pendidikan secara rinci dan dianalisis dampak yang terjadi setelah pendidikan mengharuskan standardisasi pendidikan di madrasah.

Juga penelitian oleh Jafriansen Damanik, yang berjudul "Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan". Penelitian ini membahas bahwa sekolah harus melakukan upaya penjaminan mutu hingga memenuhi bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu Jafriansen mengemukakan bahwa sekolah harus melalukan evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Lebih lanjut Jafriansen mengatakan untuk memenuhi standar isi sekolah perlu mengadakan pelatihan dan *workshop* bagi guru dan tenaga kependidikan. Untuk memenuhi standar proses guru perlu melaksanakan proses pembelajaran yang lebih interaktif, terstruktur dan terjadwal, dengan memanfaatkan bahan. Untuk memenuhi standar kompetensi lulusan sekolah perlu melakukan bimbingan yang intensif terhadap siswa untuk siap bekerja, membangun sikap kompetitif dan sportif dalam mencapai prestasi belajar. Untuk memenuhi standar sarana dan prasarana sekolah perlu menyusun program pengadaan dan pemeliharaan, dan sebagainya.[55] Jafriansen lebih memerinci upaya untuk memaksimalkan pemenuhan standar nasional pendidikan. Sedangkan di dalam tesis ini upaya pemenuhan hanya salah satu bagian yang bukan bagian pokok. Tesis ini lebih menekankan sistem penjaminan mutu yang terus meningkat karena adanya arah dan acuan dari standar nasional pendidikan untuk menjadi madrasah yang bermutu.

Pada umumnya, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh semua peneliti tersebut dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dengan merujuk pada penelitian yang sama namun berbeda-beda kasus

[55] Jafriansen Damanik, "Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan", *JDP,* Vol. 8, Nomor 3, November 2015.

dan fokus penelitiannya. Misalnya, di dalam penelitian Putu hanya membahas tiga unsur sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu peningkatan profesionalisme, pemanfaatan perkembangan teknologi dan standardisasi lulusan. Berbeda dengan penelitian tersebut peneliti ingin mengkaji bagaimana standardisasi pendidikan yang ada di madrasah dapat meningkatkan mutu madrasah.

Penelitian mengenai standardisasi pendidikan dan kualitas madrasah sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang sudah ada membatasi pada kasus-kasus yang berbeda, dengan demikian dari hasil analisis penelitian-penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang sudah ada. Tulisan tentang standardisasi pendidikan di atas pada umumnya membahas tentang ketercapaian dan kesulitan SNP yang dilakukan sekolah/madrasah. Namun penelitian standardisasi pendidikan dan kualitas madrasah di sini, akan mengkaji apa yang mendasari ditetapkannya standardisasi pendidikan dan bagaimana fakta yang terjadi di lapangan ketika pendidikan distandardisasikan dan bagaimana opini masyarakat mengenai standardisasi pendidikan tersebut, yang intinya akan dikaji bagaimana standardisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu madrasah.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti akan mencoba menganalisis standardisasi pendidikan yang ada di MTs Pembangunan UIN. Dengan beberapa tahap, pertama peneliti mengkaji komitmen mutu dan sistem penjaminan mutu di madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Kedua, peneliti menelaah implementasi SNP di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Ketiga, peneliti mengkaji instrumen penilaian akreditasi BAN/S-M tahun 2017. Keempat, peneliti menganalisis bagaimana standardisasi pendidikan dapat meningkatkan mutu madrasah. Kemudian dikembangkan

bagaimana respon masyarakat, khususnya komite madrasah tentang standardisasi pendidikan. Selanjutnya dikaji bagaimana delapan standar nasional yang ada di madrasah, apakah delapan standar itu bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah atau sebaliknya. Dan terakhir akan dianalisis dampak apa saja yang timbul akibat dari pendidikan distandardisasikan.

Peneliti mengumpulkan berbagai informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang. Setelah peneliti mengumpulkan berbagai informasi mengenai tema yang peneliti angkat, maka akan dianalisis dengan berbagai teori para ahli. Adapun tujuan utama dalam menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan dan hasil gambaran berupa deksriptif akan berjalan pada saat penelitian dilakukan. Dilihat dari fokus penelitian ini, maka rancangan penelitian yang sesuai untuk digunakan adalah studi standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah. Berarti bahwa dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian secara intensif, terinci dan mendalam tentang dampak standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah. Pendekatan sejarah digunakan untuk menganalisis lebih lanjut kebijakan pemerintah tentang SNP dan sejarah akreditasi di madrasah tersebut. Sehingga akan diketahui bagaimana standardisasi pendidikan di madrasah yang mengikuti aturan SNP yang ditentukan oleh pemerintah.

Nana Syaodih mengatakan, “dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak berhak menambahkan informasi dan melebih-lebihkan data serta memanipulasi data, data yang peneliti ambil haruslah data yang sesuai dengan berjalannya

penelitian".[56] Penelitan kualitatif deskriptif berarti menjabarkan hasil penelitian dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sesuatu. Masalah dalam penelitian kualitatif harus dicari di lapangan, pada kejadian, fakta-fakta, dan kepada orang-orang yang terlibat mengalami peristiwa tersebut.[57] Untuk memudahkan peneliti mengambil data, maka peneliti menggunakan dua metode, yaitu metode penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian lapangan (*Field research*).[58]

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih adalah MTs Pembangunan UIN Jakarta. Lokasi penelitian ini dipilih karena menurut pengamatan peneliti, MTs Pembangunan UIN Jakarta adalah madrasah berbasis Standar Nasional Pendidikan yang telah berhasil memperoleh nilai akreditasi dengan perolehan A dari awal akreditasi sampai saat ini. Penelitian ini dimulai dari bulan April 2018 – Juni 2019.

3. Sumber Data

Meskipun penelitian ini tergolong penelitian lapangan, namun demikian data yang diperlukan tidak hanya berasal dari lapangan, akan tetapi juga data tertulis untuk mendukung data lapangan. Dengan begitu sumber data primer yang peneliti gunakan adalah instrumen penilaian akreditasi, dokumen-dokumen yang terkait dengan Standar Nasional Pendidikan yang ada di madrasah seperti buku satu dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM), hasil wawancara dan observasi di lapangan. Adapun sumber skunder yang peneliti dapatkan berupa buku, jurnal maupun yang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

---

[56] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), Cet. Ke-9, h. 74.

[57] Nusa Putera, *Penelitian Kualitatif: Proses & Aplikasi*, (Jakarta: Indeks, 2011), 5.

[58] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 1.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik yang mengumpulkan data dan dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang dibuat oleh manusia dalam dokumen yang relevan dengan tujuan penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen instrumen penilaian akreditasi SMP/MTs tahun 2017 BAN-S/M yang dikeluarkan oleh BSNP, dokumen berupa draf/tulisan yang sudah dijadikan buku oleh madrasah Pembangunan UIN seperti STATUTA[59] dan ORTALA,[60] Undang-undang tentang SNP, halaman *web* madrasah Pembangunan UIN, foto dan lainnya. Dokumen juga berguna sebagai catatan historis dan juga dapat diperlakukan sebagai pelaku dalam kondisi tertentu.[61] Dokumen yang terpenting peneliti teliti di sini adalah buku satu madrasah, Evaluasi Diri Madrasah /EDM dan tentang dokumen akreditasi madrasah yang terkait dengan delapan Standar Nasional Pendidikan.

b. Hasil Wawancara

Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif adalah wawancara. Karena, wawancara memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari para responden dalam berbagai situasi dan konteks. Meskipun demikian, wawancara perlu digunakan dengan berhati-hati karena perlu ditriangulasi dengan data lain seperti

[59] Anggaran dasar suatu organisasi

[60] Organisasi dan Tata Laksana

[61] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, (Jakarta: PT Indeks, 2012), h. 81.

observasi/studi lapangan dan studi dokumentasi atau lainnya.[62]

Di sini peneliti akan mewawancarai beberapa orang yang terkait dengan orang yang dianggap penting untuk memberikan informasi, diantaranya sebagai berikut:

1) Penjamin mutu internal madrasah terkait komitmen mutu dan sistem penjamin mutu madrasah.
2) Kepala madrasah terkait kebijakan manajemen madrasah, strategi dan evaluasi penerapan SNP dan terutama standar sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan.
3) Wakil Kurikulum terkait dengan strategi dan evaluasi penerapan standar isi, proses, kompetensi lulusan dan penilaian pendidikan.
4) Guru terkait penerapan kegiatan pembelajaran di kelas.
5) Tata Usaha terkait tenaga kependidikan.
6) Komite madrasah dan orang tua terkait respon madrasah terhadap kebutuhan masyarakat.
7) Siswa terkait kepuasan dalam sistem layanan pendidikan, proses pembelajaran, sarana prasarana, ekstrakurikuler yang ada di madrasah.

c. Hasil Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan mengadakan kunjungan langsung ke tempat penelitian. Menurut Samiaji Sarosa mengenai observasi, secara umum pengamatan saja dengan pengamatan partisipatif mengandung hal yang berbeda. Pengamatan mengandung arti peneliti mengamati partisipan sebagai pihak luar, artinya peneliti dapat saja hadir dalam keseharian para partisipan namun peneliti tidak mengambil

[62] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, h. 65.

peran apapun dalam kegiatan para partisipan. Sedangkan pengamatan partisipatif mengandung arti bahwa peneliti juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari para partisipan.[63]

Di sini peneliti hanya mengamati semi partisipan sebagai pihak luar, yang mengamati kesesuaian data dengan proses SNP yang dilakukan oleh madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Observasi ini dimulai oleh peneliti sejak bulan September 2018 sampai Juni 2019.

d. Analisis Data

Analisis data adalah tahap terakhir peneliti, peneliti menggunakan data yang diperoleh dari perpustakaan tentang standardisasi dan mutu serta dikaitkan ilmu pendidikan, manajemen, sosiologi mengenai standardisasi pendidikan yang terjadi pada masyarakat dan madrasah. Data perpustakaan ini dijadikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan terhadap keabsahan data yang diperoleh dari penelitian lapangan seperti implementasi dan evaluasi madrasah terhadap SNP serta keabsahan data akreditasi madrasah yang delapan indikator, setelah itu data-data yang diperoleh diolah terlebih dahulu. Setelah data yang diperoleh dari lapangan diolah barulah dilakukan analisis untuk mengungkap pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analitis. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan dalam penganalisaan hasil penelitian berupa "Standar Nasional Pendidikan dan Kualitas Madrasah (Studi Dampak Standardisasi terhadap Mutu Madrasah)."

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisa data Model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman

[63] Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar*, h. 77.

menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.[64] Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.[65]

Setelah peneliti mereduksi data yang berarti merangkum semua yang telah peneliti dapatkan data baik dari lapangan maupun dari kajian pustaka, lalu peneliti menyajikan data yang terkait dengan standardisasi pendidikan dan mutu madrasah setelah itu ditarik kesimpulan dan menggabungkan data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh yang disebut dengan triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan dari banyak metode atau mencampurkan berbagai metode seperti studi dokumentasi, wawancara dan observasi, yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Triangulasi digunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait misalnya bagaimana sudut pandang standardisasi pendidikan menurut pemerintah, madrasah dan masyarakat dari perspektif yang berbeda.

I. Sistematika Penulisan

Tesis terdiri dari lima bab. Dua bab pertama berisi pendahuluan dan kerangka teori. Dua bab berikutnya merupakan inti dari hasil penelitian, dan satu bab terakhir merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Berikut akan ditampilkan mengenai poin-poin pembahasan dalam setiap babnya.

---

[64]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: IKAPI, 2013), h. 337.

[65]Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, h. 338.

Bab pertama, berisi hal-hal yang mendasari penelitian ini, dijabarkan berupa poin-poin masalah yang muncul dalam latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, signifikansi dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Penelitian ini akan dipandu oleh pertanyaan dari rumusan masalah. Dalam bagian metodologi penelitian, khususnya dalam bagian pengumpulan data. Saya melakukan deskripsi tentang perjalanan penelitian saya baik berupa studi kepustakaan hingga studi lapangan.

Bab kedua, berisi kerangka teori. Teori ini merupakan penjabaran terkait dengan teori-teori yang akan digunakan pada penulisan di bab-bab selanjutntya. Dalam bab ini terdiri atas empat sub-bab utama yang merupakan penjabaran dari perdebatan antara standardisasi pendidikan dan kualitas madrasah. Sub-bab pertama berisi tentang sistem penjaminan mutu madrasah yang menjelaskan tiga bagian yaitu konsep *Quality Control* (QC), *Quality Assurance* (QA) dan *Total Quality Management* (TQM). Dilanjutkan oleh sub-bab tentang manajemen pendidikan bermutu, mutu madrasah sebagai aspek akuntabilitas publik, mutu madrasah dan akreditasi sebagai tolok ukur.

Bab ketiga, peneliti akan memapaparkan hasil penelitian di MTs Pembangunan UIN Jakarta yang dimulai dari membangun madrasah bermutu melalui *standard based education*, perjalanan menuju madrasah bermutu, standar mutu pendidikan madrasah Pembangunan UIN Jakarta, akreditasi madrasah dan sistem kebijakan mutu madrasah Pembangunan UIN Jakarta.

Bab keempat, akan dianalisis mengenai Standar Nasional Pendidikan dan pengembangan mutu madrasah, sistem penjamin mutu internal madrasah Pembangunan UIN Jakarta, konsistensi mutu dan instrumen penilaian akreditasi BAN/S-M, implementasi SNP pada madrasah Pembangunan UIN Jakarta yang akan dianalisis dengan delapan indikator yaitu standar kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan

prasarana, pengelolaan, pembiayaan pendidikan dan penilaian pendidikan, respon MP terhadap kebutuhan eksternal, mutu madrasah bebasis sistem penjamin mutu eksternal dan MP sebagai madrasah berdaya saing.

Bab lima yaitu penutup, peneliti akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai dampak standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah dan hal yang terkait dengan tema tersebut.



BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU MADRASAH

Pada Bab II membahas secara lebih mendalam untuk memperjelas konsep sistem penjaminan mutu madrasah yang memuat konsep sistem penjaminan mutu pendidikan berbasis standar. Konsep penjaminan mutu berdasarkan standar ini adalah standardisasi mutu berskala nasional; akreditasi BAN-S/M, kepuasan pelanggan sebagai pengguna jasa pendidikan dan kesesuaian dengan penerapan yang ada di madrasah dalam menjamin mutu pendidikan. Konsep mutu, penjaminan mutu dan prakteknya pada dunia industri sudah jelas. Namun ketika konsep mutu dan penjaminan mutu yang berasal dari dunia industri tersebut akan dikonstruksi pada dunia pendidikan timbul beberapa problem yang perlu didiskusikan secara mendalam. Diskusi tersebut berkaitan dengan variasi konsep mutu, konsep *Quality Control* (QC), konsep penjaminan mutu atau *Quality Assurance* (QA), dan konsep *Total Quality Management* (TQM). Semua konsep ini akan dikaitkan dengan standardisasi pendidikan, yaitu Standar Nasional Pendidikan di Indonesia.

A. Konsep Standar Mutu Madrasah

Dalam memberikan definisi mutu, maka perlu dipahami terlebih dahulu perbedaan antara tiga macam terminologi yang berkaitan dengan mutu, yaitu pengawasan/proses mutu (*Quality Control*), jaminan mutu (*Quality Assurance*), dan mutu total (*Total Quality*).[1] Konsep standar mutu madrasah ini berangkat dari standar konsep pengendalian mutu berupa suatu proses yang berkualitas (QC), penjaminan mutu dalam perspektif pelanggan (QA), dan konsep *total quality management* (TQM), sehingga menghasilkan konsep standar mutu madrasah berdasarkan Standar

[1] Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, (London: Kogan, 1993), h. 16-18.

Nasional Pendidikan. Mutu pendidikan yaitu pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh masing-masing madrasah atau sebuah institusi sebagai sasaran atau target yang ingin dicapai dalam pendidikan.

Kualitas yang perlu ditingkatkan oleh madrasah dan sebuah institusi pendidikan ditafsirkan secara beragam oleh para ahli, antara lain pertama, Crosby berpendapat bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan tuntutan pelanggan atau kesesuaian dengan yang distandarkan atau disyaratnya.[2] Jika melihat konteks dunia pendidikan di Indonesia sesuatu yang distandarkan atau disyaratkan oleh pemerintah dalam pendidikan tertuang dalam sistem pendidikan nasional yaitu Standar Nasional Pendidikan. Menurut Crosby madrasah yang bermutu adalah madrasah yang mampu memenuhi SNP bahkan melampauinya. Kedua, J Joseph kualitas adalah ketepatan untuk dipakai, guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.[3] Di sini Joseph menguatkan bahwa mutu bukan hanya sesuai dengan yang distandarkan, namun selain dengan sesuai dengan yang disyaratkan madrasah juga mampu dalam memenuhi kebutuhan pelanggan sehingga pelanggan merasa puas, pelanggan di dalam pendidikan adalah masyarakat. Ketiga, Edward sallis menambahkan bahwa mutu adalah memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan.[4] Keempat, Daniel & Christopher berpendapat bahwa standardisasi pendidikan dapat didefinisikan sebagai metode kontrol mutu terhadap madrasah.[5] Standar pendidikan sangat diperlukan madrasah, karena pengukuran, penilaian dan evaluasi mengenai

---

[2] Philip B. Crosby, *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*, h. 17.

[3] J Joseph M. Juran, *Quality Planning and Analysis*, (New York: Mc. Graw Hill inc, 1993), h. 82

[4] Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*, h. 24.

[5] Daniel Lan Rubin & Christopher John Kazanjian, “Just Another Brick in The Wall: Standardization and the Devaluing of Education”,h. 94-108.

mutu bersifat hierarkis. Untuk mengetahui mutu madrasah maka harus menggunakan standar. Pengukuran berarti membandingkan pengamatan dengan kriteria/standar, penilaian terhadap mutu adalah interpretasi deskripsif terhadap pengukuran, sedangkan evaluasi adalah penilaian terhadap implikasi dari perilaku. Untuk itu, diperlukan standar/kriteria dalam pelaksanaan evaluasi mutu agar dapat membandingkan antara nilai kinerja dengan sebuah standar atau beberapa standar/kriteria yang sudah ditetapkan dengan hasil evaluasi yang dilakukan.[6]

1. *Quality Control* (QC)

Quality Control adalah mendeteksi dan menghapus komponen atau produk akhir yang tidak mencapai standar.[7] Agar produk yang dihasilkan selalu berkualitas, maka diperlukan adanya pengendalian kualitas dalam setiap proses produksinya.[8] Konsep pengendalian mutu meliputi teknik dan diagnostik dan kegiatan untuk memonitoring suatu proses dan meminimalisir penyebab ketidakpuasan kinerja untuk memperbaiki kerusakan.[9] Sistem pengendalian mutu secara umum merupakan kegiatan-kegiatan yang meliputi pengendalian proses melalui statistik, proses mengkaji kemampuan, analisis umpan balik dalam proses informasi dan mengkoreksi tindakan berkomunikasi secara efektif untuk meminimalisir ketidak normalan dalam suatu proses.

[6] Robert, E., Stake, *Standards-Based & Responsive Evaluation*, (California: SAGE Publications, 2004), h. 4.

[7] K.A. Rahman, "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2012,h. 229.

[8] Ayunita Kusuma Wardani, "Efektifitas Pelaksanaan *Quality Control* Pada Bagian Produksi PT Indohamafish di Pengambengan", *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2015.

[9] Lim Teow Ek dan Niew Bock Cheng, *Quality Management Systems*, Assessment to ISO 9000: 1994, (Singapore: Prentice Hall, 1995), h. 25.

Kontrol mutu merupakan konsep mutu yang berfungsi untuk memeriksa apakah produk atau pelayanan telah memenuhi standar atau belum. Sedangkan jaminan mutu merupakan konsep untuk menjamin bahwa produk atau pelayanan telah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan.[10] Singkatnya QC adalah suatu kegiatan untuk mempertahankan dan arahkan ke kualitas produk dan jasa dapat dipertahankan seperti yang direncanakan.[11]

QC dikenal juga dengan zaman inspeksi. Pada inspeksi ini apabila terjadi penyimpangan atribut produk yang dihasilkan dari atribut standar, departemen inspeksi tidak dapat mendeteksi apakah penyimpangan tersebut disebabkan oleh penyimpangan proses atau hanya karena penyimpangan yang bersifat kebetulan. Konsep mutu ini masih terbatas pada atribut yang melekat pada produk yang sedang dan telah diproduksi. Namun, mutu mulai dikendalikan melalui keterlibatan departemen produksi, tidak sekedar diinspeksi oleh departemen inspeksi pada akhir proses produksi. Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.[12]

Di dalam pendidikan diperlukan pengendalian mutu untuk memastikan bahwa proses yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bagi madrasah yang tidak memperhatikan pengendalian mutu, dalam jangka pendek madrasah tidak perlu

---

[10] Lailatul Maghfiroh, "Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Total Quality Management (TQM) di Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasyim Yogyakarta", *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, h. 27.

[11] Muhammad Syarif Hidayatullah Elmas, "Pengendalian Kualitas dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) untuk Meminimumkan Produk Gagal pada Toko Roti Barokah *Bakery*", *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, WIGA*, Vol. 7, Maret 2017, h. 15-22.

[12] Abdul Mannan, *Membangun Islam Kaffah*, (Penerbit Madina Pustaka, 2000), h. 152.

mengeluarkan biaya pengawasan mutu, tetapi dalam jangka panjang madrasah sulit memasarkan produk atau jasa dikarenakan tersaingi oleh lembaga lain yang sejenis, yang kualitas atau mutu produk atau jasanya lebih baik. Usaha pengendalian mutu merupakan usaha preventif (penjagaan) dan dilaksanakan sebelum kesalahan mutu produk atau jasa tersebut terjadi, melainkan mengarahkan agar kesalahan kualitas tersebut tidak terjadi di dalam lembaga yang bersangkutan.

Di Madrasah Pembangunan QC atau kualitas control terdapat dalam struktur organisasi yang terdapat dalam masing-masing indikator Standar Nasional Pendidikan dan semua guru serta staf terlibat dalam melaksanakannya. Ketika dalam proses pembelajaran atau pelayanan terdapat cacat, maka penangung jawab langsung mengambil tindakan dan evaluasi. Evaluasi di MP khususnya MTs Pembangunan diadakan selama satu minggu sekali, baik untuk pimpinan, guru dan staf. Setiap hari Rabu khusus dewan pimpinan baik direktur dan wakil, kepala TK, MI, MTs dan MA Pembangunan beserta wakil. Rapat diadakan secara tertutup hanya untuk pimpinan. Rapat terbuka untuk setiap satuan pendidikan diadakan setiap satu minggu sekali pada hari Jumat, yang dihadiri oleh kepala, wakil, dewan guru serta staf. Dengan adanya rapat satu minggu sekali maka di sini akan meminimalisir kesalahan yang ada pada proses pembelajaran dan pelayanan.

2. Penjaminan Mutu atau *Quality Assurance* (QA)

Penjaminan mutu dalam perspektif pelanggan adalah janji atau jaminan terhadap *stakeholders* dengan perpanjangan melalui publik, oleh karena itu lembaga harus memiliki sesuatu yang spesial tentang mutu yang akan diberikan kepada *stakeholders*. Jaminan mutu merupakan pendekatan yang dikembangkan oleh TQM dalam kaitan dengan proses, dengan asumsi jika suatu proses dilaksanakan dengan baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Franckman menegaskan bahwa penjaminan mutu adalah pengujian untuk mengontrol sistem mutu secara eksternal

kepada hasil lulusan atau alumni untuk memastikan perbandingan standar yang dirumuskan sesuai. Penjaminan mutu meliputi monitoring terhadap standar mutu yang dibuat dan peningkatan mutu yang berdasarkan keputusan yang permanen tentang produk dan pelayanan sesuai dengan persyaratan dan standar mutu.[13]

Penyelenggaraan pendidikan dengan produk yang dihasilkan adalah berupa jasa, maka pemahaman penjaminan mutu (*Quality Assurance*) pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga para *stakeholders* dan pihak-pihak lain yang berkepentingan mendapatkan kepuasan. Pemilihan dan penetapan standar mutu dilaksanakan berdasarkan sejumlah aspek yang disebut dengan butir-butir mutu, antara lain: kurikulum, sumber daya manusia, peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana akademik, pembiayaan dan lainnya.[14] Di Indonesia standar mutu yang digunakan adalah Standar Nasional Pendidikan.

Sejarah awal konsep penjaminan mutu pendidikan berasal dari penjaminan mutu perguruan tinggi yang tepatnya pada tanggal 18 September 1988 dengan pertemuan 14 Universitas di Eropa yang merupakan budaya/tradisi akademik, dialog intelektual dikalangan komunitas akademisi Eropa, di Bologna sebuah kota di Italia, yang telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan manajemen pengelolaan pendidikan tinggi yang modern dan selanjutnya menginspirasi konsep sistem penjaminan mutu dengan dirumuskan standar pendidikan universitas-universitas di Eropa. Ditahun yang sama konvensi negara-negara Arab dan Eropa juga melaksanakan pertemuan guna membahas

[13] Edgar Frackmann, *The German Experience*, in Craft Alma, Quality Assurance in Higher Education, Proceedings of an International Conference, (London: The Falmer Press, 1992), h. 48.

[14] Anang Dwi Putransu Aspanawa, "Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi", *An-Nisbah*, Vol. 01, No. 02, April 2015, h. 113.

penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di negara ASEAN penjaminan mutu pendidikan tinggi sejarah awal dibentuknya *ASEAN University Network-Board of Trustees* (AUN-BOT) pada tahun 1998 di kota Yogyakarta, dalam realisasi rumusan program pada tahun 1999 di Bangkok yang dikukuhkan sebagai tahun kualitas pendidikan ASEAN dan sekaligus dibentuk *ASEAN University Network Quality Assurance* (AUNQA) dengan gugus tugas tanggung jawabnya adalah untuk melaksanakan pengembangan dan merumuskan *Common Standard* pendidikan tinggi di negara-negara di ASEAN.[15] Di Indonesia secara formalnya istilah penjaminan mutu baru diimplementasikan sejak ditetapkan dan diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. QA dalam madrasah adalah kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan.

Di MTs Pembangunan UIN terdapat pula organisasi penjamin mutu yang disingkat P3JM (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu). P3JM berfungsi untuk menjamin mutu atau bisa disebut dengan QA di dalam konsep manajemen mutu. Di sini P3JM menilai setiap satu tahun sekali satuan pendidikan yang ada di Madrasah Pembangunan (MP). Sebelum MP diakreditasi, P3JM sudah terlebih dahulu menilai MP, sehingga MP saat ada penjaminan mutu dari luar, MP benar-benar siap dan maksimal untuk diakreditasi. Di dalam menjamin mutu MP, P3JM sudah memiliki instrumen dan standar mutu selain SNP dan Standar Internasional, sehingga proses penilaian internal penjamin mutu benar-benar dilaksanakan secara berkualitas.

[15] Anang Dwi Putransu Aspanawa, "Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi",h. 114.

3. *Total Quality Management* (TQM)

TQM pada mulanya ditemukan oleh William Edward Deming, melalui teorinya Deming menekankan perbaikan terus-menerus atau perbaikan berkelanjutan. TQM atau manajemen mutu terpadu dikembangkan secara serius sejak awal dekade 1990-an oleh para peneliti sebagai upaya mencari jawaban untuk pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan.[16] Konsep TQM secara umum lebih menitik beratkan pada filosofi manajemen yang berpartisipasi untuk mencapai kepuasan pelanggan terhadap kesesuaian sistem secara total melalui alat-alat, keahlian dan pelatihan.[17] TQM selalu merupakan fokus seluruh perusahaan pada memenuhi dan sering melebihi harapan pelanggan dan benar-benar mengurangi biaya yang disebabkan karena mutu yang jelek dengan membentuk sistem manajemen baru dan kultur perusahaan.[18] Konsep TQM merupakan sistem manajemen yang mengangkat mutu sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. Konsep TQM mengarah pada suatu pendekatan yang berusaha untuk mencapai daya saing organisasi yang optimal melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.[19] TQM dalam dunia industri juga lebih menitik beratkan keuntungan material atau profit, namun dalam konteks

[16] Edward Sallis, *Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*. Alih Bahasa: Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2008), h. 18.

[17] Abdur Rahman Ibrahim al-Juwaiber, Idāratu al judati al syāmilah hiya "falsafatu adārati al syārikati lil wushūli ila irdha'i 'āmili min khilāli barnamiji syāmilin min al adāwati wa al taqniyati wa al tadrīb", *Idāratu al-Judati al-Syāmilati*, h. 38.

[18] Gary Dessler, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Human Resource Management,* Edisi Bahasa Indonesia Jilid I, (Jakarta: PT Prenhallindo, 1997), h. 339.

[19] F. Tjiptono dan Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2003), edisi revisi, h. 4.

dunia pendidikan TQM lebih menekankan organisasi dan keuntungan non profit. TQM tidak hanya menekankan pada satu aspek standar dalam Standar Nasional Pendidikan, namun TQM menekankan pada keseluruhan aspek standar harus sesuai dengan standar mutu yang diinginkan.

TQM merupakan salah satu model yang saat ini banyak digunakan oleh madrasah dan juga sekolah di Indonesia untuk meningkatkan kualitas. TQM pada dasarnya merupakan salah satu model yang biasa digunakan di dunia bisnis untuk menjamin tercapainya target perusahaan dengan melibatkan paradigma mutu sebagai misi utama. Meskipun bukan satu-satunya model yang biasa diterapkan dalam pendidikan, TQM masih dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Dengan memposisikan TQM sebagai budaya mutu, maka pengelola pendidikan akan siap dengan pengembangan lembaga yang dipimpinnya menjadi lebih baik seiring tuntutan zaman.[20] Standar Nasional Pendidikan dapat dipadukan dengan konsep TQM. SNP sebagai arah atau acuan pendidikan untuk meningkatkan mutu, sedangkan TQM adalah salah satu model strategi madrasah untuk menjalankan SNP dengan baik. Diharapkan dengan model TQM ini madrasah dapat mencapai standar yang maksimal.

TQM merupakan sistem yang mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Penerapan TQM ini tidak terlepas dari biaya dan kualitas pelayanan. TQM sangat berkaitan dengan biaya dan kualitas pelayanan karena dengan peningkatan kualitas pelayanan maka madrasah dapat menekan biaya, terutama dalam mengurangi atau menghilangkan

[20] Ahmad Darmadji, “Pengembangan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Total untuk Meningkatkan Moral Bangsa”, *el-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume VIII, No. 1 Tahun 2015, h. 4.

pemborosan.[21] Hamid mengemukakan faktor-faktor TQM terdiri dari empat komponen utama, yaitu riset pasar tenaga kerja, desain proses pendidikan tinggi, operasional proses pendidikan tinggi, dan penyerahan lulusan yang kompetitif dan berkualitas ke pasar tenaga kerja.[22] TQM dikembangkan tidak hanya sekedar sebagai konsep yang menekankan pada kualitas produk akhir saja, juga mengutamakan kualitas proses, lingkungan kerja dan sumber daya manusianya.[23]

Peningkatan mutu pendidikan dalam pelaksanaanya perlu mendapat pengawasan yang intensif. Pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di sekolah/madrasah sebenarnya dapat diposisikan dalam upaya penjaminan mutu yang diimbangi dengan peningkatan mutu. Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur organisasi madrasah atau kepala madrasah dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu terkait dengan pemberdayaan anggota organisasi madrasah untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pendidikan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas organisasi melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*.[24] Manfaat TQM adalah

---

[21] Juditshira Lempoy, "Penerapan TQM terhadap Efisiensi Biaya dan Efektivitas Pelayanan Pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo", *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 September 2013, ISSN 2303-1174, h. 1157.

[22] Ahmad Hamid, "Aplikasi *Total Quality Management* (TQM) Pendidikan Tinggi dalam Rangka Pelayanan Pelanggan Mahasiswa Asing di International Islamic University Malaysia (IIUM)", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, h. 130.

[23] Suyitno, "Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Penerapan TQM", *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, h. 151.

[24] Miftakhul Munir, "Keberadaan *Total Quality Management* dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM dalam Pendidikan)", *Realita*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2018, h. 5.

memperbaiki kinerja manajerial dalam mengelola perusahaan atau madrasah agar dapat meningkatkan penghasilan perusahaan atau kualitas madrasah.[25] Menurut Desy dkk, praktik TQM mempunyai dampak penting terhadap kepuasan karyawan, yang artinya semakin baik penerapan praktik TQM yang dijalankan oleh perusahaan atau madrasah akan meningkatkan kepuasan pelanggan atau kerja karyawan.[26]

Mutu madrasah juga sering dikaitkan dengan profesionalisme manajemen. Profesionalisme manajemen berarti madrasah mampu bersikap profesional dalam manajemen yang diterapkan untuk memuaskan pelanggan pendidikan. Madrasah yang berkualitas atau bermutu adalah yang mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan standar dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.[27] Kata kualitas juga sering disebut mutu. Mutu berasal dari kata latin, yakni *qualitas* yang selanjutnya masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Prancis kuno, yakni *qualite*. Kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mempunyai arti tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar, derajat atau taraf.[28]

Madrasah bermutu sangat erat kaitannya dengan keterlibatan masyarakat di dalamnya, karena masyarakat adalah

---

[25] Andi Maddeppungeng, dkk., "Pengaruh TQM (*Total Quality Mangement*) dan SCM (*Supply Chain Management*) terhadap Daya Saing pada Industri Konstruksi, *Jurnal Fondasi*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2016, h. 87.

[26] Desy Eka Kartika Sari, dkk., "Pengaruh *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Kepuasan Kerja", *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5 No. 1, Januari 2018, h. 20.

[27] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 300.

[28] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 467.

pelanggan pendidikan, dan madrasah adalah pasarnya. Mutu sangat menuntut komitmen pada kepuasan pelanggan, yaitu masyarakat. Menurut Hoy dan Miskel, madrasah bermutu adalah madrasah yang efektif, yang terdiri dari tatanan *input*, proses dan *output*.[29] Dalam lingkungan sistem pendidikan, khususnya madrasah, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan hal yang sangat wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik.

Di samping itu Philip Crosby memperkenalkan empat belas langkah mencapai kualitas[30], yaitu *management commitment*[31], *quality improvement team*[32], *quality measurement*[33], *the cost of quality*[34], *quality awareness*[35], *corrective action*[36], *zero defects planning*[37], *supervisor training*[38],

---

[29] Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. (New York: McGraw-Hill, 2008), h. 91.

[30] Philip B. Crosby, *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*, h. 267.

[31] Inisiatif kualitas harus disetujui dari pimpinan oleh senior management.

[32] Semua ikut berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas

[33] Pengukuran kualitas, yaitu di dalam pengukuran terdapat data dari hasil inspeksi dan laporan tes, data statistik dan data umpan balik dari pelanggan.

[34] Biaya kualitas yang terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan biaya kesalahan, pekerjaan ulang, pembatalan, inspeksi dan pengujian.

[35] Upaya menumbuhkan kesadaran pada setiap orang di dalam organisasi tentang kebutuhan program peningkatan kualitas.

[36] Supervisor memerlukan kerjasama dengan stafnya guna mengurangi kualitas yang buruk.

[37] Program ini diperkenalkan dan dibimbing oleh *quality improvement team*. Tim tersebut bertanggung jawab atas implementasi program ini.

[38] Supervisor sangat berperan dalam proses peningkatan dan pelatihan ini dibutuhkan oleh mereka.

zero defects day[39], *goal setting*[40], *error-cause removal*[41], *recognition*[42], *quality councils*[43], *do it over again.*[44]

Dalam konteks pendidikan, mutu atau kualitas dikaitkan dengan kinerja seluruh jajaran yang ada di madrasah, sehingga kualitas pendidikan sangat bergantung pada efektivitas pendidikan dan pembelajaran dalam sebuah institusi, oleh karenanya mutu dalam pendidikan mencakup *input*, proses dan *output* pendidikan.[45] Mutu atau kualitas sekolah juga sering dikaitkan dengan profesionalisasi manajemen. Sekolah yang berkualitas atau bermutu adalah yang mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan standar.[46]

Dalam lingkup sistem pendidikan, khususnya pendidikan madrasah, tuntutan akan penjaminan mutu merupakan gejala yang sangat wajar, karena penyelenggaraan pendidikan yang bermutu merupakan akuntabilitas publik. Setiap komponen pemangku kepentingan pendidikan orang tua, masyarakat, dunia kerja, pemerintah dalam peranan dan kepentingannya masing-masing

[39] Ini merupakan ide untuk menetapkan setiap hari adalah hari tanpa kesalahan dalam bekerja.

[40] Perlu ditetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur.

[41] Dengan menetapkan standar maka komunikasi sampai pada garis manajer yang tepat.

[42] Pengakuan atas prestasi dan kontribusi mereka.

[43] Menetapkan adanya dewan kualitas, dimana perannya untuk memonitoring efektivitas program dan meyakinkan bahwa proses peningkatan terus berlanjut.

[44] Kerjakan secara terus-menerus.

[45] Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Konsep dan Pelaksanaan, Buku I* (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h. 26.

[46] H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 300.

memiliki kepentingan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Mutu pendidikan juga telah dijelaskan di dalam nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai ajaran Islam adalah nilai-nilai yang bersumber pada wahyu dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta nilai-nilai lain yang tidak bertentangan dengan kebenaran ajaran Islam. Islam adalah agama praksis atau berkaitan dengan pekerjaan. Inti ajarannya adalah seorang hamba mendekati dan memperoleh *ridha* melalui kerja atau amal *shaleh* dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya. Nilai-nilai tersebut sepatutnya menjadi kekuatan pendorong dan etos kerja bagi peningkatan mutu pendidikan Islam (madrasah). Di dalam Alquran dijelaskan dalam surah an-Nahl ayat 90 bahwa seseorang harus bekerja secara maksimal atau optimal serta komitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin, selaras dengan ajaran ihsan. Yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (QS. an-Nahl ayat 90).[47]

Pendidikan Islam yang bermutu juga dijelaskan oleh Haidar Putra Daulay, pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani.[48]

[47] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2014), h. 277

[48] Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 31.

Imam al-Zarkashi menambahkan bahwa tujuan pendidikan adalah mempengaruhi orang menuju kesempurnaan jasmani akal dan akhlak.[49] Disinilah para ulama membentuk berbagai cara dan strategi untuk terus menyiarkan agama Allah agar pendidikan Islam menjadi pendidikan yang bermutu. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rad/13: 11 sebagai berikut:

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوۡمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمۡۗ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوۡمٖ سُوٓءٗا فَلَا مَرَدَّ لَهُۥۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَالٍ ١١

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.[50] Sa'id Aqiel Siradj mengatakan, "ayat tersebut mengandung nilai yang sangat signifikan dan memotivasi umat Islam untuk selalu berpacu dengan segala perubahan dan kemodernan sepanjang zaman".[51]

Menurut ayat di atas manusia diperintahkan untuk berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas yang ada pada dirinya, begitupun halnya di dalam pendidikan. Kualitas pendidikan juga bisa diartikan sebagai evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan mengembangkan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat

[49] Imam al-Zarkashi, *al-Tarbiyah wa al-Ta'lim*, (Ponorogo: Gontor Press, 2005), edisi revisi, h. 17.

[50] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident, 2014), h. 250

[51] Sa'id Aqiel Siradj dkk., *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 33.

yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien yang membiayai proses atau *output* dari proses pendidikan.[52]

Sedangkan dalam Permendiknas No. 63 tahun 2009, dijelaskan bahwa, mutu pendidikan adalah tingkat kecerdasan kehidupan bangsa yang dapat diraih dari penerapan sistem pendidikan nasional. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 disebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan oleh satuan atau program pendidikan ditujukan untuk memenuhi tiga tingkatan acuan mutu, yaitu memenuhi sistem penjaminan mutu, secara bertahap memenuhi SNP dan secara bertahap memenuhi standar mutu pendidikan di atas SNP.[53] Madrasah bermutu menurut Mustaqim adalah madrasah yang dapat merumuskan visi, misi dan target mutu yang jelas dipahami semua pihak yang terlibat pimpinan, guru, karyawan, peserta didik, orang tua dan komite madrasah.[54]

Adapun yang menjadi acuan standar pendidikan dasar dan menengah, adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam Bab II tentang lingkup, fungsi dan tujuan. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan tentang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi, standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Pada pasal 54 ayat 4 dinyatakan bahwa pengelolaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan kepada rapat dewan pendidik, dan komite sekolah/madrasah. Dengan mengacu pada standar ini jelaslah bahwa pengelolaan

---

[52] Charles Hoy, *Improving Quality in Education*, (London: Falmer Press), h. 10

[53] Ridwan Abdullah Sani dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 17

[54] Mustaqim, “Sekolah/Madrasah Berkualitas dan Berkarakter”, *Jurnal Nadwa*, Vol. 6 Nomor 1, Mei 2012, h. 152

pendidikan pada madrasah merupakan bagian dari standar pengelolaan dengan melibatkan komite madrasah yang terdiri dari unsur-unsur di dalamnya, seperti *stakeholders*, orang tua siswa, dan masyarakat. Pengelolaan pendidikan juga harus sejalan dengan standar atau mutu yang telah ditetapkan.

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah NKRI.[55] Proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi diri dan evaluasi eksternal terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang, baik itu satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut dengan akreditasi sekolah/madrasah.[56] Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Adapun tujuan dilaksanakannya akreditasi sekolah/madrasah adalah untuk memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah tentang program yang dilaksanakannya sesuai dengan SNP, memberikan pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan berdasarkan

[55]Nasyirwan, "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan", *Manajer Pendidikan*, Vol. 9, No. 6, November 2015, h. 725.

[56] SNP meliputi delapan standar yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.

SNP dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik.[57]

Sumber daya manusia yang bermutu dapat diperoleh melalui sistem pendidikan yang bermutu pula, yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai dan menghormati tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu juga memiliki keimanan dan ketakwaan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian. Kualitas SDM yang diharapkan tersebut masih jauh dari produk pendidikan tinggi kita. Dalam berbagai penelitian internasional seperti yang dilaksanakan oleh majalah *ASIA WEEK* beberapa tahun lalu menunjukkan betapa mutu pendidikan tinggi Indonesia di kawasan Asia/Pasifik tidak menggembirakan. Terlebih mutu pendidikan di Indonesia pada tingkat madrasah, baik madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.[58]

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dapat dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi pendidikan. Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang berkualitas, diantaranya pengaruh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan sistem penilaian yang valid, obyektif dan tegas. Oleh karena itu perwujudan pendidikan nasional yang bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang memenuhi standar, pendidik dan tenaga kependidikan yang

[57] Guru Update, https://www.guru-up.date/2016/03/pengertian-tujuan-pelaksanaan-manfaat-hasil-akreditasi-sekolah.html, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pkl.10.12.

[58] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 302.

memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang memenuhi standar. Karena, bermutu tidaknya sebuah madrasah akan ada keterkaitan dari setiap standar. Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas pendidikan diantaranya adalah: akreditasi sekolah, program kualifikasi dan sertifikasi guru, dan pengelolaan sekolah dengan manajemen mutu terpadu.

Sejarah bangsa Indonesia sudah mengalami berbagai model pendidikan seperti pendidikan Hindu-Budha, pendidikan Islam, pendidikan zaman penjajahan, dan pendidikan zaman setelah kemerdekaan. Pendidikan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk mempertahankan budaya dan meningkatkan sumber daya manusia menuju sebuah kemajuan.[59] Menurut James G. Gee pendidikan juga berfungsi sebagai proteksi dan memelihara manusia dalam progesifitas dan penanaman ideologi suatu bangsa.[60]

Pendidikan yang bermutu juga sangat dipengaruhi oleh paradigma yang dipilih oleh suatu negara, misalnya dalam sistem pendidikan Islam, maka asas yang menjadi paradigma pendidikan adalah akidah Islam. Seperti yang dikemukakan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani bahwa kurikulum pendidikan wajib berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi dan metode pengajaran pendidikan disusun agar tidak menyimpang dari landasan tersebut.[61] Di Indonesia umumnya masyarakat beragama Islam, maka paradigma yang mayoritas diambil adalah berdasarkan Alquran dan Hadis, walaupun Indonesia bukan menganut negara

[59] Abdul Mujib Syadzali, *Pesantren Perkotaan: Pergumulan Tradisi dan Modernitas*, (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), h. 30.

[60] James G. Gee, "A Proposed Social Policy for Secondary Education", *Peabody Journal of Education*, Vol. 11, No. 2, September Tahun 1933, h. 71-77.

[61] Allāmah asy-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, Nizhām al-Islām Mu'tamadah, (Min Mansyurāt Hizb at-Tahrīr, 2001), h. 124.

Islam, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa asas-asas dalam mendirikan pendidikan sebagian besar mengambil paradigma pendidikan Islam. Seperti halnya madrasah yang merupakan sekolah berciri khas Islam.

Madrasah berasal dari kata bahasa Arab yang merupakan *isīm*, makna dari kata "*darasa*" yang berarti tempat duduk untuk belajar, dan dapat berubah menjadi "*mudarrisūn*" *isīm fāil* dari kata "*darrasa*" (*mazīd tasydīd*) yang artinya pengajar. Sebelum munculnya lembaga pendidikan yang bernama madrasah, pendidikan sebenarnya telah dilaksanakan baik di dalam rumah, halaman, surau, masjid maupun sanggar rumah guru, dengan tujuan untuk dapat mengamalkan ajaran agama dengan baik dan benar. Pendidikan secara formal dalam dunia Islam baru muncul setelah bangkitnya madrasah. Kelahiran madrasah seiring dengan perkembangan Islam dan terbentuknya masyarakat yang bertambah luas.[62] Seiring berjalannya waktu madrasah juga dikenal sebagai sekolah yang berciri khas Islam.

Namun madrasah dalam bentuknya yang kita kenal saat ini secara *harfiah* berasal dari Bahasa Arab yang artinya sama atau setara dengan kata Indonesia yaitu sekolah. Madrasah di sini kemudian memiliki konotasi tersendiri, di mana anak memperoleh pembelajaran agama di dalamnya. Madrasah inilah yang tadinya disebut sebagai pendidikan keagamaan dalam bentuk belajar mengaji Alquran, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis, terus ke pengajaran tauhid, tafsir, hadis, *tarikh* Islam dan Bahasa Arab serta masuk pula pelajaran umum dan keterampilan.[63]

---

[62] Armai Arief, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik*, (Bandung: Angkasa, 2004), Cet. Ke-1, h. 55.

[63] Muhammad Kholid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru*, (Jakarta: Departemen Agama RI), h. 62.

Lembaga pendidikan madrasah ini hadir di tengah-tengah dunia pendidikan Islam di Indonesia, terutama di luar jawa karena berbagai dorongan dan alasan. Diantara dorongan dan alasan tersebut adalah sebagai manifestasi dan realisasi cita-cita pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia, dan sebagai salah satu usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren yang dipandang tidak memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan kerja, seperti lulusan sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah Belanda, serta karena adanya sikap sementara umat Islam yang lebih condong mengikuti sistem pendidikan ala Barat yang lebih memungkinkan anak-anak maju dalam ilmu ekonomi dan teknologi.[64] Dapat dikatakan madrasah lahir mengadopsi sistem pendidikan Barat secara manajemen, akan tetapi dalam kurikulum memadukan antara pelajaran umum dan agama.

Madrasah adalah lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran agama Islam pada tingkat rendah dan menengah. Pendidikan madrasah ini sudah menyerap sistem pendidikan modern, baik pengelolaannya maupun proses pembelajaran serta materi pelajaran yang bukan saja belajar agama tetapi juga belajar ilmu-ilmu umum. Pendidikan madrasah telah ada pada awal-awal kemerdekaan yang di dalam kurikulum pembelajarannya, di samping memberikan mata pelajaran agama juga memberikan mata pelajaran umum dan sifatnya berupa klasikal atau berjenjang.[65]

Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk. mengemukakan, pendidikan agama Islam adalah pendidikan nilai dan juga pendidikan moral. Artinya, siswa dididik di madrasah agar memiliki kualitas moral

---

[64] Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 154.

[65] Hasbi Indra, *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*, (Jakarta: PT Mutiara Kalam, 2005), h. 203.

dan akhlak yang baik dan terpuji, dimana hal itu hanya bisa diperoleh melalui pendidikan agama bukan pendidikan yang lainnya. Dengan demikian, konsep pembelajaran di madrasah senantiasa harus diarahkan pada perwujudan nilai-nilai ke-Islaman dalam seluruh totalitas aktivitas madrasah oleh peserta didiknya guna mencapai pendidikan nilai dan moral yang sesuai dengan ajaran Islam.[66] Banyak madrasah di Indonesia yang menanamkan pendidikan nilai dan moral melalui pembiasaan, seperti pembiasaan akhlak dan ibadah, sehingga dengan adanya pembiasaan diharapkan menjadi karakter yang baik, karena mula-mula kita membuat kebiasaan dan dari kebiasaanlah kita membuat karakter anak. Pembiasaan ini pun akhirnya diikuti oleh sekolah umum, seperti terbiasa salam kepada guru ketika bertemu, terbiasa dhuha dan membaca Alqur'an sebelum pembelajaran dan sebagainya. Pembentukan konsep pendidikan karakter salah satunya adalah agama. Agama selalu dipertanyakan dan berpengaruh serta memiliki peran pada setiap aspek kehidupan manusia. Madrasah adalah suatu produk yang berasal dari agama Islam sehingga hasil yang diharapkan dari alumni madrasah salah satunya adalah memiliki karakter yang berpedoman kepada Nabi Muhammad. Hubungan antar agama dan juga hubungan antar pemeluk agama memberi warna tersendiri seiring dengan perkembangan sejarah dan peradaban umat manusia, maka madrasah harus mampu berubah untuk terus meningkatkan mutu pendidikan Islam yang lebih baik.[67] Hasan al-Bannā berpendapat bahwa kunci dari perubahan sosial adalah dengan akhlak.[68]

---

[66] Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk., *Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 34.

[67] Marzuki Wafi, "Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan", *Jurnal Pendidikan Karakter,* Tahun 2013, Nomor 1, Februari.

[68] Hasan al-Bannā, *Majmū'ah Rasāil*, (Iskandariyah: Darul al-Da'wah,1990), h. 80.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal Islam, sebenarnya mempunyai banyak potensi dan keunikan. Sebagai lembaga pendidikan yang berdiri dan lahir dari masyarakat, keberadaan madrasah sangat penting dan diperlukan masyarakat, terutama berkaitan dengan perannya dalam meningkatkan sumberdaya manusia dan untuk memenuhi keperluan jenjang pendidikan formal bagi masyarakat. Hal ini tidak terlalu berlebihan, mengingat biaya pendidikan di madrasah dari tinjauan ekonomis, memerlukan biaya pendidikan yang relatif lebih terjangkau dibandingkan dengan lembaga pendidikan di luar madrasah. Namun demikian, bukan berarti madrasah tidak mengalami kesulitan dan berbagai problem, terutama terkait dengan pembiayaan. Secara sosiologis, hampir sebagian besar orang tua murid di madrasah berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Hanya pada madrasah ibtidaiyah favorit saja yang orang tua muridnya berlatar ekonomi menengah ke atas.[69]

Konsep madrasah unggulan atau madrasah model dapat disebut juga sebagai madrasah yang bermutu. Mutu merupakan istilah yang dinamis yang terus-menerus bergerak, jika bergerak maju dan ada peningkatan dikatakan mutunya bertambah baik, sebaliknya jika bergerak mundur atau terdapat ketidak sesuaian terhadap program yang dijalankan dapat dikatakan mutunya menurun. Mutu juga dapat berarti *superiority* atau *excellence* yaitu melebihi standar umum yang berlaku. Sesuatu dikatakan bermutu jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda yang dikehendaki dengan maksud dari orang yang menghendakinya. Dalam pengelolaan suatu unit pendidikan, mutu dapat dilihat dari masukan, proses dan hasil. Masukan meliputi siswa, tenaga pengajar, administrator, dana, sarana, prasarana, kurikulum, buku-buku perpustakaan, laboratorium, dan

[69] Moh. Miftahul Choiri, "Pemberdayaan Madrasah dan Standardisasi Pendidikan", *Kodofikasia*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2011, h. 125.

alat-alat pembelajaran, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Proses meliputi pengelolaan lembaga, kegiatan pembelajaran, interaksi akademik, seminar, dialog, penelitian, wisata ilmiah, evaluasi dan akreditasi. Hasil meliputi lulusan, penerbitan-penerbitan, temuan-temuan alamiah dan hasil-hasil kinerja lainnya.[70]

Penyelenggaraan pendidikan bermutu memang membutuhkan dana, tanpa adanya dana tidak dapat diselenggarakan pendidikan yang dimaksud. Namun dana bukan satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan usaha penyelenggaraan pendidikan mutu. Mutu akan tergantung pada tiga kunci, yaitu sistem, keahlian, dan moral pelaksananya. [71] Terlebih pada abad 21 ini terjadi transformasi besar pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang didorong oleh perkambangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, perubahan demografi, globalisasi dan lingkungan. Adanya perubahan itu telah memicu perubahan pada lingkungan madrasah yang begitu cepat dan menuntut kepada profesionalitas guru serta manajemen madrasah yang profesional.[72]

Kesadaran bahwa pendidikan harus senantiasa tanggap terhadap kemajuan telah mendorong para ahli dan pengambil keputusan di bidang pendidikan untuk terus menerus mengadakan pembaharuan. Pembaharuan pendidikan secara langsung dimaksudkan untuk memecahkan problema madrasah.[73] Berkaitan dengan hal ini A. Malik Fadjar berpendapat bahwa terdapat tiga

---

[70] Mastuhu, *Menata Ulang Pendidikan Nasional Abad 21,* (Jakarta: INIS, 2002), h. 22

[71] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), h. 51.

[72] A. Hargreavest, "Mentoring in the New Millenium", *Proquest Education Journals*, Vol. 39, No. 1 (2000), h. 50-56.

[73] Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*, (Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2000), Cet. Ke-1, h. 99.

tantangan berat yang sedang dihadapi saat ini: pertama, bagaimana mempertahankan dari serangan krisis dan apa yang kita capai jangan sampai hilang. Kedua, kita berada dalam suasana global di bidang pendidikan. Kompetisi adalah suatu yang wajib, baik kompetisi dalam skala regional, nasional dan internasional. Ketiga, melakukan perubahan dan penyesuaian sistem pendidikan nasional yang mendukung proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan atau keadaan daerah dan peserta didik serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.[74]

Dalam Sistem Pendidikan Nasional, madrasah menghadapi permasalahan dan tantangan sekaligus, terutama dalam merespon perkembangan zaman. Pada awalnya, madrasah tumbuh dan berkembang dengan karakteristiknya yang khas dan berbeda dengan sekolah. Madrasah dibangun oleh individu dan masyarakat Muslim sebagai wujud kesadaran dalam melestarikan ajaran agama. Dengan demikian, setiap lulusan madrasah adalah mereka yang memiliki pengetahuan yang kuat terhadap ilmu agama. Dalam perkembangannya, madrasah terpaksa menerima modernisasi seiring dengan perubahan zaman. Dampaknya adalah pergeseran paradigma yang tidak dapat dihindari dalam kerangka memenuhi kebutuhan dan tuntutan perubahan. Dalam sistem pendidikan Indonesia, madrasah kemudian mengubah kurikulumnya yang pada awalnya sangat kental aroma kegamaannya dengan mengadopsi mata pelajaran umum, seperti Bahasa Indonesia, Berhitung, Sejarah, dan Ilmu Bumi hingga integrasi ke dalam Sisdiknas.[75]

---

[74] Muh. Idris, *Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam A. Malik Fadjar*, (Semarang: UM Press, 2012), h. 53.

[75] Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk., *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2010), h. xi.

Pada saat memasuki era orde baru, dunia kependidikan di Indonesia sudah berkembang dalam sistem yang dualistik antara pendidikan umum atau sekolah (nasional) di satu pihak dan pendidikan agama Islam di antaranya madrasah di lain pihak, dengan posisi pendidikan umum jauh lebih dominan. Meskipun dalam kenyataannya terjadi rekonsiliasi dalam formula Negara yang berdasarkan Pancasila, tetapi implikasi dualisme ideologis itu terhadap dunia kependidikan tampaknya tidak bisa dihapuskan dalam masa pendek.[76]

Jika melihat aspek historisitasnya, munculnya problem dalam dunia pendidikan di Indonesia akibat dari kebijakan "deislamisasi" kolonialisme Barat yang berlangsung sekian lama. Baik, dalam bentuk sekularisme maupun melalui kebijakan yang ketat terhadap segala bentuk pengembangan aspek keagamaan (Islam).[77] Terjadi problem tersebut dalam dimensi pendidikan agama dapat dipahami sebagai bagian dari kegagalan para pemikir keagamaan dalam mengurai problem umat. Hal ini sangat berkaitan langsung dengan ideologi keagamaan yang dianut oleh umat beragama. Sebab problem pendidikan agama hanyalah implikasi dari cara pandang masyarakat terhadap kenyataan yang ada.[78]

Usaha untuk memadukan sistem pendidikan yang dualistik bukan merupakan usaha yang baru sama sekali. Usaha tersebut sudah dimulai sejak kurang lebih pada abad ke-19 ketika gerakan modernisme Islam mulai berkembang di Indonesia. Pada usaha memperbaharui pendidikan Islam dengan memasukkan mata pelajaran umum dan memperkenalkan sistem didaktik-metodik ala "Belanda" sudah mulai dilakukan, di samping usaha

[76] Maksum, *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet ke-2, h. 113.

[77] Dawud Rasyid, *As-Sunnah fī Indūnisia: Baina Anshariha wa Khushuntukmiha*, (Jakarta: Usmah Press, 2001), h. 7.

[78] Munir al-Mursi Sarhan, *Fī Ijtima'iyyat at-Tarbiyah*, (Mesir: Maktaba al-Anjilu, 1978), h. 39-40.

mempengaruhi kebijakan pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan pendidikan agama dalam sistem pendidikan pribumi yang dikembangkannya.[79] Lalu timbullah pendidikan Islam yang disebut dengan madrasah, yang di dalamnya mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum.

Seiring perkembangannya, madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam, harus selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, baik keimanan dan ketaqwaan maupun mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan madrasah sejatinya telah dirancang sejak Mukti Ali menawarkan konsep pengembangan madrasah melalui kebijakan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri dalam Negeri, mereka berusaha mensejajarkan kualitas pendidikan di madrasah sebanding dengan kualitas pendidikan di sekolah umum melalui pola kurikulum, yakni 70% terdiri dari bidang studi umum dan 30% bidang studi agama. Setelah itu pada Pasal 2 dinyatakan: (1) Ijasah Madrasah memiliki nilai yang sama dengan ijasah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.[80] Dari sini tidak ada perbedaan antara ijasah madrasah dan sekolah, mereka mempunyai hak yang sama untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Pengembangan madrasah tidak hanya sampai disitu, Munawir Sadzali ikut berpartisipasi dalam pengembangan madrasah misalnya, menawarkan konsep Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) untuk memberikan keseimbangan pada lulusan madrasah, agar mampu menguasai ilmu-ilmu agama dan

---

[79] Maksum, *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet ke-2, h. 114.

[80] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, (Sapen: Lista Fariska Putra, 2005), cet. Ke-2, hal. 56

ilmu-ilmu umum secara komprehensif dengan mengajarkan kitab-kitab berbahasa asing baik Inggris, mandarin maupun bahasa asing lain, khususnya bahasa Arab, serta ilmu-ilmu ke-Islaman lainnya. Sementara pada madrasah aliyah biasa (non keagamaan) muatan pelajarannya tetap, yaitu 70% umum berbanding 30% agama.[81]

Substansi perubahan kebijakan madrasah, dari sekolah yang hanya mempelajari pada kajian agama (*tafaqquh fi al-din*) menjadi sekolah umum berciri khas agama Islam, adalah dalam rangka membina, membimbing, mengarahkan, dan melahirkan lulusan pendidikan madrasah yang berkualitas, mampu mengembangkan pandangan hidup menjadi lebih maju, sikap hidup dan *life skill* dalam perspektif Islam, atau mengembangkan anak didik dalam kognitif, afektif dan motoriknya, sehingga tercipta manusia Indonesia paripurna sebagaimana dicita-citakan dalam GBHN dan UUD 1945.[82]

Pada hakikatnya pengembangan madrasah harus berpacu pada tiga kepentingan, pertama mengemban misi dakwah Islam baik Alquran dan hadis, kedua mengemban misi pendidikan, mendidik bercita-cita untuk melahirkan manusia yang sempurna, dan ketiga mengemban misi pembaruan, pembaharuan ke arah yang lebih baik. Misi ketiga inilah yang harus ada pada setiap pengembangan madrasah, yang dapat membingkai setiap upaya untuk melakukan pembaruan, peningkatan kualitas, maupun pengembangan manajemen madrasah yang mengarah pada pencapaian kemajuan pendidikan Islam.[83]

Pada awal abad ke-20 madrasah di Indonesia sudah mulai terkenal dikalangan banyak umat Islam. Kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan dilatarbelakangi oleh munculnya

---

[81] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren.*, h. 57.

[82] Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, h. 58.

[83] Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (Erlangga, 2007), h. 89.

semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi sebagian sistem pesantren dan dan sebagian lain mengadopsi sistem sekolah umum. Ditinjau dari segi dinamika dan perkembangannya, madrasah setelah Indonesia merdeka juga dapat dibagi tiga fase. Pertama, sekitar tahun 1945-1974, pada fase ini madrasah menekankan materi pendidikannya kepada penyajian ilmu agama, dan sedikit pengetahuan umum. Disebabkan hal itulah maka pengakuan ruang lingkup madrasah hanya berada di lingkungan Departemen Agama. Kedua, ketika diberlakukannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975, fase ini berlangsung 1975-1990. Inti dari SKB tiga menteri itu adalah upaya untuk meningkatkan mutu madrasah.[84] Ketiga, fase setelah diberlakukannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 tahun 1989) dan diiringi dengan sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 dan 29. Madrasah pada fase ini dijelaskan secara eksplisit adalah sekolah yang berciri khas agama Islam, makna yang terkandung di dalamnya bahwa madrasah pada tingkat dasar dan menengah memberlakukan kurikulum sekolah yang ditambah dengan kurikulum ilmu-ilmu agama sebagai ciri khasnya.[85]

---

[84] Dalam surat keputusan tersebut dicantumkan antara lain ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih di atasnya, siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (SKB Tiga Menteri 1975, Bab II Pasal 2). Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat, pengetahuan umum pada madrasah lebih meningkat, fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan dan adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.

[85] Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 22.

Dalam pasal 17 dan 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah merupakan salah satu jalur pendidikan formal pada tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memberikan pendidikan umum dan pendidikan Islam. Madrasah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam juga sebagai lembaga pengembangan dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, tidak hanya diarahkan pada kegiatan penggalian ilmu pengetahuan semata, tapi juga menjadi wahana pelatihan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada tatanan realitas. Selain itu pendidikan di madrasah tidak hanya mengarah pada keunggulan akademis, tapi justru menegaskan pada orientasi pembentukan karakter yang berdasarkan pada prinsip *akhlaq al-karimah.* [86]

Peningkatan mutu pendidikan madrasah yang masih kalah dengan sekolah masih terus dipermasalahkan, meski sudah disejajarkan dengan sekolah, namun masih banyak madrasah yang di bawah sekolah dalam sisi mutu pendidikan. Masih banyak madrasah yang tidak bermutu, minim sarana prasarana, manajemen ala kadarnya, tenaga guru yang kurang dan tidak mumpuni, dan lulusan yang rendah. Peningkatan mutu dan tata kelola masih menjadi permasalahan yang serius yang sedang dihadapi madrasah. Bahkan, masih ditemukan persoalan akses masyarakat terhadap madrasah di daerah terpencil. Tiga pilar pendidikan di antaranya akses, peningkatan mutu dan daya saing manajemen madrasah dan tata kelola masih menjadi permasalahan serius yang dihadapi madrasah.[87]

Pengaruh yang berdampak drastis berupa perubahan struktural dari berbagai aspek kehidupan harus diakui bahwa

---

[86] Mulyani dkk, *Manajemen Madrasah Satu Atap,* (Bandung: Nuansa, 2008), h. 15.

[87] Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk., *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, xii.

proses modernisasi dan globalisasi yang bersumber dari Barat membawa perubahan yang dialami sekarang. Dalam artian bahwa tanpa kekuatan sumber daya manusia, maka proses modernisasi dan globalisasi dalam masyarakat tidak akan terwujud.[88]

Mengulas tentang dana yang minim, lagi-lagi permasalahan ini berkaitan dengan beberapa madrasah. Contohnya, banyaknya rangkap jabatan guru (sejenis dan beragam) yang disebabkan antara lain karena tidak kecukupan gaji. Kendala kekurangan guru yang profesional dalam kesesuaian dengan bidang garapan di perguruan tinggi dan sekolah menengah. Selain itu daya tamping yang hendaknya mengandung perlakuan kesempatan sama antara sekolah negeri dan swasta. Untuk itu, diperlukan sistem akreditasi yang merujuk pada standar yang ditetapkan, bukan pada madrasah negeri atau swasta, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk membantu sarana dan prasarana madrasah negeri dan swasta dengan proporsi biaya yang sudah pernah direncanakan secara baku.[89]

Jika kita bandingkan antara madrasah dengan sekolah umum, yang hanya dilihat dari hasil belajar tahap akhir nasional sesungguhnya tidaklah adil. Kedua jenis lembaga pendidikan ini berbeda, karena sesungguhnya melihat di dalamnya antara visi, misi dan kondisi yang berbeda pula. Visi, misi, dan kondisi yang berbeda tentu berimplikasi pada beban belajar, mata pelajaran dan perangkat pendukung yang berbeda pula. Tetapi anehnya, sebagian masyarakat menuntut hasil yang sama hanya dari sebagian prestasi yang dihasilkan, katakanlah hasil Ujian Akhir Nasionalnya. Padahal keduanya sesungguhnya dari segi hakikat keduanya tidak sama. Sekolah umum, pada umumnya berstatus negeri di bawah naungan pemerintah langsung dan semua serba

[88] Fachry Ali, *Visi Politik dan Intelektual Umat Islam Indonesia dalam Proses Modernisasi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 146.

[89] Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 41.

difasiltasi. Dengan statusnya itu lembaga pendidikan pemerintah segala sesuatunya tercukupi sekalipun dalam batas-batas minimal, misalnya guru, perpustakaan, laboratorium, sarana pendidikan dan faktor pendukung lainnya.[90]

Sedangkan sebaliknya dari sekolah umum, madrasah yang pada umumnya berstatus swasta atau milik perorangan atau masyarakat, yang dengan demikian banyak yang mengalami serba kekurangan, dilihat dari berbagai aspek, contoh guru yang mengajar belum tentu memperoleh imbalan kesejahteraan yang cukup, buku-buku belum tentu tersedia sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan standar minimal terlebih faktor pendukung untuk menunjang pembelajaran seperti proyektor, media pembelajaran yang bersifat teknologi yang mumpuni serta bahan-bahan ajar yang hanya seadanya. Begitu juga dengan beban belajar siswa, yang jumlahnya jelas lebih banyak karena ditambah dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berupa Alquran dan hadis, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam, fiqih serta ditambah bahasa Arab. Pengertian terbaru madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Mata pelajaran yang bernuansa muatan ciri khas jumlahnya tidak sedikit, yang hal ini merupakan beban tersendiri bagi para siswa. Ujiannya pun berbeda, siswa madrasah mengikuti dua jenis ujian, yaitu ujian madrasah dan juga ujian akhir nasional. Ironisnya yang dilihat tatkala melihat mutu madrasah hanya tertuju pada ujian akhir nasional, dan tidak memperhatikan prestasi lainnya, misalnya keberhasilannya dalam memperoleh prestasi kecerdasan spiritual maupun emosionalnya, hasil ujian madrasah khusus bagi madrasah dan sebagainya.[91]

---

[90] Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah,* (Yogyakarta: HIKAYAT, 2007), h. 90.

[91] Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah,* h. 90.

Secara normatif pendidikan Islam di Indonesia pada dasarnya bersumber dari ajaran agama yang universal dan komprehensif. Pendidikan Islam akan mampu bertahan dalam perubahan yang terjadi dari masa ke masa jika konsisten dengan prinsip ini. Prinsip komprehensif itu menunjukkan kesanggupannya di satu sisi mempertahankan semangat keislamannya dan di sisi lain menyesuaikan aspek teknisnya dengan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarahnya, pendidikan Islam memperlihatkan variasi dari satu periode ke periode lain, dan dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi dengan semangat keislaman yang permanen. Masa depan pendidikan Islam di Indonesia dibentuk baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara internal, dunia pendidikan Islam pada dasarnya masih menghadapi problem pokok berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan. Secara eksternal, masa depan pendidikan Islam dipengaruhi oleh tiga isu besar, yaitu globalisasi, demokratisasi, dan liberalisasi Islam.[92] Tetapi tidak memungkiri bahwa ada beberapa pendidikan Islam yang sudah unggul dibanding dengan sekolah umum.

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional dalam kaitannya pengembangan kualitas sumber daya manusia ialah menyangkut peningkatan mutu setiap jenis dan jenjang pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut ada tiga faktor utama yang menjadi titik perhatian, yaitu adanya sumber-sumber pendidikan untuk menunjang proses pendidikan, mutu proses pendidikan itu sendiri seperti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar lebih efektif dan mutu *output* dari proses pendidikan seperti keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh para siswa. Dalam konteks pendidikan di madrasah, sebagai sekolah umum yang berciri khas

[92] Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), h. 104.

agama Islam, maka faktor mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya tersebut perlu disiapkan secara matang terutama dari segi wawasan akademis-religiusnya, agar makna substansial madrasah dapat tertangkap dengan baik.[93]

Jika dilihat dari semua madrasah yang ada di Indonesia, masih banyak madrasah, yang dilihat dari hasil nilai Ujian Akhir Nasional pada umumnya masih rendah, kalau kita dibandingkan dengan sekolah umum pada umumnya. Kecuali beberapa yang ditangani secara khusus, ternyata juga berhasil unggul dan dapat meraih prestasi sekolah umum. Tetapi jumlah yang berhasil berprestasi seperti ini masih terbatas jumlahnya. Berbeda dengan sekolah umum, madrasah yang pada umumnya berstatus swasta, yang dengan demikian selalu saja mengalami serba kekurangan, misalnya guru yang mengajar belum tentu tersedia apalagi sarana dan prasarana lainnya.[94]

Departemen Agama sesungguhnya memang telah memperhatikan soal-soal yang terkait dengan mutu hasil pendidikan, termasuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, dengan memberlakukan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diizinkan mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, segala persyaratan itu dihiraukan dan muncullah lembaga pendidikan yang dimaksud, di antaranya adalah madrasah. Madrasah banyak yang dilahirkan serba kekurangan, jika dilihat dari kekuatan pendukungnya. Bagi pengelola madrasah, yang dianggap penting adalah identitas madrasah itu. Perkara isi pendidikan yang dilangsungkan pada madrasah itu, rupanya kurang memperoleh pertimbangan dan perhatian saksama. Kesadaran simbolik, berupa nama yang

[93] Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan,* (Bandung: Nuansa, 2003), h. 204.

[94] Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah,* h. 90.

disandang ternyata bagi sementara masyarakat pendukung lembaga pendidikan beridentitas Islam ini mengalahkan tolok ukur yang dipatok oleh siapa saja termasuk pemerintah sekalipun.[95] Mungkin standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan pemerintah belum sesuai, atau mungkin madrasah yang belum siap atas tolok ukur tersebut. Seharusnya pemerintah juga dapat meratakan berbagai sosialisasi bahkan informasi dan pelatihan bagi madrasah, karena mungkin banyak madrasah yang masih dilihat oleh sebelah mata dan kurang diperhatikan.

Meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam seperti madrasah salah satunya tidak menjadi suatu kemudahan. Karena diantaranya masyarakat dan pendiri madrasah merasa memiliki otonomi seluas-luasnya. Sebenarnya pemikiran seperti ini baik, jika masyarakat dan pendiri madrasah memanfaatkan peluang bukan berduduk manis karena pada zona nyaman. Memanfaatkan peluang di sini berarti dengan adanya otonomi madrasah diharapkan mampu untuk berinovasi sedemikian rupa sehingga madrasah memiliki mutu yang baik.

Yang tak kalah seriusnya adalah kebijakan pemerintah terhadap madrasah masih "setengah hati". Di beberapa daerah, masih ditemukan madrasah yang belum sepenuhnya diperhatikan oleh pemerintah daerah karena masih dianggap sebagai institusi vertikal yang tidak berhak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berbeda dengan sekolah, madrasah berada pada posisi yang dilematis. Secara administratif, madrasah berada di bawah koordinasi Departemen Agama yang mengurusi sektor agama di mana sektor ini tidak didesentralisasikan. Namun, secara substantif, sesuai dengan bunyi UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah adalah sekolah umum yang esensi dan statusnya sama dengan sekolah-sekolah

---

[95] Imam Suprayogo, *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi & Solusi Pembangunan Madrasah*, h. 92.

umum biasa yang lain yang melaksanakan tugas nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.[96]

Ada dua hal yang perlu dikemukakan di sini, yaitu birokrasi pendidikan yang berfungsi sebagai pengontrol pendidikan dan partisipasi masyarakat di dalam mengontrol jalannya baik organisasi maupun pelaksanaan proses pendidikan di daerah. Meningkatkan kemampuan birokrasi pendidikan bukan suatu hal yang mudah. Sangat terkenal bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang-orang konservatif yang melaksanakan tugasnya *"business as usual"*. Oleh sebab itu, harus ada suatu program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang professional.

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 dikemukakan perlu adanya Dewan Pendidikan baik pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dewan tersebut merupakan lembaga yang independen yang antara lain dapat mengontrol jalannya pendidikan di daerah. Sayang sekali sampai dewasa ini Dewan Pendidikan belum banyak terdengar sehingga masih sulit untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam mengontrol pendidikan di daerah. Sudah waktunya apabila kita menggalakkan fungsi Dewan Pendidikan baik mengenai mutu para anggotanya maupun mekanisme kerjanya di daerah maupun di pusat.[97]

Hemat peneliti, bahwa mutu pendidikan adalah hal yang harus terus diperhatikan sepanjang jalannya pendidikan, bukan hanya satu jalan tapi berkesinambungan. Untuk menjadikan madrasah bermutu harus melewati proses yang berkualitas,

[96] Nunu Ahmad An-Nahidl, dkk., *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*, xiii.

[97] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 22.

karena mutu adalah proses yang tidak mengenal kata akhir. Perbaikan mutu merupakan proses yang berkesinambungan, yang membutuhkan organisasi konsisten untuk pengendalian mutu tersebut. Tanpa ada pengawasan dan pengendalian mutu, maka madrasah seakan tetap tidak melangkah lebih maju dan berkembang.

B. Manajemen Pendidikan Bermutu

Menurut Jerome S. Arcato pada dasarnya manajemen bermutu memiliki lima karakteristik yang didefinisikan seperti pilar mutu, yaitu fokus pada pelanggan[98], keterlibatan total[99], pengukuran, komitmen dan perbaikan berkelanjutan.[100] Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara tidak sistematis. Maka diperlukan manajemen dalam bidang apapun, terutama bidang pendidikan. Manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajaran Islam.[101]

[98] Pelanggan terbagi dua, yaitu pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang tua, siswa, guru, administrator, staf dan dewan sekolah yang berada dalam sistem pendidikan. Sedangkan pelanggan eksternal adalah masyarakat, perusahaan, keluarga, perguruan tinggi, dan lain-lain yang berada di luar organisasi namun memanfaatkan *output* proses pendidikan.

[99] Setiap orang harus berpartisipasi secara total dalam transformasi mutu. Mutu bukan hanya tanggung jawab dewan madrasah atau pengawas. Mutu merupakan tanggung jawab semua pihak.

[100] Jerome S. Arcato, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Cet. Ke-4, h. 38.

[101] Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Depok: Gema Insani, 2003), h. 2.

Pendidikan berbasis standar sangat berkaitan dengan sistem manajemen mutu. Karena pendidikan berbasis standar harus mampu melampaui SNP, sehingga harus mempunyai sistem manajemen mutu yang baik. Sistem manajemen mutu diperlukan untuk mengatur setiap proses kerja agar menghasilkan produk yang memenuhi spesipikasi teknis dan mendukung penerapan manajemen yang ada. Fungsi manajemen yang dijalankan oleh manajer pendidikan di madrasah diarahkan untuk memberikan kepuasaan pelanggan, baik pelanggan internal yaitu guru dan tenaga kependidikan serta tenaga administratif, maupun pelanggan eksternal yang primer yaitu peserta didik, yang sekunder yaitu pemerintah, orang tua/wali murid atau masyarakat yang membiayai pendidikan.[102]

Manajemen pendidikan adalah manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan. Dalam arti, ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Bisa juga didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efesien. Manajemen pendidikan Islam lebih bersifat umum untuk semua aktivitas pendidikan pada umumnya, sedangkan manajemen pendidikan Islam lebih khusus lagi mengarah pada manajemen yang diterapkan dalam pengembangan pendidikan Islam. Dalam arti, bagaimana menggunakan dan mengelola sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan, kemajuan dan kualitas proses dan hasil pendidikan Islam itu sendiri. Sudah barang tentu aspek *manager* dan *leader* yang Islami atau yang dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam dan/ atau yang berdiri khas Islam,

[102] Muhammad Ali, *Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Ilmu Aplikasi Pendidikan Bagian II: Ilmu Pendidikan Praktis*, (Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama, 2007), 343.

harus melekat pada manajemen pendidikan Islam.[103] Tujuan pendidikan nasional dapat dicapai dengan proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif melalui manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan juga merupakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[104]

Manajemen administratif adalah manajemen yang mengelola seluruh kepentingan institusional yang bersifat administratif. Dalam setiap lembaga atau institusi dan organisasi terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dengan adanya tujuan tertentu. Salah satunya berkaitan dengan pengelolaan atau bisa disebut manajemen. Misalnya administrasi yang bersifat pengelolaan manajemen pendidikan contoh tata usaha, sekolah, pengembangan kurikulum, pengangkatan dosen/guru, penerimaan mahasiswa baru, pemberdayaan keuangan, tugas dan kedudukan rektor, dekan, ketua jurusan, fakultas dan hubungan di antara lembaga tersebut. Dengan demikian, terdapat kaitan erat antara organisasi, administrasi, dan manajemen. Organisasi adalah sekumpulan orang dengan ikatan tertentu yang merupakan wadah dan alat untuk menggapai cita-cita dan tujuan yang disepakati oleh para anggotanya. Perilaku manajemen dan pelaksanaan berbagai kegiatan organisasi itu disebut dengan administrasi.[105]

Beberapa pengertian manajemen di atas pada dasarnya memiliki titik tolak yang sama, sehingga dapat disimpulkan ke dalam beberapa hal, yaitu:

---

[103] Muhaimin, dkk., *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, h. 5.

[104] Dadang Dally, *Balanced Score Card: Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 7.

[105] Herabudin, *Administrasi & Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 138.

a. Manajemen merupakan suatu usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan melalui suatu proses, seperti proses pendidikan ada belajar mengajar dan lainya.
b. Manajemen merupakan suatu sistem kerja sama dengan pembagian peran yang jelas.
c. Manajemen melibatkan secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik, dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. [106]

Di samping itu, dapat berarti mengatur pendidikan yang disemangati dan dijiwai oleh ajaran dan nilai Islam serta budaya, yang dalam praktiknya bisa berupa: (1) pendidik/guru/dosen, kepala madrasah/sekolah atau pimpinan perguruan tinggi dan/atau tenaga kependidikan lainnya yang melakukan dan mengembangkan aktivitas kependidikannya disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam; dan/atau (2) komponen pendidikan lainnya, seperti tujuan, materi/bahan ajar, alat/media/sumber belajar, metode, dan evaluasi, lingkungan/konteks, dan lain lain yang disemangati atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, atau yang berciri khas Islam.[107]

Bangsa Indonesia diawal kemerdekaannya tidak main-main untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologis yang menunjukkan kesungguhan dan keuletan para pendiri Negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut antara lain, tahun 1946 membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajaran, tahun 1947 kongres pendidikan di Solo, tahun 1948 membentuk panitia pembentukan rancangan Undang-Undang pendidikan, tahun 1949 kongres pendidikan di Yogyakarta, tahun 1950 lahirnya UU No. 4 Tahun 1950, Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), tahun

[106] M. Ma'ruf, "Konsep Manajemen Pendidikan Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis", *Didaktika Religia*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2015, h. 22.
[107] Muhaimin, dkk., *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*, h. 7

1954 lahirnya UU No.12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950, tahun 1961 lahirnya UU tentang perguruan tinggi, tahun 1965 lahirnya Majelis Pendidikan Nasional, tahun 1989 lahirnnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), tahun 1990 lahirnya PP No. 27, 28,29,30, tahun 1991 lahirnya PP No. 72,73, tahun 1992 lahirnya PP No. 38, 39, tahun 1999 lahirnya PP No. 60, 61, tahun 2003 lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No. 2 Tahun 1989.[108]

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu, semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah Negara, menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu proaktif menjawab tentang perubahan zaman. Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunya misi perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global, memberdayakan peran serta masyarakat

[108] Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, h. 48.

dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.[109]

Lahirnya Undang-Undang Sisdiknas dan diperkuat dengan peraturan lainnya, di antaranya peraturan berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP), arah dan capaian pendidikan nasional semakin jelas. Delapan standar pendidikan yang ditetapkan dianggap merepresentasikan kebutuhan holistik dari penyelenggaraan pendidikan nasional. Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Implementasi SNP pada sekolah dalam setiap tingkatannya merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi sebagai ukuran ketercapaian dalam sebuah penyelenggaraan pendidikan. Salah satu implikasi positif dari ketercapaian yang merupakan buah dari konsistensi dalam mengimplementasikan SNP ini adalah, lahirnya keunggulan yang dimilki oleh sekolah tersebut. Banyak madrasah atau sekolah yang telah berkompetisi untuk dapat memenuhi tuntutan delapan standar pendidikan. Dan realitanya banyak madrasah/sekolah unggulan yang bermunculan dan diminati banyak masyarakat.[110]

---

[109] Penjelasan UU No. 20 tahun 2003

[110] Muhammad Iwan Abdi, "Implementasi Standar Nasional Pendidikan", *Fenomena*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2017.

Dalam konteks lembaga pendidikan atau istilah unggulan dapat dilekatkan pada madrasah yang pada akhirnya terdapat adanya keinginan dan semangat baru dilingkungan organisasi pendidikan seperti madrasah untuk inovasi menjadi lebih baik kualitasnya dan unggul dari madrasah lainnya. Usaha ini menuntut bukan hanya madrasah hanya harus memiliki cita-cita dan keinginan saja, tetapi madrasah agar selalu memiliki kebutuhan berprestasi sehingga tercapai keunggulan dalam segala aspeknya. Dalam konteks madrasah hal-hal yang dipersyaratkan untuk masuk dalam kategori unggul atau model, adalah memiliki manajemen madrasah yang baik, SDM yang berkualitas, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan, bantuan pendidikan yang memadai dan keunggulan kualitas lulusan. Dari semua kriteria tentang madrasah atau sekolah unggul atau madrasah model pasti dirujuk pada Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menjadi kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Standardisasi pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.[111]

Sesunggunya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dicamtunkan agar setiap daerah sekurang-kurangnya mempunyai satu rintisan sekolah percontohan yang bertaraf internasional, namun demikian konsep mengenai sekolah yang bertaraf internasional tersebut sangat kabur. Semua sekolah yang berada di Negara Republik Indonesia seharusnya berkualitas internasional. Taraf internasional tersebut tentunya perlu kita capai secara bertahap dan bukan dijadikan sebagai sarana segregasi sosial yang memarginalisasikan peserta didik dari keluarga miskin. Kecenderungan yang ada dewasa ini adalah Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) tersebut merupakan sekolah-

[111] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, 17 Bab dan 97 Pasal.

sekolah yang disebut sekolah-sekolah plus yang menambahkan di dalamnya kurikulum bahasa Inggris, matematika dan fisika serta peralatan komputer. Jelaslah kiranya sekolah yang demikian hanya dapat diraih oleh sekelompok kecil peserta didik Indonesia terutama di kota-kota besar.

Bukankah rakyat Indonesia masih tergolong bangsa yang berpendapatan rendah, sehingga tidak mungkin SBI tersebut dapat dijangkau oleh rakyat banyak. Dengan sendirinya SBI merupakan suatu sarana terbentuknya sekelompok di dalam masyarakat sebagai kelas yang memiliki *privilege* sehingga dengan demikian memisahkannya dari rakyat banyak. Hal tersebut tentunya tidak menguntungkan bagi keutuhan masyarakat Indonesia yang hanya menyediakan fasilitas pendidikannya untuk sekelompok masyarakat yang berada. Selain dari itu SBI kita ketahui menggunakan ukuran apa yang digunakan dalam menentukan SBI-nya, apakah mutu pendidikan di Eropa, mutu pendidikan negara-negara OECD atau Australia? Konsep SBI telah lahir dari paradigma ekonomi era globalisasi ialah kehidupan di dalam persaingan global.

Nilai-nilai Pancasila yang merupakan ideologi bangsa kita tidak mengenal persaingan yang mengikuti hukum sosial Darwinisme.[112] Pancasila mengajarkan kita untuk bekerja sama dalam menghimpun kekuatan-kekuatan positif dalam masyarakat dalam mencapai tujuan bersama yaitu masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Persaingan dibutuhkan bukan untuk saling mematikan seperti dalam hukum perdagangan bebas, melainkan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. SBI seharusnya

[112] Artinya semua kehidupan di bumi berasal dari nenek moyang yang satu dan evolusi digerakkan oleh mekanisme pemilihan alamiah.

menjadi "Sekolah Bangkit Indonesia" agar bangsa Indonesia dapat hidup setara dengan bangsa-bangsa di dunia yang telah maju.[113]

Sulistyo, memiliki pandangan tentang penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah: 1) Faktor manajemen dan kepemimpinan. 2) Pendekatan pendidikan lebih menitik beratkan kepada input dan *output*. 3) Rendahnya profesionalisme guru baik dalam segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, kreativitas, kemampuan mengevaluasi, mengelola kelas, serta membimbing siswa menjadi persoalan sendiri. 4) Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan. Rendahnya budaya dan partisipasi masyarakat.[114] Dengan adanya Standar Nasional Pendidikan maka akan mengarahkan dan membantu madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya dalam satu aspek tertentu saja, namun dalam delapan aspek yang sudah menjadi satu dalam manajemen berbasis standar.

Standar Internasional mengenai sistem manajemen mutu disebut dengan ISO. ISO berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama. ISO (*International Organization Standardization*) yaitu organisasi Internasional untuk standardisasi, agensi Internasional yang mengkhususkan dirinya dalam hal standardisasi yang dibentuk oleh badan-badan standar nasional.[115] Dalam sistem manajemen mutu ISO 9001 terdapat *Standard Operating Prosedur* (SOP), intruksi kerja, tujuan dan sasaran mutu, dan juga program mutu. Standar ini juga berisi unsur-unsur legal wajib yang bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman bagi perusahaan. ISO merupakan standar yang berisi persyaratan untuk sistem

---

[113] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 21

[114] Sulistyo, "Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman", *Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 23, No. 5 (Maret 2012), h. 27.

[115] Syahu Sugian O, *Kamus Manajemen Mutu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 112.

manajemen mutu yang membantu perusahaan atau organisasi agar lebih efisien dan kepuasan konsumen meningkat. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan telah melakukan pengawasan dan penjaminan pada semua kegiatan operasinya yang akan mempengaruhi kualitas produk yang diberikan. Banyak perusahaan yang mengakui bahwa setelah menerapkan standar ini mereka benar-benar merasakan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dan berhasil memperoleh penghargaan mengenai manajemen mutu yang bertaraf internasional.[116]

Adapun persyaratan sistem kepastian mutu berdasarkan ISO 9001:2000 ada lima klausul yang memberikan referensi tentang sistem kepastian mutu yang meliputi pertama, sistem penjaminan mutu, beberapa kriteria yang termuat dalam klausul ini yaitu persyaratan umum, persyaratan dokumen umum, manual mutu dan pengendalian dokumen. Kedua, tanggung jawab manajemen, beberapa kriteria yang termuat dalam klausul ini yakni komitmen manajemen, fokus pada pelanggan, kebijakan mutu, perencanaan, tanggung jawab, wewenang, komunikasi dan tinjauan manajemen. Ketiga, manajemen sumber daya, kriteria yang termuat dalam klausul ini adalah ketersediaan sumber daya, sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan kerja. Keempat, realisasi produk, terdiri dari beberapa kriteria yang termuat dalam klausul ini sebagai berikut perencanaan realisasi produk, proses yang berhubungan dengan pelanggan, desain dan pengembangan, pembelian, produksi dan penyediaan jasa, pengendalian, pengukuran dan pemantauan alat. Kelima, pengukuran, analisis dan peningkatan, terdiri dari kriteria yang

[116] Fitriana Fajrin Ramadhany dan Supriono, "Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam Menunjang Pemasaran", *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* Vol. 53, No. 1 Desember 2017, h. 32.

termuat dalam klausul ini yaitu, pemantauan, pengukuran dan peningkatan.[117]

Tujuan dari sistem manajemen mutu adalah untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang dihasilkan perusahaan mampu memenuhi persyaratan dari pembeli. Menurut *Internatonal Organization for Standarization*, sistem manajemen mutu adalah cara suatu perusahaan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ada tujuh prinsip yang mendasari sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, yaitu fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, *improvement*, pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan manajemen hubungan.[118]

C. Mutu Madrasah sebagai Aspek Akuntabilitas Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.[119] Demikian halnya di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia standar adalah ukuran dasar yang digunakan.[120] Adapun Standardisasi pendidikan adalah penstandaran pendidikan, dalam artian pengukuran dasar atau minimal yang digunakan dalam pendidikan.

Kualitas pendidikan secara sosiologi menurut Sauge dapat dilihat dari kualitas bermasyarakat dan kualitas berbangsa dengan

---

[117] IBK. Bhayangkara, *Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 239.

[118] Fitriana Fajrin Ramadhany dan Supriono, “Analisis Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dalam Menunjang Pemasaran”, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* h. 33.

[119] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 858.

[120] Badudu & Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 1355.

indikator kesetiakawanan sosial, tanggung jawab dan disiplin sosial. Madrasah sebagai institusi pendidikan merupakan salah satu ukuran dasar akan kualitas pendidikan di mata masyarakat.[121] Adapun kualitas pendidikan menurut Rasheed ditentukan oleh siswa yang sehat dan siap untuk belajar, lingkungan yang sehat, aman, dan memberikan perlindungan, proses belajar mengajar serta hasil belajar siswa baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan sikap.[122] Jika kualitas pendidikan dilihat dari kacamata sosiologis, kualitas pendidikan yang diartikan harus sesuai dengan standar yang berlaku di mata masyarakat, dalam artian standar disini harus disertakan pula atas kepentingan masyarakat sosial.

Sosiologi pendidikan akan mengungkap seberapa besar pengaruh belajar mengajar kepada kehidupan kelompok, dan pengaruh kelompok kecil terhadap yang lebih luas lagi, ialah terhadap masyarakat. Pendidikan sebagai salah satu proses sosial dengan kondisi-kondisi yang optimum dapat mengurangi kekurangan-kekurangan di dalam masyarakat untuk mencapai tata masyarakat-masyarakat yang lebih baik.[123]

Proses pendidikan sangat terkait dengan sistem-sistem sosial yang terkait dengannya, sangat penting dan memerlukan perhatian ahli-ahli sosiologi dalam pendidikan, karena meragukan apabila para administrator pendidikan hanya sekedar memakai informasi-informasi dan prinsip-prinsip sosiologis untuk mencapai kemajuan-kemajuan dalam pengelolaan pendidikan, sebelum kita bisa memahami ciri-ciri hubungan antar manusia di dalam sistem persekolahan, beserta bagaimana para ahli sosiologi telah memalingkan perhatian terhadap hubungan antar manusia

[121] Sauge, "Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi", *Jurnal Hunafa* (2004) h. 59.

[122] Sadiq Rasheed, "Defining Quality in Education", *The International Working Group on Education Florence*, (June, 2000), h. 3

[123] Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 13

dengan keluarga, industri, politik, agama, komuniti dan sistem-sistem interaksi lainnya dalam dunia pendidikan yang tentunya perlu dikaji untuk menentukan pola-pola interaksi di dalamnya. Secara lebih rinci lagi, pendekatan ini bisa lebih kokoh dilihat dari kaca mata persyaratan penyelidikan ilmiah dan bisa memberikan perhatian lebih kepada memahami totalitas masyarakat, yang memang pada intinya pendidikan bertujuan untuk membuat negara aman, damai dan sejahtera.[124] Pendidikan akan terus berkembang seiring majunya masyarakat itu sendiri, faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan pada masyarakat adalah karena adanya kebebasan, kebudayaan yang berkembang, hubungan sosial yang luas baik melalui media sosial maupun yang lainnya, kefahaman keagamaan yang komprehensif, fasilitas ekonomis dan lainnya.

Perkembangan masyarakat di sini akan juga sangat mempengaruhi pendidikan masyarakat pada wilayah tertentu, perubahan nilai-nilai dalam masyarakat bukan berarti tidak teperhatikan oleh masyarakat. Namun dalam memperhatikan nilai-nilai yang berkembang tersebut, arah yang menjadi anutan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya tidaklah sama. Tidak semua masyarakat secara terarah memahami arah dan tujuan yang benar, maka diperlukan standardisasi khususnya dalam bidang pendidikan, sangat diperlukannya standardisasi profesional untuk dapat mengarahkan pendidikan yang lebih maju dengan pilar-pilar atau ukuran yang akan menjadi tujuan bangsa Indonesia itu sendiri.

Tuntunan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan dipengaruhi oleh perlunya kepentingan pengguna jasa tersebut disalurkan sesuai dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi tersebut berawal dari perlunya pengguna jasa terpuaskan dengan apa yang ditawarkan oleh penjual jasa. Bagaimanapun pendidikan

---

[124] Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, h. 22

adalah jasa dan dianggap sebagai penjual jasa yang setiap saat harus melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan.[125]

Di Indonesia perubahan yang berkaitan dengan masalah pendidikan berlangsung begitu cepat. Mulai dari perubahan sebagai akibat kebijakan pemerintah, sampai perubahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[126] Adanya kebijakan Standar Nasional Pendidikan pun merupakan tuntutan atas pendidikan yang semakin mengglobal, agar Indonesia bisa bersaing dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan negara maju yang lain.

Terkait perdabatan pro-kontra mengenai standardisasi pendidikan di atas, antaranya yang pro berpendapat bahwa standardisasi berfungsi sebagai acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di dalam mengadakan perubahan global, standardisasi juga merupakan suatu kewajiban moral untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik. Alasan mereka juga, bahwa standardisasi yang bersifat nasional atau internasional akan menghindari keinginan-keinginan pribadi dari guru serta mencegah kontrol lokal yang berlebihan.[127] Selain dari itu standardisasi juga merupakan suatu kebutuhan karena tuntutan masyarakat yang berubah sangat cepat. Dan dengan adanya standardisasi diharapkan dapat memberikan akuntabilitas pendidikan. Adapun mereka yang kontra terhadap standardisasi pendidikan bahwa standardisasi pendidikan banyak dipengaruhi oleh keputusan-keputusan bisnis dan politik, tidak serta merta karena kepentingan masyarakat. Padahal belajar mengajar secara berhasil terletak kepada relasi antara siswa dan guru, bukan pada otoritas dari luar yang dipaksakan dari atas. Dan juga evaluasi

---

[125] Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 85

[126] Rasi'in, "Menakar Standar Madrasah Bermutu", *KORDINAT*, Vol. XV, No. I, April 2016, h. 76.

[127] Putu Subawa, Standarisasi Dunia Pendidikan, *Jurnal Penjaminan Mutu* (STAHN Mpu Kuturan Singaraja).

pendidikan yang dipakai untuk mengetahui tercapai tidaknya standar yang telah disepakati tidak semata-mata diselenggarakan melalui tes objektif, tes objektif tersebut seakan hanya berkedok akuntabilitas masyarakat padahal hanya untuk kepentingan orang-orang yang berada di atas.[128]

Tilaar berkomentar mengenai standardisasi pendidikan, bahwa dalam sistem pendidikan kita yang sentralistik, kita mengenal berbagai jenis standar untuk melaksanakan dan mengokohkan sistem yang sentralistik tersebut. Segala sesuatu ditentukan oleh kekuasaan negara, yang ditopang oleh birokrasi yang kaku, peraturan-peraturan yang terpusat atau dipegang oleh pemerintah pusat dan tidak memberikan kebebasan di daerah untuk melaksanakan peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah. Maka tumbuh dan berkembanglah suatu sistem yang kaku, statis, dengan manajemen yang terpusat. Mekanisme kontrol dari pusat dibangun begitu rupa sehingga tidak ada ruang gerak untuk pengambilan keputusan pada tingkat sekolah, juga tidak pada tingkat kabupaten dan provinsi. Seluruh Indonesia diselimuti dengan satu sistem, satu standar sehingga tidak mengherankan apa yang diajarkan di Jakarta sama dan sebangun dengan apa yang diajarkan di pelosok-pelosok hutan Kalimantan ataupun di Papua. Sistem pendidikan seperti suatu mesin yang besar yang digerakkan dari pusat dan lembaga-lembaga pendidikan di daerah merupakan sekrup-sekrup kecil yang berputar sesuai dengan keinginan pemerintah pusat.[129]

Kita patut mengetahui bahwa syarat pasar global adalah standar, mutu, keterbukaan dan demokrasi. Namun keempat hal tersebut kurang disadari masyarakat Indonesia sebagai syarat

[128] Suwidi, *Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional: Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: SPs UIN Jakarta, 2015).

[129] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 252.

utama memasuki pasar global. Akreditasi belum ditempatkan sebagai syarat mutlak yang harus dilalui jika suatu usaha ingin memperoleh pengakuan mutu dari pengguna jasanya. Banyak investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang urung menanamkan modalnya di Indonesia. Faktor penyebab semua itu adalah kurangnya keterbukaan, rumitnya administrasi, panjangnya prosedur yang harus dilalui, banyak pungutan dan sebagainya. Mereka merasa kurang aman dan kurang nyaman berinvestasi di Indonesia.[130] Terbukti ketika akreditasi berlangsung masih banyak sekolah atau madrasah, yang ketika dinilai oleh tim akreditasi, para asessor banyak yang menilai hanya sebatas formalitas saja dan banyak yang tidak mementingkan dari segi hakikat isi pendidikan tersebut. Yang pada akhirnya akreditasi hanya dilakukan sekolah atau madrasah hanya bertujuan untuk bisa diberi legalitas bukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah atau sekolah tersebut.

Sistem Pendidikan Nasional seolah berorientasi pada kepentingan pemerintah dan bukan untuk kepentingan anak didik, pasar, dan pengguna jasa pendidikan atau masyarakat dengan dalih bahwa strategi pendidikan nasional adalah untuk membekali generasi muda agar mampu membawa bangsa dan negara ini cepat sejajar dengan bangsa dan negara lain yang lebih maju. Namun, dalam implikasi perkembangannya tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keahlian dan penguasaan IPTEK yang diperoleh seusai menamatkan studinya berada dalam posisi dimiliki secara individual dan siap dijual melalui kontrak kerja demi uang, dan bukan dalam posisi "menjadikan diri" sebagai ilmuwan yang peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa, dan negara. Uang dan kekayaan materi benar-benar telah menjadi kekuatan-kekuatan dan alat kontrol kehidupan yang

[130] M. Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*, (Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2007), h. 60.

mengantarkan individu yang bersangkutan ke tempat yang lebih tinggi, menyenangkan, aman dan terhormat.[131] Jika seperti ini, standar apapun yang ditetapkan oleh pemerintah tidak akan memajukan proses pendidikan. Bahkan hanya sebuah omong kosong belaka yang akan menghambur-hamburkan uang negara.

Akibat dari model pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional seperti di atas, maka tidak terhindarkan bahwa pendidikan terkesan *ekslusive* dan *elite*, padahal seharusnya *inclusive* atau membaur dan akrab dengan semua lapisan masyarakat. Ironisnya banyak terjadi tinggi-rendahnya pendidikan yang telah dicapai tidak ada relevansinya dengan tinggi-rendahnya moral. Kejahatan dalam skala besar pada umumnya justru dilakukan oleh mereka yang telah menikmati pendidikan tinggi, padahal yang diharapkan makin tinggi jenjang pendidikan yang dilampaui, makin banyak amalan baik yang diharapkan untuk masyarakat atau kehidupan bersama. Dengan kata lain, makin tinggi jenjang pendidikan yang dilampauinya, makin tinggi pula moralnya.[132]

Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di negeri ini telah lama diupayakan. Sejak Indonesia merdeka sampai di era informasi sekarang ini, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai inovasi dan program pendidikan juga telah ditempuh. Penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, buku paket, pengadaan sarana dan termasuk peningkatan mutu guru. Upaya tersebut dilakukan karena pendidikan bermutu merupakan harapan bangsa ini. Pendidikan yang bermutu dapat terselenggara dengan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat dan

[131] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, h. 34.
[132] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, h. 35.

keluarga.[133] Namun yang berhak mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan nasional adalah pemerintah. Meskipun dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bahwa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dan terbuka untuk berperan-serta dalam menyelenggarakan atau mengelola unit pendidikan, dengan tetap pada ciri-ciri identitasnya. Namun dalam praktiknya, semuanya itu ditentukan oleh pemerintah, lengkap dengan rambu-rambu dan ukuran penilaiannya, tidak boleh menyimpang. Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka pembinaan dan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan. Padahal tuntutan pendidikan dalam era modern adalah penyelenggaraan satuan pendidikan yang demokratis dan otonom, *"school-based management*", dan sekolah berbasis masyarakat/budaya yang melingkarinya, namun tetap dalam nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.[134]

Proses stupidifikasi[135] dari sistem pendidikan yang sentralistik ditopang pula oleh berbagai sistem dalam pelaksanaannya, seperti kurikulum nasional yang berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan di seluruh tanah air. Meskipun akhir-akhir ini dibicarakan mengenai muatan lokal dalam kurikulum tetapi nyatanya hal tersebut hanya merupakan isapan jempol

---

[133] Khoirul Anwar, "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah", *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 1, No. 1, November 2018, h. 42.

[134] Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, h. 37.

[135] Proses stupidifikasi menurut Tilaar adalah pembodohan rakyat, lebih jauh lagi Tilaar mengatakan bahwa proses komoditifikasi pendidikan bahkan sudah memunculkan kapitalisme pendidikan karena pendidikan tidak diartikan kepada kebutuhan rakyat banyak, tetapi kebutuhan segelintir kelompok elit di Jakarta.

karena tidak ada rencana yang matang dalam pelaksanaannya. Pendidikan guru dilaksanakan terpusat, ataupun kalau dilakukan di daerah, programnya sama untuk seluruh daerah di tanah air. Demikian pula peningkatan mutu guru, penempatan serta peningkatan kariernya, semuanya ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pusat tanpa melihat kebutuhan daerah.[136] Tetapi dalam keadaan sadar walaupun peraturan sudah ditetapkan oleh pemerintah, kebijakan untuk sekolah/madrasah dikembalikan lagi kepada pemangku kebijakan di madrasah tersebut. Tidak menjadi hal mustahil kepala madrasah merubah sistem yang sudah baku dari pemerintah menjadi sistem yang lentur dan dapat dikondisionalkan dengan keadaan masyarakat madrasah.

Dalam sejarah pendidikan nasional, kita mengenal berbagai upaya untuk mengoreksi aturan dari sistem yang sangat sentralistis tersebut. Ada suatu masa dilancarkan sekolah sebagai pusat pembudayaan terutama untuk menghormati budaya lokal, tetapi ide yang mudah tersebut tidak dilaksanakan dan akhirnya mati. Kemudian lahir pula suatu masa kurikulum dibebani dengan sejumlah mata pelajaran mengenai Pancasila dan bukan sebagai moral kehidupan. Demikianlah, sekolah-sekolah kita dipenuhi dengan berbagai jenis beban mata pelajaran yang menurut para pakar pendidikan beban kurikulum sekolah-sekolah di Indonesia relatif yang paling berat di dunia. Namun, beratnya kurikulum di sekolah kita bertentangan dengan laporan kualitas pendidikan di Indonesia yang ternyata sangat rendah dibandingkan dengan sekolah di dunia, bahkan di Asia.[137]

Dengan adanya standardisasi pendidikan salah satu tujuan agar negara Indonesia bisa melangkah ke dalam dunia global. Karena di setiap negara pasti memiliki standar masing-masing di

[136] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 253.

[137] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 253.

dalam pendidikan. Globalisasi secara sederhana dapat disebutkan dengan mendunia, artinya sistem kehidupan internasional, lintas bangsa, Negara, budaya dan agama.[138]

Di negara maju, terutama negara yang menganut sistem desentralisasi sekolah, sekolah dikreasikan dan dipertahankan oleh masyarakat secara utuh baik praktik dan prosedurnya. Kesadaran mereka sebagai pemilik dan penanggung jawab lembaga pendidikan sudah tinggi. Partisipasi mereka sudah besar, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan kontrol pendidikan. Mereka benar-benar merasa memiliki, sebab sumbangan moral dan material mereka cukup besar terhadap kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Mereka yakin sekali bahwa pendidikan adalah modal utama bagi peningkatan kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa mereka.[139]

Salah satu contohnya adalah negara yang cukup mempunyai pengalaman dalam reformasi pendidikannya sesuai dengan pandangan demokrasi sehingga masalah pendidikan merupakan tugas dari negara bagian ialah Amerika Serikat. Sebagai negara federal yang demokratis, pendidikan di negara ini ditangani oleh tiga lembaga, yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian, dan pemerintah lokal. Dengan pembagian kekuasaan dari ketiga pusat pemerintahan boleh jadi mengurangi kontrol dari pemerintah federal terhadap mutu pendidikannya. Amerika Serikat memang tidak mengenal satu sistem pendidikan yang berlaku untuk seluruh negara. Kekhawatiran terhadap mutu pendidikan di Amerika Serikat dimulai pada masa Perang Dingin, yaitu dengan diakuinya kemajuan teknologi Rusia[140], dengan suksesnya astronot pertama Rusia melintasi orbit bumi pada tahun 1957. Pada saat itu,

[138] M. Mastuhu, *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*, 9.

[139] Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 187.

[140] Pada waktu itu Uni Soviet

Amerika Serikat melihat ketertinggalannya dari Rusia mungkin disebabkan oleh mutu pendidikannya. Maka dimulailah apa yang disebut gerakan standardisasi pendidikan nasional.[141]

Dalam perkembangannya, campur tangan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dalam peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu arus balik dari pemerintahan federalisme yang terkenal memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada warga negara untuk menentukan pendidikannya sendiri. Hal ini memang dinyatakan dalam konstitusi Amerika Serikat yang tidak mencantumkan kekuasaan pemerintah federal dalam bidang pendidikan. Bahkan, *The Tenth Amendmen* mengatur adanya wewenang otonomi yang sebesar-besarnya pada pemerintah negara bagian, termasuk bidang pendidikan.[142]

Sebenarnya, pemerintah Amerika Serikat di bawah Partai Republik mempunyai kebijakan memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya. Pandangan ini biasa disebut pandangan neoliberalisme yang percaya pada campur tangan kekuasaan pemerintah yang semakin kecil dan menyerahkan kekuasaan yang besar kepada swasta atau sektor privat. Kekuasaan pasar atau privatisasi merupakan semboyan dari neoliberalisme ini. Namun demikian, justru pada pemerintah Bush Sr. perhatian semakin besar diberikan pada kemajuan pendidikan. Maka pada September 1989 diadakanlah konferensi para gubernur di North Carolina yang merumuskan antara lain campur tangan pemerintah federal untuk meningkatkan mutu pendidikan di Amerika Serikat, maka keluarlah undang-undang

[141] Gerakan standardisasi pendidikan nasional merupakan isu politik, sejak itulah Amerika Serikat lebih menyadari bahwa pendidikan dan politik memang tidak dapat dipisah-pisahkan.

[142] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 256.

yang terkenal yang disetujui oleh Kongres pada 31 Maret 1994, yaitu *National Goal 2000: Educate America Act*.[143]

Selain menentukan tujuan nasional untuk pendidikan, undang-undang tersebut juga menugaskan untuk membentuk *National Education Standard and Improvement Council* (NESIC) yang akan memberikan sertifikasi nasional mengenai standar dari mata-mata pelajaran yang penting. Perlu kita catat bahwa yang menentukan standar dari mata-mata pelajaran tersebut bukanlah datang dari pemerintah melainkan dari asosiasi-asosiasi profesional.[144] Demikianlah, upaya besar untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengeluarkan standar nasional secara

[143] Undang-undang ini berisi delapan tujuan pendidikan nasional, yaitu: 1) Pada tahun 2000 semua anak berada di sekolah, 2) Tamatan *high school* meningkat 90%, 3) Siswa kelas IV, VIII, XII, mempunyai kompetensi yang tinggi dalam bahasa Inggris, matematika, sains, bahasa asing, warga negara dan pemerintahan, ekonomi, seni, sejarah dan geografi, 4) Semua guru telah mempunyai keterampilan yang memadai atau profesional, 5) Kualitas pengajaran matematika dan sains menjadi nomor satu di dunia di sekolah-sekolah Amerika Serikat, 6) Semua orang dewasa melek huruf dan dapat berkompetisi di dunia global, 7) Semua sekolah bebas dari narkoba, 8) Partisipasi orang tua dalam pendidikan meningkat.

[144] Asosiasi-asosiasi profesional adalah kelompok-kelompok atau himpunan orang-orang yang memiliki kemampuan pada bidang tertentu di Amerika Serikat, khususnya pada bidang standardisasi pendidikan seperti: American Council on the Teaching of Foreign Languages (1995), Consortium of National Art Education Association (1994), Center for Civic Education (1994), National Council on Economic Education, Geography Education Standard Project (1994), Joint Committee on Health Education Standard (1995), National Council Teacher of Matematics (1989), National Committee on Science Education Standard and Assessment (1995), National Consult for the Social Studies (1994), National Association for Sport and Physical Education (1995), National Assosiation for History in the Schools (1995).

sukarela diikuti oleh setiap sekolah di Amerika Serikat. Sejauh ini kita melihat bahwa standar sebagai sarana pengendalian mutu, yaitu ukuran-ukuran untuk mengetahui atau mengontrol kualitas pendidikan.[145]

Dari pengalaman pendidikan di Amerika Serikat, kita dapat ambil pelajaran bahwa pendidikan merupakan tugas bersama baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan sekolah. Para ahli kurikulum perlu kita persiapkan agar standar nasional dapat dijabarkan dengan baik pada tingkat provinsi, kemudian pada tingkat kabupaten/kota dan akhirnya penjabaran oleh masing-masing sekolah. Sudah dapat kita duga bahwa kurikulum nasional sangatlah minim dan fundamental isinya karena akan dijabarkan lebih lanjut pada tingkat-tingkat unit pemerintahan di bawahnya sampai ke tingkat sekolah. Demikian pula dalam penguasaan kurikulum, tentunya ada asesmen yang akan dilakukan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun sekolah. Dan akhirnya, sumber-sumber belajar terutama akan ditangani pada tingkat sekolah. Di sinilah letaknya reformasi manajemen pendidikan, yaitu manajemen yang berbasis sekolah. Sebab pada akhirnya segala kegiatan belajar mengajar, segala upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui standar yang telah disepakati, merupakan pekerjaan sekolah/madrasah.[146]

Selain di Amerika Serikat, Finlandia juga merupakan negara maju yang sistem pendidikannya bagus. Sistem pendidikan di Finlandia tidak membeda-bedakan peserta didik seperti di Indonesia yang pintar di kelas A, yang pintar dapat masuk ke sekolah unggulan dan sebagainya. Tidak ada diskriminasi peserta didik yang didasarkan atas tingkat intelektual mereka, baik rendah, sedang maupun tinggi. Peserta

[145] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 258.

[146] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, h. 263.

didik hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu peserta didik yang lambat belajar dan peserta didik yang cepat belajar. Indonesia dikenal banyak membeda-bedakan peserta didik. Inilah yang sebenarnya tidak manusiawi. Sebagaimana tergambar dalam prinsip-prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan Finlandia, negara ini menganut prinsip pendidikan humanis. Pendidikan humanis tersebut didefinisikan sebagai keseluruhan unsur dalam pendidikan yang mencerminkan keutuhan manusia dan membantu agar manusia menjadi lebih manusiawi dengan tiga prinsip sebagai berikut, pertama dalam proses pendidikan, pengembangan hati dan pikiran harus berjalan secara bersama-sama. Kedua, peserta didik harus diberi kesempatan untuk berkenalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang abadi dan universal. Ketiga, dalam pendidikan harus ada kerja sama yang erat antara peserta didik dan pendidik, juga antara teori dan praktek pendidikan. Finlandia menterjemahkan prinsip humanis dengan memberikan kesempatan yang sama pada seluruh anak yang telah berusia tujuh tahun untuk mulai mengenyam bangku pendidikan dasar. Anak laki-laki maupun perempuan, dari keluarga dengan latar belakang ekonomi rendah hingga tinggi, anak imigran maupun penduduk asli, semuanya berkesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah dasar Finlandia tanpa dipungut biaya sepeserpun. Bahkan anak-anak lemah ingatan atau mental maupun dengan kasus psikologis khusus juga memiliki kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya.[147]

Mata pelajaran inti dan distribusi mata pelajaran dalam silabus pendidikan dasar Finlandia ditetapkan melalui regulasi. Kurikulum pendidikan di Finlandia intinya lebih banyak menekankan penguasaan bahasa dan sastra termasuk bahasa asing pada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, peserta didik

[147] RB Kasihadi, "Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju", *Widyatama*, No. 2, Vol. 20 Tahun 2011, h. 148.

Finlandia tidak dipaksa oleh pendidik untuk mencapai target tertentu. Pendidik hanya menginformasikan tentang nilai-nilai yang dapat dicapai oleh peserta didik apabila mereka memenuhi taraf tertentu. Target pembelajaran dibuat sendiri oleh peserta didik dengan bantuan orang tua peserta didik. Sistem pendidikan Finlandia memahami belajar sebagai proses bertahap yang tidak bisa mengenal adanya sistem tinggal kelas, ini memberikan kesempatan pada peserta didik usia sekolah dasar kelas satu sampai sembilan untuk berada di sekolah hingga sepuluh tahun lamanya dan bagi peserta didik usia sekolah menengah kelas sepuluh sampai dua belas hingga empat tahun. Finlandia juga tidak mempunyai rangking sebagaimana Indonesia yang selalu merangking peserta didiknya dalam rapor penilaian akhir semester atau akhir tahun. Sebab peringkat atau nilai dianggap tidak penting oleh pendidik, yang penting adalah bagaimana peserta didik dapat menguasai materi pelajaran. Beban belajar peserta didik di Finlandia hanya 190 hari belajar per tahun, sementara di Indonesia mencapai hampir 230 hari per tahun. Setiap minggunya peserta didik belajar hampir 40 jam. Akibatnya banyak peserta didik menjadi stress dan bahkan banyak yang mengalami *school phobia.*[148] Stress tidak mau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi juga dikarenakan sekolah yang terlalu memberikan beban yang tidak sewajarnya sehingga motivasi untuk ke arah sana agak kurang diminati. Ini berpengaruh lulusan Doktor di Indonesia lebih sedikit dibandingkan negara-negara maju.

Kualitas sarana pendidikan di Finlandia juga tidak dapat direflesikan dalam kualitas fisik bangunan sekolah. Hal ini dibuktikan salah satunya sekolah berkualitas tinggi, bangunan sekolahnya bahkan mirip dengan gedung olahraga bulu tangkis

[148] RB Kasihadi, "Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju", *Widyatama,* h. 149.

atau mirip dengan gudang. Peserta didik tidak hanya belajar dikelas-kelas, melainkan mereka diperbolehkan belajar disudut-sudut ruangan maupun dengan mempelajari materi pelajaran apapun. Bahkan apabila mereka merasa penat maka pendidikpun memperkenankan mereka untuk bermain. Pemerintah Finlandia mewajibkan setiap sekolah untuk menyediakan fasilitas bimbingan konseling bagi peserta didiknya. Mereka memperhatikan yang luar biasa besarnya pada peserta didik yang memiliki gangguan psikologis dan lemah mental dengan cara memberi bantuan dengan segera. Perhatian pemerintah sangat besar dalam pendidikan generasi penerus bangsa tersebut. Finlandia telah berhasil membuat minimal tingkat pengangguran di negeri mereka. Kreativitas para lulusan sekolah-sekolah Finlandia juga sudah terbukti secara internasional, sistem pendidikan yang diaplikasikan oleh negara maju dengan pendapatan perkapita penduduknya yang sangat tinggi ini sudah terbukti berhasil mengoptimalkan prestasi belajar peserta didik mereka hingga meraih predikat terbaik dunia.[149]

D. Mutu Madrasah dan Akreditasi sebagai Tolok Ukur

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat (2) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan perubahan kedua PP Nomor 13 Tahun 2015 menyatakan bahwa penjaminan mutu pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program yang terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan itu bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kebijakan akreditasi madrasah didorong oleh upaya pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu.

[149] RB Kasihadi, "Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju", *Widyatama,* h. 151.

Untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu, maka setiap lembaga pendidikan harus dapat memenuhi atau melampaui standar yang ditentukan melalui kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan Undang-Undang.

UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pasal 35 ayat (3) yaitu pengembangan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Dan PP No 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 37 ayat (1) mengemanatkan pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP secara nasional.[150]

Adapun tugas dan wewenang BSNP meliputi, mengembangkan standar nasional pendidikan, menyelenggarakan ujian nasional, memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian dan kegrafikaan buku teks pelajaran, dan menetapkan karya sastra Indonesia unggulan yang wajib dipelajari peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.[151]

Dalam mengembangkan standar nasional pendidikan, BSNP membentuk tim ahli yang berasal dari berbagai perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, para ahli dan praktisi lapangan. Dalam melaksanakan ujian nasional BSNP didukung oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional. Dalam

[150] http://www.bsnp-Indonesia.org (BSNP, Penjelasan Singkat Tentang BSNP)

[151] PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 76 ayat (3) dan PP No. 32 Tahun 2013

menjalankan tugas penilaian buku teks mata pelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah, BSNP didukung oleh Pusat Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional.[152]

Pada awal BSNP dibentuk pada bulan Mei tahun 2005, anggota BSNP membuat suatu kesepakatan, yaitu masa kerja ketua dan sekretaris BSNP adalah satu tahun, kepemimpinan BSNP bersifat kolegial, yaitu sebagai koordinator kegiatan, semua keputusan BSNP ditetapkan pada rapat pleno BSNP, semua anggota BSNP wajib hadir pada rapat pleno mingguan pada hari Selasa sejak jam 09.00 sampai dengan jam 16.00, semua anggota BSNP harus memahami semua standar dan hal-hal yang berkaitan yang dikembangkan BSNP, setiap anggota BSNP diharapkan aktif dalam tiga kegiatan tim yang dibentuk BSNP, semua informasi yang diperoleh pimpinan BSNP disampaikan kepada semua anggota BSNP. Dalam menjalankan roda organisasinya, BSNP dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris, yang dipilih oleh anggota secara demokratis berdasarkan sidang pleno BSNP. Semua keputusan organisasi ditetapkan melalui sidang pleno dengan kuorum[153] setengah tambah satu dan diusahakan diambil berdasarkan atas kemufakatan. Dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan (SNP), BSNP berwewenang untuk membentuk tim ahli yang terdiri dari para pakar dari berbagai bidang keilmuan dan institusi terkait. Masa kerja tim ahli tersebut adalah satu tahun. [154]

Pada umumnya, kegiatan penjaminan mutu melibatkan pihak internal dan pihak eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh pelaku pendidikan di satuan pendidikan, terutama oleh kepala sekolah/madrasah dan beberapa guru yang ditugaskan

[152] Buku Laporan BSNP Tahun 2010 (BSNP: Februari 2011), h. 3

[153] Kuorum adalah jumlah minimum anggota

[154] Buku Laporan BSNP Tahun 2010, h. 8

sebagai tim evaluasi atau auditor. Sedangkan evaluasi eksternal dilakukan oleh organisasi independen, misalnya Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan, jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.[155]

Inti penjaminan mutu adalah rencana dan tindakan sistematis dalam menyediakan kepercayaan terhadap mutu. Pada proses penjaminan mutu, dilakukan kegiatan penyempurnaan yang umumnya berupa upaya pemenuhan mutu untuk mencapai SNP atau melakukan peningkatan standar jika SNP sudah dipenuhi. Berdasarkan model penjaminan mutu secara umum, pada dasarnya proses penjaminan mutu mengandung empat ciri fungsional, yaitu penetapan standar, pemenuhan standar, evaluasi secara terus-menerus dan peningkatan mutu. Adapun berdasarkan ciri fungsional penjaminan mutu tersebut, maka siklus penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dimulai dari penetapan standar, evaluasi, pemenuhan standar, audit internal, rekomendasi peningkatan mutu, peningkatan mutu dan adanya standar baru, lalu begitu seterusnya.[156]

POS pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah terdiri dari lima belas langkah sebagaimana diuraikan berikut ini.[157] Langkah pertama, BAP-S/M menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik dan Kanwil Kemenag Provinsi. Kedua, BAP-S/M mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk mendaftar

[155] http://indonesia.go.id/?layanan_pendidikan=badan-akreditasi-nasional-sekolah-madrasah-ban-sm, diakses pada hari Kamis 13 September 2018 pukul 23:05 WIB.

[156] Ridwan Abdullah Sani, dkk., *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 153.

[157] BAN-S/M, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu*, (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah: 2014), h. iv

akreditasi melalui Disdik/Kab/Kota dan Kanwil/Kankemenag. Ketiga, Disdik Prov/Kab/Kota dan Kanwil/Kankemenag mengusulkan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Keempat, BAP-S/M menyampaikan perangkat akreditasi kepada sekolah/madrasah. Kelima, sekolah/madrasah mengisi instrumen data dan informasi pendukung dan instrument akreditasi. Keenam, sekolah/madrasah mengirimkan isian instrument akreditasi kepada BAP-S/M. ketujuh, BAP-S/M bersama asesor melakukan evaluasi isian instrument dan audit dokumen untuk merekomendasikan kelayakan sekolah/madrasah yang akan divisitasi. Kedelapan, BAP-S/M menetapkan kelayakan sekolah/madrasah. Kesembilan, BAP-S/M menugaskan asesor melaksakan visitasi ke sekolah/madrasah. Kesepuluh, BAP-S/M melakukan validasi hasil visitasi. Kesebelas, BAP-S/M melakukan verifikasi hasil visitasi. Kedua belas, BAP-S/M menetapkan hasil dan rekomendasi akreditasi. Ketiga belas, BAP-S/M menerbitkan sertifikat akreditasi. Keempat belas, BAP-S/M melaporkan data (*raw* data) dan hasil akreditasi kepada BAN-S/M dan pihak terkait. Kelima belas, BAP-S/M mensosialisasikan hasil akreditasi kepada masyarakat.

Badan Akreditasi mengambil langkah kegiatan dalam mengakreditasi madrasah, pertama menyiapkan data target sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Kedua, Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah mengundang seluruh anggota untuk menghadiri rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi. Ketiga Badan Akreditasi Madrasah mengundang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Kantor Wilyah Kementrian Agama untuk menghadiri rapat pleno penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang diusulkan untuk diakreditasi. Keempat, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama atau yang mewakili, menghadiri rapat pleno dengan membawa kelengkapan dokumen dan informasi tentang sekolah/madrasah. Kelima, Badan Akreditasi

Madrasah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama menetapkan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diusulkan untuk diakreditasi, sesuai dengan anggaran yang tersedia. Keenam, Ketua Badan Akreditasi Madrasah , Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama menandatangani berita acara penetapan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Adapun dokumen yang diperlukan adalah data alokasi sasaran akreditasi sekolah/madrasah dari APBN dan APBD, jumlah sekolah/madrasah untuk setiap jenis dan jenjang di setiap kabupaten/kota, jumlah sekolah/madrasah yang sudah dan yang belum diakreditasi.[158]

Tanggung jawab BAN-S/M adalah menyediakan perangkat akreditasi sekolah/madrasah pada *website* BAN-S/M. BAP-S/M menyampaikan perangkat akreditasi atau menginformasikan ke sekolah/madrasah untuk mengunduh/menggandakan perangkat akreditasi dari *website* BAN-S/M. Adapun sekolah/madrasah bertanggung jawab untuk menunduh/menggandakan dan mempelajari perangkat akreditasi.

Sesuai dengan pedoman akreditasi sekolah/madrasah, instrument akreditasi yang diisi oleh sekolah/madrasah perlu dievaluasi untuk menjamin obyektifitas penilaian sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Dokumen yang akan dilampirkan dalam permohonan untuk diakreditasi perlu diaudit untuk menjamin bahwa sekolah/madrasah yang akan diakreditasi telah memenuhi persyaratan. Tujuannya untuk memperoleh data sekolah/madrasah yang valid dan layak untuk divisitasi.[159]

[158] BAN-S/M, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu*, h. 4

[159] BAN-S/M, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu*, h. 22

Salah satu upaya yang dilakukan oleh BAN-S/M adalah melaksanakan penetapan akreditasi dan rekomendasi. Agar penetapan benar-benar objektif sesuai sekolah/madrasah maka perlu dilakukan verifikasi dokumen akreditasi. Selain itu pada saat penetapan akreditasi maka yang penting lagi hasil akreditasi adalah rekomendasi sebagai input untuk perbaikan. Harapannya adalah melalui kegiatan validasi hasil visitasi akan terjadi peningkatan mutu sekolah/madrasah. Dengan demikian akan bermuara pada terwujudnya akreditasi bermutu untuk pendidikan bermutu.[160]

Kegiatan akreditasi madrasah maupun sekolah merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga baik kepala madrasah, guru maupun tenaga administrasi harus mampu menginterpretasikan semua instrument evaluasi diri madrasah (EDM) yang bersangkutan agar keseluruhan standar yang telah disiapkan terpenuhi dengan baik. Kemampuan dalam mengisi dan memenuhi evaluasi diri madrasah dan seluruh komponen pendukungnya, sangat membantu madrasah untuk memperoleh nilai yang maksimal dari asesor. Salah satu tugas utama asesor adalah mencocokkan apa yang ada pada evaluasi diri madrasah dengan kondisi nyata di madrasah. Terpenuhinya delapan indikator Standar Nasional Pendidikan di madrasah, mengindikasikan telah terpenuhinya unsur kualitas pendidikan madrasah melalui akreditasi. Maka sangat diperlukan manajemen tata kelola yang bermutu sehingga mampu menghasilkan proses yang berkualitas yang akan membawa kepada tujuan akhir yaitu madrasah berkualitas.

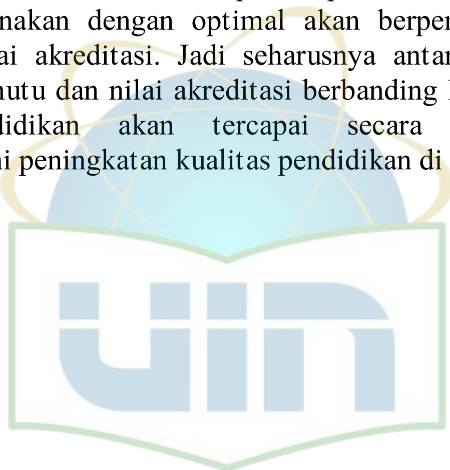
Peringkat dan status akreditasi dapat menjadi acuan bagi orang tua peserta didik dalam memilih sekolah/madrasah. Terlepas dari hasil akreditasi, kenyataan lulusan yang bermutu,

---

[160] BAN-S/M, *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu*, h. 42

sekolah yang nyaman, aman, kondusif untuk belajar menjadi alasan orang tua dalam memilih madrasah. Tingkat kepuasaan orang tua dan peserta didik atas mutu pelayanan madrasah merupakan hal yang dapat dirasakan yang dapat memotivasi peserta didik untuk berprestasi.[161]

Kesimpulan dari bab II ini berdasarkan semua paparan yang telah disajikan, maka nampak jelas bahwa sekarang ini penjaminan mutu bukan hanya sebatas pemenuhan secara administratif, namun harus benar-benar diimplementasikan dengan baik oleh madrasah. Apabila pelaksanaan penjaminan mutu dilaksanakan dengan optimal akan berpengaruh dengan tingginya nilai akreditasi. Jadi seharusnya antara pelaksanaan penjaminan mutu dan nilai akreditasi berbanding lurus, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai secara hakikat dan mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.



[161] Meni Handayani, "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2016, h. 197.



مؤسسة التربوية الإسلامية العصرية "بمعهد دارالحكم"

DAAR EL HIKAM ISLAMIC EDUCATION FOUNDATION

Pondok Pesantren Modern Daar El Hikam

PONDOK RANJI – CIPUTAT TIMUR – TANGERANG SELATAN

SERANG – BANTEN

https://daarelhikamciputat.wordpress.com

www.daarelhikam.sch.id

BAB III

MEMBANGUN MADRASAH BERMUTU MELALUI *STANDARD BASED EDUCATION*

Dalam rangka memfokuskan pembahasan bab ini maka sub bahasan yang disajikan adalah profil Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta yang berupa sejarah madrasah menjadi madrasah berstandar nasional, standar mutu pendidikan madrasah, akreditasi madrasah dan sistem kebijakan mutu madrasah.

A. Perjalanan Menuju Madrasah Bermutu

Madrasah Pembangunan lahir berawal dari keinginan tokoh-tokoh di Departemen Agama dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan adanya pendidikan Islam yang representatif. Pada awal tahun 1972, panitia pembangunan gedung madrasah komprehensif dibentuk oleh Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. H.M. Toha Yahya Omar. Bulan Juni 1972, bertepatan dengan lustrum III IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dimulai pembangunan gedung madrasah yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Menteri Agama RI pada masa itu, yaitu Prof. H.A. Mukti Ali dan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah. Tanggal 17 November 1973, gedung madrasah diserahterimakan dari pimpinan bagian proyek pembinaan bantuan untuk madrasah swasta Pemda (Pemerintah Daerah) DKI Jakarta kepada IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada awal tahun 1977, madrasah Pembangunan membuka tingkat Tsanawiyah, siswa angkatan pertama berjumlah 19 orang. Sesuai dengan keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak awal September 1974 pembinaan madrasah Pembangunan dilaksanakan oleh tim pembinaan yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Tarbiyah. Tugas tim ini di antaranya adalah menyiapkan madrasah Pembangunan sebagai madrasah

laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada tahun 1978 madrasah Pembangunan ditetapkan sebagai madrasah pilot proyek percontohan oleh Departemen Agama RI melalui Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam Depag RI Nomor: Kep/D/03/1978. Berdasarkan keputusan tersebut, kemudian diselenggarakan kegiatan penataran penulisan modul dan uji coba pembelajaran dengan sistem modul. Empat modul bidang studi Alquran Hadist, Bahasa Arab, Bahasa Indonesia, dan Matematika telah diujicobakan sampai dengan tahun 1985.

Mulai tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 06 Tahun 2008, wewenang pembinaan dan pengelolaan madrasah Pembangunan UIN dilimpahkan kepada yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengembangan sebagai madrasah laboratorium dilaksanakan bersama-sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.[1] Ini berarti bahwa Madrasah Pembangunan bukanlah lembaga pemerintah (bukan madrasah negeri), tetapi merupakan lembaga swasta yang pengelolaannya di bawah yayasan tersebut dan bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang merupakan lembaga milik pemerintah atau negeri, dalam hal ini di bawah Departemen Agama. Konsekuensi dari status swasta ini antara lain yang paling penting ialah bahwa MTs Pembangunan UIN harus mandiri dalam menggali, mengelola, dan mempertanggungjawabkan semua sumber daya dan biaya lembaga. Seiring dengan perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sejak tahun 2002 madrasah Pembangunan

[1] Yang sekarang menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan / FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

IAIN Jakarta mengikuti perubahan nama menjadi madrasah Pembangunan UIN Jakarta.

Tahun 2008 Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta ditetapkan sebagai Madrasah Standar Nasional (MSN) oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi DKI Jakarta dengan Nomor: Kw.09.4/4/5/HK.005/2081/2008.[2] Dengan usaha gigih, inovatif, kreatif dan penuh kerja keras MTs Pembangunan UIN mengalami kemajuan, dengan indikator antara lain adalah jumlah siswa yang mendaftar di madrasah ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dan pembangunan yang terus berkembang dari fasilitas, sarana prasarana maupun sumber daya manusia di dalamnya.

Bertambahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap MTs Pembangunan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan indikator meningkatnya jumlah murid dari tahun ke tahun, seperti yang diuraikan di atas, bukanlah suatu hal yang kebetulan. Kenyataan tersebut jelas merupakan respon positif terhadap peningkatan mutu madrasah yang mampu ditunjukkan kepada masyarakat, meskipun adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain yang ikut mempengaruhinya, misalnya karena anak guru, kerabat yayasan, jarak yang dekat dan lainnya. Tetapi menurut pengamatan penulis, faktor-faktor tersebut sangatlah kecil dan tidak dominan. Sebab latar belakang para orang tua murid mayoritas adalah dari kalangan menengah ke atas[3] yang terdidik dan rasional. Jika ada kebetulan beberapa faktor tersebut, namun faktor kualitas madrasah tetap menjadi pertimbangan utama. Seperti yang dikatakan oleh salah satu komite madrasah dan juga

[2] *Website* Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, diakses 16 April 2018, http://www.mpuin-jkt.sch.id/halaman/detail/sejarah-singkat

[3] Secara ekonomi, hal ini dibuktikan dari uang pangkal yang besar ketika masuk dan sumbangan penyelenggaraan pendidikan/ SPP yang relatif di atas rata-rata.

sebagai wali murid MP, saya sangat mempertimbangkan dalam menyekolahkan anak, pertimbangan saya memilih MP untuk anak saya karena ada beberapa faktor di antaranya kurikulum agama yang padat dan seimbang dengan umum, letaknya strategis, akses mudah, biaya masih terjangkau dibanding sekolah selevel (yang sudah internasional maupun madrasah yang terakreditasi A pada nasional, dan memiliki prestasi yang banyak), fasilitas cukup memadai, tenaga pendidik berkualitas, alumninya sudah banyak yang berhasil, ekstrakurikuler yang beragam dan mencetak prestasi dan anak saya sudah dua orang yang sudah tamat di MP, dan *alhamdulillah* kultur/ budaya keagamaannnya sangat baik dalam kehidupan sehari-hari.[4]

Selain itu indikator mutu madrasah juga ditandai dengan banyaknya prestasi, baik prestasi akademis maupun nonakademis, yang diraihnya. MTs Pembangunan UIN Jakarta menurut daftar rekap nilai ujian nasional selalu meraih peringkat ke-1 MTs Negeri/ swasta kota, dan peringkat ke-2/3 MTs negeri/swasta DKI Jakarta. Rata-rata nilai UN dari tahun 2009-2018 hampir sebelas tahun terakhir ini mencapai delapan puluh.[5] Prestasi literasi juga telah dihasilkan oleh salah satu siswa MTs Pembangunan UIN dengan membuat buku yang berjudul "Hezbollah" pada pekan pesta literasi Agustus 2018, dan prestasi nonakademis lainnya.[6] Kualitas madrasah tersebut juga ditunjukkan dengan keberhasilan sebagian besar alumni dapat diterima di sekolah-sekolah favorit yang mempersyaratkan calon

[4] Wawancara komite madrasah Pembangunan drg. Silvia Wahyuni, di ruang komite madrasah Pembangunan hari Kamis, 9 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

[5] Data diperoleh dari bagian kepala DIKJAR (Pendidikan dan Pengajaran) MP UIN Jakarta, pak Efron, di ruang kepala Dikjar MP UIN tanggal 28 Maret 2019.

[6] Prestasi nonakademis MTs Pembangunan UIN karena banyak maka terlampir.

murid yang berkualitas, terutama dari sisi akademis seperti MAN Insan Cendikia Serpong, SMAN 1 Tangerang Selatan, MAN 4 Jakarta, SMAN 34 Jakarta, SMA Al-Azhar 1 dan lainnya.[7]

Optimisme lembaga untuk mencapai visi dan misi, juga didukung dengan sumber daya yang ada, baik manusia, materil, maupun ruh semangat madrasah. Sumber daya manusia berupa pengurus yayasan, direktur, kepala madrasah, pegawai sampai yang terpenting yaitu para guru, bisa dikatakan sudah mumpuni dan berkualitas. Indikator dari kualitas ini antara lain bisa dilihat dari segi tingkat pendidikan dan bidang spesialisasi yang dimiliki sesuai dengan tugas yang diembannya. Sebagai contoh, para guru yang merupakan unsur utama keberhasilan pendidikan di madrasah, MTs Pembangunan UIN tahun 2019 yang jumlah gurunya 49 orang, semua (100%) sudah berijazah sarjana (S1), bahkan 9 orang berijazah master (S2). Mereka rata-rata berasal dari fakultas keguruan dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang sudah terakreditasi.[8] Demikian juga mata pelajaran yang diampu juga sesuai dengan spesialisasi keguruannya. Kondisi obyektif guru yang dinilai sudah dianggap memenuhi tingkat kelayakan mengajar tersebut lebih terbantu lagi dalam melaksanakan tugas keguruannya dengan dimilikinya sumber daya materil yang mumpuni, berupa gedung dan ruang kelas yang sangat representatif, laboratorium yang memadai, sarana MCK, sarana ibadah yang berupa masjid lengkap dengan tempat bersucinya, kantin madrasah, koperasi, sarana olah raga,

[7] Data diperoleh dari bagian kepala DIKJAR (Pendidikan dan Pengajaran) MP UIN Jakarta, pak Efron, di ruang kepala Dikjar MP UIN tanggal 28 Maret 2019.

[8] Data daftar tenaga pendidik dan kependidikan MTs Pembangunan UIN Jakarta, diperoleh dari bagian kepala Tata Usaha Kepegawaian MP UIN Jakarta, di ruang Tata Usaha bagian kepegawaian, tanggal 21 Maret 2019.

komputer, LCD, perpustakaan yang lengkap baik buku berbasis cetak maupun digital, sistem manajemen yang sudah mapan.[9]

Dalam upaya mempertahankan dan usaha untuk lebih meningkatkan prestasi dan reputasi, maka MP UIN menitikberatkan pembinaan dan pengembangan pada *basic sience*, bahasa, dan *al-akhlāk al-karīmah*. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa memasuki era global, fakta menunjukkan bukan saja semakin ketatnya persaingan kemampuan diri, tetapi juga semakin terbuka pintu-pintu yang mengarah pada perusakan moral. Madrasah sebagai lembaga pendidikan menjadi alternatif yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, kepribadian, dan kualitas bangsa di masa yang akan datang. Titik berat pembinaan dan pengembangan diri ini menjadi harga jual Madrasah Pembangunan UIN dan menjadi landasan penyusunan program tahunan sehingga hasilnya akan dirasakan oleh peserta didik dan para pemangku kepentingan terhadap pendidikan.

Mulai tahun pelajaran 2010/2011 diadakan rintisan program *bilingual* di tingkat tsanawiyah yang secara intens dievaluasi dan disempurnakan. Pada tahun pelajaran 2015/2016 Madrasah Aliyah (MA) Pembangunan UIN Jakarta membuka kelas bahasa dengan program utamanya penguasaan TOEFL (peserta didik kelas X) dan IELTS (peserta didik kelas XI). Dan pada tahun pelajaran 2016/2017 MA Pembangunan UIN Jakarta telah dicanangkan sebagai madrasah berbasis riset. Pada aspek manajemen madrasah Pembangunan UIN Jakarta mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 No.QSC:00863 untuk pelayanan pendidikan pada seluruh satuan pendidikan.[10]

---

[9] Hasil observasi langsung dan melihat data sarana prasarana MP UIN Jakarta

[10] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, (MP UIN: Jakarta, 2018), h. 3

B. Standar Mutu Pendidikan Madrasah Pembangunan UIN

Madrasah bermutu sangat erat hubungannya dengan keterlibatan masyarakat secara totalitas di dalamnya. Mutu menuntut komitmen pada kepuasan pelanggan yang memungkinkan peningkatan kualitas pada para karyawan, siswa dalam mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Charles Hoy dalam bukunya *Improving Quality in Education*, merumuskan kualitas pendidikan adalah evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan mengembangkan bakat siswa dalam suatu proses, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien yang membiayai proses atau *output* dari proses pendidikan.[11] Menurut Hoy dan Miskel, sekolah bermutu adalah sekolah yang efektif, yang terdiri dari *input*, proses, dan *output*.[12]

Sasaran mutu madrasah Pembangunan UIN Jakarta, oleh pusat penelitian, pengembangan dan jaminan mutu yaitu:[13]

1. Terwujudnya sistem manajemen mutu (SMM) mandiri.
2. Terlaksananya penelitian tentang pembiasaan Islami peserta didik di lingkungan keluarganya.
3. Terpenuhinya kebutuhan jenis pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Terpantaunya capaian hasil belajar setiap mata pelajaran setiap semester di TK, MI, MTs dan MA.
5. Terlaksananya penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru.

---

[11] Charles Hoy, *Improving Quality in Education*, (London: Falmer Press, 2000), h. 10.

[12] Wayne K. Hoy, dan Cecil G. Miskel, *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*, (McGraw-Hill, 2008), h. 91

[13] Data lapangan pamplet di ruang kepala P3JM (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.

6. Terlayaninya mahasiswa dan pihak umum dalam melakukan observasi dan penelitian di lingkungan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.
7. Terlaksananya penelitian-penelitian sebagai acuan rekomendasi kebijakan peningkatan program dan mutu madrasah.

Sasaran mutu madrasah Pembangunan UIN Jakarta dirumuskan berdasarkan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) dan evaluasi serta koordinasi P3JM[14] yang berpacu untuk memaksimalkan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Sehingga dengan adanya sasaran mutu, peningkatan mutu/kualitas madrasah semakin terukur, jelas dan terarah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa pendidikan Indonesia menggunakan delapan standar yang menjadi acuan dalam membangun dan meningkatkan kualitas pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Kesatuan Republik Indonesia. Adapun standar secara nasional mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.[15] Madrasah ideal yang

[14] Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu.

[15] Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ditetapkan bahwa Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep

diharapkan di masa depan adalah madrasah yang mampu bersaing di dunia global, yang menghasilkan para pelajar yang kreatif, inovatif, berilmu matang, dan menjadi muslim yang baik.

Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.[16] Madrasah merupakan proses pembelajaran dan pendidikan, oleh karena itu untuk mewujudkan pendidikan yang baik hendaknya memiliki standar proses yang baik, di antaranya; pertama, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, inovatif dan kreatif. Kedua, proses pembelajaran yang memberikan keteladanan bagi peserta didik. Ketiga, setiap tahun pendidik melakukan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efesien. Keempat, perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Kelima,

keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Selanjutnya, tingkat kompetensi dirumuskan berdasarkan kriteria tingkat perkembangan peserta didik, kualifikasi kompetensi Indonesia, dan penguasaan kompetensi yang berjenjang.

[16] Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan menengah. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan Kompetensi Lulusan dan Standar Isi yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pembelajaran setiap peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik per pendidik. Keenam, proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ketujuh, penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian, dapat berupa tes tulis, observasi, tes praktik, penugasan perorangan atau kelompok, sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai.[17]

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Madrasah yang diharapkan masyarakat adalah madrasah yang mampu meluluskan alumni sesuai dengan kebutuhan zaman dan memiliki standar kompetensi lulusan.[18]

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik dan tenaga kependidikan pada madrasah di masa depan agar memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yaitu:

---

[17] Dadi Permadi dan Arifin Daeng, *Panduan Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

[18] Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan.

1. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam pengelolaan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang meliputi mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat sebagai berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan berdasarkan peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.43 Tahun 2009 tentang Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program paket A, paket B dan Paket C.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B dan Paket C.

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berekreasi dan berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.[19]

Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah Pusat.[20]

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Untuk meningkatkan kualitas madrasah agar semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan memenuhi harapan para *stakeholder*nya membutuhkan pengelolaan pembiayaan yang profesional baik dalam penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal yaitu; pembiayaan madrasah terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.[21]

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan di madrasah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh peserta didik, penilaian hasil belajar

---

[19] Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

[20] Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

[21] Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya.

oleh madrasah, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas. Penilaian hasil belajar oleh madrasah bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel, serta diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali dalam satu tahun pelajaran. Hasil ujian nasional dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk pemetaan mutu program dan satuan pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, penentuan kelulusan peserta didik, pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.[22]

C. Akreditasi Madrasah

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Pasal 2 ayat 2 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan perlu dilakukan dalam tiga program yang terintegrasi yaitu evaluasi, akreditasi dan sertifikasi. Penjaminan mutu pendidikan bertujuan melindungi masyarakat agar memperoleh layanan dan hasil pendidikan sesuai dengan yang dijanjikan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kebijakan akreditasi sekolah/madrasah didorong oleh upaya pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, maka setiap lembaga pendidikan harus dapat

[22] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

memenuhi atau melampaui standar yag ditentukan melalui kegiatan akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah, Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M).[23] Akreditasi merupakan suatu pengendalian mutu satuan pendidikan yang bersangkutan. Akreditasi merupakan suatu pengendalian dari luar melalui proses evaluasi tentang pengembangan mutu lembaga pendidikan. Hasil akreditasi perlu diketahui oleh masyarakat yang menunjukkan posisi lembaga pendidikan yang bersangkutan dalam menghasilkan produk atau jasa yang bermutu. Pelaksanaan akreditasi dilakukan oleh BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah). Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 60, menyebutkan bahwa sekolah perlu di akreditasi karena:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwewenang sebagai bentuk akuntabilitas publik atau pengakuan peringkat kelayakan.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan memberikan rekomendasi tentang penjaminan mutu pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang diakreditasi dan pihak terkait.

Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:[24]

---

[23] BAN-S/M, *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*, (Jakarta: BAN-S/M, 2015), h. 23

[24] BAN-S/M, *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*, (Jakarta: BAN-S/M, 2015), h. 56

1. Objektif; akreditasi sekolah/madrasah pada dasarnya merupakan kegiatan penilaian tentang kelayakan penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh sekolah/madrasah. Dalam pelaksanaan penilaiannya berbagai aspek yang terkait dengan kelayakan diperiksa dengan objektif untuk memperoleh informasi tentang keberadaannya.
2. Komprehensif; dalam pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, fokus penilaian tidak hanya terbatas pada aspek-aspek tertentu saja tetapi meliputi pula berbagai komponen pendidikan yang menyeluruh.
3. Adil; dalam melaksanakan akreditasi, sekolah/madrasah harus diperlakukan sama dengan tidak membedakan sekolah/madrasah berdasar atas budaya, agama, sosial dan tidak memandang status sekolah/madrasah dilayani sesuai dengan kriteria dan mekanisme kerja secara adil dan/atau tidak diskriminatif.
4. Transparan; data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah seperti kriteria, mekanisme kerja, jadwal serta sistem penilaian dan lainnya harus disampaikan secara transparan dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukannya.
5. Akuntabel; pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah harus bisa dipertanggung jawabkan baik dari aspek penilaian maupun keputusannya sesuai dengan aturan dan prosedur yang ditetapkan.

Mekanisme akreditasi madrasah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:[25]

1. Penyusunan rencana jumlah dan alokasi sekolah/madrasah.
2. Pengumuman secara terbuka kepada sekolah/madrasah.
3. Pengusulan daftar sekolah/madrasah.
4. Pengiriman perangkat akreditasi ke sekolah/madrasah.

[25] BAN-S/M, *Pedoman Akreditasi Madrasah 2015.*

5. Pengisian instrumen akreditasi dan instrumen pendukung.
6. Pengiriman instrumen akreditasi dan instrumen pendukung.
7. Penentuan kelayakan visitasi.
8. Penugasan tim asesor.
9. Pelaksanaan visitasi.
10. Verifikasi hasil visitasi asesor.
11. Penetapan hasil akreditasi sekolah/madrasah.
12. Penerbitan sertifikasi.
13. Pelaporan hasil akreditasi.

Setelah sekolah/madrasah mempersiapkan dan mengisi instrumen akreditasi sekolah serta informasi pendukung, sekolah/madrasah mengumpulkan berbagai bahan bukti fisik yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yaitu dokumen tertulis, yang dicetak, dokumen photo, dan material atau fisik lainnya. Selanjutnya sekolah/madrasah mengisi atau menginput semua instrumen pengumpulan data, peryaratan akreditasi, dan informasi pendukung lainnya ke dalam aplikasi yang berbasis web yaitu Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disebut Sispena-S/M[26] di laman BAN-S/M.

Dengan demikian hasil dan akreditasi ini diharapkan akan berguna sebagai:

1. Acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan madrasah.
2. Sebagai umpan balik dalam usaha memberdayakan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka

[26] Aplikasi Sispena-S/M adalah aplikasi untuk menilai akreditasi sekolah/madrasah yang berbasis web, di mana user sekolah/madrasah dapat mengakses aplikasi Sispena-S/M kapan saja dan di mana, alsalkan dapat terkoneksi dengan akses internet. Aplikasi Sispena-S/M bisa diakses melalui perangkat PC komputer, Laptop, dan bisa juga diakses melalui perangkat handphone atau perangkat lainnya yang terkoneksi internet. BAN-S/M, *Panduan Sispena-S/M Untuk Sekolah dan Madrasah 2018.*

menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah.

3. Motivasi madrasah agar terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana dan kompetetif.
4. Bahan informasi madrasah untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta secara profesionalisme, moril, tenaga dan dana.
5. Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan sebagai penyelenggara ujian nasional.

Hasil akreditasi sekolah/madrasah tersebut akan dilaporkan ke berbagai pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan dengan peningkatan mutu pendidikan. Seluruh hasil akreditasi secara nasional diumumkan melalui *website* BAN-S/M (*http://www.ban-sm.or.id*). Selain itu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota, Kementrian Agama Kab/Kota, dan penyelenggara melakukan pembinaan terhadap sekolah/madrasah berdasarkan hasil akreditasi sesuai dengan kewenangannya. Kegiatan akreditasi madrasah maupun sekolah merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan, sehingga baik kepala madrasah, guru maupun tenaga administrasi harus mampu menerjemahkan instrument evaluasi diri madrasah (EDM) yang bersangkutan agar keseluruhan standar yang telah disiapkan dapat terpenuhi dengan baik. Kemampuan dalam mengisi dan memenuhi evaluasi diri madrasah dan seluruh komponen pendukungnya, sangat membantu madrasah untuk memperoleh nilai maksimal dari asesor. Salah satu fungsi asesor akreditasi adalah mencocokkan apa yang ada pada evaluasi diri madrasah dengan kondisi nyata di madrasah. Terpenuhinya delapan Standar Nasional Pendidikan di madrasah, mengindikasikan telah terpenuhinya unsur kualitas pendidikan

madrasah melalui akreditasi. Di sinilah dibutuhkan manajemen tata kelola madrasah yang baik dan bermutu, sehingga kepala madrasah dituntut mampu mengembangkan pengetahuan mengenai manajemen madrasah.

D. Sistem Kebijakan Mutu Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta merupakan madrasah berstandar nasional dan mempunyai nilai akreditasi dengan peringkat A sesuai sertifikat akreditasi SMP/MTs yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) No. Dp 005391 tanggal 01 Nopember 2009. Selain itu Madrasah pembangunan UIN Jakarta juga telah menerapkan sistem manajemen mutu dan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari *Sucofindo international certification services* sejak tahun 2010.[27] Dengan jumlah pendidik 49 orang dan tenaga kependidikan 17 orang serta jumlah siswa 704 orang. Luas Bangunan 2.044 meter dan luas tanah 7.350 meter, yang didirikan tahun 1997 beralamat di Jalan Ibnu Taimia IV Komplek UIN Jakarta.[28]

Untuk mengetahui mutu madrasah tentunya kita juga harus mengetahui apa visi, misi, tujuan, pilar keunggulan, motto, slogan mutu dan kebijakan mutu di madrasah tersebut. Visi menggambarkan masa depan organisasi yang diinginkan, yang berkaitan erat dengan tujuan madrasah yang dieskpresikan dalam terma-terma nilai dan menjelaskan arah organisasi yang diinginkan.[29] Visi madrasah Pembangunan UIN adalah menjadi

[27] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, h. 2

[28] Dokumen Evaluasi Diri Madrasah Pembangunan UIN Jakarta 2017

[29] Tony Bush & Marianne Coleman, *Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan*, (IRGCiSoD: Sampangan Jogjakarta, 2012), h. 36

lembaga pendidikan terkemuka dalam pembinaan keislaman, keilmuan, dan ke-Indonesiaan dengan mengapresiasi potensi peserta didik. Adapun misi adalah terma lain yang sering digunakan untuk mengekspresikan tujuan organisasi untuk menjelaskan seluruh tujuan dan filosofi.[30] Misi madrasah Pembanguan UIN yaitu:

1. Menyelenggarakan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah yang menghasilkan lulusan berakhlakul karimah, cerdas dan terampil;
2. Melakukan inovasi kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang keislaman, keilmuan, dan ke-Indonesiaan;
3. Melakukan pembelajaran aktif dan menyenangkan dalam rangka meningkatkan potensi peserta didik;
4. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik;
5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu layanan dan pendidikan;
6. Menciptakan partisipasi aktif *stakeholders* madrasah untuk meningkatkan kualitas.[31]

Adapun tujuan madrasah Pembangunan UIN yaitu terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang akan melahirkan lulusan beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan kompetitif dan keunggulan komparatif, terwujudnya peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan dan kepedulian sosial, terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian

[30] Tony Bush & Marianne Coleman, *Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan*, h. 41

[31] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 5

Indonesia dan kemampuan potensi anak, tersedianya pendidik sebagai tenaga profesional yang menguasai bidang keilmuan yang diasuhnya secara luas, mendalam dan komprehensif serta memiliki kemampuan untuk mengajarkannya (*teaching skill*), berkepribadian pedagogis dan berakhlak mulia. Serta tersedianya tenaga kependidikan profesional yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh ilmu pengetahuan yang relevan, memiliki etos kerja, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi yang dilandasi akhlak mulia. Dalam sarana prasarana serta fasilitas juga bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga madrasah benar-benar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, dan juga terwujudnya peserta didik yang mandiri yang mampu melakukan *team work* melalui berbagai aktivitas belajar baik intra maupun ekstrakurikuler.[32]

Madrasah Pembangunan UIN juga mempunyai motto, yaitu cerdas, terampil dan unggul. Karena slogan mutu mengacu pada *more than just an Islamic School*. Dengan berpatokan pada lima kebijakan mutu diantaranya adalah pembiasaan *Islamic School Culture*, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, perbaikan *teaching learning process*, pencapaian layanan prima, dan pencapaian standar sarana prasarana. Lima kebijakan mutu ini akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Pembiasaan *Islamic School Culture*;

Seperti sholat *dhuha*, tadarus, pembinaan wali kelas setiap pagi hari, salam-sapa dewan guru dengan siswa, *I Can Speak* (setiap hari bahasa), budaya membaca atau literasi dan lainnya. Pembiasaan tersebut juga merupakan upaya menumbuhkan nilai moral dan agama peserta didik. Penerapan nilai moral dan agama pada proses pembelajaran mestinya diawali dengan pemahaman

[32] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 5

dari tenaga pendidik dan peserta didik terhadap konsep nilai moral dan agama dalam pembelajaran. Proses ini dapat menunjang pembentukan akhlak mulia pada para peserta didik. Pembentukan akhlak mulia tidak lain sebagai bagian dari tujuan pembelajaran pada ranah afektif (moral dan agama).[33] Pembiasaan *Islamic School Culture* diharapkan dapat membentuk akhlak baik peserta didik untuk selalu membiasakan kegiatan-kegiatan Islami atau kegiatan yang bermanfaat. Menurut al-Ghazali, akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.[34] Maka kegiatan pembiasaan budaya Islam sangat diperlukan oleh lembaga pendidikan.

2. Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Dengan Pelatihan Keprofessionalan Berkelanjutan (PKB) melalui lembaga *training*, seperti Next Edu dan Milenia serta lainnya. Kenaikan pangkat berdasarkan evaluasi dengan tulisan makalah dan presentasi.[35]Suatu pelatihan yang komprehensif dapat membantu mencapai tujuan lembaga untuk menciptakan keunggulan yang kompetitif, baik itu melalui peningkatan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap pendidik serta tenaga kependidikan.[36] Desain pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna khususnya pendidik dan tenaga kependidikan memegang peranan yang sangat penting bagi peningkatan kinerja

---

[33] Sri Laspitorin, "Metode Pengintegrasian Nilai Moral dan Agama dalam Pembelajaran Ilmu Biologi di SMA", *Jurnal Ilmiah Guru "COPE"*, No. 01/Mei 2010., h. 14.

[34] Al-Ghazali, *Ihyā' "Ulūm al-Dīn*, (Kairo: Dār al-Taqwa, 2000), h. 193.

[35] Guru dengan Penelitian Tindakan Kelas/ PTK dan tenaga kependidikan disesuaikan dengan keahliannya.

[36] Abdus Satar Niazi, "Training Development Strategy ang Its Role in Organizational Performance", *Journal of Public Administration and Governance*, Vol. I, Nomor 2, Tahun 2011.

pegawai itu sendiri.[37] Dan ada satu rencana strategi untuk memotivasi peningkatan kompetensi adalah program penggajian yang berdasarkan kompetensi.

3. Perbaikan *Teaching Learning Process;*

Dengan supervisi pembelajaran dan kelengkapan pembelajaran oleh kepala madrasah, wakil kepala dan guru senior serta evaluasi pembelajaran. Adanya evaluasi pembelajaran menurut Donald Rouse bahwa evaluasi mengenai dampak dan efektifitas pelatihan atau evaluasi pembelajaran diperlukan agar kelebihan dan kekurangan dalam program tersebut dapat diidentifikasi sehingga perbaikan dapat ditindaklanjuti.[38] Perbaikan tersebut antara lain yaitu, didadakannya kelas regular yang berdasarkan *multiple intelegent*, kelas *billingual* yang sudah terlokalisir ruang khusus di lantai empat dan lima dengan meja piket khusus dan guru *bilingual*. Dan diadakan program remedial bagi siswa yang kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dan program pengayaan bagi siswa yang sudah memenuhi KKM.

4. Pencapaian Layanan Prima

Pencapaian layanan prima baik dalam bidang kepegawaian, keuangan, penjaminan mutu internal dengan mengadakan evaluasi, narasumber, motivator, monitoring, daftar ceklis kebersihan, melengkapi fasilitas, pemanfaatan air, pelayanan antar jemput dan lain sebagainya.

5. Pencapaian Standar Sarana Prasarana

---

[37] Raja Abdul Ghafoor Khan, Furqan Akhmaed Khan, Muhammad Aslam Khan, "Impact of Training and Development on Organizational Performance", *Global Journal of Management and Business Research*, Vol. 11, Issue 7, Version 10, July 2011.

[38] Donald Rouse, "Employing Kirkpatrick's Evaluation Framework to Determine the Effectiveness of Health Information Management Courses and Program", *Perspectives in Health Information Management*, Spring, 2011.

Pencapaian standar sarana prasarana menginventarisasi kebutuhan pemangku pendidikan, menghimbau peserta didik untuk menjaga fasilitas. Adanya wali kelas di dalam kelas dari awal pembelajaran sampai dengan selesai, salah satu cara untuk meminimalisir kerusakan sarana dan prasarana. Selain MP menyediakan sarana prasarana yang memadai, peserta didik juga dihimbau untuk peduli terhadap lingkungan madrasah yang juga termasuk sarana prasarana. Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia. Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak disakiti, lingkungan memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di sekitarnya.[39]

Di MTs Pembangunan UIN yang juga di bawah naungan yayasan, sebagaimana juga diatur dalam Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA dan STATUTA) MP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang MTs mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran tingkat Tsanawiyah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, pembinaan kesiswaan dan pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16, MTs menyelenggarakan fungsi:[40]

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan perencanaan dibidang pembinaan MTs.

[39] Rabiah Z. Harahap, "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup", *Jurnal EduTech*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

[40] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, h. 10.

2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
3. Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang pembinaan MTs.
4. Pelaksanaan pembinaan kepesertadidikan dan kegiatan ekstrakurikuler.
5. Pelaksanaan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan.
6. Pelaksanaan penilaian prestasi peserta didik.
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan MTs.
8. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pelaksanaan pengawasan kegiatan dan penyusunan laporan.

Dari sekian banyak pemangku kepentingan untuk menjamin mutu madrasah, maka akan lebih memudahkan madrasah untuk mendapatkan hasil akreditasi yang maksimal. Menurut data yang peneliti temukan bahwa madrasah Pembangunan UIN khususnya di MTs selalu terakreditasi A dari awal pendirian sampai sekarang ini. Yang nanti akan dibahas pada bab berikutnya.

Gelombang Pendaftaran

Gelombang Pertama 01

23 Desember 2023 - 23 Februari 2024

Sarpas dan banggunan
Rp.2.300.000

02 **GELOMBANG KEDUA**

24 Februari 2024 - 24 Mei 2024

Sarpas dan banggunan
Rp.2.850.000

Informasi lebih lanjut

Daarelhikamofficial

Kantor ponpes Daar El Hikam
Jl. Men jangan raya No. 27, Pondok Ranji, Ciputat Timur,Tangerang Selatan, Serang, Banten

معهد دار الحكم

لحكم المؤسسة التربية الإسلامية معهد دار الحكم

DAAR EL HIKAM ISLAMIC BOARDING SCHOOL

PONDOK PESANTREN MODERN DAAR EI HIKAM

DAFTAR SEKARANG JUGA, REGISTRASI HANYA 300K!!!

Informasi Pendaftaran

Telp. 0815-8502-1267 (Ustzh Seivi)
Telp. 085927249868 (Ustd Rian)
Telp. 085814029512 (Ustzh Sopi)

PESANTREN MODERN DAAR EL HIKAM

PENERIMAAN SANTRI BARU

Tahun Ajaran

2024-2025

Visi

- Sebagai pendidik pencetak Kader pemimpin umat.
- Tempat ibadah, Tholabul ilmi.
njadi sumber pengetahuan islam, Bahasa, r'an, dan ilmu pengetahuan umum dengan p berjiwa pesantren. MISI

Misi

- Membentuk generasi yang unggul menuju generasi yang bermanfaat untuk umat. zaman.
- Mengembangkan dan mendidik generasi muslim yang berakhlak mulia, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berfikiran bebas, mengayomi masyarat.
- Mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang. Mewujudkan warga negara indonesia yang beriman dan bertaqwa.

PROGRAM UNGGULAN

- TahfidZ Qur'an
- Qiro'atul Kutub
- Kursus Bahasa Arab
- Kursus Bahasa inggrish

PERSYARATAN

- Persyaratan Photocopy ijazah 3 lembar (dilegalisir)
- Photocopy SKHUN 3 lembar (dilegalisir)
- Pas photo (3x4) 4 lembar dan (2x3) 4 lembar
- Photocopy Kartu Keluarga
- 1 lembar NISN

EKSTRAKURIKULER

- Seni baca Al-Qur'an
- Pramuka
- pencak silat
- Pengajian kitab kuning
- Kaligrafi
- Marawis,
- barzanji
- Persida
- Halaqoh arab inggris
- club Futsal
- Design grafis
- Taekwondo
- Muhadhoroh (pidato)

BAB IV
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN MUTU MADRASAH

Pendidikan selalu bergerak dan dinamis, untuk menuju peningkatan mutu pendidikan, tentunya butuh standardisasi pendidikan untuk kontrol terhadap mutu. Indonesia yang bangsanya beragam baik agama, suku dan ras, maka perlunya perhatian pemerintah dengan meratakan kualitas pendidikan melalui standardisasi pendidikan, lalu bagaimana dampak standardisasi pendidikan terhadap madrasah. Bab ini menguraikan sistem penajminan mutu MTs Pembangunan UIN, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MTs Pembangunan UIN dan dampak yang ditimbulkan dari standardisasi pendidikan terhadap mutu madrasah.

A. Sistem Penjamin Mutu Internal Madrasah Pembangunan UIN

Madrasah bermutu berbasis standar di sini yang dimaksud adalah madrasah mencapai bahkan melampaui standar nasional pendidikan yang berangkat dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005. Penjaminan mutu dalam perspektif pelanggan adalah janji atau jaminan terhadap *stakeholders*, dengan perpanjangan melalui publik, oleh karena itu lembaga harus memiliki sesuatu yang spesial tentang mutu yang akan diberikan kepada *stakeholders*. Penjaminan mutu meliputi monitoring terhadap standar mutu yang dibuat, baik oleh pemerintah maupun oleh suatu lembaga masing-masing sesuai kebutuhan masyarakat, dan peningkatan

mutu yang berdasarkan keputusan yang permanen tentang produk dan pelayanan sesuai dengan persyaratan dan standar mutu.[1]

Di Madrasah Pembangunan UIN mempunyai bagian khusus yang merupakan Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu (P3JM). Dalam Organisasi dan Tata Laksana (ORTALA dan STATUTA) MP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bagian pertama, tentang P3JM Pasal 41, P3JM adalah unsur pelaksana sebagian tugas Madrasah Pembangunan dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu yang berada di bawah direktur. P3JM dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada direktur. Pasal 42, P3JM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan akreditasi internal dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

Menurut Drs. H. Sugiono, yang menjabat sebagai kepala P3JM di antara strategi madrasah dalam menjamin mutu, pertama adalah memastikan adanya standar baku yang paling utama dalam standar pendidikan adalah akreditasi dan kedua adalah ISO 9001: 2008.[2] Akreditasi yang digunakan oleh Madrasah Pembangunan adalah pedoman akreditasi terbaru tahun 2017, akreditasi hanya berlaku lima tahun sekali dan menjadi satu standar baku dalam penjaminan mutu madrasah, agar akreditasi ini maksimal dalam penilaian kualitas madrasah maka diperkuat oleh sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, walaupun dalam perkembangannya ISO 9001:2008 sudah tidak dipakai dan sekarang yang berlaku adalah ISO 9001:2015. Sistem manajemen mutu ISO ini proses audit mutunya berjenjang 1

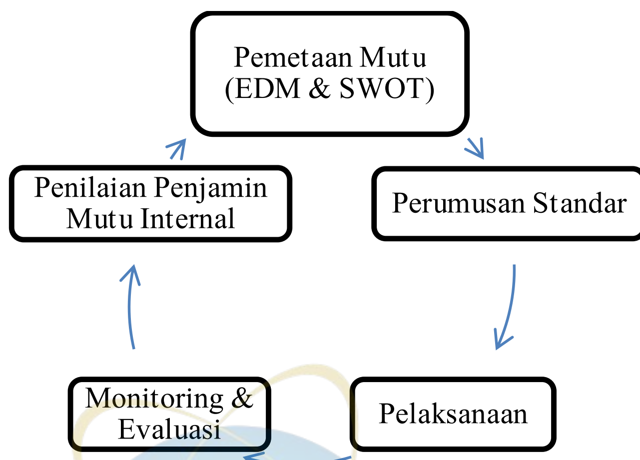
[1] Edgar Frackmann, "Quality Assurance in Higher Education", Proceedings of an International Conference, *The German Experience*, in Craft Alma, (London: The Falmer Press, 1992), h. 48.

[2] Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

tahun sekali, maka akan lebih dapat memaksimalkan dalam hal audit mutu madrasah.

Strategi yang selanjutnya adalah menjalankan strategi organisasi. Upaya mengimplementasikan penjaminan mutu berbasis standar ini, MP juga membuat tim khusus penjamin mutu internal madrasah di masing-masing satuan pendidikan. Yang fungsinya adalah untuk memastikan proses yang berjalan benar-benar sesuai dengan mutu yang diinginkan. P3JM yang mengkoordinir masing-masing mutu pada satuan pendidikan di MP, memiliki tim ahli yang memang dilatih dan sesuai dengan keahlian dalam menjamin mutu pendidikan di madrasah. Struktur organisasi madrasah Pembangunan terdiri atas, direktur dan wakil direktur, taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, pusat penelitian, pengembangan dan jaminan mutu, pusat sistem informasi, dokumentasi dan publikasi, unit pelaksana teknis baik perpustakaan maupun laboratorium, bagian tata usaha dan komite madrasah.[3] Dengan adanya organisasi yang terstruktur, maka MP akan mudah menjamin mutu di masing-masing satuan pendidikan. Sistem penjaminan mutu madrasah Pembangunan UIN dapat digambarkan sebagai berikut:

[3] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, (Jakarta: Keputusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 4.

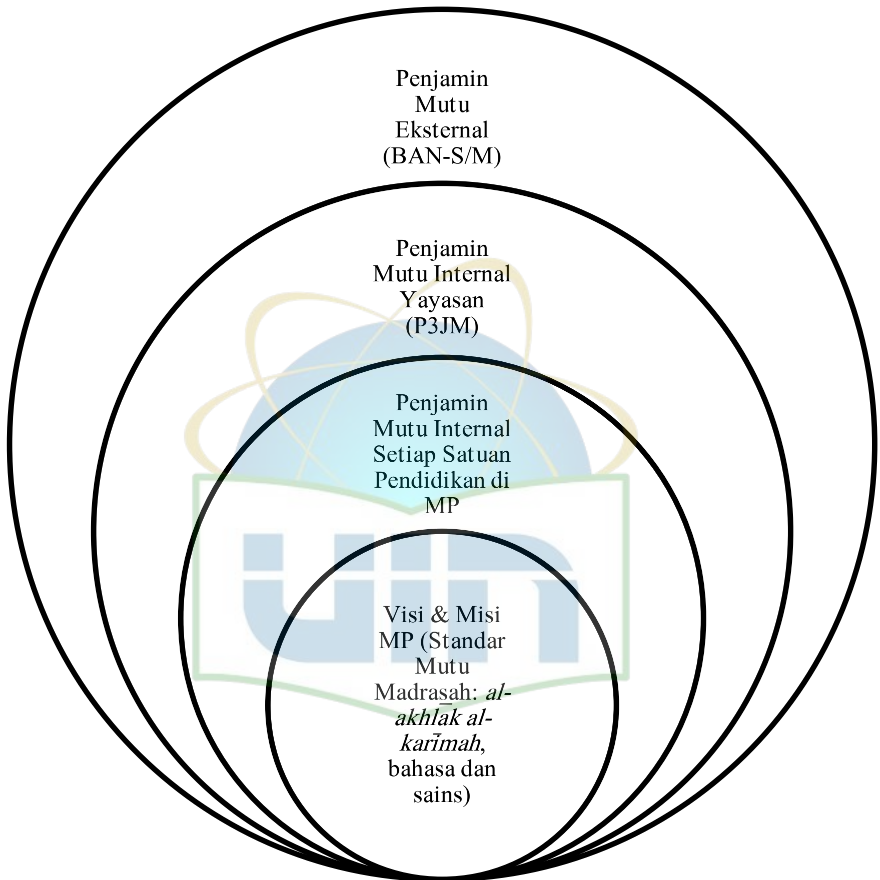


Gambar 4.1. Siklus Penjaminan Mutu Internal Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Dalam siklus penjaminan mutu internal madrasah Pembangunan UIN dimulai dari pemetaan mutu. Pemetaan mutu di sini diambil dari analisis Evaluasi Diri Madrasah dan analisis SWOT, yakni *strengths, weakness, opportunities* dan *threats*. Madrasah mengevaluasi diri baik itu kekuatan madrasah, kelemahan, peluang yang ada pada madrasah dan ancaman bagi madrasah, lalu disusunlah pemetaan mutu dan dirumuskan standar mutu madrasah menggunakan acuan Standar Nasional Pendidikan dan kebijakan pemerintah. Setelah mutu dan standar sudah dipetakan dan dirumuskan, madrasah melaksanakan proses yang sesuai dengan yang dirumuskan. Lalu penjamin mutu internal madrasah melakukan monitoring dan evaluasi dari apa yang sudah dirumuskan dengan yang dilaksanakan. Apakah sesuai atau terjadi kesenjangan. Penjamin mutu internal berhak menilai atau mengaudit mutu madrasah berdasarkan apa yang sudah dirumuskan. Jika ada kesenjangan maka madrasah bersama mengevaluasi dan diidentifikasi ulang SWOT dan akhirnya siklus penjamin mutu internal madrasah akan terus berputar, dan menghasilkan mutu yang terus meningkat. Satu tahun sekali

sebelum madrasah diaudit mutu oleh BAN-S/M, madrasah sudah melaksanakan audit mutu internal, sehingga madrasah sudah siap dan menghasilkan nilai yang maksimal. Adapun sistem penjaminan mutu madrasah secara global dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 4.2. Sistem Penjaminan Mutu MP

Sistem penjaminan mutu ini menggambarkan penjamin mutu madrasah Pembangunan UIN diawasi oleh berbagai penjamin mutu internal setiap satuan pendidikan di MP baik di TK Ketilang, MI Pembangunan, MTs Pembangunan dan MA Pembangunan (masing-masing mempunyai tim penjamin mutu yang diketuai oleh kepala madrasah) maupun penjamin mutu internal MP yakni P3JM dan penjamin mutu eksternal, yakni BAN-S/M. Dari pokok utama visi dan misi madrasah sebagai acuan yang memuat indikator standar mutu madrasah, dan juga disesuaikan dengan penjamin mutu eksternal yang acuan mutunya berupa indikator Standar Nasional Pendidikan. Sebelum MP dinilai oleh BAN-S/M terlebih dahulu MP dinilai oleh P3JM, sehingga ketika pihak penjamin mutu eksternal menilai maka penilaian yang didapatkan akan lebih maksimal. Ada tiga nilai jual mutu MTs Pembangunan UIN yang membedakan dengan madrasah lainnya yaitu *Al-akhlāk al-karīmah*, bahasa dan sains. Ini juga yang disebut sebagai pilar keunggulan MP. Lulusan MTs Pembangunan selain memiliki keilmuan dan kemampuan, mereka juga harus memiliki akhlak yang baik. Kegiatan ini dituangkan melalui *hidden* kurikulum yang disebut juga di MTs Pembangunan UIN Jakarta dengan *Habbitual Curriculum*. Pagi hari selama satu jam pelajaran, ada kegiatan pembinaan akhlak. Siswa melakukan shalat dhuha, tadarrus dan kultum. Siswa dibiasakan dengan tradisi mengucapkan salam, bersalaman dan sapa antar sesama teman. Dan untuk bahasa serta sains ada pergeseran kurikulum pada jam tatap muka, yang nanti akan dijelaskan distandar isi.

Adapun sasaran mutu madrasah Pembangunan UIN Jakarta dalam pusat penelitian, pengembangan dan jaminan mutu adalah; (1) terwujudnya sistem manajemen mutu (SMM) secara mandiri, terlaksananya penelitian tentang pembiasaan Islami peserta didik di lingkungan keluarganya, terpenuhinya kebutuhan jenis pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, terpantaunya capaian hasil belajar setiap mata pelajaran setiap

semester di TK, MI, MTs, dan MA, terlaksananya penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru, terlayaninya mahasiswa dan pihak umum dalam melakukan observasi dan penelitian di lingkungan madrasah Pembangunan UIN Jakarta, dan terlaksananya penelitian-penelitian sebagai acuan rekomendasi kebijakan peningkatan program dan mutu madrasah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 untuk mencapai sasaran mutu P3JM menyelenggarakan fungsi:[4]

1. **Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu**.

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Di dalam pendidikan diperlukan perumusan kebijakan dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu, agar kualitas pendidikan terus meningkat. Dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu, P3JM mengacu pada analisis SWOT (*strengths-weakness-opportunities-threats*) yang berlaku umum dan Evaluasi Diri Madrasah (EDM) yang bersifat khusus Madrasah Pembangunan.[5]

SWOT merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk membantu madrasah mengungkap dan mengidentifikasi permasalahan. Pentingnya analisis SWOT dilakukan agar dapat diketahui kekuatan dan kelemahan yang melekat dalam lingkungan internal sistem itu sendiri, serta peluang dan tantangan yang datang dari lingkungan eksternal sistem tersebut. Berbagai hasil studi empirik menunjukkan bahwa suatu manajemen itu akan berhasil jika mampu mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan kekuatan dan peluang yang

[4] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, h. 15.

[5] Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

dimilikinya serta mampu meminimalkan intensitas pengaruh faktor kelemahan dan hambatan yang disertai upaya untuk memperbaiki atau mengatasinya. Dari SWOT dan EDM madrasah dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri madrasah. Setelah madrasah mengetahui kekurangan-kekurangan diri madrasah, maka tim akan membuat langkah khusus untuk penjaminan mutu madrasah, sehingga madrasah akan terus dinamis dan berkembang.

Pusat penelitian, pengembangan dan jaminan mutu di madrasah Pembangunan UIN Jakarta terdiri atas kepala dan kelompok tenaga ahli. Kelompok tenaga ahli adalah sejumlah tenaga akademik dan/atau jabatan fungsional dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu. Jumlah tenaga ahli ditetapkan menurut kebutuhan atas dasar hasil analisis beban kerja. Tenaga ahli di dalam MTs Pembangunan UIN dibentuk berdasarkan empat konsorsium (kelompok mata pelajaran), yaitu kelompok mata pelajaran agama, yang meliputi: Alquran Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Khot/kaligrafi. Kelompok mata pelajaran IPA, yang meliputi: IPA terpadu (Fisika, Biologi, Kimia) dan Matematika. Dan kelompok mata pelajaran umum, yang meliputi: PPKn, IPS Terpadu, SBK, Penjasorkes, dan Prakarya. Serta mata pelajaran bahasa, yang meliputi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab.[6] Selain mata pelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dalam kurikulum MTs Pembangunan juga terdapat kegiatan pembiasaan (*Habitual Curriculum/* HC). Kegiatan ini merupakan program pembinaan dan pembiasaan kecakapan hidup nilai-nilai Islami. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi baik intrakurikuler (dhuha, tadarus Alquran, kultum dan hafalan doa) selama 40 menit

[6] Wawancara kepada kepala MTs Pembangunan: Momon Mujiburrahman, MA, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN

di pagi hari maupun ekstrakurikuler, bakti sosial dan safari dakwah, pesantren ramadhan dan lain sebagainya.

Pengelompokan mata pelajaran di atas dilakukan melalui beberapa pertimbangan, antara lain kedekatan sifat, esensi dan substansi mata pelajaran, efektivitas kerja sama kelompok dan jumlah guru dalam satu kelompok mata pelajaran. Setiap guru yang tergabung dalam kelompok guru mata pelajaran melakukan musyawarah kelompok mata pelajaran, menyusun dan melaksanakan program kerja kelompok dikoordinir oleh ketua dan sekretaris konsorsium.[7] Muatan kurikulum MTs Pembangunan UIN meliputi sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Dalam menjamin mutu madrasah diperlukan pengelompokan mata pelajaran agar dapat disampaikan kepada peserta didik dengan efektif dan efesien. Sehingga dengan adanya empat konsorsium ini mutu madrasah akan semakin meningkat khususnya dalam standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan standar penilaian pendidikan di dalam mata pelajaran masing-masing.

2. Penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

P3JM menyiapkan perumusan standar, kriteria, pedoman dan prosedur dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu madrasah menggunakan pedoman ISO 9001:2008, pedoman akreditasi tahun 2017 dan pendapat pakar mutu khususnya dalam bidang pendidikan.[8]

[7] Himpunan sarjana sebidang yang mengurus kepentingan bersama.

[8] Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

Madrasah Pembangunan UIN telah menetapkan Prosedur Operasional Standar (POS) dari tingkat taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah. POS pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.[9] Ciri-ciri POS yang efektif dan bermanfaat bagi organisasi memiliki empat syarat, yaitu sebagai berikut:

Pertama, efektif dan efisien, yakni melakukan sesuatu yang tepat dan sesuai. Penyusunan dan pelaksanaan POS harus dicapai efektifitas dan efisiensinya. Dalam hal perubahan efektifitas akan lebih kaku, namun efisiensi dengan memotong langkah-langkah yang dianggap tidak akan mengganggu hakekat suatu prosedur operasional standar dibolehkan selama tidak mengurangi ukuran kontrol internal dari prosedur yang bersangkutan.

Kedua, konsisten diperlukan untuk meningkatkan mutu POS. Maksudnya POS diterapkan secara standar dan sama untuk semua prosedur yang sama untuk semua bagian organisasi yang harus menerapkan prosedur tersebut. Untuk menjamin konsistensi diperlukan kontrol internal harus diterapkan, baik secara umum maupun rinci peraktifitas dalam suatu POS. Untuk menerapkan konsistensi diperlukan budaya organisasi yang bersifat positif. Konsisten mencakup dua aspek, yaitu konsistensi prosedur dan konsistensi lokasi. Konsistensi prosedur dicapai dengan menguji apakah sebuah prosedur diterapkan secara sama untuk lokasi yang sama. Konsistensi lokasi pada intinya menguji hal yang sama dengan konsisten prosedur hanya untuk pengujian dan penilaian

[9] Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur*, (Jakarta: Maistas Publishing, 2008), h. 79

lokasi atau bagian-bagian organisasi yang berbeda, yaitu perbedaan nilai kerja atau unit lokasi lain.

Ketiga, standar maksudnya adalah POS yang berstandar berarti kepada prosedur itu sendiri. Standar dapat dibedakan menjadi standar prosedural dan standar pemahaman. Standar prosedural adalah standar yang dapat terlihat dengan jelas/ nyata pada prosedur atau manual prosedur. Standar pemahaman adalah standar yang sudah dipahami oleh penggunaannya.

Keempat, sistematis, berarti tersusun secara rapi dan teratur, dimana ini merupakan syarat mutlak dari seluruh pedoman efektif yang akan digunakan oleh sebuah organisasi. Sistematika dalam POS dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistematika tampilan dan sistematika jelasan. Dua hal ini harus dipenuhi secara mudah dan benar oleh pengguna.[10]

Adapun peran dan manfaat POS sebagai pedoman di dalam suatu organisasi adalah untuk pedoman kebijakan, pedoman kegiatan, pedoman birokrasi, pedoman administrasi, pedoman evaluasi kinerja dan pedoman integrasi yang merupakan pengintegrasian kegiatan dalam organisasi dalam konteks mencapai tujuan organisasi. POS sebagai manual prosedur memiliki tujuh kriteria yang menyebabkan POS suatu organisasi berbeda dengan POS organisasi lain. Tujuh kriteria manual tersebut adalah; khas / spesifik, lengkap prosedur, jelas dan mudah dipahami, layak tetap, layak kontrol, layak audit, layak ubah.[11] Adapun unsur-unsur POS yaitu ada tujuan, kebijakan, petunjuk operasional, pihak yang terlibat, formulir atau bentuk standar dari dokumen-dokumen kosong atau lazim disebut blanko, masukan atau yang terkait tentang penjelasan proses, proses tahapan lanjutan setelah tahapan masukan dalam suatu sistem, laporan

[10] Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur*, h. 88-92.

[11] Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur*, h. 109-119

hasil pengolahan yang memiliki makna tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengambilan keputusan di dalam organisasi, validasi dan kontrol[12] dalam konteks Madrasah Pembangunan UIN ternyata cenderung memiliki POS yang memenuhi unsur-unsur POS yang baik sebagaimana di atas.

3. Pengelolaan sistem informasi penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

Pengelolaan sistem informasi penelitian, pengembangan dan jaminan mutu pada Madrasah Pembangunan UIN Jakarta berupa pengelolaan sistem manajemen mutu (SMM) secara mandiri, yakni pemerintah tidak lagi menjadi sandaran utama dalam menjamin mutu madrasah. Pengelolaan penelitian berupa pembiasaan Islami peserta didik di lingkungan keluarganya yang dilakukan oleh tim ahli/ guru/ wali kelas. Mengadakan jenis pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan berupa workshop jaminan mutu madrasah/ metode dan strategi pembelajaran dan hal yang lain berkaitan dengan memajukan mutu madrasah.

Pengelolaan jaminan mutu juga dipantau dari capaian hasil belajar setiap mata pelajaran pada setiap semester baik itu tingkat TK, MI, MTs dan MA di Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Juga pengelolaan penelitian tindakan kelas (PTK) bagi guru mata pelajaran setiap satu tahun sekali. Juga dalam terlayaninya mahasiswa dan pihak umum dalam melakukan observasi dan penelitian di lingkungan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Dan hasil dari penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan rekomendasi kebijakan peningkatan program dan mutu madrasah.

4. Pembinaan, penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

[12] Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur*, h. 121-142

Pembinaan, penelitian, pengembangan dan jaminan mutu madrasah dilakukan sesuai dengan kebutuhan madrasah. Pembinaan di sini dilakukan yang sifatnya bermacam-macam. Ada pembinaan umum yang memang dilaksanakan ketika rapat-rapat baik itu kepada pimpinan, guru, pegawai, komite madrasah dan peserta didik. Dan juga memang ada pembinaan khusus seperti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh tim ahli.[13]

Penelitian sebagaimana dimaksud P3JM selalu mengadakan penelitian berupa angket kepuasan wali murid terhadap pelayanan madrasah, mengharuskan dewan guru mata pelajaran membuat penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah, memberi kesempatan peneliti dari luar madrasah seperti mahasiswa untuk mengadakan penelitian di MP dengan terbuka. Adapun pembinaan dan penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan mutu madrasah secara berkelanjutan. Pembinaan dilakukan bukan hanya pada pimpinan, guru dan pegawai namun juga terhadap peserta didik atau siswa.

Pembinaan, penelitian, pengembangan dan jaminan mutu madrasah seperti di atas dilakukan sesuai dengan kebutuhan internal madrasah. Contoh pembinaan terhadap siswa yang ada di MTs tentu berbeda dengan pembinaan yang ada di MA, begitu pula sebaliknya. Pembinaan dan jaminan mutu di MTs Pembangunan UIN lebih menekankan pada aspek *al-akhlak al-karimah* dan kepribadian, *basic sains* dan bahasa.

Secara umum materi *al-akhlak al-karimah* dan kepribadian terintegrasi pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semua mata pelajaran dan dalam kegiatan pembiasaan. Namun secara khusus materi tersebut terkait langsung pada mata pelajaran Akidah Akhlaq dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dengan demikian kegiatan tatap muka untuk kedua mata pelajaran

[13] Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

tersebut mengalami penyesuaian, di mana satu jam pelajaran digunakan untuk kegiatan tatap muka dan satu jam pelajaran lainnya terintegrasi dengan kegiatan *Habitual Curriculum* (HC) di hari selasa dan senin, di mana masing-masing ekuivalen atau setara dengan satu jam kegiatan tatap muka. Adapun *basic sains*, dalam rangka mencapai prestasi dan hasil belajar yang lebih baik di bidang matematika dan sains, maka jam tatap muka untuk materi *basic sains* diupayakan lebih banyak dari yang ditetapkan. Di samping itu guna menunjang *basic sains* dibidang aplikasi komputer, peserta didik kelas tujuh dan delapan untuk pelajaran prakarya berbasis ilmu teknologi atau IT. Dan juga bahasa sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi global, maka semua mata pelajaran bahasa mengalami penambahan jam tatap muka dari yang ditetapkan, yakni bahasa Indonesia satu jam bahasa Inggris dua jam untuk kelas sembilan. Khusus kelas *billingual* tujuh dan delapan ditambah dua jam tatap muka di hari kamis jam terakhir yaitu jam ke-9 dan ke-10.[14]

5. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan akreditasi internal dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

Madrasah Pembangunan UIN Jakarta bekerja sama dengan Sucofindo[15] dalam memberikan bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan akreditasi internal dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu. Pemberian bimbingan ini dilakukan oleh tim audit internal madrasah (audit mandiri

[14] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, (MP UIN: Jakarta, 2018), h. 10

[15] Madrasah pembangunan UIN Jakarta juga telah menerapkan sistem manajemen mutu dan memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari *Sucofindo international certification services* sejak tahun 2010.

madrasah) dan perwakilan dewan guru yang ahli/profesional serta sudah dilatih.[16]

Supervisi dapat diartikan luas. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin madrasah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel madrasah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode mengajar yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya. Dengan kata lain supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai madrasah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara selektif.[17]

Supervisi juga ialah memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tetapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru.[18] Di MTs Pembangunan UIN melaksanakan supervisi setiap semester ganjil, satu tahun sekali kepada semua dewan guru atau pendidik. Supervisi dilakukan oleh kepala madrasah dan wakilnya, dengan

---

[16] Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

[17] M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 76.

[18] Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 19

instrumen penilaian berupa pembuka/ pra pembelajaran, kegiatan inti dan kegiatan penutup pembelajaran. Setelah disupervisi dewan guru akan mendapatkan nilai, nilai tersebut bertujuan aspek mana saja yang sudah dikuasai dan aspek mana yang harus diperbaiki oleh dewan guru, agar pembelajaran dikelas semakin kreatif, menyenangkan dan terus berinovasi.

Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam meningkatkan mutu madrasah. Setiap satu tahun sekali sebelum satuan pendidikan mengadakan akreditasi, MP sudah terlebih dahulu menyiapkan untuk di supervisi dan evaluasi oleh tim penjamin mutu internal madrasah. Semua instrumen akreditasi sudah dimiliki secara berkala, sehingga setiap akan melaksanakan akreditasi yang sifatnya empat tahun sampai lima tahun sekali, MP sudah siap dan terpenuhi setiap komponennya. Karena adanya evaluasi yang dilakukan setiap tahun oleh tim penjamin mutu internal madrasah. Bukan hanya evaluasi terhadap siswa namun dewan guru, semua pimpinan dievaluasi. Jika evaluasi itu ditujukan kepada siswa yang gunanya adalah untuk mengetahui kegiatan belajar siswa serta sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar, lebih bersifat koreksi bahwa tujuan evaluasi untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan atau kesulitan belajar siswa dan sekaligus memberi umpan balik.[19] Begitupun sebaliknya satuan pendidikan perlu dievaluasi sebelum akreditasi, agar lebih maksimal dalam mengidentifikasi apa saja yang kurang dan harus diperbaiki secepat mungkin. Agar kesalahan atau kekurangan tidak berkelanjutan yang akan menurunkan mutu madrasah secara utuh.

[19] Asep Jihad, *Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2008), h. 63

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat.

Pusat penelitian, pengembangan dan jaminan mutu terdiri atas kepala dan kelompok tenaga ahli. Kelompok tenaga ahli adalah sejumlah tenaga akademik dan/atau jabatan fungsional dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu. Jumlah tenaga ahli ditetapkan menurut kebutuhan atas dasar hasil analisis beban kerja.[20]

Pelaksanaan urusan ketatausahaan pusat sangat diperlukan untuk jalannya birokrasi yang tertata rapih dan terstruktur dengan baik. Tata Usaha atau yang disingkat menjadi TU adalah segenap rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengolah, mengganda, mengirim dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap organisasi. Berdasarkan hal tersebut inti dari TU adalah tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan yang berwujud pada enam pola, yaitu pertama menghimpun, kegiatan-kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap untuk dipergunakan jika diperlukan, kedua mencatat, kegiatan membubuhkan dengan berbagai peralatan tulis-menulis keterangan yang diperlukan sehingga berwujud tulisan yang dapat dibaca, dikirim dan disimpan. Ketiga mengolah, yaitu bermacam-macam kegiatan menyajikan keterangan dengan maksud menyajikannnya dalam bentuk yang lebih berguna. Keempat mengganda, yaitu memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Kelima mengirim yaitu menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak kepada pihak lain. Keenam menyimpan yaitu menaruh dengan berbagai cara dan alat ditempat tertentu yang aman. Hal yang terkait dengan enam pola ini adalah informasi. Informasi adalah pengetahuan tentang sesuatu hal atau peristiwa yang diperoleh melalui pembacaan dan pengamatan. Informasi ini yang dibutuhkan oleh pimpinan dalam rangka

[20] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, h. 15

pengambilan keputusan. Enam pola kegiatan tersebut merupakan isi dan ruang lingkup TU.[21]

TU dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi teknik informatika dalam TU biasanya terkait dengan pemanfaatan internet, *database*, seperti sistem informasi akademik dan sistem informasi keuangan. Secara langsung implementasi teknologi informasi terkait langsung dengan sistem informasi manajemen. Setiap pekerjaan dalam suatu organisasi dewasa ini mempunyai segi-segi pekerjaan perkantoran atau pekerjaan kertas. Dalam berbagai pekerjaan, segi ini adalah sebagai akibat dari aktivitas pokok yang dapat berupa produksi, penjualan, keuangan, pembelian, kepegawaian, teknik atau salah satu dari banyak pekerjaan lainnya. Meskipun demikian segi-segi pekerjaan kertas itu harus tetap diurus dengan manajemen yang baik. Dengan demikian peran TU menjadi sangat penting dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut, khususnya di dalam pendidikan madrasah.

Implementasi TU dalam suatu organisasi mempunyai tiga ciri utama sebagai berikut, yaitu bersifat pelayanan melalui penerapan pelayanan prima, bersifat merembes ke segenap bagian dalam organisasi, dan dilaksanakan oleh semua pihak dalam organisasi. tugas pokok dan fungsi TU harus terus ditingkatkan karena memiliki peranan yang penting dalam pengembangan suatu organisasi. tugas pokok dan fungsi bagian TU dapat dirinci yaitu pertama, tugas pokok TU adalah melaksanakan urusan TU, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan. Kedua, fungsi TU adalah pelaksanaan urusan TU, pelaksanaan urusan rumah

[21] Lantip Diat Prasojo, *Pengembangan Tata Usaha Berbasis Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY), artikel h. 5

tangga, perlengkapan, pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan keuangan.[22]

TU di Madrasah Pembangunan dipilih secara selektif dan melewati proses panjang pencalonan, pemilihan, rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat)[23] serta persetujuan dari yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta. TU di MP terdiri dari beberapa bagian di antaranya adalah kepala bagian tata usaha umum, kepala subbagian keuangan dan kepegawaian, kepala subbagian pendidikan dan pengajaran, kepala subbagian umum sarana dan prasarana. Dan juga bagian kepala pusat penelitian dan pengembangan jaminan mutu, kepala pusat sistem informasi dokumentasi dan publikasi, kepala unit pelaksana teknis laboratorium, serta kepala unit pelaksana teknis perpustakaan.[24]

TU di MP sudah dapat dikatakan mumpuni baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari segi kuantitas ditunjukkan oleh struktur organisasi TU yang banyak sehingga mencakup serta meliputi tugas-tugas yang dibutuhkan secara profesional dan terarah. Adapun dari segi kualitas adalah orang-orang yang dilantik sebagai kepala bidang sesuai dengan keahliaanya. Ditunjukkan oleh gelar yang dimilikinya, contoh Maradona, S.E. sebagai kepala subbagian keuangan dan kepegawaian beliau adalah lulusan sarjana ekonomi yang mampu mengelola keuangan sesuai dengan manajemen akuntasi dan ekonomi yang baik. Serta subbagian yang lain yang sudah dipertimbangkan oleh baperjakat untuk mengelola bagiannya masing-masing dengan profesional.

---

[22] Lantip Diat Prasojo, *Pengembangan Tata Usaha Berbasis Teknologi Informasi*, h. 7-8

[23] Baperjakat adalah suatu organisasi di MP yang salah satu tugasnya adalah sebagai pertimbangan penentuan jabatan dan kepangkatan di MP UIN Jakarta.

[24] http://www.mpuin-jkt.sch.id/artikel/detail/pelantikan-pimpinan-mp-periode-2018-2022

B. Konsistensi Mutu dan Instrumen Penilaian Akreditasi BAN-S/M

Pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu satuan pendidikan. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah SNP yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BSNP, merupakan kriteria minimal tentang sistem penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). SNP berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.[25]

Pemenuhan SNP oleh satuan pendidikan sebagai bagian dari penjaminan mutu juga dibantu oleh pihak eksternal lainnya, utamanya instansi pembina pendidikan seperti Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten/Kota (Pemerintah daerah/ Pemda), Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota, Disdik Provinsi dan Kantor Wilayah Kementrian Agama juga instansi tingkat Pusat termasuk Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yang ada pada setiap provinsi yang berperan memberikan asistensi kepada pembina satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan swasta pihak eksternal yang membantu pemenuhan SNP adalah yayasan atau bahkan pendiri Badan Hukum Pendidikan.

Sistem penjaminan mutu eksternal adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan, dalam rangka implementasi kebijakan peningkatan mutu

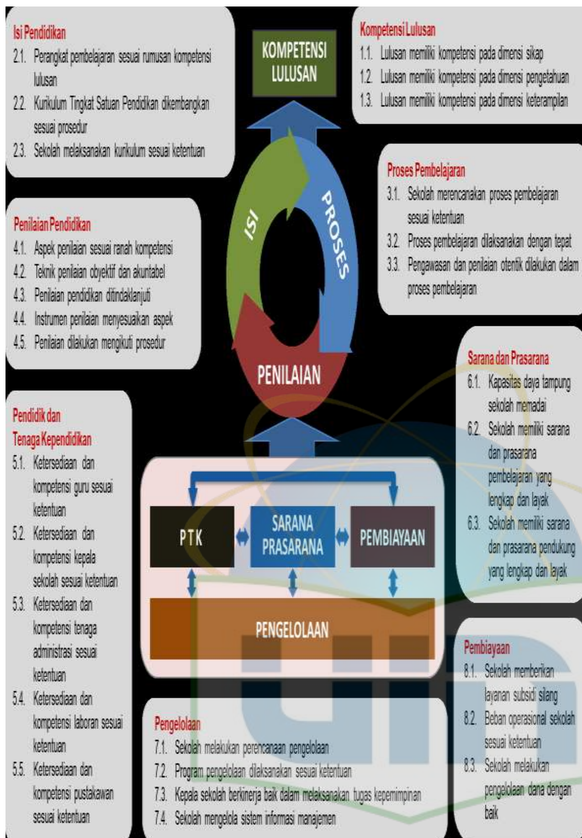
[25] Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Analisis Peta Mutu Sekolah Model SPMI Tahun 2017 SMPN 1 Sukamulia*, (Nusa Tenggara Barat: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Maret 2018), h. 3

pendidikan khususnya pemenuhan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Masukan dari pihak eksternal berikutnya adalah hasil akreditasi yang merupakan hasil penilaian kelayakan satuan atau program pendidikan secara menyeluruh yang mengacu pada SNP. Satuan pendidikan dan instansi-instansi pembina memperoleh masukan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) dan BAN-S/M Provinsi yang dapat menjadi pertimbangan dalam pemenuhan SNP.

Masukan dari pihak eksternal terakhir yang bermanfaat bagi satuan pendidikan dan instansi yang membantu satuan pendidikan dalam pemenuhan SNP berupa capaian hasil evaluasi belajar oleh pemerintah seperti ujian nasional dan ujian sekolah/madrasah. Satuan pendidikan dengan intervensi dan masukan dari pihak-pihak eksternal tersebut merupakan ciri model penjaminan mutu yang diamanatkan Sisdiknas sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dalam Sisdiknas sebelumnya tidak diatur secara eksplisit.[26]

Permasalahan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem yang saling memengaruhi. Mutu luar dipengaruhi oleh mutu masukan dan mutu proses. Secara eksternal, rekomendasi dari hasil penilaian berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan. Proses pencapaian mutu satuan pendidikan melalui pemenuhan SNP tersebut meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Pencapaian mutu secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program secara terus menerus dan berkelanjutan merupakan upaya penjaminan mutu satuan pendidikan yang bersangkutan. Indikator mutu dalam SNP dapat digambarkan sebagai berikut:

[26] Abdul Malik dkk., *Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2018*, (Jakarta: BAN-S/M), h. 15



Gambar 4.3. Indikator Mutu dalam Standar Nasional Pendidikan
(Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menegah tahun 2017, Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah)

Konsisten terhadap mutu juga terlihat di dalam indikator perstandar nasional pendidikan. Standar yang menjadi acuan pertama adalah standar kompetensi lulusan yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin tiga puluh satu sampai tiga puluh tujuh. Standar yang paling inti berada pada

standar kompetensi lulusan, karena dari kompetensi lulusan inilah yang akan dijabarkan menjadi standar isi, dan dijabarkan lagi ke standar proses dan penilaian, lalu didukung oleh standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, terakhir didukung pula oleh standar pengelolaan yang baik. Di dalam standar kompetensi lulusan sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan di Indonesia yaitu siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, mempunyai sikap sosial dengan karakter yang baik, mencerminkan sikap pembelajar sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani, siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks. Serta memiliki keterampilan berpikir kreatif dan bertindak secara mandiri yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran dan kegiatan. Untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten maka diperlukan kegiatan yang mengandung unsur-unsur tersebut seperti pramuka, olahraga, ekstrakurikuler, kegiatan pembiasaaan ibadah dan proses pembelajaran yang berkualitas. Kompetensi lulusan ini apabila seluruh madrasah bisa mencapai standar minimal bahkan melampaui maka tidak ada lagi anak-anak yang tawuran, menggunakan obat-obat terlarang dan tidak menghormati guru dan orang tua. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak lulusan yang belum sesuai dengan kompetensi lulusan, berarti ada kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan pelaksanaan di madrasah. Maka madrasah membutuhkan pemimpin dan guru yang berkualitas, serta proses dan pembiasaan pembelajaran yang dapat menanamkan hal-hal yang terkait dengan kompetensi lulusan.

Kedua setelah sudah dipersiapkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi yang distandarkan, lalu terangkum pada standar isi yang seperti apa, yang dapat menghasilkan lulusan agar sesuai dengan standar kompetensi lulusan, standar isi di dalam instrumen penilaian akreditasi terdapat pada poin nomor satu sampai sembilan yang berisi guru mengembangkan perangkat

pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan tingkat kompetensi dan ruang lingkup pembelajaran, mengembangkan dan menyusun kurikulum dengan melibatkan berbagai unsur sesuai dengan prosedur operasional. Pada poin ini sangat signifikan berpengaruh untuk peningkatan mutu pada aspek spritual, sosial, kognitif dan keterampilan sehingga akan menghasilkan lulusan yang cerdas, berpikir kritis dan berakhlak baik serta inovatif. Madrasah dituntut untuk mengembangkan bukan hanya menggunakan yang telah diatur.

Ketiga, standar proses yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari poin nomor sepuluh sampai tiga puluh, yang berisi mengembangkan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/RPP, waktu dan beban belajar sesuai ketentuan, menggunakan buku teks pelajaran, didukung dengan pengelolaan kelas yang baik, kegiatan pra, inti dan mengakhiri pembelajaran dengan persiapan yang matang, model, media, sumber belajar, pendekatan dan penilaian pembelajaran yang sesuai, disertai dengan supervisi pimpinan, pemantauan dan tindak lanjut dari semua pemangku kebijakan akan sangat diperlukan untuk menghasilkan proses yang berkualitas. Jika proses sudah berkualitas maka hasilpun akan bermutu.

Keempat, standar penilaian yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin seratus dua belas sampai seratus dua puluh empat. Guru melaksanakan penilaian hasil belajar siswa berdasarkan prinsip-prinsip penilaian, kompetensi, dan beragam penilaian, menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), memperbaiki proses pembelajaran dari hasil penilaian. Standar penilaian juga sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, karena tanpa penilaian maka pendidikan terasa hampa dan tidak menuju perbaikan. Dari standar penilaian inilah madrasah mengetahui kekurangan dan kelebihan madrasah baik siswa, guru dan pimpinan serta tenaga kependidikan.

Kelima, standar pendidik dan tenaga kependidikan yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin tiga puluh delapan sampai lima puluh enam. Di dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kompetensi, kualifikasi dan syarat yang harus dipenuhi seorang pendidik dan kependidikan baik itu syarat administratif, kemampuan dan keteladanan. Standar yang harus dipenuhi pendidik dan tenaga kependidikan sangat tepat sehingga dengan syarat-syarat itu, tidak semua orang bisa menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan sangat penting untuk memperoleh SDM yang berkualitas, jika SDM pendidik dan tenaga kependidikan itu bermutu maka tidak mustahil akan menghasilkan lulusan yang bermutu pula.

Keenam, standar sarana dan prasarana yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin lima puluh tujuh sampai delapan puluh. Syarat yang distandarkan di dalam standar ini memang akan sangat menunjang dalam pembelajaran. Seperti luas lahan, luas lantai bangunan, keselamatan, kesehatan, instalasi listrik, pemeliharaan berkala 5 tahun sekali, prasarana yang lengkap, ruang kelas yang memadai, ruang perpustakaan dengan luas dan sarana yang sesuai dengan ketentuan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tenaga administrasi, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, tempat bermain, berolahraga, berkesenian, keterampilan, halaman upacara, ruang sirkulasi, tempat parkir kendaraan dan sebagainya. Di samping persyaratan yang memang menunjang pembelajaran tetapi persyaratan ini cukup berat khususnya bagi madrasah swasta yang memang sebagian besar dana diperoleh secara mandiri. Jika kita amati standar ini cukup bertentangan dengan hakikat pendidikan yang merupakan alam sebagai tempat pendidikan. Sebagian madrasah sudah mampu memanfaatkan sarana dan prasarana dengan memaksimalkan SDM yang ada, namun bagi sebagian madrasah standar ini cukup membuat beban, sehingga beberapa

madrasah ada yang meminta sumbangan pembinaan pendidikan yang tidak sedikit kepada siswa/ wali siswa, dan terkesan bahwa pendidikan yang berkualitas itu mahal. Pemerintah sedikit banyaknya sudah memberikan solusi dengan dana BOS, namun dana BOS lagi-lagi tidak mampu mencukupi untuk membiayai pendidikan yang berkualitas.

Ketujuh, standar pembiayaan yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin sembilan puluh enam sampai seratus sebelas. Madrasah memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 3 tahun terakhir baik tentang biaya investasi, operasi nonpersonalia, memiliki dokumen investasi sarana dan prasarana, memiliki pembukuan keuangan, biaya pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan siswa, serta merealisasikan dan menyampaikannya kepada semua yang terkait dan memiliki laporan pertangung jawabannya. Audit keuangan juga merupakan hal yang terpenting agar terlaksananya pendidikan berkelanjutan, dengan rencana, pelaksanaan dan pertanggung jawaban terhadap pembiayaan madrasah, maka madrasah menjadi berhati-hati dan mengatur sebaik mungkin pemasukan dengan pengeluaran, sehingga semua proses akan terlaksana dengan efektif dan efisien.

Terakhir, standar pengelolaan yang terdapat dalam instrumen penilaian akreditasi dari nomor poin delapan puluh satu sampai sembilan puluh lima. Madrasah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas, merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) sesuai ketentuan, pedoman pengelolaan, struktur organisasi yang lengkap dan efektif, melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan, melaksanakan kegiatan kesiswaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan bidang kurikulum dan pembelajaran, mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan, melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, menyusun pedoman pengelolaan pembiayaan investasi dan operasional, melibatkan peran serta masyarakat dan membangun

kemitraan dengan lembaga lain, melaksanakan kegiatan evaluasi diri, melaksanakan tugas kepemimpinan, menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan dan memiliki sistem informasi manajemen (SIM). Semua aspek ini juga berkaitan dengan teori-teori pengelolaan madrasah yang baik. Maka aspek standar pengelolaan sangat signifikan dalam meningkatkan mutu madrasah apabila madrasah memenuhi syarat ini semua. Karena madrasah yang baik adalah madrasah yang dikelola secara profesional.

Dari 124 indikator instrumen penilaian akreditasi BAN-S/M, yang di dalamnya terdapat delapan Standar Nasional Pendidikan, dapat dikatakan bahwa standar-standar tersebut dapat mewakili pemerintah untuk memberikan pedoman standar sebagai pengarah madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah. Namun, terdapat beberapa indikator yang harus pemerintah galakkan lagi dari segi sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan pendidikan baik kepala madrasah, pendidik atau guru, tenaga kependidikan, siswa dan semua masyarakat. Di samping ada standar yang pemerintah tetapkan, harus ada pembinaan khusus kepada orang yang bersangkutan, agar standar ini tersampaikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Jika dikerucutkan lagi dari delapan standar, tujuh standar semua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu madrasah. Hanya ada satu standar yaitu standar sarana dan prasarana yang masih menjadi keluhan disebagian madrasah. Apabila diamati lebih jauh, indikator standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah standar mutu yang baik. Namun disayangkan, sebagian madrasah hanya menjadikan standar-standar ini suatu persyaratan birokratis tanpa ada pelaksanaan di lapangan. Sehingga, salah satu tujuan utama dalam pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa belum tersampaikan dengan baik secara merata.

Terkait dengan pemahaman akan amanat yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut sebagai sasaran

penyelenggaraan pendidikan nasional hakikatnya adalah transformasi budaya, yaitu suatu proses transformasi dari masyarakat tradisional dan terbelakang menuju masyarakat maju dan modern, dan masyarakat tradisional feodalistis menuju masyarakat yang maju dan demokratis serta berkeadilan sosial.[27]

Kalau kita kaji secara mendalam tujuan pendidikan yang selama ini dirumuskan dalam berbagai UU pendidikan nasional kita, akan terbaca betapa pendidikan nasional diharapkan mampu melahirkan manusia Indonesia yang religus dan bermoral, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian dan bertanggung jawab. Keempat karakteristik manusia tersebut hakikatnya bersifat universal dan masih perlu diterjemahkan ke dalam rumusan yang operasional dan terkait dengan perkembangan masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional pada umumnya. Karena itu, dalam menerjemahkan keempat karakteristik tersebut ke dalam rumusan wujud kemampuan, nilai, dan sikap yang dapat dijadikan rujukan dalam proses perencanaan kurikulum perlu dipahami tingkat dan arah perkembangan masyarakat Indonesia. Terlebih di era globalisasi, yang maknanya adalah berlakunya berbagai ukuran dan aturan internasional di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya, iptek, komunikasi, transportasi, bahkan sosial budaya. Dalam era semacam ini hanya bangsa yang sumber daya manusianya berkualitas, yang dapat tetap eksis.[28]

Kenyataannya walaupun Standar Nasional Pendidikan ini mampu meningkatkan kualitas pendidikan, namun belum secara maksimal untuk menjadikan manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Madrasah yang berbasis Standar Nasional Pendidikan harus mampu berupaya lebih kreatif mengolah pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat global.

[27] Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2008), h. L.

[28] Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, h. 119.

Seperti halnya di Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN, tidak hanya menggunakan SNP, tetapi juga mengembangkan dengan berbagai inovasi serta membuat keunikan madrasah sendiri, contoh ISO 9001:2008, pembinaan *al-akhlak al-karimah* dan kepribadian di sela-sela waktu pembinaan wali kelas, sholat dhuha berjama'ah, mengedepankan *basic sains* yang memang lagi *trend* di era globalisasi yaitu ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi seperti dibidang aplikasi komputer dan prakarya berbasis IT. Serta meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi global berupa bahasa, khususnya bahasa inggris ditambah 2 jam tatap muka di hari kamis jam terakhir. Kesimpulannya, standardisasi pendidikan yang digunakan MTs Pembangunan UIN menggunakan tiga standar. Pertama, Standar Nasional Pendidikan. Kedua, Standar Internasional/ ISO. Ketiga, standar kekhasan Madrasah Pembangunan UIN yaitu *basic science*, bahasa dan *al-akhlak al-karimah*.

C. Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada Madrasah Pembangunan UIN Jakarta

Implementasi SNP di MP UIN Jakarta khususnya pada jenjang MTs, bisa disebut dengan pendidikan berbasis standar. Pendidikan berbasis standar selain juga mengikuti SNP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah juga menurut sistem manajemen MP yang diinterpretasikan oleh peneliti adalah pendidikan yang juga berbasis keunggulan lokal dan global yang dapat memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan berwawasan global, upaya yang ditempuh MTs Pembangunan UIN Jakarta antara lain;

a. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001: 2008 (bidang pendidikan).

b. Menyiapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) 2010-2030 dan rencana strategis lima tahunan.
c. Menggunakan alat dan sumber belajar yang berbasis multimedia dan media pembelajaran interaktif.
d. Melaksanakan penguatan bahasa asing untuk seluruh peserta didik.
e. Mengadakan kelas *bilingual*, menghadirkan *native speaker* dan menyelenggarakan *English for Speakers of Other Languages* (ESOL) test.
f. Mengadakan kegiatan intra dan ekstra kurikuler berbasis keunggulan lokal dan global, seperti pendidikan kepramukaan, Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), *student company* (SC), Kader Kesehatan Remaja (KKR), robotic, musikalisasi puisi, tari saman dan lain-lain.[29]

Implementasi SNP ini dan didukung oleh kreatifitas dan inovasi madrasah sangat berkaitan pedagogik baru yang melihat manusia dalam proses mewujudkan kemanusiaannya berada di dalam masyarakat. Tidak mungkin manusia itu berkembang di dalam isolasi tetapi hanya di dalam lingkungan masyarakatnya yang berbudaya. Inilah titik tolak dari pedagogik baru yaitu manusia dalam masyarakat yang berbudaya. Sungguhpun demikian manusia bukanlah robot di dalam lingkungan budayanya tetapi dia sendiri adalah pendukung dan pencipta kebudayaannya yang terus-menerus berubah. Pedagogik kontemporer menekankan kepada pribadi peserta didik sebagai manusia yang bebas yang dapat mengambil keputusan moral dan menentukan arah hidupnya dari perubahan-perubahan global yang serba cepat.[30] Berikut gambaran implementasi masing-masing indikator SNP di MTs

[29] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, Jakarta:06 Agustus 2018, Kepala MTs Pembangunan UIN: Momon Mujiburrahman, MA, Komite Madrasah: drg. Silvia Wahyuni, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan: Drs. Hasyim, h. 51

[30] H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*. h. 278.

Pembangunan UIN Jakarta. Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada MTs Pembangunan UIN dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar pengelolaan.

Delapan SNP ini, merupakan jabaran antara input, proses dan *output* di MTs Pembangunan UIN Jakarta. Hematnya menurut penulis input dalam Standar Nasional Pendidikan yang diimplementasikan oleh MTs Pembangunan UIN terdapat pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Di dalam menjalankan visi, misi dan tujuan lembaga, maka standar-standar yang dalam kategori input madrasah harus direalisasikan dengan baik. Sedangkan dalam proses terdiri dari standar isi, standar proses dan standar penilaian. Terakhir *output* yang dihasilkan adalah standar kompetensi lulusan. Jika demikian, maka standar yang harus dijabarkan terlebih dahulu adalah standar kompetensi lulusan. Madrasah harus mempunyai standar kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan SNP dan standar yang dibutuhkan masyarakat madrasah. Setelah itu baru madrasah membuat standar isi, proses dan penilaian yang substansinya disesuaikan dengan indikator standar kompetensi lulusan madrasah, agar sinergi antara lulusan yang akan dihasilkan dengan proses yang dilakukan madrasah. Standar ini semua didukung dengan pengelolaan yang baik, pembiayaan, sarana dan prasarana, dan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai. Berikut ini adalah implementasi Standar Nasional Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta.

1. Standar Kompetensi Lulusan

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 menyebutkan Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap. Pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Permendikbud No. 54 Tahun 2013 Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi pada dasarnya memiliki makna sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang keilmuannya.[31]

Kemampuan sikap lulusan yang berkaitan dengan akhlak siswa terhadap guru, teman, orang yang lebih tua dan sesama lingkungannya. Kemampuan pengetahuan atau kognitif berupa nilai dan kemampuannya dalam semua mata pelajaran yang diampu. Sedangkan pengetahuan keterampilan berkaitan dengan kemampuan psikomotor siswa. Menurut Jamila dan Janovec, proses pembelajaran psikomotor merupakan pembelajaran yang dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu fase kognitif dan fase mandiri. Fase kognitif merupakan fase paling penting karena jika mengabaikan fase ini, maka akan menyebabkan kesulitan dalam tahap-tahap selanjutnya. Keterampilan psikomotorik dan kemampuan juga tergantung pada motif dan emosi.[32]

Kualifikasi lulusan SMP/sederajat mencakup sikap adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Pengetahuan adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun keterampilan adalah memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan

[31] Ngadirin Setiawan & Tutuk Ningsih, "Penilaian Kinerja Guru Bersertifikat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* No. 2 Tahun ke-1, Agustus 2010, h. 271.

[32] Jamila Honzikoval & Jan Janovec, "Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning", *Computer and Information Science* 6, 1, tahun 2013 h.1-12.

yang dipelajari disekolah dan sumber lain sejenis. Kriteria kelulusan peserta didik di MTs Pembangunan UIN Jakarta diantaranya mengacu kepada PP nomor 4 tahun 2018 pasal 19, bahwa peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah adalah apabila peserta didik dapat menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik dan lulus ujian satuan/program pendidikan.

Kompetensi lulusan yang diantaranya rata-rata siswa sudah mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, sesuai dengan perkembangan siswa yang diperoleh dari pengalaman pembelajaran melalui pembiasaan-pembiasaan baik di dalam kelas maupun di luar kelas lingkungan madrasah. Dan kegiatan-kegiatan kesiswaan baik olahraga, seni/ ekstrakurikuler dan keagamaan. Di MTs Pembangunan UIN terdapat kegiatan keagamaan seperti pembiasaan membaca Alquran dan sholat dhuha sebelum kegiatan belajar mengajar dan kegiatan keagamaan keputrian pada saat putra sholat Jumat, diisi dengan presentasi atau ceramaah keagamaan yang ditunjuk oleh guru dan pengurus, baik materi tentang keputrian berupa fiqih seperti haid, akhlak dan keilmuan yang lain.

Setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran selama 3 tahun, target lulusan MTs Pembangunan UIN Jakarta antara lain adalah lulus 100% ujian praktek, Ujian Akhir Madrasah Berbasis Nasional (UAMBN), Ujian Madrasah (UM) dan Ujian Nasional (UN), memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani dan rohani, olahraga dan kesehatan. Juga memiliki kemampuan membaca Alquran dengan kaidah yang baik dan benar, memiliki kemampuan menjalankan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Islam, memiliki kemampuan

berkomunikasi dalam bahasa Arab/Inggris, memiliki keterampilan dibidang teknologi informasi dan komputer, memiliki rasa hormat dan kepatuhan kepada orang tua, memiliki kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan serta memiliki jiwa kemandirian.[33]

MTs Pembangunan UIN Jakarta juga memiliki program pendalaman materi khusus bagi peserta didik yang tidak lulus Ujian Nasional/ UN (jika ada). Kegiatan ini dilaksanakan setelah hasil UN diumumkan hingga menjelang pelaksanaan UN paket B berlangsung. Hal ini dilakukan agar siswa yang tidak lulus UN utama dapat lulus di UN paket B, sehingga dapat melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya. Di samping itu MTs Pembangunan UIN juga menyediakan program pengayaan khusus pada mata pelajaran tertentu, seperti bahasa Arab dan Matematika, bagi peserta didik yang telah melaksanakan UN dan akan melanjutkan studi di SMA unggulan. Adapun materi pengayaan dan tenaga pengajarnya menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan materi seleksi/tes tulis yang akan dihadapi.

Melihat dari kualifikasi di atas, MTs Pembangunan UIN menjadikan acuan dan membuat perumusan profil lulusan MTs Pembangunan UIN setidaknya harus memenuhi tujuh profil sebagai berikut:[34]

a. Berakhlakul karimah dan mengamalkan ajaran agama Islam;
b. Mahir dan terbiasa dalam membaca Alquran, hafal juz 30 dan surah-surah pilihan;
c. Terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Arab;

---

[33] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, h. 49.

[34] Data Profil lulusan MTs Pembangunan UIN diperoleh dari Kepala MTs Pembangunan UIN Jakarta tahun 2018/2019. Standar profil lulusan salah satunya adalah untuk sinergi kejelasan dan kerealistisan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran lulusan MTs Pembangunan UIN.

d. Peduli terhadap lingkungan;
e. Membiasakan kemampuan menulis;
f. Mampu memanfaatkan teknologi informasi;
g. Berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.

Tabel 4.1. Sebaran Lulusan Alumni MTs Pembangunan UIN Jakarta
(Sumber: Data diperoleh dari Subbag Administrasi Pendidikan dan Pengajaran/ Dikjar, Effron Faulusia, S.E.)

TAHUN PELAJARAN 2017/2018			
No	**Nama Sekolah Tujuan**	**Jumlah**	**Persentase**
1	MA MADRASAH PEMBANGUNAN	42	20.9%
2	MAN 4	31	15.4%
3	SMAN 1 TANGSEL	9	4.5%
4	SMAN 6 TANGSEL	9	4.5%
5	SMAN 3 TANGSEL	8	4.0%
6	SMAN 2 TANGSEL	7	3.5%
7	SMAN 70 JAKARTA	7	3.5%
8	SMAN 34 JAKARTA	6	3.0%
9	SMAN 87 JAKARTA	6	3.0%
10	SMAN 29 JAKARTA	4	2.0%
11	SMAN 4 TANGSEL	4	2.0%
12	SMAN 6 JAKARTA	4	2.0%
13	MAN INSAN CENDIKIA SERPONG	3	1.5%
14	SMA AL-AZHAR BSD	3	1.5%
15	SMAN 47 JAKARTA	3	1.5%
16	SMAN 66 JAKARTA	3	1.5%
17	MAN 11	2	1.0%

18	MAN INSAN CENDIKIA GORONTALO	2	1.0%
19	PONPES AL BAYAN	2	1.0%
20	SMA AL AZHAR PUSAT	2	1.0%
21	SMA GIS SERPONG	2	1.0%
22	SMA LABSCHOOL KEBAYORAN	2	1.0%
23	SMAN 28 JAKARTA	2	1.0%
24	SMAN 5 DEPOK	2	1.0%
25	SMAN 8 TANGSEL	2	1.0%
26	SMAN 97 JAKARTA	2	1.0%
27	SMK INFORMATIKA BINTARO	2	1.0%
28	MAN 1 TANGSEL	1	0.5%
29	MAN 2 MALANG	1	0.5%
30	PESANTREN	1	0.5%
31	PONDOK BOGOR	1	0.5%
32	SMA AL- HASRA	1	0.5%
33	SMA AL-ADZKAR	1	0.5%
34	SMA AL-IZHAR	1	0.5%
35	SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL	1	0.5%
36	SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 SURABAYA	1	0.5%
37	SMA KHARISMA BANGSA	1	0.5%
38	SMA TREWSAINS	1	0.5%
39	SMAN 10 TANGSEL	1	0.5%
40	SMAN 109 JKT	1	0.5%
41	SMAN 46 JAKARTA	1	0.5%
42	SMAN 48 JAKARTA	1	0.5%
43	SMAN 49 JAKARTA	1	0.5%
44	SMAN 5 TANGSEL	1	0.5%

45	SMAN 6 DEPOK	1	0.5%
46	SMAN 74 JAKARTA	1	0.5%
47	SMAN 82 JAKARTA	1	0.5%
48	SMAN 85 JAKARTA	1	0.5%
49	SMAN 9 JAKARTA	1	0.5%
50	SMAN CMBBS	1	0.5%
51	SMAN MHT JAKARTA	1	0.5%
52	SMAN SEMARANG	1	0.5%
53	SMK LATRIS INDONESIA 1	1	0.5%
54	SMKN CIREBON	1	0.5%
55	LAINNYA	3	1.5%
TOTAL		201	

Jika dilihat dari tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebaran alumni MTs Pembangunan UIN Jakarta memiliki mutu *output* yang baik, dibuktikan dari banyaknya alumni yang diterima disekolah/madrasah unggulan. Madrasah unggulan di sini yang dimaksud adalah madrasah yang memiliki nilai di atas standar, yakni nilai akreditasi madrasah berstatus A (amat baik).

Di dalam data tersebut menunjukkan pula lulusan MTs Pembangunan UIN terbanyak meneruskan di MA Pembangunan UIN, menurut hasil wawancara kepada perwakilan wali siswa meneruskan ke MA Pembangunan dengan pertimbangan materi dan program yang akan diteruskan di MA Pembangunan seperti adanya keringanan biaya bagi satu almamater, wilayah dan tempat yang aman dan strategis, dan pertimbangan akademis seperti meneruskan program *tahfidz* yang sudah dilaksanakan oleh MTs Pembangunan, dan membiasakan budaya yang Islami.[35] Kepala

[35] Wawancara komite dan wali murid yang sedang berkunjung ke kantor kepala MTs Pembangunan, pada hari Selasa 03 September 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

madrasah menambahkan bahwa di MP terdapat rumusan profil yang setiap jenjangnya memiliki target tertentu, maka kita mendorong siswa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih unggul, atau jika tidak, maka disarankan melanjutkan ke MA Pembangunan yang juga memiliki kualitas yang setara dengan MTs Pembangunan UIN. Kesimpulan yang penulis ambil adalah adanya kepercayaan wali murid untuk menitipkan kembali di MA Pembangunan baik dari segi kenyamanan dan kualitas. Strategi-strategi dalam memaksimalkan Standar kompetensi Lulusan juga di antaranya dengan:[36]

a. Menyusun dan merumuskan target profil lulusan;
b. Mensosialisasikan kepada *stakeholders* target profil lulusan setelah dirumuskan dan disusun;
c. Membuat program-program yang relevan dengan peningkatan kompetensi lulusan;
d. Pelatihan dan diskusi bersama dewan guru setiap hari Jumat pukul 13.00-15.00 dan setelah itu monitoring dan evaluasi setelah pelaksanaan program pelatihan dan diskusi;
e. Mengadakan kegiatan konsorsium seminggu sekali setiap guru mata pelajaran;
f. Bekerjasama dengan OSIS/MPK untuk mengadakan kegiatan kesiswaan yang bermutu;
g. Mendatangkan pelatih-pelatih ekstrakurikuler yang kredibel;
h. Mengikuti berbagai perlombaan baik dibidang akademik maupun non akademik;
i. Mengadakan remedial bagi siswa yang kurang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM);
j. Mengadakan pengayaan bagi siswa yang sudah memenuhi KKM;

[36] Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Selasa 03 September 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

k. Mengadakan pembinaan secara khusus bagi siswa yang ingin melanjutkan ke sekolah atau madrasah unggulan;
l. Supervisi dan penganggaran setiap program untuk kegiatan peningkatan kualitas lulusan, agar kegiatan tersebut memiliki nilai proses yang bermutu.

2. Standar Isi

Setelah MP merumuskan profil lulusan, maka profil lulusan tersebut yang menjadi acuan untuk MP membuat kegiatan dan standar isi apa saja yang dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan profil lulusan MP tersebut. Adapun standar isi yang distandarkan oleh pemerintah meliputi tingkat kompetensi dan lingkup materi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang pendidikan tertentu. Yang berupa kerangka dasar dan prinsip pengembangan serta struktur kurikulum dan beban belajar untuk jenjang tertentu dan lainnya.[37] MTs Pembangunan UIN sudah mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan dengan baik. Sehingga mendorong siswa lebih agamis, sosialis, kritis dan kreatif baik dalam *open curriculum*[38] (kurikulum terbuka), *close curriculum*[39] (kurikulum tertutup) dan *guide curriculum*[40] (kurikulum terbimbing).

---

[37] H.A.R. Tilaar, *Manifesto Pendidikan Nasional*. h. 117.

[38] Kurikulum terbuka yakni madrasah memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

[39] Kurikulum tertutup yakni kurikulum sudah ditentukan secara pasti mulai tujuan, materi, metode dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya.

[40] Kurikulum terbimbing yakni kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas.

Kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu *rececourse*, artinya pangkalan untuk pacuan kuda.[41] Pada zaman Yunani Kuno, kurikulum dipandang sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada siswa dan harus dikuasainya.[42] Pada abad ke-19 pandangan mengenai kurikulum menjadi luas tidak hanya sekedar terfokus pada mata pelajaran, tetapi meliputi dokumen sekolah, artikel, surat kabar, laporan penelitian. Naskah akademis juga dapat dianggap sebagai bagian dari kurikulum bukan sekedar mata pelajaran, tetapi meliputi kegiatan dan pengalaman yang dikelola oleh sekolah baik itu kegiatan di dalam kelas maupun di luar kelas.[43] Kurikulum dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa arab dengan *al-manhāj*. Merujuk pada kamus *līsan al-Arab* Ibnu Manzur menjelaskan bahwa *al-manhāj* adalah jalan yang terang yaitu disebutkan dengan *al-tarīqah al-wadīh*. Terdapat kekeliruan dalam para pendidik yang menyamakan antara kurikulum dengan panduan mata pelajaran atau *al-muqarrar*. Menurut Muhammad Malik Ibnu Sa'aīd, bahwa panduan mata pelajaran bukanlah kurikulum, melainkan bagian atau komposisi dari kurikulum. Kurikulum lebih luas dari panduan mata pelajaran.[44] Implementasi standar isi di MTs Pembangunan UIN Jakarta di sini adalah serangkaian implementasi kurikulum yang ada di MTs Pembangunan UIN baik mata pelajaran, struktur dan muatan kurikulum, bobot jam, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keunggulan MTs Pembangunan UIN.

---

[41] Colin J. Marsh dan Geotge Wills, *Curriculum Alternative Approaches on Going Issues*, (Upper Saddle River, NJ: Merril Prentice Hall, 2003), h. 8.

[42] Nana Saodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 4.

[43] Stephen A Romine, *Building the High School Curriculum*, (New York: The Ronald Press Company, 1954), h. 57.

[44] Muhammad Muzammil al-Bashīr dan Muhammad Malik Sa'id, *Madkhal ilā al-Manhāj wa Thurūq al-Tadrīs*, (Riyad: Dār al-Liwā' wa al-Tauzī, 1995), h. 16.

Menurut Hamdani, kurikulum merupakan ide yang dikembangkan pada level nasional dalam bentuk dokumen yang dapat dikembangkan di daerah tersebut.[45] Kurikulum MTs Pembangunan menerapkan perpaduan kurikulum Kementrian Agama (Kemenag), Diknas yang berorientasi pada Kurikulum 2013 dan mengutamakan pada pilar keunggulan Madrasah Pembangunan yakni *al-akhlāk al-karīmah*, bahasa dan sains. Menurut kepala MTs Pembangunan, Momon Mujiburahman, dengan perpaduan ketiganya, lulusan MTs Pembangunan diharapkan akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berwawasan keislaman dan kebangsaan, berpikir modern, dan mahir dalam berbahasa, sains dan tahfidz.[46]

Mardi menambahkan bahwa kurikulum yang digunakan oleh MTs Pembangunan adalah dengan menganalisis kurikulum Kemenag, Diknas dan kebutuhan peserta didik yang ada dilingkungan tersebut seperti pilar keunggulan Madrasah Pembangunan/ MP adalah *al-akhlāk al-karīmah*, bahasa dan sains, sehingga timbullah perbedaan antara bobot jam mata pelajaran masing-masing prioritas kelas regular, kelas bilingual tahfidz dan kelas billigual sains.[47]

Kurikulum MTs Pembangunan UIN Jakarta disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut; Pertama, peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia, keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. Kurikulum yang disusun

---

[45] HM Djaswadi Al Hamdani, "Introduction Curriculum Multiculturalism Boarding School", *Journal of Education and Practice* 4, 23 tahun 2013, h. 61.

[46] Wawancara kepada kepala MTs Pembangunan: Momon Mujiburrahman, MA, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN

[47] Wawancara kepada wakil kurikulum MTs Pembangunan: Mardi, MA., pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di ruang guru MTs Pembangunan.

MTs Pembangunan UIN memberi ruang yang cukup bagi peserta didik meningkatkan iman dan takwa serta memiliki akhlak yang mulia. Kedua, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Pendidikan merupakan proses sistematik untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Ranah afektif atau sikap, ranah ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan perasaan, sikap, nilai dan emosi. Ranah kognitif yang lebih memfokuskan pada perhatian dalam hal pengembangan kemampuan dan keterampilan intelektual. Ranah psikomotor, lebih menekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan motorik.[48] Sejalan dengan itu, kurikulum yang disusun MTs Pembangunan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual dan kinestetik peserta didik.

Ketiga, keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Keempat, tuntunan pembangunan daerah dan nasional. Kelima, tuntutan dunia kerja. Keenam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum di MTs Pembangunan dalam proses belajar mengajar memanfaatkan sistem *e-learning*. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris dan Arab, siswa memanfaatkan internet sebagai bahan literasi baik untuk membaca dan menulis atau dalam sebagian pembelajaran tugas dikirimkan lewat *email* dan juga terutama pelajaran prakarya pada kelas 7 dan 8 berbasis IT. Konstantina Chatzara, Charalampos dan Demosthenes dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kedepannya sistem *e-learning* dapat mengekploitasi penggunaan

[48] Benyamin S Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives, Hand Book I, Cognetive Domain*, (New York: Longman, 1977), h. 7.

emosi untuk meningkatkan proses pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh.[49]

Ketujuh, agama yaitu kurikulum dikembangkan untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan umat beragama, serta memperhatikan norma agama yang berlaku di lingkungan madrasah. Kedelapan, dinamika perkembangan global. Kesembilan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kesepuluh, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesepuluh, kesetaraan jender. Kesebelas, karakteristik satuan pendidikan yakni sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas MTs Pembangunan UIN Jakarta.[50]

Secara garis besar struktur dan muatan kurikulum MTs Pembangunan meliputi empat kelompok mata pelajaran, atau yang disebut empat konsorsium (kelompok mata pelajaran), yaitu kelompok mata pelajaran agama, yang meliputi: Alquran Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Khot/kaligrafi. Kelompok mata pelajaran IPA, yang meliputi: IPA terpadu (Fisika, Biologi, Kimia) dan Matematika. Dan kelompok mata pelajaran umum, yang meliputi: PPKn, IPS Terpadu, SBK, Penjasorkes, dan Prakarya. Serta mata pelajaran bahasa, yang meliputi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab.[51] Selain mata pelajaran dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dalam

---

[49] Konstantina Chatzara, Charalampos dan Demosthenes, “Emotional Interaction in e-Learning,” Research on E-Learning and ICT in Education, editor Athanassios Jimoyiannis, (New York: Springer, 2011), h. 263.

[50] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, Jakarta:06 Agustus 2018, Kepala MTs Pembangunan UIN: Momon Mujiburrahman, MA, Komite Madrasah: drg. Silvia Wahyuni, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan: Drs. Hasyim, h. 19.

[51] Wawancara kepada kepala MTs Pembangunan: Momon Mujiburrahman, MA, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN

kurikulum MTs Pembangunan juga terdapat kegiatan pembiasaan (*Habitual Curriculum/* HC). Kegiatan ini merupakan program pembinaan dan pembiasaan kecakapan hidup nilai-nilai Islami. Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi baik intrakurikuler (dhuha, tadarus Alquran, kultum dan hafalan doa) selama 40 menit di pagi hari maupun ekstrakurikuler, bakti sosial dan safari dakwah, pesantren ramadhan dan lain sebagainya.

Pengelompokan mata pelajaran di atas dilakukan melalui beberapa pertimbangan, antara lain kedekatan sifat, esensi dan substansi mata pelajaran, efektivitas kerja sama kelompok dan jumlah guru dalam satu kelompok mata pelajaran. Setiap guru yang tergabung dalam kelompok guru mata pelajaran melakukan musyawarah kelompok mata pelajaran, menyusun dan melaksanakan program kerja kelompok dikoordinir oleh ketua dan sekretaris konsorsium. Muatan kurikulum MTs Pembangunan UIN meliputi sejumlah mata pelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX.

Tabel 4.2. Kurikulum berupa Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu
(Sumber: Buku Satu, Kurikulum MTs Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, Jakarta 06 Agustus 2018 Kepala MTs Pembangunan UIN)

Mata Pelajaran		**Alokasi Waktu Per –minggu**		
		VII	**VIII**	**IX**
Kelompok A				
1	Pendidikan Agama Islam			
	a. Alquran Hadis	2	2	2
	b. Akidah Akhlak	2	2	2
	c. Fikih	2	2	2
	d. Sejarah Kebudayaan Islam	2	2	2
2	Pendidikan Pancasila dan	2*	2*	2*

	Kewarganegaraan			
3	Bahasa Indonesia	5*	5*	5*
4	Bahasa Arab	3	3	3
5	Matematika	5	5	6
6	Ilmu Pengetahuan Alam	5	5	6
7	Ilmu Pengetahuan Sosial	3	3	3
8	Bahasa Inggris	4	4	5
Kelompok B				
1	Seni Budaya	1*	1*	1*
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2*	2*	2*
3	Prakarya	1	1	1
4	Pengembangan Diri dan Bimbingan Konseling	1	1	1
5	Tahfidz	2	2	1
6	Kaligrafi/Khot	1	1	1
Jumlah alokasi waktu per-minggu		43	43	44

Berdasarkan struktur dan muatan kurikulum di atas terdapat beberapa mata pelajaran yang mengalami pergeseran dan perubahan jumlah jam pelajaran atau jam tatap muka dari yang ditetapkan, antara lain:[52]

[52] Tim, *Panduan Peserta Didik Baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, h. 10. Tanda bintang (*) merupakan tanda jumlah jam yang mengalami pergeseran kurikulum karena menyesuaikan dengan kelas baik kelas reguler/bahasa/tahfidz, visi, misi dan tujuan MTs Pembangunan UIN Jakarta. Misalnya PKn tertera 2 jam tatap muka, tetapi tatap muka ini mengalami pergeseran dalam artinya 1 jam tatap muka di kelas, dan 1 jam tatap muka pada program kurikulum pembiasaan budaya Islami (*Habitual Curriculum*).

a. *Al-Akhlāk al-Karīmah* dan Kepribadian

Secara umum materi *al-Akhlāk al-Karīmah* dan kepribadian terintegrasi pada Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semua mata pelajaran dan dalam kegiatan pembiasaan. Namun secara khusus materi tersebut terkait langsung pada mata pelajaran Akidah Akhlaq dan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Dengan demikian kegiatan tatap muka untuk kedua mata pelajaran tersebut mengalami penyesuaian, di mana 1 jam pelajaran digunakan untuk kegiatan tatap muka dan 1 jam pelajaran lainnya terintegrasi pada KBM setiap mata pelajaran dan bersinergi dengan kegiatan *Habitual Curriculum* (HC) di hari selasa dan senin, di mana masing-masing ekuivalen atau setara dengan 1 jam kegiatan tatap muka. Dengan adanya materi *al-Akhlāk al-Karīmah* dan kepribadian diharapkan siswa memiliki karakter yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia. Karakter merupakan kekuatan dan kemudian yang akan mengendalikan kehidupan suatu bangsa agar tidak terombang-ambing.[53] Lulusan MTs Pembangunan selain memiliki keilmuan dan kemampuan, mereka juga harus memiliki akhlak yang baik. Kegiatan ini dituangkan melalui *hidden* kurikulum yang disebut juga di MTs Pembangunan UIN Jakarta dengan *Habbitual Curriculum*. Pagi hari selama satu jam pelajaran, ada kegiatan pembinaan akhlak. Siswa melakukan shalat dhuha, tadarrus dan kultum. Siswa dibiasakan dengan tradisi mengucapkan salam, bersalaman dan sapa antar sesama teman.

Habbitual Curriculum atau kurikulum pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dengan materi pembinaan akhlak dan pembiasaan ibadah. Pembinaan akhlak dan pembiasaan ibadah dilakukan selama empat

---

[53] Dianti, Puspa, "Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa", *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 23, No. 1, Tahun 2014, h. 2.

puluh menit atau setara dengan satu jam mata pelajaran seperti yang telah diungkap di atas. Cakupan materinya sebagai berikut:

1) Materi Alquran Hadis disusun mengacu kepada kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada membiasakan membaca Alquran dengan tartil, hafal beberapa surat Alquran sesuai materi yang telah ditentukan.
2) Materi Aqidah Akhlak mengacu kepada kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang dikehendaki oleh kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan menunjukkan akhlak yang baik dalam pergaulan antar sesama manusia. Dan kemampuan menunjukkan akhlak yang baik terhadap orang tua dan guru.
3) Materi Fiqih disusun mengacu kepada tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan melaksanakan shalat dhuha dengan benar dan baik serta menghayati pentingnya melaksanakan shalat.
4) Materi PPKn disusun mengacu kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai dengan tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan menghormati dan menghargai pendapat orang lain sesuai norma bangsa Indonesia. Juga penekanan pada kemampuan untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat dimuka umum.

Menurut Davis, madrasah atau sekolah harus fokus dalam mengembangkan pendidikan karakter pada kurikulum madrasah. Karena dengan pendidikan karakter madrasah akan menciptakan lingkungan yang bermoral seperti dengan ditandai oleh adanya kejujuran, pengendalian diri, keramahan, kesopanan, tidak egois, dan demokratis.[54] Seorang psikolog asal Chicago E. Frank Francis

[54] Derek H. Davis, "Character Education in America's Public Schools", *Journal of Church and State*, 2016: 2.

mengatakan bahwa karakter adalah ungkapan sikap individu terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain dalam mendapatkan hak-hak mereka, kepentingan mereka, dan kesejahteraan mereka. Sikap pada dasarnya adalah cerminan dari kebutuhan individu dalam memperoleh kepuasan hidup di manapun mereka berada.[55] Dapat disimpulkan karakter adalah suatu kebiasaan yang mencirikan seseorang yang teraplikasikan dalam pikiran dan perbuatan tanpa memerlukan suatu rencana atau rekayasa dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari baik karakter terpuji maupun karakter buruk.

Selain kurikulum pembiasaan di MTs Pembangunan UIN Jakarta juga terdapat *reading habbit* (budaya membaca). Budaya membaca adalah suatu pelatihan pembiasaan membaca dengan alokasi waktu khusus 40 menit atau setara dengan satu jam pelajaran. Kegiatan ini dilaksanakan dalam suasana santai, tanpa tuntutan apapun kecuali setiap peserta didik harus membaca. Pada kondisi tertentu guru dapat meminta peserta didik untuk menceritakan atau membuat sinopsis dari buku yang dibacanya. MTs Pembangunan UIN Jakarta memberikan penekanan yang sangat serius pada kemampuan membaca Alquran, setiap peserta didik diharuskan memiliki kemampuan membaca Alquran yang baik.

Peserta didik yang belum bisa membaca Alquran dengan baik diharuskan mengikuti kegiatan Bina Baca Alquran (BBQ). Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan belajar mengajar di bawah kordinasi kelompok guru mata pelajaran agama. Peserta didik juga dilatih untuk terbiasa melaksanakan shalat dhuha bersama-sama didampingi oleh wali kelas masing-masing di dalam kelas.

[55] E. Frank Francis, "Fundamentals of Character Education", *Chicago Journals The School Review*, Vol. 70, Tahun 2013, h. 345-357.

b. ***Basic Sains***

Dalam rangka mencapai prestasi dan hasil belajar yang lebih baik di bidang matematika dan sains, maka jam tatap muka untuk *basic sains* diupayakan lebih banyak dari yang ditetapkan. Di samping itu guna menunjang *basic sains* di bidang aplikasi komputer, peserta didik kelas 7 dan 8 juga untuk pelajaran prakarya berbasis *Information and Technology* (IT).

c. **Bahasa**

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam komunikasi global, maka semua mata pelajaran bahasa mengalami penambahan jam tatap muka dari yang ditetapkan, yakni bahasa Indonesia 1 jam dan bahasa Inggris 2 jam (kelas 9), khusus kelas bilingual (kelas 7 dan 8) ditambah 2 jam tatap muka di hari kamis jam terakhir (jam ke-9 dan 10).

MTs Pembangunan memiliki tiga jenis kelas dengan keunggulan dan ciri khasnya masing-masing, yakni: kelas regular, kelas bilingual sains, dan kelas bilingual tahfidz. Pada kelas bilingual terdapat penambahan jam tatap muka untuk pembelajaran MIPA dan bahasa asing (Arab dan Inggris). Sementara untuk kelas bilingual tahfidz, selain penambahan jam tatap muka untuk bahasa asing, peserta didik juga diberikan tambahan pembelajaran Alquran Hadis dan Tahfidz. Pada kelas reguler telah diterapkan *multiple intelligences*, dengan tujuan peserta didik dapat mengoptimalkan kecerdasan yang dimilikinya, dan juga akan mampu membuat proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru sesuai dengan kecenderungan kecerdasan dari peserta didik.[56]

[56] Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Rabu 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

Selanjutnya MTs Pembangunan UIN juga menerapkan pendidikan kecakapan hidup (*life skill*)[57] yang didefinisikan sebagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi atau berprilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan secara lebih efektif. Pendidikan kecakapan hidup diberikan secara praktis, sebagai bekal kepada peserta didik guna mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Secara garis besar ada 4 jenis kecakapan hidup, yakni meliputi kecakapan personal (keimanan dan ketaqwaan), kecakapan sosial (hubungan kerjasama), kecakapan akademik (pengetahuan) dan kecakapan vokasional. Penerapan pendidikan kecakapan hidup di MTs Pembangunan UIN antara lain merupakan bagian integral dari aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar / KBM pada semua mata pelajaran yang aktualisasinya terdapat pada aspek afektif dan psikomotorik peserta didik. Di samping itu juga dapat direalisasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler, Latihan Dasar Kepemimpinan / LDK, dan organisasi melalui wadah OSIS.[58] Beragam ekstrakurikuler di MTs Pembangunan UIN Jakarta seperti Palang Merah Remaja/ PMR, Kelompok Ilmiah Remaja/ KIR, nasyid, marawis, Arabina, teater, sains, musikalisasi puisi, Journalist Student Community/ JSC, english club, Pasukan Pengibar Bendera/Paskibra, bola basket, sepak bola/futsal, bela diri/karate, Student Company/ SC, rohis, tari saman dan tenis meja. Semua telah diadakan oleh MTs Pembangunan UIN dengan baik, namun dalam perjalanannya ada ekstrakurikuler seperti Journalist Student Community/ JSC yang masih terdapat beberapa kendala sehingga tidak berjalan dengan kontrol yang baik.[59]

---

[57]

[58] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, h. 51.

[59] Alysha mengakui bahwa dirinya sangat minat untuk menjadi penulis, namun ekstrakurikuler yang diminatinya dipertengahan jalan

Kebijakan madrasah dalam merancang program pembelajaran adalah dengan melaksanakan pelatihan, workshop guru, terutama menyangkut kurikulum, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penggunaan teknologi dan informasi dan kompetensi keahlian dibidang mata pelajaran masing-masing. Terbukti di saat kepala akan mensupervisi dewan guru, terlebih dahulu madrasah mensosialisasikan jadwal sebelum pelaksanaannya berlangsung, agar dewan guru dapat menyiapkan secara profesional bahan-bahan yang diperlukan seperti *lesson plan*, dewan guru sudah tidak lagi membuat RPP pada saat supervisi, karena RPP yang dibuat oleh dewan guru sudah pada saat awal tahun pembelajaran. Kepala beserta wakil membuat standar apa aja penilaian yang akan dinilai pada saat supervisi, sehingga *lesson plain* yang dibuat oleh guru dapat membantu guru mengarahkan lebih tepat kepada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.[60]

Madrasah juga mewajibkan guru-guru melakukan kerja sama yang baik untuk memenuhi standar isi, mengadakan persiapan dalam pembelajaran dan mengembangkan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ RPP masing-masing guru mata pelajaran dengan mengacu standar RPP minimal yang telah diberikan oleh madrasah sebagai acuan utama secara lengkap dan sistematis.

3. Standar Proses

Standar proses pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang berarti dalam standar proses pembelajaran berlangsung. Penyusunan standar proses pendidikan diperlukan

---

dibubarkan dikarenakan peminatnya sedikit namun pengeluarannya banyak.

[60] Wawancara kepada wakil kurikulum MTs Pembangunan: Mardi, MA., pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di ruang guru MTs Pembangunan.

untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru sebagai upaya ketercapaian standar kompetensi lulusan. Dengan demikian, standar proses dapat dijadikan pedoman oleh setiap guru dalam pengelolaan proses pembelajaran serta menentukan komponen-komponen yang dapat mempengaruhi pendidikan. Dalam proses pembelajaran menurut Galloway, ada persamaan hak antara siswa dan guru, sehingga dalam proses pembelajaran tidak selalu siswa yang belajar, tetapi bisa jadi justru guru yang belajar kepada siswa, karena siswa yang menentukan proses pembelajaran.[61] Senada dengan hal tersebut Arnold Dodge menyatakan, dalam proses pembelajaran siswa harus diberikan kebebasan.[62]

Standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan berdasarkan Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 merupakan salah satu acuan utama bagi kesatuan pendidikan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pembelajaran, mulai dari perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Adapun berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 bab I pasal 1 ayat 6, standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Menurut wawancara dengan wakil kurikulum MTs Pembangunan, hampir 90% guru melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, dibuktikan dengan hasil supervisi setiap satu tahun sekali dan diiringi dengan tindak lanjut hasil supervisi. Baik pengembangan Rencana Pelaksanaan

[61] Sarah Galloway, "Reconsidering Emancipatory Education Staging A Conversation Between Paulo Freire and Jacques Ranciere", *Educational Theory* 62, 2, tahun 2012, h. 163.

[62] Arnold Dodge, "Heuristic and NCLB Standardize Test: A Convenience Lie", *International Journal of Progressive Education* 5, 2, tahun 2009, h. 13.

Pembelajaran/ RPP, silabus, alokasi waktu dan beban belajar sesuai ketentuan.

Guru dalam proses belajar mengajar juga menerapkan berbagai metode dan strategi mengajar. Contoh guru fikih menerapkan metode praktik pada materi haji, dilengkapi dengan alat dan media peraga seperti ka'bah buatan, sehingga memudahkan peserta didik untuk memahami dan mempraktikan langsung ibadah haji. Dan juga materi makanan halal dan haram, guru juga memberikan inisiatif praktek melalui cara penyembelihan, karena salah satu halal dan haramnya makanan juga ditentukan dari cara mengolahnya.[63] Siswa juga mengakui bahwa metode dan media yang diutarakan oleh guru sangat mengdukung untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan minat serta bakat siswa.[64]

Komunikasi yang disampaikan oleh guru-guru di MTs Pembangunan UIN sangat baik. Sehingga siswa nyaman dan senang di dalam proses pembelajaran. Siswa tidak dijadikan laksana bejana-bejana kosong yang tidak lebih sebagai manusia yang perlu dikasihani dan disuapi berbagai pengetahuan sesuai selera guru tanpa ada hak untuk mereka menolak. Bahkan pada awal pembelajaran siswa disesuaikan dengan minat bakat mereka atau sesuai dengan *multiple intelligence* yaitu menyesuaikan dengan kecerdasan ganda yang lebih dominan dimiliki anak.[65] Di dalam pembelajaran aktif siswa tidak selalu menghafal pelajaran, namun siswa di ajak untuk memecahkan masalah, menemukan

[63] Wawancara kepada salah satu guru MTs Pembangunan: M. Idham Khalid, M.Ag., pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 di ruang guru MTs Pembangunan.

[64] Wawancara siswa MTs Pembangunan UIN Jakarta: Alysha dan Bilqis kelas 9E, pada hari selasa 05 November 2019 di kantin MTs Pembangunan UIN, pukul 12.30-12.46 WIB.

[65] Wawancara siswa MTs Pembangunan UIN Jakarta: Alysha dan Bilqis kelas 9E, pada hari selasa 05 November 2019 di kantin MTs Pembangunan UIN, pukul 12.30-12.46 WIB.

hal-hal baru dalam pembelajaran dan menemukan ide-ide baru.[66] Model pembelajaran di MTs Pembangunan UIN juga menggunakan pembelajaran aktif, sehingga siswa dituntut untuk kritis dan membangun sebuah konsep pengetahuan, sedangkan dewan guru hanya menjadi fasilitator saja.

Proses yang baik juga didukung oleh proses pembelajaran dengan jumlah siswa perombongan kurang dari 32 orang per rombongan belajar. Di MTs Pembangunan UIN disetiap masing-masing tingkat terdapat delapan rombongan belajar baik kelas tujuh, delapan maupun sembilan, dan masing-masing rombongan belajar terdiri dari 26-30 siswa/i, yang memungkinkan belajar siswa menjadi kondusif karena jumlah yang memadai untuk satu rombongan belajar. Serta siswa sudah menggunakan buku teks pelajaran dan media dalam proses pembelajaran.[67]

Proses yang baik bukan hanya terjadi pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga pada program pembinaan dan pembiasaan, *Habitual Curriculum* (HC) atau kurikulum pembiasaan adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai dengan materi pembinaan akhlak dan kepribadian serta pembiasaan ibadah. Pembinaan akhlak dan kepribadian serta pembiasaan ibadah dilakukan selama empat puluh menit sebelum dimulainya KBM jam pelajaran pertama setiap senin, selasa dan rabu. Pagi hari selama satu jam pelajaran setara dengan empat puluh menit, ada kegiatan HC yaitu berupa pembinaan akhlak. Kegiatan yang dilakukan selama HC dalam upaya pembinaan akhlak siswa berupa siswa melakukan shalat dhuha, tadarrus dan kultum. Siswa dibiasakan dengan tradisi mengucapkan salam, bersalaman dan sapa antar sesama teman. Cakupan materinya meliputi:

---

[66] Muhammad Yusuf dan Islamil Suardi Wekke, "Aktive Learning on Teaching Arabic for Special Purpose in Indonesian Pesantren", *Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences* 191 (2015), h. 141.

[67] Observasi setiap satuan kelas di MTs Pembangunan UIN Jakarta.

1. Alquran Hadis

Materi Alquran Hadis disusun berdasarkan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang terdapat dalam kurikulum dan sesuai jenjang tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan dan pembiasaan membaca Alquran dengan tartil. Hafal Alquran juz 29 dan juz 30 sesuai materi yang telah ditentukan.

2. Akidah Akhlak

Materi Akidah Akhlak mengacu kepada kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana yang dikehendaki oleh kurikulum dan sesuai jenjang tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan menunjukkan akhlak yang baik dalam pergaulan antar sesama manusia dan kemampuan menunjukkan akhlak yang baik terhadap orang tua dan guru.

3. Fiqih

Materi Fiqih disusun berdasarkan nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai jenjang tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan bersuci dan berwudhu, kemampuan melaksanakan shalat dhuha dengan benar dan baik, dan menghayati pentingnya mendirikan shalat.

4. PPKn

Materi PPKn disusun dengan mengacu kepada nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta tujuan kurikuler sebagaimana terdapat dalam kurikulum sesuai jenjang tingkatannya, dengan penekanan pada kemampuan menghormati dan menghargai pendapat orang lain sesuai norma bangsa Indonesia dan kemampuan untuk berani berbicara dan mengemukakan pendapat dimuka umum.

5. Tahsin dan Hafalan

MTs Pembangunan UIN Jakarta memberikan penekanan sangat serius pada kemampuan membaca Alquran, karenanya kepada setiap peserta didik diharuskan memiliki kemampuan membaca Alquran dengan baik. Peserta didik yang belum bisa membaca Alquran dengan baik diharuskan mengikuti kegiatan tahsin atau Bina Baca Alquran (BBQ). Kegiatan ini dilaksanakan usai kegiatan belajar mengajar dibawah koordinasi kelompok guru mata pelajaran/konsorsium agama.

MTs Pembangunan UIN Jakarta memiliki muatan lokal dan tahfid untuk kelas 7 Juz 30 dan kelas 8 Juz 29, dan ada program kegiatan pembiasaan atau HC yang di dalamnya antara lain memuat kegiatan hafalan. Kegiatan hafalan setara 1 jam pelajaran dilaksanakan dalam bentuk tugas (non tatap muka). Sedangkan setoran hafalan dilaksanakan sebanyak 1 kali tatap muka setiap hari Rabu, serta dinilai oleh wali kelas atau guru pendamping HC dan sesama peserta didik di buku Monitor Penilaian *Habitual Curriculum* (MPHC).[68] Pembelajaran tatap muka kekuatannya adalah pertama, *human connection* yakni lewat tatap muka sangat mudah membangun dan mengembangkan suatu presensi sosial dan rasa saling percaya. Kedua, *spontaneity* yakni melalui pembelajaran langsung, memungkinkan setiap orang untuk mengikuti dan mengimbangi percepatan berpikir di antara kontributor sehingga dimungkinkan mencapai kesepahaman. Sedangkan kelemahan pembelajaran tatap muka adalah pertama, *participation* yakni ada hambatan-hambatan partisipasi untuk semua orang terutama jika terjadi dominasi perseorangan. Kedua, *flexibility* yakni karena keterbatasan waktu hingga

[68] Tim, *Panduan Peserta Didik Baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, h. 13.

memungkinkan suatu materi yang didiskusikan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.[69]

4. Standar Penilaian

Penilaian merupakan tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai mengenai sesuatu.[70] Penilaian pendidikan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan adalah penilaian hasil belajar atau evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan proses aktivitas penilaian dan pengukuran terhadap suatu obyek tertentu yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan hasil kesimpulan secara memadai.[71] Sebagai sebuah proses, evaluasi berperan dalam penentuan keberlangsungan sebuah program, apakah sebuah program tepat, memadai, efektif dan efisien serta dapat juga menunjukkan apakah program tersebut memiliki manfaat atau malah menciptakan masalah yang tidak terduga.[72] Permendiknas No. 27 Tahun 2007 menjelaskan standar penilaian pendidikan adalah Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar dalam Permendiknas No. 20 Tahun 2007 meliputi tes, observasi, penugasan, ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian

---

[69] M. Yusuf T., "Mengenal Blended Learning", *Lentera Pendidikan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2011, h. 235.

[70] A. Nurhayati, "Prinsip dan Tujuan Penilaian Tindakan Kelas", Vol. V, No. 1, Januari- Juni 2016, h. 2.

[71] Ngadirin Setiawan & Tutuk Ningsih, "Penilaian Kinerja Guru Bersertifikat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto",h. 272.

[72] Sue Mallonee, Evaluating Injury Prevention Programs: The Oklahoma City Smoke Alarm Project. The Future Children Unintentational Injuries in Childhood", *Spring/Summer*, Vol. 10, No. 1 Tahun 2000.

akhir semester, penilaian akhir tahun, ujian madrasah dan ujian nasional.

Prinsip-prinsip penilaian kelas antara lain yaitu validitas, reliabilitas, adil dan obyektif, kontinyu (terus-menerus), komprehensif (menyeluruh), praktibilitas, ekonomis, terfokus pada kompetensi, mendidik, transparan dan bermakna. Adapun tujuan penilaian kelas yaitu, 1) mengetahui tingkat pencapaian kompetensi siswa, 2) mengukur pertumbuhan dan perkembangan belajar siswa, 3) mendiagnosis kesulitan belajar siswa, 4) mengetahui hasil pembelajaran, 5) mengetahui pencapaian kurikulum, 6) memotivasi siswa untuk belajar dan terakhir memotivasi guru agar melakukan kegiatan pengajaran dengan lebih baik.[73]

Berdasarkan Permendikbud nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian disebutkan bahwa penilaian hasil belajar dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan dan oleh pemerintah. Berkaitan penilaian oleh pendidik, maka penilaian hendaknya dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester dan ulangan kenaikan kelas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam standar penilaian pendidikan. Penilaian ini digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Strategi MTs Pembangunan dalam memaksimalkan standar penilaian sebagai berikut:[74]

a. Membuat media diskusi tentang penilaian yang baik dan benar;

---

[73] A. Nurhayati, "Prinsip dan Tujuan Penilaian Tindakan Kelas", h. 3.

[74] Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Selasa 03 September 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

b. Rapat perkonsorsium terutama untuk menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), baik KKM internal untuk penilaian harian dan penilaian tengah semester, serta KKM utama yang akan digunakan dirapor siswa;
c. Mewajibkan bentuk penilaian proyek/ karya setiap satu mata pelajaran minimal satu kali;
d. Monitoring penilaian guru setiap satu minggu sekali;
e. Memberikan penghargaan terhadap siswa yang berprestasi setiap awal semester ketika apel/ upacara awal semester;
f. Memberikan beasiswa berupa bebas SPP, bagi bintang pelajar kelas delapan dan sembilan;[75]

Penilaian Harian (PH) dilaksanakan selama proses pembelajaran, dalam hal ini dilaksanakan setelah berakhirnya satu kompetensi dasar atau lebih. Hasil ulangan harian ini dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kegiatan remedial dan pengayaan. Penilaian Tengah Semester (PTS), dilaksanakan setelah melaksanakan pembelajaran kurang lebih tiga bulan. Cakupan PTS meliputi semua kompetensi dasar yang telah disajikan pada proses pembelajaran. Hasil ulangan ini sebagai acuan untuk menentukan rapor tengah semester. Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan setiap akhir semester pada tahun pelajaran berjalan. Kompetensi dasar yang diuji pada ulangan akhir semester adalah semua kompetensi dasar yang disajikan pada semester gasal. Hasil ulangan akhir semester dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menentukan nilai rapor semester gasal. Adapun Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan untuk menguji kompetensi dasar pada akhir semester genap. Keseluruhan ulangan dimaksud dijadikan acuan untuk menentukan

[75] Bintang pelajar adalah setiap siswa yang memiliki peringkat satu di dalam satu kelas.

nilai rapor yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kriteria kenaikan kelas.[76]

Kenaikan kelas bagi peserta didik yang dilaksanakan setiap akhir tahun pelajaran di MTs Pembangunan UIN Jakarta mengacu kepada kriteria kenaikan kelas dan kebutuhan madrasah dengan mempertimbangkan Permendikbud nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian dan ketentuan/aturan terkait lainnya, serta didasarkan kepada keputusan hasil rapat pleno kenaikan kelas di MTs Pembangunan UIN. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila dalam dua semester di kelas yang diikuti telah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran, menyelesaikan program hafalan (HC), memiliki akhlak yang baik, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam/ PAI yang harus mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal / KKM yakni Alquran Hadis, Aqidah Akhlak dan Fiqih. Mata pelajaran yang tidak mencapai KKM maksimal tiga pelajaran, tidak boleh ada nilai di bawah 50.0 (kurang dari sama dengan lima puluh koma nol) pada mata pelajaran yang diujikan secara nasional, antara lain Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Kehadiran di kelas mencapai minimal 90% dari jumlah hari efektif, nilai yang diberikan kepada peserta didik bersifat kumulatif, dengan mempertimbangkan rerata harian (nilai ulangan harian dan nilai tugas), Penilaian Tengah Semester (PTS), dan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dengan rumus: 2PH+PTS+PAS dibagi empat, sama dengan nilai rapor.[77]

Berkaitan dengan hal penilaian maka sistem pelaporan hasil belajar peserta didik diatur dengan ketentuan pengelolaan nilai hasil belajar peserta didik sepenuhnya ditentukan oleh guru

---

[76] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, h.46.

[77] Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, h. 45.

mata pelajaran, laporan hasil belajar peserta didik meliputi seluruh aspek yang disesuaikan dengan mata pelajaran, kepala madrasah atau wakil kepala madrasah bidang kurikulum menandatangani hasil belajar siswa dan dilaporkan kepada orang tua peserta didik melalui wali kelas. Pelaporan hasil belajar peserta didik pada kurikulum 2013 tidak hanya menekankan pada kompetensi pengetahuan saja, namun juga meliputi kompetensi keterampilan dan kompetensi sikap. Ketika jenis kompetensi menggunakan skala 1-4 (kelipatan 0,33), yang dapat dikonversi ke dalam predikat A-D (untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan), maupun predikat kualitatif Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), Kurang (K) untuk kompetensi sikap.

Berdasarkan data tersebut MTs Pembangunan UIN sudah melaksanakan penilaian hasil belajar siswa, menentukan KKM, penilaian kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan berdasarkan karakteristik Kompetensi Dasar/ KD. Dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar dengan langkah-langkah menetapkan tujuan, penilaian, menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen dan pedoman penilaian, mengolah dan menentukan kelulusan siswa, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan menurut PP No. 13 Tahun 2015 adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Tenaga pendidik berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 6 adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Tabel 4.3. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
(Sumber: Ringkasan dari Instrumen Penilaian Akreditasi BAN-S/M)[78]

No.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Keterangan
1.	Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi.	Ijazah minimum S1
2.	Guru memiliki sertifikat mendidik	Akta VI/ Akta mengajar/ sertifikat
3.	Guru mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan /atau uji kelayakan dan kesetaraan	Bidang studi yang diampu liniar dengan ijazah/ sertifikat
4.	Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik	Guru diwajibkan menguasai ilmu mendidik dan mampu mengelola pembelajaran peserta didik.
5.	Guru memiliki kompetensi profesional	Kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam.
6.	Guru memiliki kompetensi kepribadian	Kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.
7.	Guru memiliki kompetensi sosial	Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara

[78] https://bsnp-indonesia.org/standar -pendidikan-dan-tenaga-kependidikan/

		efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
8.	Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kempetensi profesional	Penguasaan konsep dan praksis asesmen, penguasaan kerangka teoritis dan praktis, perencanaan program, penilaian proses dan hasil kegiatan, komitmen terhadap etika profesional, penguasaan konsep dan praktis penelitian.
9.	Rasio antara Guru BK dengan jumlah siswa sesuai dengan ketentuan.	Satu guru BK melayani maksimal 150 siswa.
10.	Kepala madrasah memenuhi persyaratan.	Kualifikasi minimal S1 atau D4, usia maksimal 56 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, memiliki sertifikat kepala madrasah, berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, golongan minimal III/c bagi PNS dan bagi non-PNS disetarakan, nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun

		terakhir.
11.	Kepala madrasah memiliki kompetensi manajerial	Mampu merencanakan, mengelola, memimpin, mengembangkan kurikulum, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
12.	Kepala madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan	Mampu melakukan inovasi, bekerja keras, motivasi, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, serta memiliki naluri kewirausahaan.
13.	Kepala madrasah memiliki kemampuan supervisi akademik	Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil supervisi.
14.	Madrasah memiliki kepala tenaga administrasi sesuai dengan ketentuan.	Kualifikasi minimal S1 dengan pengalaman 4 tahun, atau D3 dengan pengalaman minimal 8 tahun dan memiliki sertifikat.
15.	Kepala perpustakaan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.	Kualifikasi minimal S1 dengan pengalaman 3 tahun, atau D2 dengan pengalaman minimal 4 tahun dan memiliki sertifikat.
16.	Tenaga perpustakaan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan.	Kualifikasi minimal SMA atau sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan

		perpustakaan madrasah.
17.	Madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi sesuai ketentuan standar tenaga laboran.	Memiliki kualifikasi minimal D1 yang relevan dan memiliki sertifikat.
18.	Madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus	Penjaga keamanan, tukang kebun, tenaga kebersihan, pesuruh dan pengemudi.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan di atas adalah standar minimal untuk penyelenggara pendidikan. Maka diharapkan madrasah dapat memenuhi semua standar bahkan melampaui standar. Adapun standar pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Pembangunan UIN rata-rata disetiap indikator instrumen penilaian BAN-S/M sudah mencapai pada standar maksimal. Dibuktikan dengan nilai akreditasi pada standar pendidik dan tenaga kependidikan di MTs Pembangunan UIN bernilai 94 pada tahun 2014.[79]

Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN terdiri atas: kepala madrasah, wakil kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan. Kepala MTs mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, pembinaan pendidik, dan tenaga kependidikan, pembinaan kesiswaan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kepala MTs bertanggung jawab langsung kepada direktur. Adapun wakil kepala madrasah terdiri atas wakil kepala madrasah bidang akademik dan kurikulum, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan, wakil kepala madrasah bidang akademik dan kurikulum mempunyai tugas membantu kepala madrasah dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, intra-kurikuler dan ko-kurikuler, wakil kepala madrasah bidang kesiswaan

[79] Data dari BAN-S/M pak Irfan.

mempunyai tugas membantu kepala madrasah dalam pelaksanaan pembinaan kesiswaan, organisasi kesiswaan, ekstra-kurikuler dan pengabdian masyarakat. Adapun tenaga kependidikan terdiri atas tenaga guru, tenaga penunjang akademik dan tenaga administrasi.[80]

Guru di MTs Pembangunan UIN sudah memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang cukup baik. Dibuktikan salah satunya Pasal 30 dalam ORTALA dan STATUTA MP UIN tentang tenaga pendidik, diatur bahwa guru yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata satu (S-1) atau diploma IV (D4). Guru terdiri dari guru tetap, guru tidak tetap dan guru tamu dan guru pengganti. Guru tetap adalah guru yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap yayasan yang berstatus sebagai PNS diperbantukan atau guru swasta tetap. Guru tamu adalah guru yang diundang menjadi guru yayasan selama jangka waktu tertentu. Guru tidak tetap adalah guru yang diangkat oleh ketua yayasan dengan perjanjian kontrak kerja. Guru pengganti adalah guru yang ditugaskan direktur atas usulan kepala madrasah untuk menggantikan sementara guru yang berhalangan melaksanakan tugas minimal 10 hari kerja. Jenjang jabatan fungsional guru ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 31, tenaga penunjang akademik adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab membantu peningkatan kegiatan akademik. Tenaga administrasi adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi. Pemilihan dan pengangkatan tenaga kependidikan berdasarkan kualifikasi kebutuhan atas usul direktur kepada yayasan.[81]

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai

[80] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, h. 11.
[81] Abuddin Nata dkk., *ORTALA dan STATUTA*, h. 11.

dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi profesional pendidik sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugas sebagai guru. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia yang menjadi teladan bagi peserta didik. Kompetensi professional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru dapat membimbing peserta didik untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[82]

Tenaga pendidik dan kependidikan pada MTs Pembangunan UIN secara garis besar sudah memenuhi kualifikasi. Standar kepala madrasah berdasarkan Permendiknas No. 13 Tahun 2007 harus memenuhi kompetensi, kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kualifikasi umum yaitu kepala madrasah di MTs Pembangunan sudah memiliki kualifikasi akademik sarjana kependidikan pada perguruan tinggi terakreditasi bahkan sudah memiliki kualifikasi *master*/S2 pada bidang pendidikan agama dan

[82] UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

memiliki pengalaman mengajar selama 20 tahun. Adapun kualifikasi khusus yaitu kepala madrasah berstatus sebagai guru MTs Pembangunan, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru MTs, memiliki sertifikat kepala MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

Kompetensi untuk standar kepala madrasah menurut Permendiknas No. 13 Tahun 2007 terdiri dari lima dimensi kompetensi yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial. Kepala madrasah sudah mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanan program serta lainnya. Kepala madrasah dan wakilnya juga sudah mampu melaksanakan supervisi dengan baik untuk meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi dilaksanakan pada setiap guru satu tahun sekali, dengan melalui merencanakan program supervisi, melaksanakan supervisi dengan indikator penilaian yang sudah disosialisasikan oleh dewan guru sebelum pelaksanaan dan menindaklanjuti hasil supervisi. Meskipun dalam proses menindaklanjuti di sini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan waktu.

Kompetensi sosial juga telah dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah. MTs Pembangunan UIN sudah melaksanakan kerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga. Dalam rangka mendukung operasional pengelolaan pendidikan dan peningkatan mutu layanan, MTs Pembangunan berupaya menjalin kerjasama dengan pihak lain, yakni:

a. Kerjasama pelaksanaan penguatan bahasa Inggris, dengan *Flash English Course*;
b. Kerjasama pengadaan buku teks pelajaran *English in Mind* dan *ESOL test* untuk peserta didik bilingual, dengan Mentari *Books*;

c. Kerjasama kegiatan eksperimen sains untuk peserta didik kelas bilingual, dengan rumah sains Ilma;
d. Kerjasama pengadaan dan pemeliharaan software pembelajaran MIPA, dengan Pesona Edu;
e. Kerjasama pelaksanaan psikotes untuk peserta didik, dengan lembaga Psikologi Essens.

Guru/pendidik di MTs Pembangunan UIN sudah berjalan sesuai fungsinya yaitu, guru sebagai pendidik dan pengajar, bahwa guru harus memiliki kestabilan emosi, ingin memajukan peserta didik, bersikap realitas, jujur dan terbuka, serta peka terhadap perkembangan, terutama inovasi pendidikan. Untuk mencapai semua itu, guru harus memiliki pengetahuan yang luas, menguasai berbagai jenis bahan pembelajaran, menguasai teori dan praktek pendidikan, serta menguasai kurikulum dan metodologi pembelajaran. Guru sebagai anggota masyarakat, bahwa setiap guru harus pandai bergaul dengan masyarakat, untuk itu guru harus menguasai psikologi sosial, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia, memiliki keterampilan membina kelompok, keterampilan bekerjasama dalam kelompok, dan menyelesaikan tugas bersama dalam kelompok. Guru juga sebagai pemimpin, administrator dan pengelola pembelajaran.[83]

Peranan seorang pendidik terhadap efektifnya pembelajaran sangat mempengaruhi mutu hasil belajar. Studi yang dilakukan peneliti pendidik di MTs Pembangunan sudah secara efektif dalam memaksimalkan proses pembelajaran baik dari pemanfaatan sumber maupun media yang ada, sehingga muncul ide-ide kritis dari siswa dan siswa dapat mengembangkan minat dan bakat mereka. Menurut L. Elder dan R. Paul, salah satu cara untuk membantu siswa mengembangkan pemahaman dalam pembelajaran adalah memberikan pemahaman tentang pentingnya tujuan pembelajaran tersebut. Misalnya untuk setiap tugas yang

[83] E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. Ke-3, h. 19

diberikan kepada mereka, pendidik dapat meminta siswa untuk menyatakan dengan kata-kata sendiri tujuan penugasan tersebut.[84]

Pendidik di MTs Pembangunan UIN kurang lebih terdiri dari 49 orang guru, 9 orang berkualifikasi Magister, dan 40 orang berkualifikasi Sarjana. Yang berarti secara kualifikasi sudah memenuhi standar bahkan melampaui standar. Pendidik yang berstatus PNS terdiri dari 13 orang, 30 orang guru tetap yayasan dan 6 orang guru kontrak. Serta terdiri dari tenaga pendidik yang mumpuni baik itu tata usaha, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, Kasubag dikjar, keuangan, kepengawaian dan umum, sekuriti, pengemudi, dan *care staff*.[85] Dibuktikan dengan rata-rata tenaga kependidikan yang sudah S1 dan sesuai dengan bidangnya. Dari staf tenaga kependidikan di MTs Pembangunan UIN terdiri dari 33 orang, yang sudah menamatkan S1 sebanyak 22 orang, menamatkan D3 sebanyak 3 orang, SMA/SMK sebanyak 7 orang dan SD 1 orang.[86]

Terkait dengan mutu yang didasarkan pada kepuasan pelanggan, perwakilan siswa menyatakan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung sudah bagus baik dari segi metode, media dan komunikasi yang guru bawakan. Namun dalam tenaga kependidikan perwakilan siswa mengakui bahwa masih ada tenaga kependidikan yang kurang komunikasi dan keterlambatan dalam menjalankan tugasnya. Berbeda halnya dengan staf perpustakaan dan laboran yang baginya sangat melayani dengan sepenuh hati.[87]

---

[84] Linda Elder & Richard Paul, "Critical Thingking: Thingking to Some Purpose," *Journal of Developmental Education*, Vol. 25, No. 1, Tahun 2001, h. 40.

[85] Data diperoleh dari bagian kepegawaian yaitu Thobroni, A.Md.

[86] Data diperoleh dari Subbag Administrasi Pendidikan dan Pengajaran/ Dikjar, Effron Faulusia, S.E.

[87] Wawancara siswa MTs Pembangunan UIN Jakarta: Alysha dan Bilqis kelas 9E, pada hari selasa 05 November 2019 di kantin MTs Pembangunan UIN, pukul 12.30-12.46 WIB.

6. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana menurut PP No. 13 adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknolgi informasi dan komunikasi.

Penggunaan sarana dan prasarana dalam pendidikan juga dikemukakan oleh Malik Fadjar, bahwa masa depan harus dijemput dengan menggunakan sarana pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan harus dipacu ke arah masa depan manusia. Di sinilah sesungguhnya makna penting secara terus-menerus memperbaharui sistem pendidikan Islam. Ungkapan pendidikan sepanjang masa sejatinya sudah diajarkan oleh Rasulullah, ketika menyuruh para sahabat belajar ilmu ke Cina dan mencari ilmu sejak lahir sampai meninggal dunia. Untuk itu, manusia harus senantiasa belajar dan belajar, karena belajar merupakan rekreasi ke arah masa depan.[88]

Adapun fasilitas di MTs Pembangunan UIN Jakarta terdiri dari ruang kelas ber-AC, bimbingan membaca Alquran, perpustakaan, laboratorium komputer dilengkapi jaringan internet, laboratorium Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/ MIPA, laboratorium Ilmu Pengetahuan Sosial/ IPS, laboratorium bahasa, laboratorium keterampilan/ *kichen lab*, masjid dan aula, sarana audio visual, Unit Kesehatan Siswa/ UKS dan perawat Rumah Sakit Syarif Hidayatullah, ruang bimbingan konseling, ruang musik, Tabungan Amal Shaleh (TAS), sarana antar jemput, kantin, satuan pengaman (Satpam), koperasi sekolah, sarana olahraga (futsal, basket, tenis meja dan lainnya) serta bank.[89]

---

[88] Malik Fadjar, *Holistika Pemikiran Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 38.

[89] Tim, *Panduan Peserta Didik Baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, h. 19.

Sarana dan prasarana di MTs Pembangunan UIN sudah sangat baik dan memenuhi standar. Salah satunya adalah perpustakaan, perpustakaan MP UIN Jakarta adalah salah satu unit pelaksana teknis sumber belajar bagi peserta didik, guru dan karyawan. Untuk itu perpustakaan MP UIN mempunyai peranan penting dalam:

1. Membantu menyediakan bahan/sumber belajar baik berupa buku, majalah, Koran, audio visual, internet dan fasilitas lain.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap bacaan.
3. Memperkaya pengalaman belajar peserta didik.
4. Menanamkan kebiasaan belajar mandiri.
5. Melatih peserta didik kearah tanggung jawab.
6. Memperlancar peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah.
7. Membantu guru-guru menemukan sumber pengajaran.
8. Membantu peserta didik, guru, dan karyawan dalam mengikuti perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan.

Koleksi perpustakaan Madrasah Pembangunan UIN terdiri dari bahan pustaka berupa buku-buku dari berbagai disiplin ilmu, bacaan berupa cerpen, novel, majalah dan surat kabar. Juga terdapat bahan pustaka berupa non buku, seperti film video/VCD, kaset, peta, globe dan internet. Terdapat juga katalog *online* untuk peserta didik mencari bahan literatur.

Laboratorium di MP UIN juga sudah memenuhi standar. Laboratorium MP UIN merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi sekelompok laboran. Laboratorium bertugas melaksanakan layanan penunjang pelaksanaan pendidikan dan pengajaran keagamaan, bahasa, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Laboratorium MP UIN Jakarta memiliki beberapa laboratorium, yaitu pertama laboratorium agama yang dilengkapi

dengan petugas khusus, pendingin ruang, *sound system*, LCD projector, DVD pendukung pembelajaran, perlengkapan shalat, perlengkapan tahsin Alquran, perlengkapan manasik haji, perlengkapan pengurusan jenazah, perlengkapan penyembelihan hewan qurban, perlengkapan kegiatan peringatan hari besar Islam dan lainnya. Kedua, laboratorium matematika dan ilmu pengetahuan alam (MIPA) dilengkapi dengan petugas khusus, pendingin ruang, *sound system*, LCD projector, DVD pendukung pembelajaran, buku-buku pendukung praktik/pembelajaran, beranekaragam model alat peraga (torso manusia dan binatang), peralatan observasi dan penelitian, peralatan optic, bermacam-macam kit, aquarium besar, peralatan uji golongan darah, fortofolio karya-karya siswa, beraneka ragam jenis ikan hias, tanaman tabulampot dan lainnya. Ketiga, laboratorium computer dilengkapi dengan petugas khusus, pendingin ruang, *sound system*, LCD projector, DVD pendukung pembelajaran, *active board classroom*, buku-buku praktik/pembelajaran, *wearnes server*, computer set (CPU, monitor, *keyboard, headset, server* guru dan siswa), robot miniature industry, lemari fortofolio karya peserta didik dan lainnya. Keempat, laboratorium bahasa dilengkapi dengan petugas khusus, pendingin ruang, *sound system*, LCD projector, DVD pendukung pembelajaran, buku-buku pendukung praktik/pembelajaran, computer set (PC, *monitor, headset* dan *microphone, server*, PC *conector*), *student amplifier* dan lainnya.[90]

Sebagian siswa ada yang memilih sekolah di MTs Pembangunan UIN salah satu alasannya adalah sarana dan prasarana yang lengkap.[91] Menurut indikator standar memang

[90] Tim, *Panduan Peserta Didik Baru Madrasah Pembangunan UIN Jakarta*, h. 47.

[91] Wawancara siswa MTs Pembangunan UIN Jakarta: Alysha dan Bilqis kelas 9E, pada hari selasa 05 November 2019 di kantin MTs Pembangunan UIN, pukul 12.30-12.46 WIB. Ketika ditanya mengapa memilih MTs Pembangunan UIN sebagai tempat belajar?, Alysha dan Bilqis menjawab karena sarana dan prasarananya lengkap untuk

sarana dan prasarana di MTs Pembangunan UIN sudah mencapai standar yang maksimal. Namun dalam kesempurnaannya siswa mengakui bahwa masih tetap ada yang kurang, seperti halnya robotic yang digunakan secara bersama-sama dengan siswa Madrasah Ibtidaiyah yang membuat kurang nyaman peserta didik, karena harus antri, terlebih jika masing-masing membutuhkan. Dan sarana prasarana yang lain seperti komputer yang banyak tetapi dengan siswa yang lebih banyak, serta perbaikan yang belum maksimal cepat tanggap.[92]

7. Standar Pembiayaan

Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu ditentukan oleh banyak faktor, yang antara lain adalah tenaga yang memadai dalam hal jumlah maupun kualitas, dana yang mencukupi untuk membiayai berbagai hal yang mendukung kegiatan pembelajaran, lingkungan yang kondusif, kepemimpinan yang baik, peran serta masyarakat yang aktif, dan faktor lainnya. Di antara banyak faktor tersebut, faktor ketersediaan dana merupakan salah satu yang sangat penting dalam membiayai berbagai kebutuhan yang menjamin keberlangsungan kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Ada tiga jenis biaya pendidikan, yaitu biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

---

mendukung pembelajaran, di samping ada hal-hal lainnya seperti di suruh orang tua, bagus sistem pembelajarannya dan banyak teman yang sekolah di MTs Pembangunan UIN Jakarta.

[92] Seorang siswa berkomentar, terkadang jika ada komputer yang rusak lama dibenarkannya.

melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tidak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain sebagainya. Adanya amanat konstitusi tentang penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang harus dibiayai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti pemerintah melalui berbagai program. Salah satu program yang sudah digulirkan sejak tahun 2005 adalah program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS adalah program yang memberikan bantuan dana ke lembaga pendidikan formal penyelenggara pendidikan dasar baik negeri maupun swasta untuk keperluan biaya operasional di lembaga pendidikan masing-masing.[93]

Setiap pemerintah daerah memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan setiap sektor yang menjadi tanggungjawabnya termasuk sektor pendidikan. Pembiayaan pendidikan pada suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya, tergantung pada kapasitas keuangan daerah dan kemauan politis dari para pengambil kebijakan di daerah tersebut. Daerah yang mempunyai pimpinan baik eksekutif maupun legislatif dengan visi yang mengutamakan pendidikan akan mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan dengan proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang pimpinan eksekutif dan legislatifnya kurang perhatian terhadap pendidikan.

Permendiknasi No. 69 Tahun 2009 tentang standar biaya operasi nonpersolia 2009 menjelaskan standar biaya yang diperlukan MTs untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia

---

[93] Yendri Wirda, Studi Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No. 3 Tahun Ke-1,* (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, Desember 2010), h. 359.

selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai standar nasional pendidikan. Biaya tersebut meliputi biaya alat tulis madrasah, biaya bahan dan alat habis pakai, biaya pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya konsumsi, biaya asuransi, biaya pembinaan siswa, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri dan biaya pelaporan. Untuk mencapai hasil yang maksimal, madrasah Pembangunan mempunyai strategi khusus dalam standar pembiayaan ini agar hasilnya maksimal, yaitu:[94]

a. Menginventarisasi dan merumuskan anggaran biaya kebutuhan-kebutuhan dari unit lain;
b. Setelah dirumuskan anggaran pembiayaan pendidikan maka dibagi perorangan/persiswa kepada uang pangkal, Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
c. Anggaran pembiayaan pendidikan disosialisasikan kepada yayasan dan komite dan dirapatkan kembali harus disesuaikan dengan kebutuhan bukan keinginan madrasah;
d. Pelaksanaan sesuai dengan yang dianggarkan;
e. Mempunyai auditor keuangan dari pihak luar;
f. Adanya rapat pimpinan mengenai evaluasi keuangan.

Manajemen standar pembiayaan di madrasah Pembangunan UIN terdiri dari perencanaan, pengawasan dan tindak lanjut. Perencanaan anggaran berawal dari Renstra (Rencana Struktur Anggaran empat tahun ke depan), yang dirinci lagi dari merencanakan kegiatan setiap satu tahun sekali berdasarkan RKAM (Rencana Keuangan Anggaran Madrasah) yang berasaskan audit jaminan mutu madrasah. Kegiatan-kegiatan

[94] Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Selasa 03 September 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

yang direncanakan harus bertolak ukur pada peningkatan mutu madrasah dan standar biaya masukan departemen keuangan di madrasah. Semisal rencana anggaran sarana dan prasarana dianggarkan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, contoh satu rombongan belajar menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017[95] jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar diatur bahwa SMP/ MTs dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik, di madrasah Pembangunan menganggarkan untuk sarana prasarana rombongan belajar yang jumlah kelasnya tidak maximal, pak Maradona menyebutkan apabila standar nasionalnya 28 (dua puluh delapan) maka kami kurangi/ menentukan satu rombongan belajar berjumlah 25 (dua puluh lima) siswa, untuk menjaga kualitas pendidikan agar bisa dikelola dengan baik.[96]

Ada beberapa sumber dana yang selama ini memberikan kontribusi dalam memenuhi kebutuhan anggaran di tingkat satuan pendidikan, baik yang berasal dari dana pemerintah maupun dari masyarakat. Sumber-sumber dana tersebut adalah pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, orang tua siswa, donatur, usaha produksi, dan sumber dana lainnya. Penyediaan dana ditinjau dari pengalokasian dana yang kemudian dilanjutkan dengan penyaluran dana.[97]

Pembiayaan operasional, personal dan investasi di madrasah Pembangunan UIN terdiri dari beberapa pemasukan

[95] Tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat

[96] Wawancara kepada Kasubag Keuangan dan Kepegawaian/ penanggung jawab standar pembiayaan, Maradona, SE., Pada hari selasa 12 Maret 2019, di Ruang Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.

[97] Yendri Wirda, Studi Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No. 3 Tahun Ke-1,* h. 360.

antara lain adalah, pertama komite madrasah yang terbagi menjadi dua yaitu sumbangan rutin dan sumbangan tidak rutin. Pembiayaan dari komite madrasah ini tidak ditentukan secara besaran nominal, namun komite madrasah secara suka rela memberikan dana sumbangan kepada madrasah dengan kadar kemampuan komite dan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah. Kedua, pemasukan pembiayaan dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh pemerintah, biaya BOS ini sesuai dengan yang dianggarkan oleh masing-masing unit (TK/MI/MTs/MA) dan disetujui oleh pemerintah. Masing-masing unit pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ketiga, adalah pengumpulan dana dari alumni atau perusahaan yang juga secara suka rela memberikan kepada madrasah, contoh pengumpulan dana berupa buku-buku dan perlengkapan perpustakaan dan lainnya. Keempat, adalah dana yang berasal dari uang pangkal PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), uang pangkal yang dianggarkan oleh madrasah di sini harus mampu menampung dan mencukupi kurang lebih 246 karyawan yang ada di madrasah Pembangunan UIN, bukan hanya saja MTs akan tetapi semua unit untuk kondisi biaya investasi yang dibutuhkan oleh madrasah seperti penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia) dan modal kerja tetap. Dari keempat pemasukan dana tersebut madrasah mampu membiayai keberlangsungan seluruh proses pembelajaran baik jangka menengah maupun jangka panjang.[98]

Madrasah membuat suatu perencanaan pembiayaan juga melakukan penyaringan dari skala prioritas yang disepakati oleh bersama yaitu masing-masing manajemen perunit, semisal di Madrasah Ibtidaiyah lebih mengedepankan program *multiple intelegent*, maka standar pembiayaan yang dianggarkan akan lebih

[98] Wawancara kepada Kasubag Keuangan dan Kepegawaian/ penanggung jawab standar pembiayaan, Maradona, SE., Pada hari selasa 12 Maret 2019, di Ruang Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.

besar pada program tersebut. Begitupula dengan Madrasah Tsanawiyah yang lebih mengedepankan program tilawati, maka anggaran yang dikeluarkan akan lebih besar daripada anggaran program yang lain, sedangkan di Madrasah Aliyah lebih mengedepankan program riset, maka biaya-biaya yang anggarkan akan sangat berbeda.

Setelah perencanaan dan dilaksanakan maka pembiayaan di Madrasah Pembangunan (MP) juga menerapkan pengawasan yaitu dengan lima tahap, pertama validasi. Validasi pembiayaan adalah cara untuk mengetahui sejauh mana data anggaran biaya mencerminkan hasil data yang tepat dan akurat.[99] Validasi anggaran biaya di MP tahap awal adalah validasi atas persetujuan masing-masing kepala, kepala madrasah sebagai penentu dan mempunyai hak untuk memvalidasi lebih awal lalu diserahkan ke bagian tata usaha, setelah itu tata usaha menyerahkan kepada wakil direktur, untuk divalidasi ulang dan disesuaikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah/ RKAM yang sudah direncanakan diawal. Setelah itu barulah bendahara/ bagian keuangan mengeluarkan uang secara bertahap sesuai kebutuhan madrasah. Setelah biaya dikeluarkan dan digunakan maka penanggung jawab membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari pembiayaan yang sudah dikeluarkan. Setelah itu dalam manajemen pembiayaan di MP terdapat audit eksternal yang langsung diaudit oleh pakar keuangan, kantor akuntan publik, sesuai atau tidaknya rencara anggaran dan pengeluaran yang digunakan. Setelah dilakukan audit eksternal, pembiayaan di verifikasi ulang oleh bagian internal mengenai pembiayaan yang bersifat audit jaminan mutu madrasah.[100]

---

[99] Glosarium, https://www.kamusbesar.com/validasi

[100] Wawancara kepada Kasubag Keuangan dan Kepegawaian/ penanggung jawab standar pembiayaan, Maradona, SE., Pada hari selasa 12 Maret 2019, di Ruang Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.

8. Standar Pengelolaan

Semua standar diatas didukung oleh standar pengelolaan yang baik, tanpa standar pengelolaan yang baik, maka standar-standar yang lain menjadi semu. Standar pengelolaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 menegaskan bahwa standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Madrasah wajib merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta mengembangkannya. Madrasah memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas sesuai dengan ketentuan meliputi perumusan, keputusan, penetapan dan peninjauan. Visi dijadikan sebagai cita-cita bersama warga madrasah. MTs Pembangunan UIN sudah merumuskan visi berdasarkan saran/masukan dari berbagai warga madrasah dan pihak-pihak yang berkepentingan selaras dengan visi pendidikan nasional. Momon mengemukakan bahwa MTs Pembangunan UIN ketika membuat tata tertib atau perihal apapun baik visi, misi dan tujuan madrasah, MP selalu melibatkan komite, kepolisian sekitar atau badan-badan lainnya yang berwenang seperti ahli psikolog dan lainnya.[101] Visi diputuskan oleh rapat dewan pendidik yang dipimpin oleh kepala madrasah dengan memerhatikan masukan komite madrasah, lalu disosialisasikan kepada warga madrasah dan segenap pihak yang berkepentingan, begitupun misi madrasah.

Misi adalah jalan pilihan lembaga pendidikan bagi peserta didik/masyarakatnya. Perumusan misi adalah suatu usaha untuk menyusun peta perjalanan. Kemampuan pengelola lembaga pendidikan untuk membuat peta yang secara akurat menggambarkan dunia yang dimasuki, memberikan kesempatan

[101] Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Rabu 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

bagi lembaga tersebut untuk mengelola aktivitas pendidikan yang memenuhi kebutuhan dan keinginan lingkungannya, sehingga kelangsungan hidup dan perkembangan lembaga tersebut terjamin. Sedangkan visi adalah suatu pikiran yang melampaui realitas sekarang, sesuatu yang kita ciptakan yang belum pernah ada sebelumnya, suatu keadaan yang akan kita wujudkan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Seorang pimpinan lembaga pendidikan yang memiliki visi adalah pimpinan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang belum pernah ada, dan kemampuan untuk mencapai suatu kondisi yang belum pernah dialami sebelumnya.[102] Visi madrasah Pembangunan UIN adalah menjadi lembaga pendidikan terkemuka dalam pembinaan keislaman, keilmuan, dan ke-Indonesiaan dengan mengapresiasi potensi peserta didik. Maka kegiatan/proses pembelajaran di MTs Pembangunan harus sesuai dengan visi MTs Pembangunan UIN. Adapun misi madrasah Pembanguan UIN yaitu: [103]

1. Menyelenggarakan pendidikan usia dini, dasar, dan menengah yang menghasilkan lulusan berakhlakul karimah, cerdas dan terampil; di MP terdapat beberapa satuan pendidikan berupa TK, MI, MTs dan MA.
2. Melakukan inovasi kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam bidang keislaman, keilmuan, dan ke-Indonesiaan; kurikulum yang ditetapkan MP sebagaimana yang sudah dikemukakan di standar isi mengacu pada tiga pilar keunggulan yaitu *al-akhlāk al-karīmah*, bahasa dan sains yang diintegrasikan dalam bidang keislaman, keilmuan dan ke-Indonesiaan.
3. Melakukan pembelajaran aktif dan menyenangkan dalam rangka meningkatkan potensi peserta didik; pembelajaran aktif dan menyenangkan di MP terdapat dalam proses

[102] Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Groups, 2009), h. 120.
[103] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 5

pembelajaran yang membuat siswa berpikir secara kritis dan menggunakan berbagai macam metode *aktive learning* dengan program perbaikan *teaching learning process* setelah guru disupervisi.

4. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik; lingkungan belajar yang dibangun oleh MP untuk mendukung perkembangan potensi peserta didik salah satunya dengan *Habbitual Curriculum*, kegiatan keputrian, ekstrakurikuler, Baca Tulis Quran (BTQ), pembiasaan membaca/ literasi, pembiasaan menulis dan membuat portofolio.[104]
5. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka penjaminan mutu layanan dan pendidikan; MP mengadakan program peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan program PKB (Pelatihan Keprofessionalan Berkelanjutan). Di dalam program inilah pendidik dan tenaga kependidikan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanannya dengan diundang para ahli
6. Menciptakan partisipasi aktif *stakeholders* madrasah untuk meningkatkan kualitas; partisipasi *stakeholders* madrasah dibangun dengan berbagai acara perkumpulan wali murid, komite madrasah dan masyarakat sekitar dengan acara bakti sosial, perlombaan dan lain sebagainya.

Rencana kegiatan proses pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi semua diarahkan kepada visi dan misi madrasah. Adapun tujuan madrasah Pembangunan UIN yaitu terselenggaranya pendidikan dasar dan menengah yang akan melahirkan lulusan beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan kompetitif dan

[104] Setiap satu mata pelajaran dituntut untuk membuat penilaian portofolio sehingga setiap pembelajaran memiliki dokumentasi perkembangan suatu proses pembelajaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

keunggulan komparatif, terwujudnya peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan dan kepedulian sosial, terwujudnya kurikulum yang memiliki kekuatan pada pembinaan keislaman, sains dan teknologi serta apresiatif terhadap kecenderungan globalisasi dengan tetap berpijak pada kepribadian Indonesia dan kemampuan potensi anak, tersedianya pendidik sebagai tenaga profesional yang menguasai bidang keilmuan yang diasuhnya secara luas, mendalam dan komprehensif serta memiliki kemampuan untuk mengajarkannya (*teaching skill*), berkepribadian pedagogis dan berakhlak mulia. Serta tersedianya tenaga kependidikan profesional yang dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh ilmu pengetahuan yang relevan, memiliki etos kerja, loyalitas, dan dedikasi yang tinggi yang dilandasi akhlak mulia. Dalam sarana prasarana serta fasilitas juga bertujuan untuk dapat memberikan kesempatan kepada para peserta didik untuk dapat belajar seluas-luasnya, sehingga madrasah benar-benar berfungsi sebagai pusat pembelajaran, dan juga terwujudnya peserta didik yang mandiri yang mampu melakukan *team work* melalui berbagai aktivitas belajar baik intra maupun ekstrakurikuler.[105]

MTs Pembangunan UIN juga memiliki struktur organisasi yang lengkap dan efektif, sesuai dengan ketentuan melalui langkah berikut: diputuskan, ditetapkan, disosialisasikan dan disahkan. Madrasah sebagai sebuah organisasi yang menjadi tempat untuk belajar-mengajar dan untuk menerima pendidikan, memiliki orang atau sekelompok orang yang melakukan hubungan kerja sama, yaitu kepala madrasah, guru, tenaga pendidik dan siswa serta lainnya. Madrasah merupakan lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Kompleks karena madrasah sebagai organisasi memiliki berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Dan unik, karena madrasah sebagai

[105] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 5

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki organisasi lainnya.

Madrasah Pembangunan juga melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja tahunan, kesiswaan, pengelolaan bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran seperti *workshop* untuk guru dan pelatihan serta seminar untuk meningkatkan kompetensi guru. Penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, yang dibuktikan oleh rapor guru. Momon mengatakan bahwa setiap guru mempunyai rapor baik itu poin prestasi maupun poin melakukan pelanggaran yang tertulis.

Keberhasilan madrasah dalam mencari tujuan institusional pendidikan bergantung pada profesionalitas kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala madrasah merupakan tumpuan manajemen madrasah dalam upaya mencapai tujuan institusi, karena kepala madrasah memiliki kewenangan dalam menetapkan arah pendidikan madrasah melalui visi, misi dan tujuan madrasah yang merupakan salah satu tugas pemimpin pendidikan. Kecakapan kepala madrasah merumuskan visi, misi dan tujuan akan mampu meningkatkan keberhasilan dan mutu madrasah. Namun secara proses pemimpin yang sudah mengelola madrasah dengan baik juga memiliki problem di dalam pembelajaran. Problem tersebut bisa dari sebagian siswa, pendidik dan tenaga kependidikan seperti motivasi dan minat belajar atau mengajar, suasana belajar, kompetensi guru yang belum merata, ketidak tepatan memilih metode, waktu yang tersedia dan lingkungan siswa sehabis pulang dari sekolah.[106]

Pengelolaan madrasah juga terdapat manajemen yang baik berupa menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan, evaluasi diri madrasah, melibatkan peran serta masyarakat dan membangunan

[106] Aziz Fahrurrozi, “Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya”, *Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*, November 2014, h. 165.

kemitraan dengan lembaga lain yang relevan dalam melakukan berbagai kegiatan pengelolaan pendidikan.

Secara keseluruhan standar, berdasarkan penilaian akreditasi BAN-S/M tahun 2014 MTs Pembangunan UIN memperoleh hasil akhir 94 dengan predikat A (Amat Baik).

Tabel 4.4. Hasil Akreditasi MTs Pembangunan UIN Jakarta Tahun 2014

(Sumber: Data diperoleh dari BAN-S/M, Tanggal ditetapkan 22 Oktober 2014, 268/BAP-S/M/DKI/2014)

NO	KOMPONEN	NILAI
1	STANDAR ISI	97
2	STANDAR PROSES	95
3	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	93
4	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	94
5	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	95
6	STANDAR PENGELOLAAN	95
7	STANDAR PEMBIAYAAN	93
8	STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN	93
	NILAI AKHIR	94
	PERINGKAT	A

Melihat dari rincian nilai akreditasi di atas Madrasah Pembangunan UIN sudah mampu memenuhi SNP, dibuktikan dengan predikat A. Namun dalam implementasinya masih terdapat kekurangan dan memerlukan berbagai evaluasi untuk dapat menghasilkan madrasah yang berdaya saing sepanjang zaman. Terutama dalam standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. Karena membicarakan mutu pendidikan tidak akan pernah berakhir, seiring munculnya banyak permasalahan pendidikan, rumitnya masalah mutu pendidikan yang terus berkembang seiring perkembangan zaman.

Indikator yang harus dievaluasi oleh MTs Pembangunan UIN terkait standar kompetensi lulusan yaitu; kegiatan pembiasaan berupa sikap sosial siswa dengan karakter jujur dan bertanggung jawab, peduli, gotong-royong dan demokratis, percaya diri, nasionalisme yang diperoleh melalui kegiatan pembelajaran dan pembiasaan serta kegiatan lainnya harus lebih ditanamkan sikap-sikap ini dan terus dievaluasi kecapaian kompetensi sosial siswa.

Setelah diamati lebih jauh untuk standar pembiayaan MP sudah mulai meningkat, dari kasubag. Keuangan dan kepegawaian MP, dipegang oleh orang-orang yang profesional dalam bidang ekonomi, yaitu pak Maradona, SE (Sarjana Ekonomi), namun dalam kelembagaannya diperlukan unit usaha khusus untuk pemasukan keuangan madrasah, agar biaya di MP dapat terjangkau oleh kalangan menengah ekonomi kebawah. Karena sampai saat ini MP masih dinikmati oleh mayoritas kalangan menengah ekonomi ke atas. Walaupun untuk pendataan atau audit keuangan MP sudah menggunakan sistem yang bagus secara manajemen keuangan.

Pendidik di MTs Pembangunan UIN Jakarta tidak 100% murni lulusan sarjana pendidikan dan memiliki sertifikat mengajar, jadi untuk standar penilaian ada beberapa guru yang mungkin belum 100% maksimal dalam menilai siswa dan belum maksimal mengetahui prinsip-prinsip penilaian pendidikan sehingga diperlukan pelatihan yang khusus dan intensif bagi pendidik/guru yang bukan murni lulusan sarjana pendidikan. Seperti pelatihan mengenai prinsip dasar penilaian, analisis hasil penilaian, macam-macam penilaian dan melakukan penilaian proses dan hasil belajar dari mulai menetapkan tujuan penilaian, menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian, melakukan analisis kualitas instrumen, melaksanakan penilaian, mengolah dan menentukan kelulusan siswa, melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.

D. Respon Madrasah Pembangunan terhadap Kebutuhan *Stakeholders*

Respon madrasah terhadap kebutuhan *stakeholders* merupakan salah satu dampak adanya standardisasi pendidikan. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.[107] Madrasah Pembangunan merespon kebutuhan masyarakat atau wali siswa dalam berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran maupun kegiatan di luar pembelajaran seperti kegiatan sosial dan lainnya. Seperti tiga pilar yang diunggulkan oleh madrasah Pembangunan yaitu *al-akhlak al-karimah*, bahasa dan sains juga merupakan salah satu contoh respon MP dalam menghadapi kebutuhan masyarakat yang semakin mengglobal/ mendunia. Untuk menyambut perkembangan sosial, politik, ekonomi dan budaya global yang telah mempengaruhi hidup dan kehidupan saat ini dan masa depan, pendidikan diharuskan bersikap responsif dan proaktif terhadap tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan persekolahan. Tuntutan tersebut adalah agar dunia pendidikan persekolahan dapat memberikan layanan prima terhadap pelanggan atau pengguna jasa pendidikan tersebut. Tuntutan yang bersikap normatif dari masyarakat biasanya berbentuk perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Tuntutan yang bersifat normatif tersebut, saat ini mengharuskan persekolahan harus dilibatkan secara proaktif dan responsif. Sehingga setiap warga masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan menyadari bahwa peran yang mereka mainkan tidak jauh berbeda dengan peran yang dimainkan tenaga kependidikan yang bertugas di persekolahan.

[107] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/ Daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/dampak, diakses tanggal 10 September 2019

Salah satu upaya untuk menjaring keterlibatan masyarakat dalam persekolahan adalah apa yang saat ini disebut dengan konsep manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), yang merupakan terjemahan dari *School Based Management*. Dalam operasionalnya, manajemen berbasis sekolah/madrasah biasa disebut dengan manajemen pendidikan berbasis sekolah/madrasah. Ini merupakan alternatif dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas sekolah/madrasah. Indikator keberhasilan mutu dalam MBM ini, yang harus dapat diukur dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan terhadap pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pendidikan di sekolah/madrasah. MBM ini berpotensi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah/madrasah.[108]

Dalam MBM, pihak madrasah, masyarakat dan pemerintah mempunyai peran masing-masing yang saling mendukung dan sinergis satu dengan yang lainnya. Madrasah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan, sehingga menjadi bagian utama di dalam proses pembuatan keputusan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi fasilitator yang akan mendukung tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di madrasah. MBM memberikan otonomi yang luas kepada madrasah untuk mengelola sumber daya pendidikan yang dapat dimanfaatkan untuk kemajuan pendidikan di madrasah. Melalui MBM diharapkan akan mendorong profesionalisme guru dan kepala sekolah, baik sebagai manager maupun sebagai pemimpin madrasah. Madrasah Pembangunan merupakan salah satu madrasah yang menggunakan sistem MBM, di dalamnya

[108] Muhyi Batubara, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2004), h. 89

terdapat peran serta masyarakat terhadap meningkatkan mutu madrasah. Dibuktikan MP dapat merespon kebutuhan eksternal/ masyarakat.

Kebutuhan eksternal adalah kebutuhan yang berasal dari luar madrasah, bisa dari masyarakat yang diantaranya adalah komite madrasah dan para pemangku pendidikan yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Kebutuhan menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah keperluan.[109] Sedangkan masyarakat adalah kumpulan individu yang menjalin kehidupan bersama sebagai satu kesatuan yang besar yang saling membutuhkan dan memiliki ciri-ciri yang sama sebagai kelompok.[110] Kebutuhan eksternal masyarakat tentunya akan semakin beragam terutama pada masyarakat perkotaan. Semakin banyak masyarakat maka akan semakin banyak pula kebutuhan yang diminta oleh pasar. Kebutuhan eksternalpun akan terus berubah seiring dengan perubahan sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Perubahan sosial yang ada dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *social change,* secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu perubahan dan sosial. Secara umum makna perubahan adalah proses pergeseran, pengurangan, penambahan, atau perkembangan; sementara sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan obyeknya, yaitu masyarakat.[111] Dan masyarakat adalah sebuah sistem yang terintegrasi dari struktur dan fungsi sosial. Jadi, perubahan sosial berarti terjadinya proses-proses tersebut dalam hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. Secara terminologis pengertian perubahan sosial seringkali ditumpangtindihkan dengan pengertian perubahan kebudayaan.

---

[109] Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), h. 237.

[110] Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 872.

[111] Hanry Pratt Fairchild and 100 authorities, "Dictionary of Sosiology", dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 2003), h. 14.

Hal itu karena hampir semua bentuk perubahan mencakup aspek sosial dan kultural.

Dari pengertian di atas dan cakupannya dapat diketahui bahwa perubahan sosial mencakup perubahan orientasi nilai, atau dengan kata lain perubahan orientasi nilai termasuk dalam wilayah cakupan perubahan sosial. Yang dimaksud dengan orientasi nilai adalah kompleks gagasan atau tema pikiran yang menjadi arah tujuan dan cita-cita nilai budaya sebagian besar warga suatu masyarakat.[112] Tidak jarang suatu masyarakat atau bangsa berupaya mengadakan proses modernisasi pada berbagai bidang kehidupan, baik aspek ekonomi, birokrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, maupun pendidikan. Namun masyarakat atau bangsa yang bersangkutan juga tidak luput dari upaya menelusuri, mengeksplorasi, menggali, serta menemukan unsur-unsur atau nilai-nilai kepribadian/ jatidiri sebagai bangsa yang bermartabat.

Masyarakat yang semakin modern maka akan semakin berkembang responnya terhadap pendidikan. Komite madrasah Pembangunan UIN yang terletak diperkotaan pasti memiliki respon yang berbeda dengan komite madrasah-madrasah pedesaan. Respon masyarakat terutama komite madrasah yang mempunyai kepentingan terhadap pendidikan akan juga disesuaikan dengan kebutuhan yang sedang berkembang didaerahnya. Bagi masyarakat perkotaan seperti Jakarta dan Ciputat didalam memilih pendidikan juga pasti memiliki pertimbangan. Contoh salah satu komite MP mengatakan saya sangat merekomendasikan MP, karena beberapa pertimbangan, yaitu kurikulum agama yang padat dan seimbang dengan kurikulum umum, letaknya strategis, akses mudah, biaya yang masih terjangkau dibanding sekolah swasta yang selevel MP, fasilitas memadai, tenaga pendidik berkualitas, alumninya sudah banyak yang berhasil,

[112] Koentjaraningrat dkk., *Kamus Istilah Antropologi*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), h. 125

ekstrakurikuler yang beragam dan mencetak prestasi dan lain sebagainya.[113]

Madrasah untuk mengetahui respon masyarakat sekitar terhadap pendidikan, maka diperlukanlah adanya komite madrasah. Karena madrasah tanpa komite bagaikan madrasah yang sepihak, dan tidak dapat merespon timbal balik dengan kebutuhan masyarakat. Komite madrasah bertujuan untuk mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan Madrasah Pembangunan UIN Jakarta. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan partisipasi *stakeholders* pendidikan pada tingkat sekolah untuk turut serta merumuskan, menetapkan dan memonitor pelaksanaan kebijakan sekolah dan pertanggungjawaban yang terfokus pada kualitas pelayanan terhadap peserta didik secara proporsional dan terbuka. Menciptakan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Adapun tugas pokok komite madrasah adalah pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung dalam hal pendanaan, pemikiran, tenaga dan penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Bersama-sama sekolah merumuskan dan menetapkan visi dan misi, menyusun standar pembelajaran, menyusun rencana strategis pengembangan sekolah, menyusun dan menetapkan rencana program tahunan, serta mengembangkan potensi kearah prestasi unggulan. Membahas dan turut menetapkan pemberian tambahan kesejahteraan. Menghimpun, menggali, dan mengelola

[113] Wawancara komite madrasah Pembangunan drg. Silvia Wahyuni, di ruang komite madrasah Pembangunan hari Kamis, 9 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

sumber dana dan kontribusi lainnya baik materil maupun non materil dari masyarakat.[114]

Komite madrasah berfungsi untuk memberikan respon terhadap kurikulum yang dikembangkan baik berstandar lokal, nasional maupun internasional. Memberikan motivasi dan penghargaan serta otonomi profesional kepada tenaga pendidik dan kependidikan. Memantau kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Pemberi masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada madrasah mengenai kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran dan pendapatan belanja madrasah, kriteria kerja madrasah, kriteria tenaga pendidik dan kependidikan madrasah, kriteria fasilitas pendidikan dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Pendorong partisipasi orang tua peserta didik dan masyarakat dalam meningkatkan mutu madrasah. Mengkaji laporan pertanggung jawaban program dan menyampaikan usul atau rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.[115]

Dari peran serta komite madrasah, madrasah akan dapat melihat sejauh mana kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan. Masyarakat terpelajar akan sangat membutuhkan kultur keagamaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dan pendidikan karakter yang mengutamakan nilai-nilai luhur Pancasila, sebagaimana yang dikatakan oleh Silvia salah satu komite MP, anak saya sudah dua orang tamat dari MP, dan *alhamdulillah* kultur keagamaannya sangat baik dalam kehidupan sehari-hari.[116] Di sini terbukti MP merespon dengan adanya *Habbitual Curriculum*, kurikulum pembiasaan seperti sholat dhuha, membaca Alquran dipagi hari, mengucapkan salam dan sapa dan sebagainya.

---

[114] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, (MP UIN: Jakarta, 2018), h. 50.

[115] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 50.

[116] Wawancara komite madrasah Pembangunan drg. Silvia Wahyuni, di ruang komite madrasah Pembangunan hari Kamis, 9 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

Menurut wawancara juga Silvia mengemukakan bahwa MP sudah dapat membuka diri terhadap aspirasi masyarakat (khususnya komite), keleluasan komite dalam menjalankan perannya sebagai *advisor agency*, *controlling agency*, mediator dapat berjalan dengan baik. Melalui komite, setiap tahun MP mengadakan rapat anggaran bersama dalam rangka transparansi dan akuntabitilas publik. Dan juga setiap mulai tahun ajaran baru diadakan rapat kerja (raker) bersama untuk menyampaikan laporan dan rencana program-program selanjutnya. MP juga mengadakan diskusi dengan komite tiga sampai enam bulan sekali untuk sama-sama meningkatkan mutu madrasah.[117]

E. Mutu Madrasah Berbasis Sistem Penjamin Mutu Eksternal

Masyarakat modern mempunyai karakteristik perubahan perilaku, perubahan tutur kata dan perubahan performa. Perubahan masyarakat mengikuti hukum dialektika, semua kondisi obyektif sosial saling berhubungan berbagai unsur membentuk satu sistem. Hal ini saling terjadi konflik, dimana yang lemah kalah kemudian menghilang dan yang kuat menang menjelma menjadi kualitas baru kemudian membentuk sistem baru. Sistem baru membawa arus transformasi nilai, norma dan budaya akan menampilkan wajah baru. Hal itu didasarkan globalisasi mempunyai dimensi ideologi kapitalisme, ekonomi pasar bebar dan teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas negara.[118] Perubahan-perubahan ini merupakan dampak dari era globalisasi, globalisasi menjadi tantangan eksternal dari organisasi pendidikan.

Lembaga pendidikan bagian dari pusaran era globalisasi mengharuskan membangun keunggulan kompetitif. Keunggulan

---

[117] Wawancara komite madrasah Pembangunan drg. Silvia Wahyuni, di ruang komite madrasah Pembangunan hari Kamis, 9 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

[118] Darsono, *Budaya Organisasi: Kajian tentang Organisasi, Media, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik*, (Jakarta: Diadit Media, 2006), h. 104.

kompetitif organisasi adalah cara organisasi dalam menciptakan nilai peforma pelayanan yang lebih unggul. Tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab pendidikan memberikan penjaminan mutu kepada masyarakat. Isu-isu yang berkembang di dalam dunia pendidikan mengenai penjaminan mutu yang relevan dengan masyarakat global. Contohnya penjaminan mutu yang utama di sekolah/madrasah melalui sistem penjaminan mutu yang terdiri dari akreditasi BAN-S/M dan standar ISO. Mutu madrasah berbasis sistem penjamin mutu eksternal adalah madrasah harus mampu menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan masyarakat, yakni yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui badan standardisasi pendidikan di Indonesia.

Menurut Rangkuti bahwa untuk menunjang penjaminan mutu adalah membutuhkan cara pandang organisasi pendidikan sebagai layanan jasa berarti konsistensi yang terus-menerus diperbaiki akan melahirkan persepsi baru yang mempunyai tiga unsur yang telah dikelompokkan berikut ini, yaitu:[119]

1. Merek, yaitu nilai yang berkaitan dengan nama atau nilai dimiliki dan melekat pada suatu perusahaan.
2. Pelayanan, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemberian jasa pelayanan kepada konsumen. Kualitas pelayanan kepada konsumen ini perlu terus-menerus ditingkatkan.
3. Proses, yaitu nilai yang berkaitan dengan prinsip perusahaan untuk membuat setiap karyawan terlibat dan memiliki rasa tanggung jawab dalam proses memuaskan konsumen, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pendekatan tersebut adalah cara menciptakan tingkat kepercayaan institusi pendidikan bagi internal maupun eksternal, masyarakat dan pemerintah, menciptakan daya tarik pengguna eksternal. Pendidikan adalah bidang usaha jasa membutuhkan usaha terus-menerus menunjukkan strategi diferensiasi, strategi

[119] Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, (Jakarta: Gramedia, 2014), h. 103.

audit internal untuk melibatkan masyarakat bagian dari keluarga besar yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem penjaminan mutu.

Untuk meningkatkan mutu jasa pada bidang pendidikan membutuhkan kompetensi inti yaitu, pertama, nilai bagi pelanggan yaitu keterampilan yang memungkinkan suatu perusahaan menyampaikan manfaat yang fundamental kepada pelanggan. Kedua, diferensiasi bersaing, yaitu kemampuan yang unik dari segi daya saing. Ketiga, dapat dapat diperluas, kerena kompetensi inti merupakan pintu gerbang menuju pasar masa depan, kompetensi ini harus memenuhi kriteria manfaat bagi para pelanggan dan keunikan bersaing. Selain itu, kompetensi inti harus dapat diperluas sesuai dengan keinginan konsumen masa depan. Dengan demikian, kompetensi tidak menjadi usang meskipun kompetensi ini mungkin saja kehilangan nilainya sepanjang waktu. Kompetensi penunjang adalah perlunya fokus terhadap kepemimpinan dalam mengelola sumber daya manusia sesuai dengan rencana standar mutu agar memenuhi kepuasan pelanggan.[120]

Kesimpulan mutu madrasah berbasis sistem penjaminan mutu eksternal adalah madrasah dapat dikatakan bermutu, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Madrasah, yaitu delapan Standar Nasional Pendidikan. Madrasah yang sudah mampu melampaui Standar Nasional Pendidikan adalah madrasah yang bermutu dan dapat diberikan akuntabilitas publik berupa nilai akreditasi yang maksimal atau A.[121] Bukan berarti madrasah yang terakreditasi B dan C tidak bermutu, madrasah yang terakreditasi B dan C juga dapat dikatakan madrasah bermutu karena telah memenuhi syarat-syarat

[120] Freddy Rangkuti, *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*, h. 14.

[121] Teknik penskoran dan pemeringkatan hasil akreditasi sesuai pedoman pada perangkat akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan dan dapat diberikan akuntabilitas publik berupa sertifikat akreditasi dari BAN-S/M. Namun madrasah yang di bawah nilai C atau tidak terakreditasi harus mengupayakan perbaikan mutu berupa memenuhi syarat-syarat minimal Standar Nasional Pendidikan, agar setara dengan madrasah-madrasah yang sudah terakditasi yang lain.

F. Madrasah Pembangunan Sebagai Madrasah Berdaya Saing

Daya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.[122] Adapun daya saing yaitu menggunakan keunggulan sumber daya dan kemampuan untuk memaksa agar hasilnya sesuai dengan kepentingan perusahaan, mengatasi dan bertahan terus dalam perang persaingan.[123] Sedangkan madrasah yang berdaya saing adalah kemampuan madrasah untuk bersaing di dalam lokal, nasional maupun internasional/ global baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Madrasah mempunyai daya saing karena memahami bahwa pengetahuan merupakan sumber dari daya saing, dan pengetahuan harus dikelola dengan maksimal dengan direncanakan dan diimplementasikan. Madrasah dapat membuat perencanaan yang matang, sehingga di dalam pelaksanaannya terdapat tujuan yang jelas baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional. Madrasah Pembangunan yang dimaksud adalah MTs Pembangunan UIN Jakarta sebagai madrasah yang dapat berdaya saing baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional. Daya saing tingkat lokal dan nasional MP dibuktikan dengan kejuaraan-kejuaraan baik dalam

[122] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/ Daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/daya, diakses tanggal 26 September 2019.

[123] Dedy Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 114.

bidang akademik[124] maupun non akademik[125], dan MP juga mampu memaksimalkan SNP yang ditetapkan oleh pemerintah dengan akreditasi A. Dalam kancah internasional MP menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin mutu yaitu ISO.

Pendidikan berfungsi untuk mendidik manusia yang produktif, yang mampu bekerja dalam bidangnya masing-masing. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, begitu banyak bidang-bidang keterampilan yang harus dimiliki anak didik. Dan pada kenyataannya salah satu kritikan yang muncul ke permukaan dewasa ini adalah bahwa pendidikan kita dianggap masih sangat lemah dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan dunia kerja. Pendidikan dan dunia kerja adalah salah satu masalah yang menjadi tantangan pendidikan dewasa ini. Untuk itu, yang harus dipahami adalah bahwa sekolah memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan anak didik yang memiliki keterampilan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Persoalan ini merupakan bagian dari krisis pendidikan dewasa ini yang harus mendapat perhatian serius bagi pengelola pendidikan dan lembaga pendidikan dewasa ini. Pendidikan secara massif justru cenderung lebih banyak diorientasikan untuk menghasilkan manusia teknis intelektual atau tukang, dibandingkan dengan upaya untuk berorientasi pada tujuan untuk mewujudkan manusia yang memiliki karakter yang kuat serta nalar yang kritis.[126] Berbeda halnya dengan MTs Pembangunan UIN, MTs Pembangunan UIN telah menetapkan pilar keunggulan sebagai landasan berpijak dalam proses

---

[124] Dalam bidang akademik MTs Pembangunan UIN berhasil mendapatkan peringkat 1-3 di dalam nilai Ujian Nasional tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam 9 tahun terakhir (lihat dilampiran).

[125] Dalam bidang non akademik MTs Pembangunan UIN juga dapat berdaya saing antara lain taekwondo menpora tingkat nasional, basket, anggar dan lainnya (lihat dilampiran).

[126] R F Dearden, “British Journal of Educational Studies”, 39, no. 1 (2010): 37-41

pembelajaran yang menitikberatkan pada *basic science*, bahasa, dan *al-akhlaq al-karimah.* Dengan penetapan tersebut membawa konsekuensi logis pada perubahan kurikulum. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa berdasarkan struktur dan muatan kurikulum di MTs Pembangunan UIN terdapat beberapa mata pelajaran yang mengalami pergeseran dan perubahan jam pelajaran atau tatap muka dari yang ditetapkan, hal ini sangat mempengaruhi kualitas pilar unggulan MP sendiri. Karena MP mempunyai tujuan yang diantaranya adalah melahirkan lulusan yang beriman dan bertaqwa serta memiliki kemampuan kompetitif dan keunggulan komparatif dan terwujudnya peserta didik yang memiliki keseimbangan antara kekuatan jasmani dan rohani serta kepekaan terhadap kepedulian sosial dan sebagainya.[127] Untuk mencapai tujuan tersebut MP juga program pembinaan dan pembiasaan baik pembinaan akhlak dan kepribadian serta pembiasaan ibadah, yang akhirnya tujuan pendidikan bukan hanya untuk memperoleh kerja semata, tetapi juga benar-benar menciptakan manusia yang berkualitas baik dari segi akhlak dan keilmuan.

Inovasi dalam pendidikan sangat penting, untuk menjadikan pendidikan yang berdaya saing. Dalam hal ini, inovasi pendidikan telah banyak dilakukan oleh pemerintah. Misalnya, penerapan sistem ganda untuk sekolah kejuruan. Melalui sistem ini siswa tidak hanya dibekali dengan teori, akan tetapi dalam kurun waktu tertentu, mereka diharuskan melakukan magang di berbagai tempat seperti pusat-pusat industri yang akan menyerap mereka sebagai tenaga kerja. Dengan sistem ini diharapkan manakala mereka lulus kelak, mereka sudah paham apa yang harus dikerjakan.[128] Di MTs Pembangunan UIN juga melakukan inovasi yang salah satunya adalah penguatan bahasa yang sangat

[127] Tujuan-tujuan MP yang lain masih banyak, sebagaimana yang sudah disebutkan di bab III mengenai profil MP.

[128] Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran*, h. 319.

diperlukan di dalam dunia global. MTs Pembangunan UIN mempunyai kelas bilingual yang dirintis pertama kali pada tahun pelajaran 2010/2011. Awalnya disebut sebagai kelas bahasa dengan konsentrasi penguatan bahasa Inggris. Setelah satu tahun berjalan, penyebutannya berubah menjadi kelas bilingual. Peserta didik di kelas ini ditekankan untuk terampil bercakap dalam bahasa Inggris dan Arab. Karena itu, peserta didiknya mendapatkan *native speaker* baik Inggris maupun Arab. Hasilnya atmosfir berbahasa asing (khususnya bahasa Inggris) demikian terasa di kelas bilingual. Sampai saat ini, MTs Pembangunan UIN Jakarta sudah meluluskan tujuh angkatan kelas bilingual.[129] Peserta didik yang menempati kelas bilingual diutamakan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mendapatkan nilai MIPA dan/atau bahasa Inggris minimal tujuh dalam seleksi Pendaftaran Peserta Didik Baru/ PPDB masuk MTs Pembangunan UIN;
2. Mendapatkan rekomendasi sebagai peserta seleksi kelas bilingual dari lembaga yang bekerjasama dengan MTs Pembangunan UIN;
3. Lulus seleksi yang diadakan oleh Tim Pengembang Kelas *Bilingual*;
4. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali peserta didik dan bersedia membuat dan menandatangi surat pernyataan atau kontrak belajar.

Peserta didik di kelas *bilingual* selain melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar/ KBM yang sama dengan kelas lainnya, juga mendapatkan tambahan layanan berupa:

1. Tambahan alokasi waktu belajar bahasa Inggris dan Arab di hari Kamis;
2. Mendapat *native speaker* Inggris, Arab, Sains dan Matematika;

[129] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 14

3. Praktek sains, pelajaran bahasa Inggris, Sains dan Matematika buku Cambridge;
4. *Esol Test* (dilaksanakan di kelas 8);
5. *W*ali kelas yang memiliki keterampilan bahasa Inggris dan/atau Arab;
6. Speaking test untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab disetiap semester;
7. *Homestay/immersion* (kelas 8);
8. *K*unjungan edukasi (kedutaan/PP Iptek) kelas 7;
9. *Qiyam al-lail* (*Mabit*), *english camp* (kelas 7); *science camp* (kelas 7).[130]

Dengan adanya program-program seperti ini membuktikan bahwa madrasah berinovasi untuk mengembangkan mutu madrasah, bukan hanya pada hal syarat standardisasi pendidikan tetapi juga mengembangkan kekhasan di luar dari standardisasi dan menjawab kebutuhan global.

Sarah E. Turner berpendapat, bahwa lembaga pendidikan saat ini secara niscaya harus memiliki kaitan erat dengan dunia kerja, karena pendidikan khususnya pendidikan tinggi adalah investasi berharga untuk membentuk tenaga-tenaga kerja ahli yang baru bagi negara.[131] Pendapat ini juga senada dengan Penny Summerfield, bahwa munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang berkualifikasi adalah merupakan indikator bakal terpenuhinya kebutuhan dunia kerja, selain itu hakekat pendidikan yang utama tidaklah dimaksudkan untuk tujuan pendidikan itu sendiri, tetapi terpenuhinya kebutuhan dunia kerja adalah hakekat tujuan pendidikan itu sendiri.[132] Tantangan lainnya yang dihadapi lembaga pendidikan Islam baik pesantren, perguruan tinggi Islam,

---

[130] Tim, *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*, h. 16

[131] Sarah E Turner, "Connecting Higher Education and the Labor Market: Comparisons across States", *Source Change* 34, no. 4 (2015): 32-39

[132] Penny Summerfield, "History Workshop", *Labour Market* 25, no. 25 (2015): 206-209.

maupun madrasah seperti Madrasah Pembangunan UIN Jakarta adalah tidak sekedar mentransmisikan berbagai pelajaran kepada peserta didik, tetapi juga bagaimana mengembangkan pendidikan Islam yang mampu memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak bangsa sehingga mereka dapat memiliki keunggulan kompetitif dalam dunia kerja.

Tantangan dimaksud menjadi mendunia yang dikenal dengan era globalisasi, batas-batas negara menjadi hilang, kebudayaan masing-masing negara dengan sendirinya dipengaruhi oleh budaya negara lainnya, termasuk dunia pendidikan yang semakin kian kompetitif. Tantangan baru berbentuk globalisasi dan globalisme, yang tidak hanya menyangkut bidang ekonomi, politik, dan informasi tetapi juga bidang pendidikan. Menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas, bahwa pembangunan pendidikan saat ini idealnya harus dapat meletakkan posisinya bukan pada pembangunan fisik atau ekonomi semata, melainkan harus dimulai dari pembentukan individu yang beradab dan mampu memahami kedudukannya baik dihadapan Tuhan, masyarakat, maupun dirinya sendiri.[133]

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut A. Malik Fadjar, pendidikan harus menjanjikan “prestasi dan posisi”. Yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan yaitu cita-cita atau gambaran hidup masa depan, nilai (agama) dan status sosial. Semakin terdidik masyarakat maka semakin banyak faktor yang dijadikan pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan dan sebaliknya semakin awam masyarakat maka akan semakin sederhana pertimbangan yang diambil dalam memilih lembaga pendidikan. Bagi masyarakat terpelajar yang pada umumnya lebih rasional, pragmatis dan berpikir jangka panjang, ketiga aspek tersebut (cita-cita, nilai dan

[133] Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M, Naquib Al-Attas*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 25.

status sosial), dijadikan pertimbangan secara bersama-sama dalam memilih lembaga pendidikan.[134]

Untuk memenuhi kebutuhan di atas, lembaga pendidikan dituntut untuk menawarkan programnya secara cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian dan kedisiplinan serta menawarkan masa depan. Sehingga keberadaannya dapat fungsional baik bagi keperluan menciptakan dan mengembangkan ilmu baru, lapangan pekerjaan baru, maupun membina sikap hidup kritis dan pola tingkah laku baru serta kecenderungan baru.



[134] A. Malik Fadjar, *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi*, h. 14-15.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa standardisasi pendidikan mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap peningkatan mutu madrasah. Di dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat dari standar minimal yang harus dicapai madrasah sampai dengan standar maksimal yang menjadi arah atau acuan madrasah dalam upaya berkomitmen terhadap mutu. Sehingga mutu madrasah berada pada mutu yang terus berkelanjutan dan meningkat yakni *continuous improvement*, karena standardisasi pendidikan juga menjadi kontrol terhadap mutu.

Sistem penjaminan mutu madrasah Pembangunan UIN menggunakan tiga standar yaitu Standar Nasional Pendidikan, standar Internasional dan standar kekhasan madrasah. Sistem penjaminan mutu tersebut diawasi oleh penjaminan mutu eksternal (BAN-S/M), penjamin mutu internal P3JM (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu) dan setiap satuan pendidikan di MP. Sistem penjaminan mutu di MP juga sudah menerapkan *Quality Control* (QC), *Quality Assurance* (QA), dan *Total Quality Manajement* (TQM) dengan baik. QC terletak pada proses yang terus memiliki kualitas kontrol, baik pada proses pembelajaran dan proses pelayanan. QC ini terlihat pada program Pelatihan Keprofessionalan Berkelanjutan (PKB), perbaikan *teaching learning process* dan evaluasi proses setiap satu minggu sekali oleh pimpinan serta pegawai. QA juga terlihat dari program pencapaian layanan prima melalui angket komite madrasah atau wali siswa. Dan pencapaian standar sarana prasarana yang memiliki daftar ceklis tingkat kelengkapan. P3JM juga berfungsi sebagai penjamin mutu madrasah yang menilai proses dan hasil madrasah setiap satu tahun sekali untuk memastikan bahwa proses

benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana dan menghasilkan mutu secara total melalui alat-alat/ instrumen standar penilaian dan keahlian serta pelatihan.

Implementasi SNP sudah maksimal dijalankan oleh madrasah, baik secara pengendalian mutu maupun penjaminan mutu di madrasah. Sehingga terdapat dampak dari standardisasi pendidikan terhadap peningkatan mutu madrasah. Dampak standardisasi pendidikan tersebut juga didasarkan pada kenyataan sejumlah fakta atau temuan yang terungkap alamiah.

Pertama, adanya penjamin mutu internal madrasah yang terorganisir seperti P3JM. P3JM berfungsi untuk memastikan proses yang berjalan benar-benar sesuai dengan mutu yang diinginkan. Adapun tugas khusus P3JM adalah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan dan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan akreditasi internal dibidang penelitian, pengembangan dan jaminan mutu.

Kedua, adanya penilaian mutu secara internal. Sebelum madrasah diaudit secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M), madrasah mengadakan audit internal setiap satu tahun sekali. Maka mutu madrasah lebih maksimal, dalam hal audit mutu madrasah ketika madrasah akan diaudit dari pihak eksternal.

Ketiga, madrasah tanggap. Madrasah merespon atau memerhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan orang tua dan siswa. Madrasah lebih tanggap kepada komite dan para pemangku pendidikan yang mempunyai kepentingan di dalamnya.

Keempat, dengan adanya standardisasi pendidikan madrasah dapat berdaya saing baik dalam tingkat lokal, nasional maupun internasional. Dibuktikan dengan adanya kerjasama dengan tim penjamin mutu eksternal seperti BAN-S/M dan ISO serta lembaga lain yang terkait dengan peningkatan mutu seperti Sukofindo, Next Edu, Milenia dan lainnya.

Kesimpulan ini tidak sependapat dengan H.A.R. Tilaar dan Suwidi, yang menyatakan bahwa standardisasi yang ditetapkan oleh pemerintah hanya sebatas legislasi dan legalisasi orientasi sebuah kelompok yang memainkan peran utama dan akan berbahaya bagi tegaknya suatu masyarakat demokrasi yang kreatif dan inovatif. Tetapi dengan adanya standardisasi pendidikan, hakikatnya adalah sebagai kontrol terhadap mutu. Standardisasi pendidikan juga merupakan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang terus-menerus meningkat dan tidak kaku, sesuai dengan kebutuhan global. Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah adalah usaha pemerintah untuk meratakan kualitas pendidikan, dan benar-benar dijadikan sebagai standar minimal pendidikan yang harus dipenuhi oleh madrasah. Dibuktikan juga bahwa di madrasah Pembangunan mempunyai standar kekhasan yang merupakan dari pengembangan SNP yaitu tiga pilar keunggulan, *al-akhlāk al-karīmah*, bahasa dan sains. Dengan adanya ciri khas madrasah dan keunggulan madrasah menandakan bahwa standardisasi tidak mengekang madrasah untuk terus berinovasi dengan ciri khas yang dimilikinya.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

Hendaknya ada upaya madrasah untuk mengimplementasikan SNP sebagai standar minimal dan mengembangkan setiap standarnya untuk mencapai standar maksimal. Jangan menjadikan SNP suatu standar yang baku dan membuat rumit birokrasi madrasah. Madrasah juga harus menaruh perhatian yang tinggi dalam memahami SNP dan indikator instrumen penilaian akreditasi dengan berbagai pelatihan, seminar dan sosialisasi serta memfasilitasi sarana dan prasarana yang menunjang untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan. Madrasah juga harus mempunyai tim penjamin internal yang terstruktur dan terorganisir khusus yang menangani tentang mutu

madrasah, sehingga madrasah akan terus berkomitmen terhadap mutu dan terus meningkatkan mutu.

Madrasah tidak boleh lengah dalam menjalani proses yang berkualitas. Karena dari proses yang berkualitas akan menghasilkan madrasah bermutu. Proses yang berkualitas harus dibangun oleh semua pemangku kepentingan baik pimpinan, guru, karyawan, komite dan masyarakat. Maka tugas madrasah adalah terus membangun kepercayaan masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang positif, bermanfaat dan menghasilkan prestasi madrasah. Kegiatan yang ada dimadrasah juga harus diarahkan kepada visi dan misi madrasah,

Kepala madrasah, pendidik dan tenaga kependidikan serta masyarakat terutama pemerintah sangat memberikan andil besar terhadap kemajuan mutu pendidikan madrasah. Dengan adanya standardisasi pendidikan diharapkan menjadikan madrasah yang baru berdiri, atau yang belum berpengalaman dapat memiliki acuan yang jelas dalam meningkatkan mutu. Karena dengan adanya standardisasi pendidikan juga merupakan perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap pendidikan. Standardisasi pendidikan yang dinilai oleh BAN-S/M juga membuka persaingan yang baik dalam pendidikan serta akuntabilitas publik kepada pendidikan.

Madrasah harus cepat merespon kebutuhan pelanggan dan tuntutan zaman sesuai dengan ciri khasnya. Fasilitas yang *elite* belum tentu memuaskan pelanggan, maka madrasah harus terus berbenah dalam sistem mutu, memperbaiki fasilitas secara maksimal dan lebih perhatian kepada siswa dan wali siswa.

Madrasah yang bermutu memang tidak bisa dipungkiri harus mempunyai modal, walaupun tidak semua madrasah bermutu harus dengan materi. Madrasah harus bisa memanfaatkan peluang dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Madrasah setidaknya harus mempunyai usaha sebagai modal subsidi silang untuk keberlanjutan pendidikan bermutu. Sehingga keberadaan

madrasah bermutu tidak hanya dapat dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, namun dapat menyeluruh ke semua kalangan.

Dengan demikian perlu penelitian lebih lanjut terhadap standardisasi pendidikan dan kualitas madrasah terutama pada standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan aplikasinya di sekolah/madrasah, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan, serta dapat terus berinovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui acuan standar.





معهد المجموعية الإسلامية خير الأمة

PONDOK PESANTREN TERPADU

Khairul Ummah

KAPUK MUARA – PENJARINGAN
JAKARTA UTARA

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

---------, "Mutu ISO 9001:2015 dalam Menunjang Pemasaran". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB),* Vol. 53, No. 1 Desember.

Abdi, Muhammad Iwan. 2017. "Implementasi Standar Nasional Pendidikan". *Fenomena*, Vol. 9, No. 1

Al Hamdani, HM Djaswadi. 2013. "Introduction Curriculum Multiculturalism Boarding School". *Journal of Education and Practice* 4. 23.

Anwar, Khoirul. 2018. "Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah". *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam.* Vol. 1. No. 1. November.

Aspanawa, Anang Dwi Putransu. 2015. "Memahami Quality Assurance Menjadikan Budaya Mutu Perguruan Tinggi". *An-Nisbah.* Vol. 01, No. 02, April.

Chatzara, Konstantina, Charalampos dan Demosthenes. 2011. "Emotional Interaction in e-Learning". *Research on E-Learning and ICT in Education.* editor Athanassios Jimoyiannis. New York: Springer.

Choiri, Moh. Miftahul. 2001. "Pemberdayaan Madrasah dan Standardisasi Pendidikan". *Kodofikasia*, Vol. 5 No. 1

Damanik, Jafriansen. 2015. "Upaya dan Strategi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan", *JDP,* Vol. 8, Nomor 3, November. STKIP Purnama Jakarta.

Darmadji, Ahmad. 2015. "Pengembangan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Total untuk Meningkatkan Moral Bangsa". *el-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam.* Vol. VIII. No. 1.

Davis, Derek H. 2016. "Character Education in America's Public Schools". *Journal of Church and State.* 2.

Dearden, R F. 2010. "British Journal of Educational Studies", *39*, no. 1.

Dianti, Puspa. 2014. "Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol. 23, No. 1.

Dodge, Arnold. 2009. "Heuristic and NCLB Standardize Test: A Convenience Lie". *International Journal of Progressive Education* 5. 2.

Elder, Linda & Richard Paul. 2001. "Critical Thingking: Thingking to Some Purpose". *Journal of Developmental Education*. Vol. 25, No. 1.

Elmas, Muhammad Syarif Hidayatullah. 2017. "Pengendalian Kualitas dengan Menggunakan Metode *Statistical Quality Control* (SQC) untuk Meminimumkan Produk Gagal pada Toko Roti Barokah *Bakery*". *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi. WIGA*. Vol. 7, Maret.

Fahrurrozi, Aziz. 2014. "Pembelajaran Bahasa Arab: Problematika dan Solusinya". *Arabiyat Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*.

Fairchild , Hanry Pratt and 100 authorities. 2003. "Dictionary of Sosiology", dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.

Frackmann, Edgar. 1992. "Quality Assurance in Higher Education", Proceedings of an International Conference. *The German Experience*. in Craft Alma. London: The Falmer Press.

Francis, E. Frank. 2013. "Fundamentals of Character Education". *Chicago Journals The School Review*. Vol. 70.

Galloway, Sarah. 2012. "Reconsidering Emancipatory Education Staging A Conversation Between Paulo Freire and Jacques Ranciere". *Educational Theory* 62. 2.

Gee. James G. 1993. "A Proposed Social Policy for Secondary Education". *Peabody Journal of Education*. Vol. 11. No. 2. September.

Hadad, Ismid. 2010. "Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pengantar". *Jurnal Prisma*. Vol. 29, No. 2, April.

Hamid, Ahmad. "Aplikasi *Total Quality Management* (TQM) Pendidikan Tinggi dalam Rangka Pelayanan Pelanggan Mahasiswa Asing di International Islamic University Malaysia (IIUM)". *Jurnal Manajemen Pendidikan*.

Handayani, Meni. 2016. "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 1, Nomor 2, Agustus.

Handayani, Meni. 2016. "Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA di Provinsi DKI Jakarta". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Vol. 1. No. 2. Agustus.

Harahap, Rabiah Z. 2015. "Etika Islam dalam Mengelola Lingkungan Hidup". *Jurnal EduTech*. Vol. 1, No. 1, Maret.

Hargreavest, A. 2000. "Mentoring in the New Millenium". *Proquest Education Journals*. Vol. 39. No. 1.

Honzikoval, Jamila & Jan Janovec. 2013. "Conceptual and Methodical Procedures of Psychomotor Learning". *Computer and Information Science* 6. 1.

Kasihadi, RB. 2011. "Optimalisasi Prestasi Peserta Didik Melalui Sistem Pendidikan yang Humanis: Suatu Perbandingan dengan Negara Maju". *Widyatama*, No. 2, Vol. 20.

Khan, Raja Abdul Ghafoor, Furqan Akhmaed Khan, Muhammad Aslam Khan. 2011. "Impact of Training and Development on Organizational Performance". *Global Journal of Management and Business Research*. Vol. 11, Issue 7, Version 10, July.

Kholidah, Zakiyah. 2014. “Meneropong Madrasah dalam Bingkai Standar Nasional Pendidikan”. *AL HIKMAH Jurnal Studi Ke-Islaman*, Vol. 4, Nomor 1, Maret.

Laspitorin, Sri. 2010. “Metode Pengintegrasian Nilai Moral dan Agama dalam Pembelajaran Ilmu Biologi di SMA”. *Jurnal Ilmiah Guru “COPE”*. No. 01/Mei.

Lempoy, Juditshira. 2013. “Penerapan TQM terhadap Efisiensi Biaya dan Efektivitas Pelayanan Pada PT. PLN (PERSERO) Wilayah Suluttenggo”. *Jurnal EMBA,* Vol. 1 No. 3 September 2013, ISSN 2303-1174.

Ma’ruf, M. 2015. “Konsep Manajemen Pendidikan Islam dalam Al-Qur’an dan Hadis”. *Didaktika Religia*. Vol. 3, No. 2.

Maddeppungeng, Andi, dkk. 2016. “Pengaruh TQM (*Total Quality Mangement*) dan SCM (*Supply Chain Management*) terhadap Daya Saing pada Industri Konstruksi. *Jurnal Fondasi*. Vol. 5, No. 2.

Maghfiroh, Lailatul. 2018. “Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Melalui Total Quality Management (TQM) di Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasyim Yogyakarta”, *Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 1 Januari.

Mallonee, Sue. 2000. Evaluating Injury Prevention Programs: The Oklahoma City Smoke Alarm Project. The Future Children Unintentational Injuries in Childhood”, *Spring/Summer*, Vol. 10, No. 1.

Munir, Miftakhul. 2018. “Keberadaan *Total Quality Management* dalam Lembaga Pendidikan (Antara Prinsip Implementasi dan Pilar TQM dalam Pendidikan)”. *Realita*, Vol. 16, No. 1.

Mustaqim. 2012. “Sekolah/Madrasah Berkualitas dan Berkarakter”, *Jurnal Nadwa*, Vol. 6 Nomor 1, Mei.

Musyaddad, Kholid. 2013. “Problematika Pendidikan di Indonesia”. *Jurnal: Edu-Bio*. Vol 4.

Nasyirwan. 2015. "Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan oleh Kepala Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Lulusan". *Manajer Pendidikan*. Vol. 9. No. 6. November.

Niazi, Abdus Satar. 2011. "Training Development Strategy ang Its Role in Organizational Performance". *Journal of Public Administration and Governance*. Vol. I, Nomor 2.

Nurhayati, A. 2016. "Prinsip dan Tujuan Penilaian Tindakan Kelas". Vol. V, No. 1, Januari- Juni.

Rahman, Abdur Ibrahim al-Juwaiber, Idāratu al judati al syāmilah hiya "falsafatu adārati al syārikati lil wushūli ila irdha'i 'āmili min khilāli barnamiji syāmilin min al adāwati wa al taqniyati wa al tadrīb." *Idāratu al-Judati al-Syāmilati*.

Rahman, K.A. 2012. "Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Penguatan Partisipasi Masyarakat". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. I. No. 2. Desember.

Rahman, Taufiqur. 2012. "Paradoks Manajemen Mutu: Standarisasi Pendidikan di Indonesia". *Jurnal Lisan al-Hal*. Vol. 4. No. 2. Desember.

Ramadhany, Fitriana Fajrin dan Supriono. 2017. "Analisis Penerapan Sistem Manajemen.

Rasheed, Sadiq. 2000. "Defining Quality in Education", *The International Working Group on Education Florence*.

Rasi'in. 2016. "Menakar Standar Madrasah Bermutu". *KORDINAT*. Vol. XV. No. I. April.

Rouse, Donald. 2011. "Employing Kirkpatrick's Evaluation Framework to Determine the Effectiveness of Health Information Management Courses and Program". *Perspectives in Health Information Management*. Spring.

Rubin, Daniel Lan & Christopher John Kazanjian. 2011. "Just Another Brick in The Wall: Standardization and the Devaluing of Education". *Journal of Curriculum and Instruction (JoCI)*, November, Vol. 5, No. 2.

Samsirin. 2015. "Konsep Mutu dan Kepuasan Pelanggan dalam Pendidikan Islam". „*Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 10, No. 1, Juni.

Sari, Desy Eka Kartika dkk. 2018. "Pengaruh *Total Quality Management* (TQM) terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Kepuasan Kerja". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5 No. 1.

Sauge, 2004. "Mutu Pendidikan Dalam Perspektif Psikologi". *Jurnal Hunafa*.

Setiawan, Ngadirin & Tutuk Ningsih, 2010. "Penilaian Kinerja Guru Bersertifikat di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwokerto". *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* No. 2 Tahun ke-1, Agustus.

Shobri, Muwafiqus. "Strategi Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Hasan Jufri". *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 3, Nomor 1, Juni 2017; P-ISSN 2443-2741; E-ISSN 2579-5503

Subawa, Putu. "Standarisasi Dunia Pendidikan". *Jurnal Penjaminan Mutu*. file:///C:/Users/Personal/Downloads/STANDARISASI_DUNIA_PENDIDIKAN.pdf, diakses pada tanggal 06 April 2018.

Sujarwo. 2016. "Pendidikan di Indonesia Memprihatinkan". *Journal: UNY*, Dosen PJKR Fakultas Ilmu Keolahragaan, UNY. https://journal.uny.ac.id/index.php/wuny/article/download/.../pdf.

Sulistyo. 2012. "Pendidikan Karakter dalam Menghadapi Tantangan Perubahan Zaman". *Jurnal Manajemen Pendidikan*. Vol. 23, No. 5.

Summerfield, Penny. 2015. "History Workshop", *Labour Market* 25, no. 25.

Supriadi. M. 2014. “Analisis Sistem Penilaian Kelas dalam Kegiatan Belajar Mengajar”. *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Ke-Islaman*. Vol. VII, No. 1, Januari.

Suyitno. 2016. “Peningkatan Sumberdaya Manusia Melalui Penerapan TQM”. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 4, No. 2.

Triwiyanto, Teguh. 2013. “Standar Nasional Pendidikan Sebagai Indkator Mutu Layanan Manajemen Sekolah”. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. Jilid 19, Nomor 2, Desember.

Turner, Sarah E. 2015. “Connecting Higher Education and the Labor Market: Comparisons across States”. *Source Change* 34, No. 4.

Wafi, Marzuki. 2013. “Revitalisasi Pendidikan Agama di Sekolah dalam Pembangunan Karakter Bangsa di Masa Depan”. *Jurnal Pendidikan Karakter.* Nomor 1, Februari.

Wardani, Ayunita Kusuma. 2015. “Efektifitas Pelaksanaan *Quality Control* Pada Bagian Produksi PT Indohamafish di Pengambengan”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol. 5, No. 1.

Wirda, Yendri. 2010. “Studi Pengalokasian dan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar”. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan No. 3 Tahun Ke-1.* Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan.

Yusuf T. M. 2011. “Mengenal Blended Learning”. *Lentera Pendidikan*. Vol. 14, No. 2, Desember.

Yusuf, Muhammad dan Islamil Suardi Wekke. 2015. “Aktive Learning on Teaching Arabic for Special Purpose in Indonesian Pesantren”. *Elsevier, Procedia Social and Behavioral Sciences*.

Buku

A Romine, Stephen. 1954. *Building the High School Curriculum.* New York: The Ronald Press Company.

Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 13

al-Bannā, Hasan. 1990. *Majmū'ah Rasāil.* Iskandariyah: Darul al-Da'wah.

al-Bashīr, Muhammad Muzammil dan Muhammad Malik Sa'id. 1995. *Madkhal ilā al-Manhāj wa Thurūq al-Tadrīs*. Riyad: Dār al-Liwā' wa al-Tauzī.

Al-Ghazali. 2000. *Ihyā' "Ulūm al-Dīn*. Kairo: Dār al-Taqwa.

Ali, Fachry. 1997. *Visi Politik dan Intelektual Umat Islam Indonesia dalam Proses Modernisasi.* Yogyakarta: Aditya Media.

Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud Ali. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Muhammad. 2007. *Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Ilmu Aplikasi Pendidikan Bagian II: Ilmu Pendidikan Praktis.* Jakarta: PT Imperial Bhakti Utama

Al-Zarkashi, Imam. 2005. *al-Tarbiyah wa al-Ta'lim.* Ponorogo: Gontor Press. Edisi Revisi.

an-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizhām al-Islām Mu'tamadah.* Min Mansyurāt Hizb at-Tahrīr.

An-Nahidl, Nunu Ahmad dkk. 2007. *Posisi Madrasah dalam Pandangan Masyarakat*. Jakarta: Gaung Persada Press

An-Nahidl, Nunu Ahmad dkk. 2010. *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah.* Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Arcato, Jerome S. 2007. *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arief, Armai. 2004. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Klasik.* Bandung: Angkasa

Badudu & Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Batubara, Muhyi. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.

Bloom, Benyamin S. 1977. *Taxonomy of Educational Objectives, Hand Book I, Cognetive Domain*. New York: Longman.

Bush, Tony & Marianne Coleman. 2012. *Manajemen Mutu Kepemimpinan Pendidikan*. IRGCiSoD: Sampangan Jogjakarta.

Crosby, Philip B. 1979. *Quality is Free: The Art of Making Quality Certain*. New York: New American Library.

Dally, Dadang. 2010. *Balanced Score Card: Suatu Pendekatan dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Daud, Wan Mohd Nor Wan. 1998. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M, Naquib Al-Attas*. Bandung: Mizan.

Daulay, Haidar Putra. 2004. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Daulay, Haidar Putra. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*. Jakarta: PT Rineka Cipta

Dawam, Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin. 2005. *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*,. Sapen: Lista Fariska Putra.

Dessler, Gary. 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Human Resource Managemen.* Edisi Bahasa Indonesia Jilid I. Jakarta: PT Prenhallindo.

Fadjar, A. Malik. 1999. *Madrasah dan Tantangan Modernitas*, Bogor: Mizan.

Fadjar, A. Malik. 2012. *Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam*. Malang: UM Press.

Fadjar, Malik. 2005. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fatah, Nanang. 2012. *Standar Pembiayaan Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Fathoni, Muhammad Kholid. *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional Paradigma Baru*,. Jakarta: Departemen Agama RI

Feisal, Jusuf Amir. 1995. *Reorientasi Pendidikan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Frackmann, Edgar. 1992. *The German Experience*. in Craft Alma. Quality Assurance in Higher Education. Proceedings of an International Conference. London: The Falmer Press.

Haedari, M. Amin. 2010. *Spektrum Baru Pendidikan Madrasah*. Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Depok: Gema Insani.

Herabudin. 2009. *Administrasi & Supervisi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.

Hoy, Charles. 2000. *Improving Quality in Education*. London: Falmer Press.

Hoy, Wayne K. dan Cecil G. Miskel. 2008. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. McGraw-Hill.

IBK. Bhayangkara. 2008. *Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat

Idris, Muh. 2012. *Pembaharuan Pemikiran Pendidikan Islam A. Malik Fadjar*. Semarang: UM Press

Indra, Hasbi. 2005. *Pendidikan Islam Melawan Globalisasi*. Jakarta: PT Mutiara Kalam

J. Marsh, Colin dan Geotge Wills. 2003. *Curriculum Alternative Approaches on Going Issues*. Upper Saddle River. NJ: Merril Prentice Hall.

Jihad, Asep. 2008. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.

Kementrian Agama RI. 2014. *Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Wali Oasis Terrace Recident.

Koentjaraningrat dkk. 1984. *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Komariah, Aan dan Cepi Triatna. 2005. *Visionary Leadership: Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kusmana dan JM Muslimin. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan: Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PIC UIN JAKARTA dan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI.

M. Juran, J Joseph. 1993. *Quality Planning and Analysis*. New York: Mc. Graw Hill inc.

Maksum. 1999. *Madrasah: Sejarah & Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Mannan, Abdul. 2000. *Membangun Islam Kaffah*. Penerbit Madina Pustaka.

Mastuhu, M. 2007. *Sistem Pendidikan Nasional Visioner*. Ciputat: Penerbit Lentera Hati

Mastuhu. 2002. *Menata Ulang Pendidikan Nasional Abad 21.* Jakarta: INIS

Mastuhu. 2003. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21.* Yogyakarta: Safiria Insania Press.

Muhaimin, dkk. 2012. *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Kencana

Muhaimin. 2003. *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam: Pemberdayaan, Pengembangan Kurikulum hingga Redefinisi Islamisasi Pengetahuan.* Bandung: Nuansa.

Muhyi Batubara. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Ciputat Press.

Mulyani dkk. 2008. *Manajemen Madrasah Satu Atap.* Bandung: Nuansa

Mulyasa, E. 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Cet. Ke-9

Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasana, Dedy. 2011. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyono. 2009. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Groups.

Nata, Abuddin. 2003. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Bandung: Angkasa

Nata, Abuddin. 2005. *Pendidikan Islam di Era Global (Pendidikan Multikultural, Pendidikan Multi Iman, Pendidikan Agama, Moral dan Etika).* Jakarta: UIN Jakarta Press.

Nurkolis. 2006. *Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi*. Jakarta: Anggota Ikapi. Cet. Ke-3.

Permadi, Dadi dan Arifin Daeng. 2013. *Panduan Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Nuansa Aulia.

Pidarta, Made. 2004. *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Purwanto, M. Ngalim. 2010. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Putera, Nusa. 2011. *Penelitian Kualitatif: Proses & Aplikasi*. Jakarta: Indeks.

Qomar, Mujamil. 2007. *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Erlangga.

Raharjo, Sabar Budi. 2012. *Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan di Indonesia*, Jurnal.

Rahim, Husni. 2005. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.

Rangkuti, Freddy. 2014. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT*. Jakarta: Gramedia.

Rasyid, Dawud. 2001. *As-Sunnah fī Indūnisia: Baina Anshariha wa Khushuntukmiha*. Jakarta: Usmah Press.

Rosyada, Dede. 2017. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah.* Depok: Kencana

Sahertian, Piet A. 2000. *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sallis, Edward. 1993. *Total Quality Management in Education.* London: Kogan.

Sallis, Edward. 2008. *Total Quality Management in Education. Manajemen Mutu Pendidikan.* Alih Bahasa: Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurozi. Yogyakarta: IRCiSoD.

Sani, Ridwan Abdullah dkk. 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah.* Jakarta: Bumi Aksara

Sarhan, Munir al-Mursi. 1978. *Fī Ijtima'iyyat at-Tarbiyah.* Mesir: Maktaba al-Anjilu.

Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar.* Jakarta: PT Indeks.

Siradj, Sa'id Aqiel dkk. 1999. *Pesantren Masa Depan Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren.* Bandung: Pustaka Hidayah.

Soedijarto. 2008. *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita.* Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Stake, Robert, E. 2004. *Standards-Based & Responsive Evaluation.* California: SAGE Publications.

Sugian O, Syahu. 2006. *Kamus Manajemen Mutu.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatf, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: IKAPI.

Sukmadinata, Nana Saodih. 2004. *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Suprayogo, Imam. 2007. *Quo Vadis Madrasah: Gagasan, Aksi dan Solusi Pembangunan Madrasah.* Yogyakarta: HIKAYAT.

Syadzali, Abdul Mujib. 2016. *Pesantren Perkotaan: Pergumulan Tradisi dan Modernitas*. Ciputat: Cinta Buku Media.

Tambunan, Rudi M. 2008. *Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur*. Jakarta: Maistas Publishing.

Teow Ek, Lim dan Niew Bock Cheng. 1995. *Quality Management Systems*. Assessment to ISO 9000: 1994. Singapore: Prentice Hall.

Tilaar, H.A.R. 2000. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional.* Jakarta: Rineka Cipta

Tilaar, H.A.R. 2005. *Manifesto Pendidikan Nasional.* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tilaar, H.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Tilaar, H.A.R. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1988. Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Tjiptono, F. dan Anastasia Diana. 2003. *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi.

Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel. 2008. *Educational Administration: Theory, Research, and Practice*. New York: McGraw-Hill.

Zain, Badudu. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan.* Yogyakarta: BIGRAF Publishing

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Seminar, Tesis, Disertasi dan Laporan

BANS/M. 2014. *Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Akreditasi Sekolah/Madrasah: Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu*. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah

BAN-S/M. 2015. *Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah 2015*. Jakarta: BAN-S/M.

BSNP. 2011. Buku Laporan BSNP Tahun 2010. BSNP: Februari.

Data daftar tenaga pendidik dan kependidikan MTs Pembangunan UIN Jakarta, diperoleh dari bagian kepala Tata Usaha Kepegawaian MP UIN Jakarta, di ruang Tata Usaha bagian kepegawaian, tanggal 21 Maret 2019.

Data diperoleh dari bagian kepala DIKJAR (Pendidikan dan Pengajaran) MP UIN Jakarta, pak Efron, di ruang kepala Dikjar MP UIN tanggal 28 Maret 2019.

Data diperoleh dari bagian kepegawaian yaitu Thobroni, A.Md

Data lapangan pamplet di ruang kepala P3JM (Pusat Penelitian, Pengembangan dan Jaminan Mutu) Madrasah Pembangunan UIN Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah.*

Dokumen Evaluasi Diri Madrasah Pembangunan UIN Jakarta 2017

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.* Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menegah.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Analisis Peta Mutu Sekolah Model SPMI Tahun 2017 SMPN 1 Sukamulia*. Nusa Tenggara Barat: Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Konsep dan Pelaksanaan, Buku I . Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan

Malik, Abdul. dkk. 2018. *Pedoman Akreditasi Sekolah/ Madrasah 2018*. Jakarta: BAN-S/M

Masrukhin. 2014. *Pengambangan Instrumen Penilaian Otentik Mata pelajaran PAI untuk Meningkatkan Kemampuan Evaluasi dalam Pembelajaran*. Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2014, SNEP II, ISBN 978-602-14215-5-0.

MTs Pembangunan UIN: Momon Mujiburrahman, MA, Komite Madrasah: drg. Silvia Wahyuni, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementrian Agama Kota Jakarta Selatan: Drs. Hasyim

Mujiburrahman, Momon. 2018. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Pembangunan UIN Jakarta Tahun Pelajaran 2018/2019, *Buku Satu*, Jakarta: 06 Agustus 2018

Nata, Abuddin. dkk. 2014. *ORTALA dan STATUTA*. Jakarta: Keputusan Yayasan Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Nomor 2. Balitbang Kemendiknas.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya.

Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Standar Kompetensi Lulusan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi

Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan dasar dan menengah.

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana.

PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 76 ayat (3) dan PP No. 32 Tahun 2013

Suryadi, Bambang. 2016. *Peran BSNP dalam Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Pengembangan Standar Nasional Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Revitalisasi LPTK, Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia* (KONASPI) VIII Tahun 2016.

Suwidi. 2015. *Reorientasi Sistem Pendidikan Nasional: Kritik Nalar Internasionalisasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: SPs UIN Jakarta.

Tim. 2018. *Panduan Peserta Didik Tahun Pelajaran 2019/2020*. MP UIN: Jakarta.

UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Majalah dan Surat Kabar

Darsono. 2006. *Budaya Organisasi: Kajian tentang Organisasi, Media, Budaya, Ekonomi, Sosial dan Politik*. Jakarta: Diadit Media.

Prasojo, Lantip Diat. *Pengembangan Tata Usaha Berbasis Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Dosen Prodi Manajemen Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

Wawancara

Diskusi dengan Ibu Nurul, Sekretariat BSNP, Cipete, Rabu 24 Juli 2019, Kantor Sekretariat BSNP.

Wawancara kepada Kasubag Keuangan dan Kepegawaian/ penanggung jawab standar pembiayaan, Maradona, SE., Pada hari selasa 12 Maret 2019, di Ruang Kasubag Keuangan dan Kepegawaian.

Wawancara kepada kepala MTs Pembangunan: Momon Mujiburrahman, MA, pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN

Wawancara kepada kepala P3JM Madrasah Pembangunan: Drs. H. Sugiono, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 di kantor kepala P3JM Madrasah Pembangunan UIN

Wawancara kepada salah satu guru MTs Pembangunan: M. Idham Khalid, M.Ag., pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 di ruang guru MTs Pembangunan.

Wawancara kepada wakil kurikulum MTs Pembangunan: Mardi, MA., pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 di ruang guru MTs Pembangunan.

Wawancara kepala MTs Pembangunan Momon Mujiburahman, MA., pada hari Rabu 13 Februari 2019 di kantor kepala MTs Pembangunan UIN.

Wawancara komite madrasah Pembangunan drg. Silvia Wahyuni, di ruang komite madrasah Pembangunan hari Kamis, 9 Mei 2019, pukul 13.00 WIB.

Wawancara siswa MTs Pembangunan UIN Jakarta: Alysha dan Bilqis kelas 9E, pada hari selasa 05 November 2019 di kantin MTs Pembangunan UIN, pukul 12.30-12.46 WIB.

Website

Glosarium, https://www.kamusbesar.com/validasi

http://indonesia.go.id/?layanan_pendidikan=badan-akreditasi-nasional-sekolah-madrasah.ban-sm, diakses pada hari Kamis 13 September 2018 pukul 23:05 WIB.

http://www.bsnp-Indonesia.org (BSNP, Penjelasan Singkat Tentang BSNP)

http://www.mpuin-jkt.sch.id/artikel/detail/pelantikan-pimpinan-mp-periode-2018-2022

Sispena (Sispena adalah sistem penilaian akreditasi sekolah atau madrasah). https://sispenabap.blogspot.co.id/2017/04/tujuan-manfaat-dan-fungsi-akreditasi.html. Diakses pada tanggal 06 Maret 2018.

UNDP Indonesia, *United Nations Development Programme*. http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-.html. akses 15 Januari 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/ Daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/dampak, diakses tanggal 10 September 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/ Daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/daya, diakses tanggal 26 September 2019.

Guru Update, https://www.guru-up.date/2016/03/pengertian-tujuan-pelaksanaan-manfaat-hasil-akreditasi-sekolah.html, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pkl.10.12.

Website Madrasah Pembangunan UIN Jakarta, diakses 16 April 2018, http://www.mpuin-jkt.sch.id/halaman/detail/sejarah-singkat





PONPES TERPADU
KHAIRUL UMMAH

PENDAFTARAN PESERTA DIDIK TAHUN AJARAN 2024/2025

Syarat Pendaftaran

- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Pas Foto 3x4 (4 Lembar)
- Mengikuti Tes Akademik & Interview
- Biaya Pendaftaran Rp 250.000,-

BEASISWA & HADIAH:
1. Yatim (Free Uang Makan)
2. Ranking 1, 2 & 3 (Beasiswa)
3. Haji & Umrah (Santri Juara 1 Nasional / Go Internasional)



Fasilitas Ponpes & Sekolah

- Ruang Asrama Lengkap
- Ruang Kelas CCTV
- Ruang Perpustakaan
- Ruang Komputer AC
- Lab. Praktek IPA
- Lapangan Basket
- Lapangan Volly & Futsal
- Lapangan Badminton
- Bersambung Masjid
- Aula Utama Praktek Manasik & Hadroh
- Ruang Serbaguna Eskul Paskibra dll



Khairul Ummah Syahroni

Informasi Pendaftaran

Gus Umam 085883186817
Ust. A. A. Muis, M.Pd 083877229023
Umi Hj. Haryanti, S.Pd 085210338473
Dr. Hj. Intan Zakiyyah, M.A 085718470914

GLOSARIUM

Administrasi	Usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan
Akreditasi	Suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap suatu lembaga pendidikan
Akuntabilitas	Sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan
Asesor	Seseorang yang berhak melakukan asesmen terhadap suatu kompetensi, sesuai dengan ruang lingkup asesmennya
Asosiasi	Suatu perkumpulan bersama beberapa individu yang memiliki ikatan
Audit Eksternal	Audit terpisah dari madrasah yang disewa oleh lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa laporan administrasi yang disusun telah mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku
Audit Internal	Madrasah mengaudit berbagai segmen dari organisasi untuk memastikan bahwa para karyawan mematuhi kebijakan-kebijakan madrasah dan operasi madrasah berjalan sesuai efisien
Audit	Suatu sistem pengujian terhadap laporan keuangan perusahaan dan sistem akuntansinya
Auditor	Seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi

BAN-S/M	Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, yakni badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah/ BOS	Bantuan pendidikan berbentuk dana yang diberikan kepada sekolah dan madrasah untuk kepentingan ninpersonalia
BSNP	Badan Standar Nasional Pendidikan, yakni lembaga mandiri profesional dan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
Continous Improvement	Usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk mengembangkan dan memperbaiki produk, pelayanan ataupun proses
Dampak	Akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/ sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu
Demokrasi	Negara yang menganut bentuk dan sistem pemerintahan oleh rakyat
Demokratisasi	Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis
Deregulasi	Proses pencabutan atau pengurangan regulasi negara
Dewan Pendidikan	Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan

	pendidikan di kabupaten/ kota
Diferensiasi	Proses pembedaan suatu produk atau jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap suatu pasar sasaran tertentu
Dualisme	Konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi
EDM	Evaluasi Diri Madrasah, yakni proses yang mengikutsertakan semua pemangku kepentingan untuk membantu madrasah dalam menilai mutu peyelenggaraan pendidikan berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada Standar Pelayanan Mininal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP)
Efektif	Suatu tindakan yang dapat memberikan efek atau hasil
Efisien	Bekerja dengan menggunakan sumber daya dan energi yang sesuai tanpa pemborosan
Egaliter	Persamaan derajat pada setiap manusia
Ekstrakurikuler	Kegiatan non pelajaran formal yang dilakukan peserta didik sekolah atau madrasah
Evaluasi	Suatu proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai
Feodalistis	Bersifat feodal (sistem politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, sistem sosial yang mengagungkan jabatan atau pangkat dan

	bukan mengungkan prestasi
Globalisasi	Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya
Habitual Curriculum/HC	Pembinaan akhlak selama tiga puluh menit sebelum jam pelajaran pertama setiap hari
Ideologi Kapitalisme	Ideologi kapital (sistem ekonomi di mana perdagangan, industri, dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar)
Implementasi	Pelaksanaan/ penerapan
Indikator	Sesuatu yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar sebagai acuan dalam mengukur adanya perubahan pada suau kegiatan atau kejadian
Inovatif	Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda
Input Pendidikan	Segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses
Institusi	Norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus
Instrumen	Suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel

ISO	International Organization for Standardization, internasional untuk standardisasi yakni badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi nasional setiap negara
KBM	Kegiatan Belajar Mengajar, di kelas atau di luar kelas
Kecakapan vokasional	Kecakapan yang berkaitan dengan suatu bidang kejuruan/ keterampulan tertentu
KKM	Kriteria Ketuntasan Minimal, yakni kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan
Kognitif	Kontruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan
Komite Madrasah	Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan
Komparatif	Suatu hal yang bersifat dapat diperbandingkan dengan suatu hal lainnya
Kompetensi Dasar	Pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa
Konseptual	Sesuatu yang disusun secara terperinci, terencana dengan matang, punya dasar teori yang kuat dan latar belakang yang jelas, rencana yang baik, tujuan dan manfaat yang jelas
Konsorsium	Kelompok/ himpunan mata pelajaran
Kualifikasi	Pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian

Kurikulum	Perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan
Laboratorium	Tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah
Legalitas	Suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas
Lesson Plain	Suatu program perencanaan yang dibuat oleh pengajar
Liberalisasi	Proses usaha untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan tata negara dan ekonomi
Lokomotif	Bagian dari rangkaian di mana terdapat mesin untuk menggerakkan
Madrasah Model	Madrasah yang konsisten menjaga mutu *input*, proses dan *output*.
Madrasah	Sekolah formal yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran umum dan keislaman
Manajemen Berbasis Madrasah/ MBM	Penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu madrasah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
Manajemen	Seni atau sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok

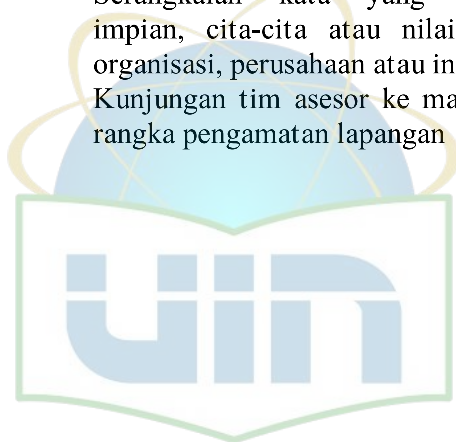
	orang atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu
Manajer	Orang yang mengatur pekerjaan atau kerja sama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran
Manajerial	Perpaduan seni dan ilmu, sebuah ilmu dalam mengatur segala sesuatunya dengan benar
Mekanisme	Suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja
Misi	Tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut
Modernisasi	Suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat diberbagai aspek dalam kehidupan masyarakat
Motivasi	Suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan
Multiple Intelegent	Kecerdasan ganda yang dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk menyelesaikan suatu masalah
Mutu/ Kualitas	Tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu
Native Speaker	Penutur / pengguna asli suatu bahasa
Otonomi	Hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Output	Hasil yang dicapai dalam jangka pendek

Pedagogik	Ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru
Pelanggan	Orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan
Pendidik	Tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan
Pendidikan	Suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan dan penelitian
Penelitian Tindakan Kelas/ PTK	Penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas
Pengetahuan faktual	Pengetahuan yang sesuai dengan kondisi yang senyatanya
Profesional	Bersangkutan dengan profesi
Prosedural	Sesuai dengan prosedur
Psikomotorik	Berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi
Reformasi	Perubahan secara drastis untuk perbaikan dalam suatu masyarakat atau negara
Regulasi	Pengaturan
Rencana Induk Pengembangan / RIP	Salah satu persyaratan pendirian perguruan tinggi baru atau perubahan status perguruan tinggi dari akademi, sekolah tinggi menjadi institut atau universitas

Rencana Kerja dan Anggaran/ RKA	Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan
Rencana Kerja Jangka Menengah/ RKJM	Menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran/ RPP	Rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih
Respon	Setiap tingkah laku pada hakekatnya merupakan tanggapan atau balasan
School Phobia	Merupakan rasa takut atau malas pada anak untuk pergi ke sekolah dan sistem belajar di sekolah
Segregasi	Pemisahan kelompok ras atau etnis secara paksa
Sekolah Unggul	Sekolah yang dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (*output*) pendidikannya
Sertifikasi	Suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik
Silabus	Rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian

	kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar
SNP	Suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum negara Indonesia
Sosial	Merupakan bagian yang tidak utuh dari sebuah hubungan manusia sehingga membutuhkan pemakluman atas hal-hal yang bersifat rapuh di dalamnya
Spritual	Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin)
Stakeholders	Suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan
Standardisasi Pendidikan	Usaha bersama membentuk standar pendidikan
Strategi	Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu
Stupidifikasi	Pembodohan
Tenaga Kependidikan	Pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik
Tradisional	Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun
Valid	Menurut cara yang semestinya berlaku

Validasi	Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa setiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan
Verifikasi	Proses menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dengan menggunakan sebuah metode yang empirik
Visi	Serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi.
Visitasi	Kunjungan tim asesor ke madrasah dalam rangka pengamatan lapangan



KHAIRUL UMMAH SYAHRONI

Haul
& Masyayikh
MUHAFADZOH

KH. ABDUL KARIM
KH. MARZUQI DAHLAN KH. MAHRUS ALY

KH. ABDUL KHOLIQ
KH. MAHFUDZIN KOSIM

TASHRIF - QOWA'IDUSSHORFIAH - IMRITY - ALFIYAH IBNU MALIK
MADRASAH DINIYYAH KHAIRUL UMMAH (MDKU)

PONPES TERPADU KHAIRUL UMMAH
DKI JAKARTA

Jum'at, 17 Maret 2023

Khairul Ummah Syahroni khairulummah_ku KhairulummahKu YouTube Khairul Ummah

عيد مبارك

KELUARGA BESAR
PONPES TERPADU KHAIRUL UMMAH
Mengucapkan

SELAMAT
HARI RAYA IDUL FITRI
1 SYAWAL 1446 H

MOHON MAAF LAHIR & BATIN
Khairul Ummah Syahroni

INDEKS

A

B

C

D

E

G

I

J

K

L

M

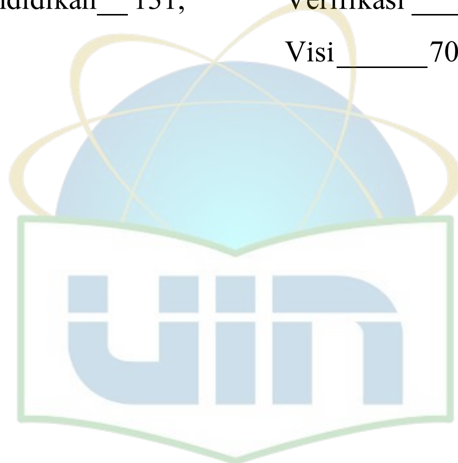
P

R

S

T

V





PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA



PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

JAKARTA UTARA

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



BIODATA PENULIS



Intan Zakiyyah, lahir pada tanggal 14 Desember 1993 di Penjaringan, Jakarta Utara. Anak kedua dari seorang Abi Drs. H. Oman Syahroni (Banten) dengan Ummi Hj. Haryanti, S.Pd. (Solo). Memiliki tiga saudara, yakni H. Khairul Umam, M.Ag. (Kakak), Malik Rahmatullah (Adik) dan Dinda Nadwah Aulia (Adik). Seorang istri dari Ahmad Abdul Muis, M.Pd.I. dan dikaruniai seorang putri kecil disaat studi S2 bernama Mutiara Suci Kamilah pada tanggal 24 Agustus 2017.

Pendidikan yang telah ditempuh antara lain Taman Kanak-kanak (TK) al-Muttaqin selama 2 tahun, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Pagi Kapuk Muara, Jakarta Utara selama 6 tahun, dan Madrasah Diniyyah Siang di al-Muttaqin, serta Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di Yayasan Khairul Ummah seusai magrib. Setelah lulus SDN menuntut ilmu di Pondok Pesantren al-Itqon selama 6 tahun, Jakarta Barat pimpinan KH. Mahfudz Asirun an-Nadawi. Dengan sekolah formal Madrasah Tsanawiyyah al-Itqon, Madrasah Aliyah al-Itqon dan Madrasah Diniyah al-Itqon.

Kuliah S1 tahun 2011-2015 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan/ FITK. Selama kuliah tinggal di Pondok Pesantren Darul Hikam, Menjangan Ciputat selama 4 tahun, pimpinan KH. Bahruddin

mengkaji kitab utama tasawuf dan akhlak (*Syarāh al-Hikām*), fiqih, nahwu, sharaf, balaghah, hadis dan kitab kuning lainnya. Kuliah S2 tahun 2016-2019 Beasiswa Unggulan/BU Kemendikbud Masyarakat Berprestasi di Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Pengkajian Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam. Selama kuliah tinggal bersama santri putri Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Penjaringan Jakarta Utara.

Selain mengikuti pendidikan formal kuliah, aktif juga mengikuti forum seminar, kajian diskusi, dan pesantren pasaran/kilatan di Jawa Tengah "Darul Falah, Amsilati" Pimpinan KH. Taufiqul Hakim serta pasaran dan menuntut ilmu di sekitar kampus. Pengalaman organisasi dan kegiatan non formal penulis antara lain: ISPA (Ikatan Santri Pondok Pesantren al-Itqon) menjabat sebagai koor olahraga, ISDAH (Ikatan Santri Darul Hikam) menjabat sebagai sekertaris, LTTQ (Lembaga Tahsin dan Tahfidz al-Qur'an) masjid fathullah, HIQMA (Himpunan Qori dan Qoriah Mahasiswa), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), SFI (Smile For Indonesia), LATANZA Ciputat (Kursus Bahasa Inggris), LIA Grogol (Kursus Bahasa Inggris), LEMKA Ciputat (Lembaga Kaligrafi), Penguatan Bahasa Arab di Duta Araby tahun 2014 Fakultas Ilmu Tarbiyyah dan Keguruan. Kursus TOEFL di AMCOR (American Corner) Perpustakaan Pusat UIN Jakarta tahun 2016. Bendahara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Mandiri Angkatan ke-13 tahun 2019 tingkat Nasional di Jawa Barat yang diadakan oleh P-FK KBIHU, Kemenag dan UIN SGD Bandung (10 peserta terbaik sertifikasi pembimbing manasik haji tahun 2019 dari 117 peserta). Serta aktif belajar sambil mengajar di Pondok Pesantren Terpadu Khairul Ummah, Penjaringan Jakarta Utara tahun 2012 sampai sekarang dengan mata pelajaran Alquran Hadis di MTs Khairul Ummah dan Tahsin Alquran pada tingkat MA.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Syarif Hidayatullah

JAKARTA – INDONESIA



Penelitian Intan Zakiyyah mengenai, “Standar Nasional Pendidikan dan Kualitas Madrasah: Studi Dampak Standardisasi Pendidikan terhadap Mutu Madrasah”, menunjukkan bahwa akreditasi sebagai satu sistem penjaminan mutu madrasah yang menggunakan Standar Nasional Pendidikan, memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan mutu madrasah dengan tetap mempertahankan ciri khasnya. Diharapkan madrasah menjadikan akreditasi sebagai pintu untuk meningkatkan kualitasnya dengan cara mengimplementasikan SNP sebagai standar minimal dan menyadari SNP bukan untuk mengekang madrasah, melainkan untuk menjadi arah dalam peningkatan mutu madrasah.

Prof. Dr. H. Husni Rahim.
(Guru Besar Politik Pendidikan SPs UIN Jakarta dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998-2002)







Diterbitkan oleh:
Pustakapedia
(CV Pustakapedia Indonesia)
Jl. Kertamukti No.80 Pisangan
Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419
Email: penerbitpustakapediagmail.com
Website: http://pustakapedia.com

ISBN 978 623-7641-17-9

